



PROSIDING



SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER 2017

*Dalam Rangka 59 tahun
FEB UPN "Veteran" Yogyakarta*

Tema:

**"Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah,
Koperasi, UMKM dan Korporasi"**

*Ruang Seminar
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
UPN "Veteran" Yogyakarta*

Selasa, 24 Oktober 2017

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
2017**

**PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL TAHUN KE-1
CALL FOR PAPERS HASIL PENELITIAN
PENGUATAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN**

**THEMA :
“PENGUATAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH, KOPERASI,
UMKM DAN KORPORASI”**

**YOGYAKARTA - INDONESIA
24 OKTOBER 2017**

Speaker :

Drs. H. Sri Purnomo, M.Si, (Bupati Kabupaten Sleman)

GKR. Mangkubumi (Ketua Kadin DIY)

Tri Saktiyana (Kepala Dinas Koperasi & UMKM DIY).

Dr. Ir. Trenggono Sutioso – (Direktur Pengembangan Usaha PT Timah).

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

PROSIDING

Seminar Nasional Tahun Ke-1 *Call for Papers* Hasil Penelitian Penguatan Tata Kelola Perusahaan.

Thema:

“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Koperasi, UMKM dan Korporasi”

***Steering Committee* :**

Prof. Dr. Arief Subyantoro, M.Si.

Dr. Winarno, M.M.

Dr. Dian Indri Purnamasari, M.Si.,Ak., CA

Wahyu Dwi Artaningtyas, SE.,M.Si

***Organizing committee* :**

Dr. Hiras Pasaribu, SE.,M.Si., Ak., CA

Dr. I. Ketut. Name, M.Si

Dr. Diah Sugandhini, SE.,M.Si.

Dr. Sri Suryaningsum, SE.,Ak., M,Si

Hari Kusuma Satria N., SE.,Akt., M.Acc.

Editor:

Dr. Dian Indri P., SE., M.Si., Ak., CA

Dr. CA. Ambar Pujiharjanto, M.Si

Dr. Hadi Suprpto, M.Si

Dr. Hendro Wijanarko, SE., M.Si

Dr. Arditho Bhinadi, M.Si

Dr. Sri Suharsih, Se., M.Si

UPN “Veteran” Yogyakarta

***Penyunting* :**

Prof. Dr. Arief Subyantoro, M.Si.

Prof. Dr. Didit Welly Ujjianto, M.Si.

Prof. Dr. Jogiyanto Hartono, MBA

Prof. Dr. Rahmawati, SE., M.Si., Ak., CA

Prof. Dr. Sukrisno Agoes, M.Si., Ak., CA

Prof. Dr. Abdul Rohman, M.Si., Ak., CA

Dr. Irhas Efendi, M.Si

Dr. Winarno, MM.

Dr. CA. Ambar Pujiharjanto, M.Si.

Istiana Rahmawati, SE., M.Si

FEB UPN “Veteran” Yogyakarta

FEB UPN “Veteran” Yogyakarta

FEB Universitas Gajah Mada

FEB Universitas Sebelas Maret, Surakarta

FEB Universitas Tarumanegara Jakarta

FEB UNDIP Semarang

FEB UPN “Veteran” Yogyakarta

FEB UPN “Veteran” Yogyakarta

FEB UPN “Veteran” Yogyakarta

FEB UPN “Veteran” Yogyakarta

Published by:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta

Kampus Condongcatur

Jln.SWK 104, Lingkar Utara, Condongcatur, Depok, Yogyakarta

Telp.: (0274) 486255, 487276

E-mail: hiras.pasaribu@upnyk.ac.id

Website: <http://ekonomi.upnyk.ac.id>

Cetakan : 2018

ISBN :978-602-5534-16-4

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk foto copy, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Ucapan Selamat Datang

PANITIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

KepadaYth:

- Bapak/Ibu Pembicara pada Seminar Nasional dan *Call for Paper*
- Dekan, WakilDekan dan Para Dosen FEB UPN “Veteran” Yogyakarta, dan
- Para Peserta dan Undangan Seminar Nasional dan *Call for Paper* FEB UPN “Veteran” Yogyakarta

Panitia Seminar Nasional dan *Call for Paper*, mengucapkan selamat datang di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta.

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyelenggaraan Seminar Nasional dan *Call for Papers*, dalam rangka 69 tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta, dengan tema: “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Koperasi, UMKM dan Korporasi”. Seminar dan *Call for Paper* ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan keilmuan pada bidang Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi di Indonesia. Kegiatan seminar dan *Call for Paper* ini dilaksanakan dengan tujuan mengelaborasi teori, praktik dan hasilriset. Jumlah paper yang masuk kepanitia sampai tanggal 20 Oktober 2017 berjumlah 20 paper. Semua paper yang diterima telah direviewoleh tim ahli.

Panitia penyelenggara menyampaikan terimakasih kepada semua pihak terutama pada pemakalah dalam kegiatan seminar dan *Call for Papers*.

Yogyakarta, 24 Oktober 2017

Panitia Seminar dan *Call Papers*
Ketua,

Dr. HirasPasaribu, SE.,M.Si. Ak., CA.

Kata Sambutan

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, nikmat, dan segala anugrah serta kekuatan, sehingga kita senantiasa diberikan semangat untuk terus memperbaiki diri guna mewujudkan pengabdian sebagai masyarakat akademik yang memiliki kepedulian atas berbagai permasalahan bangsa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sholawat dan salam atas junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah member pencerahan yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan sekarang ini.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai salah satu fakultas di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta ikut mengemban amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendidik kader-kader pionir pembangunan bangsa, terutama bidang manajemen, akuntansi dan ekonomi. Melalui kegiatan seminar *dancall for paper* ini yang mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Koperasi, UMKM dan Korporasi” diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan ilmu dan pengetahuan, untuk selanjutnya diabdikan kepada masyarakat luas.

Selaku Dekan, saya menyambut baik dilaksanakannya kegiatan seminar *dancall for paper* ini, diharapkan menjadi forum ilmiah pada akademisi untuk pengembangan ilmu dan mencarisolusi terbaik atas berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya peserta seminar dan *call for paper* serta seluruh pelaksana kegiatan atas peransertanya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

Yogyakarta, 24 Oktober 2017

Dekan,

Dr. Winarno, MM.

DAFTAR ISI

Ucapan Selamat Datang	iii
Kata Sambutan	v
Daftar Isi	vii
<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Pertamina Terhadap Perbatikan Sri Suryaningsum, Mohammad Irhas Effendi, dan Raden Hendri Gusaptono	1
Perilaku Etis Akuntan Masa Depan dipengaruhi Religiusitas, <i>Intellectual Capital</i> , <i>Locus of Control</i> , dan Nilai-Nilai Etika Sunu Pranya Malestha dan Hiras Pasaribu	7
Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Growth Opportunity</i> Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Property yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014 Setyaka Abi Saputra dan Alp Yuwudiantoro	20
Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2014) Kurnia Armiaty dan Ruserlistyani	34
Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong Tahun Anggaran 2009-2014 Selvina Asatila Murafer dan Kunti Sunaryo	52
Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palangka Raya) Elga Arya Putra dan Windyastuti	66
<i>Analysis of Financial Performance In Government Maluku District West</i> Samuel Rudolfo Nowally dan Suchyo Heriningsih	80
Pengaruh <i>Corporate Governance Index</i> , Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Kualitas Auditor Terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Kandida Ratna Tiffany dan Dian Indri P	97
Pemeringkatan Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> Tahun 2011-2013 Sri Budiwati Wahyu Suprapti dan Geliska Jenio Balkan	117

Keputusan <i>Hedging</i> dalam Meminimalisasi Risiko Perusahaan (Studi Pengaruh Utang, Piutang, Net Sales, ROA Pada Perusahaan Pertambangan yang listing di BEI Tahun 2010-2014)	
Novita Ratna Pratiwi dan C. Ambar Pujiharjanto	132
Pengaruh <i>Store Environment</i> Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif yang Dimediasi Emosi Positif	
Intan Maharani dan Chaula Anwar	141
Mapping Potensi Wisata dalam Upaya Tata Kelola <i>Green Ecotourism</i> di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Indonesia	
Putri Puspita Sari dan Istiana Rahatmawati	152
Tata Kelola Pertambangan Untuk Kesejahteraan Rakyat di Sumur Tua Migas	
Noto Pamungkas dan Sri Suryaningsum	163
Pengaruh Diversitas Kebangsaan, Komisaris Independen, Diversitas Tingkat Umur, <i>Leverage</i> , dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	
Zachrara Putri Arintawati dan Marita	167
Analisis Pengaruh <i>Day Of The Week Effect</i> , <i>Week Four Effect</i> , dan <i>Rogalsky Effect</i> Terhadap Return Saham LQ 45 Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (Tahun 2012-2014)	
Triani Pujiastuti dan Bray Ayu Lestari	182

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERTAMINA TERHADAP PERBATIKAN

Sri Suryaningsum¹, Mohammad Irhas Effendi², dan Raden Hendri Gusaptono³

¹Accounting Department, Economic and Business Faculty, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, DIY, Indonesia.

²⁻³Management Department, Economic and Business Faculty, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, DIY, Indonesia.

Jalan SWK 104(Lingkar utara), Condongcatur, Yogyakarta 55283, Telp. +62 274 486733

¹No. Hp. 085729671807 Email: srisuryaningsum@upnyk.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan program-program CSR PT. Pertamina. Penelitian ini dilakukan di Blora, penelitian dilakukan selama empat bulan yaitu bulan April sampai Juli 2017. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus kolektif (survei dan studi kasus). Implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) pada setiap korporasi mempunyai karakteristik yang berbeda – beda. Kunci dari keberhasilan program CSR terletak pada program yang dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang dilaksanakan oleh Pertamina telah berhasil, dibuktikan dengan berkembang pesatnya batik blora Berkat program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu Tepatnya Di Lingkungan RT 05/ RW 01 Kelurahan Ngelo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu dalam programnya untuk kemajuan batik blora tidak sekadar pemberian pelatihan teknis membatik. Namun menyeluruh dari hulu ke hilir seperti di sektor manajemen kelompok, maupun pemberian alat-alat membatik hingga pemasangan IPAL.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR), PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Batik, Blora*

A. PENDAHULUAN

Klaster Batik Pratiwi Krajan di Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Blora yang perbatikannya tidak terkoordinir dengan baik dari tahun 2012. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta agar kerajinan batik di blora dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat yang ada di blora. Terkait hal ini PT Pertamina yang ada di blora mengambil sebuah langkah-langkah CSR yang ditujukan untuk kerajinan batik di blora agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu perusahaan yang menyertakan batik pada program kerjanya adalah PT Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Pertamina melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan beberapa kegiatan yang menyertakan batik. Kegiatan CSR budaya Sumatera Utara melalui batik, dan pemberdayaan batik, Suryaningsum (2017).

Menurut Suryaningsum (2009), dalam Indeks CSR, salah satu tanggung jawab korporasi terutama perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (Pasal 74 UU No. 40/2007) mineral, tambang ataupun migas adalah *corporate social responsibility* (CSR) yang merupakan gerakan etis

kepedulian sebagai wujud tanggung jawab sosial dan pembangunan ekonomi, seiring dengan perbaikan kualitas hidup para karyawan dan keluarganya, komunitas setempat, dan masyarakat secara luas (*World Business Council for Sustainable Development*). Menurut Pasal 1 titik 3 UU No. 40 Tahun 2007 tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu sebagai perusahaan BUMN telah melaksanakan program corporate social responsibility (CSR) di sekitar wilayah operasional sebagai wujud tanggung jawab atas dampak operasional perusahaan.

Menurut Resnawaty (2016) Apabila dilihat dari pelaksanaan CSR oleh Pertamina dari waktu ke waktu, Pertamina saat ini benar-benar menitikberatkan program CSR pada peningkatan kemandirian masyarakat dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Program CSR Pertamina sudah tidak lagi didominasi oleh kegiatan bantuan (charity) yang notabene akan menyebabkan ketergantungan dari masyarakat terhadap perusahaan.

B. KAJIAN TEORI

Corporate Social Responsibility

D'Amato, Dkk. 2002, menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan yang mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada suatu komunitas, atau merupakan suatu proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders baik secara internal (pekerja, shareholders, dan penanaman modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain). Stakeholders perusahaan meliputi pesaham, pemimpin, pekerja, penyedia barang dan jasa (mitra atau supplier), pesaing, konsumen, pemerintahan dan masyarakat. Diterapkan pada setiap kegiatan pembangunan tersebut.

Gray *et.al.* (1995) dan Deegan (2002) menyatakan bahwa pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) mempengaruhi praktik *environmental disclosure*. Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan dari ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial [Dierkes & Antal (1986), dalam Mangos & Lewis (1995)]. Mangos & Lewis (1995) menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor tanggung jawab sosial perusahaan ketika kita melakukan pengujian terhadap teori akuntansi positif.

Jadi, tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis serta pasif, semua itu hanya dikeluarkan dari perusahaan akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara stakeholders. Konsep *Corporate Social Responsibility* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders.

C. METODE PENELITIAN

Observasi

Penelitian ini dilakukan di Blora Penelitian dilakukan selama empat bulan yaitu bulan April sampai Juli 2017. Penelitian ini menggunakan metode observasi. Metode ini paling tepat untuk mengamati secara langsung dan mendalam untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena–fenomena sosial.

Data dan Analisis

Pencarian data dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama untuk data Primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antar pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber. Pencarian data yang kedua dengan berdasarkan *Annual Report* 2016. Di dalam *Annual Report* ada banyak informasi serta program-program CSR yang sudah dilaksanakan oleh PT. Pertamina yang dapat digunakan untuk bahan pendukung data Primer. Analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data yang dimiliki selama penelitian ini berlangsung.

D. PEMBAHASAN

Batik Blora

Batik merupakan kesenian menggambar di atas kain menggunakan Canting dan Malam sebagai pewarna. Pada mulanya membatik hanya berkembang di lingkungan Keraton, lambat laun membatik menjadi berkembang dikalangan masyarakat umum sebagai mata pencaharian wanita sekaligus untuk mengisi waktu senggang di rumah. Banyak sekali literatur yang memperdebatkan awal mula sejarah batik di nusantara (jawa) namun tehnik pembuatan batik pertama kali dituliskan dalam buku *History of Java* oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu sedang menjadi gubernur Hindia-Belanda dibawah kekuasaan Napoleon. Kabupaten Blora yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Rembang, tidak memiliki sejarah batik. Batik yang berkembang di Kabupaten Blora, adalah hasil pencarian identitas daerahnya yang dituangkan ke dalam batik, berbeda dengan Lasem atau kota-kota lain yang mengenal sejarah batik. Tidak ada sejarah yang mencatat perkembangan batik di Kabupaten Blora. Batik yang dikenal masyarakat Blora pada umumnya adalah batik Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan dan Lasem, yang kesemuanya mempunyai corak tersendiri.

Sejak ditetapkannya Batik sebagai warisan kebudayaan untuk kemanusiaan oleh Unesco dan ditetapkannya hari Batik Nasional oleh pemerintah, juga pemakaian seragam di hari-hari tertentu seperti di sekolahan dan di instansi pemerintahan, membuat permintaan pasar akan batik begitu tinggi sehingga berbagai daerah yang tidak mengenal atau mempunyai sejarah batik berusaha membuat corak batik yang mengidentitaskan daerahnya.

Corak irisan-irisan kayu dan daun-daun adalah hasil pencarian identitas perajin batik Kabupaten Blora sebab Kabupaten Blora terkenal dengan daerah penghasil Kayu Jati terbesar di Jawa Tengah. Selain corak irisan kayu dan daun, para perajin batik di Kabupaten Blora juga mengembangkan corak lain seperti burung dan bunga-bunga.

Bagi para pecinta batik, batik Blora layak untuk dikoleksi sebab mempunyai nilai identitas dan kekhasan sendiri yang akan menjadi sekarah pertama kali di Kabupaten Blora.

Penerapan *Corporate Social Responsibility*

Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika perusahaan akan melakukan program *Corporate Social Responsibility* CSR, menurut Wibisono (2008), setidaknya terdapat empat tahap, diantaranya:

1. Tahap perencanaan

Perencanaan terdapat tiga langkah utama, yaitu *awareness building*, *CSR Assessment*, dan *CSR manual building*. *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya CSR dan komitmen manajemen, Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.

CSR Assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.

Langkah selanjutnya adalah membuat *CSR manual*. Hasil *assessment* merupakan dasar menyusun *manual* atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau menggunakan tenaga ahli.

Manual merupakan inti dari perencanaan, karena menjadi panduan atau petunjuk pelaksanaan CSR bagi komponen perusahaan. Penyusunan *manual* CSR dibuat sebagai acuan, panduan dan pedoman dalam pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efisien.

2. Tahap Implementasi

Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak apapun bila tidak diimplementasikan dengan baik. Akibatnya tujuan CSR secara keseluruhan tidak akan tercapai, dan masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang optimal. Padahal anggaran yang telah dikururkan tidak bisa dibilang kecil. Oleh karena itu perlu disusun strategi untuk menjalankan rencana yang telah dirancang.

Dalam memulai implementasi, Wibisono (2008) menyatakan pada dasarnya terdapat tiga aspek yang harus disiapkan yaitu; siapa yang akan menjalankan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukan implemmentasi beserta alat apa yang diperlukan. Dalam istilah manajemen populer, aspek tersebut diterjemahkan kedalam:

- a. Pengorganisasi, atau sumber daya yang diperlukan
- b. Penyusunan (*staffing*) untuk menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya
- c. Pengarahan (*directing*) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan
- d. Pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan
- e. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana
- f. Penilaian (*evaluating*) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan

Tahap implemmentasi ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Agar efektif, upaya ini perlu dilakukan dengan suatu tim atau divisi khusus yang dibentuk untuk mengelola program CSR, langsung berada dibawah pengawasan salah satu direktur atau CEO. Tujuan utama sosialisasi adalah agar program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh unit penyelenggara.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasarkan *roadmap* yang telah disusun. Sedangkan internalisasi adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh aspek bisnis perusahaan, misalnya melalui sistem manajemen kinerja, prosedur pengadaan, proses produksi, pemasaran dan proses bisnis lainnya. Dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR bukan sekedar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan lagi sebagai upaya untuk *compliance* tetapi sudah *beyond compliance*.

3. Tahap Evaluasi

Setelah program diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi program. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan CSR. Terkadang ada kesan, evaluasi baru dilakukan jika ada program yang gagal. Sedangkan jika program tersebut berhasil, justru tidak dilakukan evaluasi. Padahal evaluasi harus tetap dilakukan, baik saat kegiatan tersebut berhasil atau gagal. Bahkan kegagalan atau keberhasilan baru bisa diketahui setelah program tersebut dievaluasi.

Menurut Prayogy, Dody. (2011) dalam Evaluasi Program *Corporate Social Responsibility* dan *Community Development* pada industri tambang dan migas. Evaluasi program *corporate social responsibility* perlu diadakan evaluasi setiap tahunnya bukan untuk tindakan mencari-cari kesalahan. Evaluasi dilakukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Misalnya keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, memperbaiki atau mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang telah diimplementasikan.

4. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk keperluan *shareholder* juga untuk *stakeholder* yang memerlukan.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina (Persero), badan usaha milik negara di sektor energi terintegrasi, bersama anak usahanya dinilai sebagai salah satu BUMN yang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan masyarakat, salah satunya melalui program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan. Setiap tahun Pertamina menganggarkan Rp 120 miliar-Rp130 miliar dalam program CS. Resnawaty (2016). Jika dilihat dari program CSR Pertamina dari waktu ke waktu membuktikan bahwa Pertamina saat ini benar-benar menitikberatkan program CSR pada peningkatan kemandirian masyarakat dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Program CSR Pertamina sudah tidak lagi didominasi oleh kegiatan bantuan (charity) yang notabene akan menyebabkan ketergantungan dari masyarakat terhadap perusahaan. Bentuk nyata dari program Pertamina adalah Bantuan terhadap pengusaha batik Blora.

Pertamina sebagai perusahaan energi memberikan kontribusi melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Melalui program CSR Pertamina mencari dan memberdayakan para pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk dapat melestarikan budaya lokal juga untuk membantu mereka mengembangkan usahanya. Salah satu budayanya yaitu batik. Mulai dari mengadakan pelatihan seperti cara membatik dan sebagainya, masyarakat pun mulai bisa mengembangkan usahanya.

Teknik membatik sendiri dibedakan menjadi beberapa macam, salah satunya adalah teknik batik tulis. Membatik dengan teknik batik tulis disebut teknik membatik tradisional. Teknik batik tulis merupakan teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut canting. Canting biasa banyak digunakan di Jawa. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam pada sebagian pola di kain mori. Teknik ini membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi. Karena sedikit rumit, maka tak heran batik tulis tergolong mahal harganya. Namun itu semua tidak membuat minat masyarakat terhadap batik tulis menurun. Banyaknya animo masyarakat sekarang terhadap batik tulis, apabila ditambah dengan adanya pariwisata di daerah-daerah pengrajin batik akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah tersebut. Dengan ditetapkannya batik sebagai warisan dunia, diharapkan dapat lebih banyak menarik perhatian wisatawan dan memacu para pelaku ekonomi daerah untuk terus mengembangkan usahanya sehingga perekonomian masyarakat dapat bertambah. Sri Suryaningsum (2017).

Sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Pertamina, Batik Pratiwi Krajan dianggap sebagai klaster batik yang potensial untuk dikembangkan. Selanjutnya gelontoran berbagai macam bantuan untuk mengembangkannya juga dilakukan perusahaan Migas tersebut. Pertamina tidak hanya memberikan pelatihan teknis membatik, namun menyeluruh dari hulu sampai hilir. Seperti di sektor manajemen kelompok maupun pemberian alat-alat membatik hingga pemasangan IPAL. Kunci dari keberhasilan program CSR Pertamina terletak pada program yang dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dibuktikannya dengan Keberhasilannya PT Pertamina (Persero) meraih tujuh Proper Emas dapat menjadi teladan bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh perusahaan swasta maupun BUMN.

E. Kesimpulan

PT. Pertamina telah berhasil melaksanakan program CSR yang telah meraka rencanakan, melalui anak perusahaan Pertamina EP Asset 4 Field Cepu berhasil memberi bantuan dalam bentuk pelatihan membuat, tidak hanya itu tetapi juga Seperti di sektor manajemen kelompok maupun pemberian alat-alat membuat hingga pemasangan IPAL. Program-program CSR PT. Pertamina dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki masyarakat. Dibuktikannya dengan Keberhasilannya PT Pertamina (Persero) meraih tujuh Proper Emas dapat menjadi teladan bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh perusahaan swasta maupun BUMN.

Daftar Pustaka

- Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 47-77
- Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. Methodological Themes: Constructing a Research Database of Social and Environmental Reporting by UK Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 2, p. 78-101
- D'Amato, Dkk., Corporate Social Responsibility and Sustainable Business A Guide to Leadership Tasks and Functions, North Carolina.
- Mangos, Nicholas C. and Neil R. Lewis. 1995. A Socio-Economic Paradigm for Analysing Managers'Accounting Choice Behaviour. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 1, p. 38-62
- Prayogo, Dody. (2011). Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada industri tambang dan migas. *Makara, Sosial Humaniora*, 15 (1).
- Sri Suryaningsum, Peningkatan Kesejahteraan Dengan Batik, 9 Mei 2017, <http://www.lintasmedika.com/2017/05/peningkatan-kesejahteraan-dengan-batik/>
- Sri Suryaningsum, Batik Tulis Untuk Wisata dan Perekonomian, 25 Mei 2017, <http://www.lintasmedika.com/2017/05/batik-tulis-untuk-wisata-dan-perekonomian/>
- Suryaningsum, Sri. 2009. Perbedaan Paradigma Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility: Komparasi Amerika dan Eropa. *Paradigma* ISSN 1410-3133. Volume 13, no 2.
- Suryaningsum, Sri. Moch. Irhas Effendi. R. Hendri Gusaptono. 2016. Penerapan *Corporate Social Responsibility* Pada Pt. Bukit Asam Dalam Pengentasan Kemiskinan
- Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik. Fascho Publishing.
- <http://blora-batik.blogspot.com/p/tentang-batik-blora.html> (diakses pada 20 oktober 2017)
- <http://www.dunia-energi.com/risna-resnawaty-pakar-csr-unpad-program-amdal-dan-csr-pertamina-berkontribusi-positif-bagi-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/>(diakses pada 20 oktober 2017)
- <http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/batik-blora-bangkit-bersama-pertamina-ep> (diakses pada 20 oktober 2017)

PERILAKU ETIS AKUNTAN MASA DEPAN DIPENGARUHI RELIGIUSITAS, INTELLECTUAL CAPITAL, LOCUS OF CONTROL, DAN NILAI-NILAI ETIKA

Sunu Pranya Malestha¹; Hiras Pasaribu²

UPN "Veteran" Yogyakarta;

E-mail: supram7610@gmail.com¹; pasaribuhiras@yahoo.com²

Abstract

The purpose of this study was to test the effect of religiosity (intrapersonal and interpersonal), intellectual capital, locus of control, and ethical orientation (idealism and relativism), the ethical behavior of accountants future or prospective accountant is a student majoring in accounting. The sample used 200 respondents of whom are students majoring in accounting UPN "Veteran" Yogyakarta. The sampling method using purposive sampling, while the criteria relating to sampling Sugiyono (2012) states that the number of members of the sample of at least ten times the number of variables. The research method using multiple linear regression, coefficient test deterinasi, f test, t test. Based analaisis this study stated that intellectual capital, locus of control, ethical orientation idealism affect the ethical behavior of accountants future, while religiosity intrapersonal, interpersonal religiosity and ethical relativism orientation does not affect the ethical behavior of future accountants. Based on the results of this study are expected of students majoring in accounting UPN "Veteran" Yogyakarta is more ethical behavior in everyday life both during lectures or when later entered the workforce. So do not hurt yourself and others.

Keywords: Ethical Conduct, Religiosity, Intellectual Capital, Locus of Control, Ethical values.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini semakin pesat yang menimbulkan dorongan bagi pelaku bisnis untuk bersaing lebih ketat dalam dunia bisnis. Semua usaha dan inovasi dikembangkan dalam dunia bisnis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Untuk memperoleh keuntungan yang besar segala macam tindakan dilakukan para pelaku bisnis walaupun dengan mengabaikan berbagai dimensi yaitu dimensi moral dan etika bisnis, termasuk profesi akuntansi.

Banyaknya kasus penyimpangan etika dan hukum yang dilakukan oleh profesi akuntan yang merugikan banyak pihak. Seperti beberapa kasus yang pertama adalah KAP Anderson dan Enron, KAP Anderson mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan manipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, kecurangan yang dilakukan oleh Artur Andersen telah banyak melanggar prinsip dan etika profesi akuntan diantaranya yaitu melanggar prinsip Integritas dan perilaku profesional. hukumonline (2001). Permasalahan tentang kerugian negara atau perusahaan akibat tindakan korupsi merupakan cerminan perilaku yang tidak benar. Terdapat pelanggaran etika akuntan dalam fungsinya seperti yang telah disebutkan pada paragraf di atas. Karena tidak mungkin kasus korupsi dilakukan oleh satu orang tanpa melibatkan akuntan yang berperan penting dalam melaporkan laporan keuangan.

Menurut Hutahaean dan Hasnawati, (2015) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa gender, religiusitas intrapersonal tidak berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan, sedangkan variabel religiusitas interpersonal berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan.

Menurut penelitian Febrianty, (2010) mendapatkan hasil yaitu gender, *locus of control* dan *ethical sensitivity* tidak berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, sedangkan variabel *intellectual capital* berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan.

Menurut penelitian Windiastuti dan Mahendra (2015) memperoleh hasil yaitu Orientasi etis idealisme, orientasi etis relativisme, *equity sensitivity*, budaya jawa berpengaruh terhadap perilaku etis auditor pada kantor akuntan publik di jogjakarta.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti memasukan variabel religiusitas dari penelitian Hutahaehan dan Hasnawati (2015), dan menambahkan variabel *intellectual capital* dan *locus of control* dari penelitian Febrianty (2010), serta menambahkan variabel Orientasi Etis dari penelitian Windiastuti dan Mahendra (2015). Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan variabel religiusitas dari penelitian Hutahaehan dan Hasnawati (2015), variabel *intellectual capital* dan *locus of control* dari penelitian Febrianty (2010), dan variabel orientasi etis dari penelitian Windiastuti dan Mahendra (2015).

Perilaku tidak etis sebenarnya sudah mulai tumbuh sejak sebelum menjadi mahasiswa atau sejak ada di bangku sekolah baik SD, SMP, maupun SMA. Perilaku tersebut sadar atau tidak telah dilakukan dalam aktivitas sehari-hari baik di lingkungan perkuliahan maupun diluar kuliah. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan mahasiswa yang seharusnya menjadi generasi baru agar tidak ada lagi oknum-oknum akuntan yang melanggar etika di masa yang akan datang ternyata masih ada bibit-bibit perilaku tidak etis dalam dirinya. Hal ini yang mengkhawatirkan apakah akuntan kedepannya akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dari kekhawatiran inilah timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Religiusitas, *Intellectual Capital*, *Locus of Control*, Orientasi Etis, Terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa Depan.

Perilaku Etis

Menurut Hutahaehan dan Hasnawati (2015) perilaku etis merupakan tingkah laku atau tanggapan seseorang dalam lingkungan tentang hak dan kewajiban moral serta nilai-nilai benar atau salah. Hastuti (2007) dalam Lucyanda dan Gunardi (2012) menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengidentifikasi perilaku etis dan tidak etis pada suatu profesi yang sangat penting, karena kepercayaan masyarakat pada profesi akan rusak apabila seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis. Jika seorang akuntan melakukan tindakan yang tidak etis, maka akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan tersebut.

Religiusitas

Dalam Hutahaehan dan Hasnawati (2015) religiusitas memberikan gambaran dengan sifat perilaku etis. selain itu religiusitas juga dikenal memiliki pengaruh terhadap perilaku dan sikap seseorang. Dalam penelitian religiusitas menggunakan dua faktor yaitu religiusitas intrapersonal dan religiusitas interpersonal Hutahaehan dan Hasnawati (2015). Religiusitas intrapersonal adalah kemampuan individu mengenai bagaimana individu tersebut memahami hal yang dia temui dalam kehidupan. Sedangkan religiusitas interpersonal adalah bagaimana cara pandang seseorang tentang sebuah relasi dengan orang lain, dirinya dan berbagai tata nilai agama Hutahaehan dan Hasnawati (2015).

Intrapersonal religiusitas merupakan kemampuan individu mengenai bagaimana individu tersebut memahami berbagai hal yang dia temui dalam kehidupan, mereka memiliki iman yang kuat kesadaran yang tinggi akan nilai-nilai kebaikan yang sudah ditetapkan oleh agama mereka masing-masing dari dalam diri mereka sendiri Hutahaehan dan Hasnawati (2015).

Interpersonal religiusitas merupakan bagaimana cara pandang seseorang terhadap sebuah hubungan dengan orang lain, dirinya dan berbagai nilai-nilai agama dan juga keaktifan seseorang dalam bersosialisasi didalam organisasi ataupun kelompok-kelompok agama. Keyakinan agama seseorang memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan etis karena nilai-nilai dan standar pribadi yang sering berhubungan dengan latar belakang agama seseorang Hutahaehan dan Hasnawati (2015).

Intellectual Capital

Intellectual capital adalah materi intelektual yang meliputi pengetahuan, informasi properti intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan Steward (1887). Menyikapi kenapa *intellectual capital* didudukkan di tempat yang strategis dalam konteks kinerja atau kemajuan suatu organisasi atau masyarakat., mungkin pertama dapat kita rujuk dari fenomena pergeseran tipe masyarakat dari masyarakat industrialis dan jasa ke masyarakat pengetahuan Drucker (2001) dalam Febrianty (2010). dalam penelitian Bontis (2000) membagi *intellectual* menjadi tiga bagian yaitu *human capital*, *customer capital*, dan *structural capital*. *Human capital* adalah aktiva tak berwujud yang dimiliki perusahaan dalam bentuk kemampuan intelektual, kreativitas dan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh karyawannya. *Customer capital* adalah pengetahuan dari rangkaian pasar, pelanggan, supplier, dan hubungan baik antara pemerintah dengan industri, atau hubungan baik dengan pihak luar.

Locus of Control

Locus of control adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak mengendalikan (control) peristiwa yang terjadi padanya (Rotter dalam Febrianty 2010). (Reiss dan mitra, 1998 dalam Febrianty 2010) membagi *Locus Of Control* menjadi dua, yaitu: *internal Locus Of Control* adalah cara pandang bahwa segala hasil yang didapat, baik atau buruk adalah karena tindakan, kapasitas dan faktor-faktor dari dalam diri mereka sendiri. *External Locus Of Control* adalah cara pandang dimana segala hasil yang didapat, baik atau buruk berada diluar kontrol diri mereka tetapi karena faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir. Individu yang termasuk dalam kategori ini meletakkan tanggung jawab diluar kendalinya.

Locus of Control merupakan konsep yang menjelaskan tentang persepsi seseorang terhadap siapa yang menentukan nasibnya. (Ustadi dan Utami, 2005 dalam Lucyanda dan Gunardi 2012). Reiss dan Mitra (1998) membagi *locus of control* menjadi dua, yaitu: *internal locus of control* adalah cara pandang bahwa segala hasil yang didapat, baik atau buruk adalah karena tindakan, kapasitas dan faktor-faktor dari dalam diri mereka sendiri. *External locus of control* adalah cara pandang dimana segala hasil yang didapat, baik atau buruk berada diluar kontrol diri mereka tetapi karna faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir. Individu yang termasuk dalam kategori ini meletakkan tanggung jawab diluar kendalinya. Variabel *locus of control* diukur dengan menggunakan instrumen *Work Locus of control (WLC)* yang digunakan dalam penelitian Reiss dan Mitra (1998). Instrumen terdiri dari 16 pertanyaan dengan skala likert 1 sampai 5.

Nilai-nilai etika

Nilai-nilai etika adalah cara pandang seseorang mengenai etika. Perilaku seseorang akan mempengaruhi pengambilan keputusan ketika mengalami problematika etis. Forsyth (1980) dalam Windiastuti dan Mahendra (2015) mengatakan bahwa nilai-nilai etika atau orientasi etika dikendalikan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme. Idealisme, merupakan nilai-nilai etika atau orientasi etika yang mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa konsekuensi dari tindakan dapat terjadi tanpa harus melanggar nilai moral. Windiastuti dan Mahendra (2015), yang menyatakan Relativisme adalah orientasi etika yang mengacu pada penolakan terhadap nilai (aturan) moral universal yang membimbing perilaku.

Pengembangan Hipotesis

Religiusitas terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa Depan

Religiusitas didefinisikan sejauh mana seorang individu berkomitmen untuk agama dan ajaran yang ada di dalamnya, termasuk komitmen yang berpatokan pada agama terhadap sikap dan perilaku individu (Lung dan Chai, 2010 dalam Hutahahean dan Hasnawati, 2015). Keyakinan agama seseorang mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan karena terdapat nilai-nilai yang berhubungan dengan latar belakang agama seseorang. Artinya bahwa agama seseorang sudah memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh

penganut agama tersebut. Dalam penelitian religiusitas menggunakan dua faktor yaitu intrapersonal religiusitas dan interpersonal religiusitas Mokhlis, (2006).

Intrapersonal religiusitas adalah kemampuan individu mengenai bagaimana individu tersebut memahami hal yang dia temui dalam kehidupan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hutahaean dan Hasnawati (2015) yang mengatakan bahwa religiusitas intrapersonal tidak berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Hal ini berarti bahwa kurangnya hubungan seseorang dengan orang lain dan nilai-nilai agama sehingga berkurang juga nilai pemahaman mereka terhadap sikap etis

Interpersonal religiusitas adalah bagaimana cara pandang seseorang tentang sebuah relasi dengan orang lain, dirinya dan berbagai tata nilai Hutahaean dan Hasnawati (2015). Dalam penelitian Hutahaean dan Hasnawati (2015) religiusitas interpersonal berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Hal ini berarti bahwa seseorang dengan religiusitas yang tinggi sangat mentaati nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh agamanya Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan dengan dua hipotesis tentang religiusitas sebagai berikut:

H_1 : Intrapersonal religiusitas berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan.

H_2 : Interpersonal religiusitas berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan.

Intellectual Capital dan pengaruhnya terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa Depan

Intellectual capital ditempatkan di tempat strategis dalam konteks kinerja atau kemajuan organisasi dan masyarakat, kita bisa melihat pergeseran masyarakat dari masyarakat industrialis dan jasa ke masyarakat pengetahuan. Drucker (2001) misalnya meramalkan datangnya dan sekaligus mendeskripsikan pergeseran ke arah era masyarakat berpengetahuan. *intellectual capital* sangat penting bagi masyarakat karena untuk dijadikan pengetahuan agar tidak dibodohi oleh orang lain, juga bermanfaat untuk mencari kekayaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febrianty (2010) dengan hasil penelitiannya yaitu *intellectual capital* berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *intellectual capital* yang merupakan faktor pribadi kemampuan seseorang untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_3 : *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan.

Locus of Control terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa Depan

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan. Hasil yang samajuga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2007) pada hasil penelitiannya mengatakan bahwa *locus of control* memiliki pengaruh terhadap perilaku etis, dimana seorang dengan *locus of control* cenderung berperilaku lebih etis daripada seorang tidak mempunyai *locus of control*. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H_4 : *Locus of Control* mempengaruhi perilaku etis akuntan masa depan.

Nilai-nilai Etika terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa Depan

Forsyth (1980) mengatakan bahwa nilai-nilai etika atau orientasi etika dikendalikan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme. Orientasi etis idealisme merupakan orientasi etika yang mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dapat terjadi tanpa melanggar nilai-nilai moral. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Windiastuti dan Mahendra (2015) terdapat pengaruh orientasi etis idealisme terhadap perilaku etis auditor pada kantor akuntan publik di Yogyakarta. Penelitian yang sama dilakukan oleh Dzakirin (2013) diperoleh hasil bahwa idealisme berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai krisis etika akuntan profesional. Penelitian Damayanthi dan Gede (2016) diperoleh hasil orientasi etis idealisme berpengaruh terhadap perilaku tidak etis akuntan. Hal di atas menunjukkan bahwa mahasiswa yang mempunyai idealisme tinggi cenderung bersikap etis dalam berperilaku. Sedangkan orientasi

etis relativisme adalah orientasi etika yang mengacu pada penolakan terhadap nilai-nilai moral universal yang membimbing perilaku Forsyth (1980). Dalam penelitian Windiastuti dan Mahendra (2015) terdapat pengaruh orientasi etis relativisme terhadap perilaku etis auditor pada kantor akuntan publik di Yogyakarta. Hal ini sama dengan penelitian dari Damayanthi dan Gede (2016) yaitu adanya pengaruh orientasi relativisme terhadap perilaku tidak etis akuntan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dzakirin (2013) dengan hasil yang diperoleh adalah tidak ada pengaruh orientasi relativisme terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai krisis etika akuntan profesional. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki relativisme yang tinggi cenderung kurang bersikap etis dalam berperilaku. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas maka ada dua hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H₅ : Orientasi Etis Idealisme berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan.

H₆ : Orientasi Etis Relativisme berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan

B. METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi adalah kumpulan dari elemen yang menjadi objek penelitian Indrianto dan Supomo (2002). Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif jurusan akuntansi fakultas ekonomi bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta dengan jumlah total 1046 mahasiswa

Sampel

Untuk mencapai tujuan penelitian, pemilihan sampel untuk penelitian menggunakan metode *purposivesampling*, yaitu teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Adapun kriteria *purposive sampling* yang digunakan peneliti dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:

1. Sampel merupakan semua mahasiswa aktif Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta angkatan 2012 dan 2013.
2. Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang telah menempuh matakuliah Etika Bisnis Profesi.

Sugiyono (2012), menyebutkan beberapa saran terkait ukuran sampel dalam penelitian sebagai berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
2. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5, maka jumlah anggota sampelnya yaitu $10 \times 5 = 50$ sampel.

Jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini dihitung dari variabel penelitian yang terdiri dari 5 variabel. Maka jumlah sampel minimalnya yaitu $10 \times 5 = 50$. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 200 responden.

Variabel Penelitian

1. Perilaku Etis

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel terikat (Y) adalah perilaku etis akuntan masa depan. Perilaku etis dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *workplace behavior scale* (WBS) yang dikembangkan oleh Jones (1990) yang sudah dimodifikasi, difokuskan pada tiga dimensi yaitu kecurangan pada saat ujian, tugas kelompok/individu, dan tugas pembuatan makalah atau *paper*. Terdapat 10 pertanyaan dalam variabel perilaku etis dengan skala likert 1 sampai 5.

2. Religiusitas

Religiusitas dalam penelitian ini menggunakan pengukuran dari penelitian Mokhlis (2006). Dalam pengukuran religiusitas dibagi menjadi dua yaitu religiusitas intrapersonal dan religiusitas interpersonal. Terdapat 5 pertanyaan dalam religiusitas intrapersonal dan terdapat 4 pertanyaan dalam religiusitas interpersonal, dengan total pertanyaan sebanyak 9 dengan skala likert 1 sampai dengan 5.

3. *Intellectual Capital*

Pada variabel *intellectual capital* pada penelitian ini diukur dengan kuesioner yang dibuat oleh Bontis (2000), dan dikembangkan oleh Ferreira (2010). Didalam kuesioner penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang telah dikembangkan oleh penelitian dari Ferreira (2010) dengan jumlah total 16 pertanyaan, dengan skala likert 1 sampai 5.

4. *Locus of Control*

Locus of control pada penelitian ini diukur dengan *work locus of control (WLC)* dalam penelitian Reiss dan Mitra (1998) yang terdapat 16 pertanyaan didalamnya, dengan skala likert 1 sampai 5.

5. Nilai-Nilai Etika

Pengukuran nilai-nilai etika pada penelitian ini diadopsi dari kuesioner penelitian Windiastuti dan Mahendra (2015) dimana orientasi etis dibagi menjadi dua yaitu orientasi etis idealisme dan orientasi etis relativisme, total terdapat 20 pertanyaan. 10 pertanyaan dalam orientasi etis idealisme, 10 pertanyaan dalam orientasi etis relativisme dengan skala likert 1 sampai 5.

Penentuan Sampel.

Untuk mencapai tujuan penelitian, pemilihan sampel menggunakan metode *purposivesampling*, yaitu teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria, yaitu sampel diambil dari mahasiswa aktif di Jurusan/Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta angkatan 2012 dan 2013 dan telah menempuh matakuliah Etika Bisnis Profesi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 200 mahasiswa dari dua angkatan.

Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Ghazali (2006), suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Corelation*, yaitu dengan cara menghitung korelasi antaranilai yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan. Apabila *Pearson Corelation* yang didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid.

Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Menurut Ghazali (2006), suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan one shot atau pengukuran sekali saja (pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan) SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60

Analisis Data Untuk Menguji Hipotesis

Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 16 windows. Analisis regresi berganda menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y = Perilaku Etis Akuntan Masa Depan

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = koefisien regresi parsial

X_1 = Religiusitas Intrapersonal

X_2 = Religiusitas Interpersonal

X_3 = *Intellectual Capital*

X_4 = *Locus of Control*

X_5 = Orientasi Etis Idealisme

X_6 = Orientasi Etis Relativisme

E = error

Uji statistik ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel religiusitas intrapersonal, religiusitas interpersonal, *Intellectual capital*, *locus of control*, orientasi etis idealisme, orientasi etis relativisme, mempunyai pengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R²* dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk presentase, kemudian sisanya (100%-persentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Uji F (Simultan)

Uji F menunjukkan semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan nilai signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti secara simultan (bersama-sama) variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai $> 0,05$ secara simultan keempat variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

Uji t (Parsial)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen Ghozali, (2006).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian melalui deskripsi data penelitian, uji validitas, uji reliabilitas, dan pembahasan hasil uji hipotesis dalam pembahasan sebagai berikut

Uji Statistik Deskriptif

Untuk menganalisis data berdasarkan kecenderungan jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel, maka akan disajikan hasil jawaban responden dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
R_INTRA	200	2	5	4.04	.509	
R_INTER	200	2	5	3.58	.652	
IC	200	3	5	4.07	.309	
LOC	200	3	5	4.05	.306	
OEI	200	2	5	4.23	.364	
OER	200	2	5	4.22	.388	
PE	200	2	5	4.08	.644	
Valid N (listwise)	200					

Sumber: Output SPSS.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata religiusitas intrapersonal, religiusitas interpersonal, *intellectual capital*, *locus of control*, orientasi etis idealisme, orientasi etis relativisme, terhadap perilaku etis lebih besar dari standar deviasi yang menunjukkan bahwa simpangan baku kecil. Dalam rata-rata dari statistik deskriptif nilai variabel religiusitas intrapersonal adalah 4.04, religiusitas interpersonal adalah 3.58, *intellectual capital* adalah 4.07, *locus of control* adalah 4.05, orientasi etis idealisme adalah 4.23, orientasi etis relativisme adalah 4.22 dan perilaku etis akuntan masa depan adalah 4.08. hal ini menunjukkan bahwa responden dalam menjawab pertanyaan cenderung netral dan setuju. Maka dapat dikategorikan baik.

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas variabel-variabel dalam penelitian ini semua tingkat koefisien korelasi dari item pernyataan mempunyai nilai lebih kecil dari 0,05, sehingga semua item pertanyaan pada variabel penelitian adalah valid pada derajat 5% dan dapat digunakan untuk mengukur masalah yang diteliti.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Uji Reliabilitas		
Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Religiusitas Intrapersonal (X_1)	0,729	Reliabel
Religiusitas Interpersonal (X_2)	0,750	Reliabel
<i>Intellectual capital</i> (X_3)	0,756	Reliabel
<i>Locus of Control</i> (X_4)	0,748	Reliabel
Orientasi Etis Idealisme (X_5)	0,752	Reliabel
Orientasi Etis Relativisme (X_6)	0,780	Reliabel
Perilaku Etis Akuntan Masa Depan (Y)	0,897	Reliabel

Sumber: Output SPSS dan data primer yang diolah (2016)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* atas variabel Religiusitas Intrapersonal adalah sebesar 0,729, Religiusitas Interpersonal adalah 0,750, *Intellectual Capital* sebesar 0,756, *Locus of Control* sebesar 0,748, Orientasi Etis Idealisme sebesar 0,752, Orientasi Etis Relativisme sebesar 0,780, dan variabel Perilaku Etis Akuntan Masa Depan sebesar 0,897. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70.

Religiusitas, *Intellectual Capital*, *Locus Of Control*, dan Nilai-nilai Etika dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa Depan.

Hasil regresi linier berganda ditunjukkan dalam Tabel 4.3

Tabel 4.3
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.818	.785		2.315	.022
R_INTRA	.130	.086	.103	1.513	.132
R_INTER	.052	.067	.052	.778	.438
IC	.664	.295	.318	2.252	.025
LOC	-.633	.300	-.300	-2.114	.036
OEI	-.707	.300	-.399	-2.353	.020
OER	1.042	.279	.628	3.733	.000

a. Dependent Variable: Perilaku etis akuntan masa depan

Sumber: Output SPSS.

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 1,818 + 0,130 X_1 + 0,052 X_2 + 0,664 X_3 - 0,633 X_4 - 0,707 X_5 + 1,042 X_6 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1 Pada persamaan di atas, nilai konstanta diperoleh sebesar 1,818 yang berarti bahwa jika variabel independen yaitu Religiusitas Intrapersonal, Religiusitas Interpersonal, *Intellectual Capital*, *Locus of Control*, Nilai-nilai etika idealisme, dan Nilai-nilai etika relativisme tidak ada, maka perilaku etis akuntan masa depan adalah sebesar konstanta yaitu 1,818.
- 2 Koefisien regresi religiusitas intrapersonal yang diperoleh pada persamaan di atas yaitu sebesar 0,130 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan religiusitas intrapersonal akan meningkatkan perilaku etis akuntan masa depan 13,0 %.
- 3 Koefisien regresi religiusitas interpersonal yang diperoleh pada persamaan di atas yaitu sebesar 0,052 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan religiusitas interpersonal akan meningkatkan perilaku etis akuntan masa depan sebesar 5,2 %.
- 4 Koefisien regresi *intellectual capital* yang diperoleh pada persamaan di atas sebesar 0,664 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya peningkatan *intellectual capital* akan meningkatkan perilaku etis akuntan masa depan sebesar 66,4 %.
- 5 Koefisien regresi *locus of control* yang diperoleh pada persamaan di atas yaitu sebesar -0,633 (negatif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya penurunan *locus of control* akan menurunkan perilaku etis akuntan

masa depan sebesar 63,3 %.

- 6 Koefisien regresi orientasi etis idealisme yang diperoleh pada persamaan di atas sebesar -0,707 (negatif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya penurunan orientasi etis idealisme akan menurunkan perilaku etis akuntan masa depan sebesar 70,7 %.
- 7 Koefisien regresi orientasi etis relativisme yang diperoleh pada persamaan di atas yaitu sebesar 1,042 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan orientasi etis relativisme akan meningkatkan perilaku etis akuntan masa depan sebesar 104,2 %

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.4
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.364 ^a	.133	.106	.610

a. Predictors: (Constant), Oer, R_Intra, R_Inter, Ic, Loc, Oei

Sumber: Output SPSS.

Koefisien determinasi pada Tabel 4.4 menunjukkan, bahwa Adjusted R² adalah 0,106 artinya variabel Perilaku Etis Akuntan Masa Depan dipengaruhi Religiusitas Intrapersonal, Religiusitas Interpersonal, *Intellectual capital*, *Locus of Control*, Nilai-nilai etis idealisme, Nilai-nilai etis relativisme sebesar 10,6 % sedangkan sisanya 89,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Tabel 4.5
Uji F

ANOVA ^b						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.956	6	1.826	4.915	.000 ^a
	Residual	71.698	193	.371		
	Total	82.654	199			

a. Predictors: (Constant), OER, R_INTRA, R_INTER, IC, LOC, OEI

b. Dependent Variable: Perilaku etis akuntan masa depan

Sumber: Output SPSS dan data primer yang diolah (2016)

Nilai signifikansi pada Tabel 4.5 adalah $0,000 \leq 0,05$ berarti secara simultan (bersama-sama) variabel Religiusitas Intrapersonal, Religiusitas Interpersonal, *Intellectual Capital*, *Locus of Control*, Orientasi Etis idealisme, Orientasi Etis Relativisme yang dimasukkan dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Perilaku Etis Akuntan Masa Depan.

Uji t (Parsial)

Tabel 4.6

Uji t

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.818	.785		2.315	.022
	R_INTRA	.130	.086	.103	1.513	.132
	R_INTER	.052	.067	.052	.778	.438
	IC	.664	.295	.318	2.252	.025
	LOC	-.633	.300	-.300	-2.114	.036
	OEI	-.707	.300	-.399	-2.353	.020
	OER	1.042	.279	.628	3.733	.000

a. Dependent Variable: Perilaku etis akuntan masa depan

Sumber: Output SPSS.

Variabel Religiusitas intrapersonal memiliki nilai t sebesar 1,513 dengan signifikansi 0,132 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa Religiusitas intrapersonal tidak terbukti berpengaruh terhadap Perilaku Etis Akuntan masa depan. Dengan demikian hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan Religiusitas intrapersonal berpengaruh terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa depan ditolak.

Variabel Religiusitas interpersonal memiliki nilai t sebesar 0,778 dengan signifikansi 0,438 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa Religiusitas interpersonal tidak terbukti berpengaruh terhadap Perilaku Etis Akuntan masa depan. Dengan demikian hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan Religiusitas interpersonal berpengaruh terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa depan ditolak.

Variabel *Intellectual Capital* memiliki nilai t sebesar 2,252 dengan signifikansi 0,025 kurang dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* terbukti berpengaruh terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa Depan. Demikian hipotesis ketiga (H₃) yang menyatakan *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa Depan diterima.

Variabel *Locus of Control* memiliki nilai t sebesar -2,114 dengan signifikansi 0,36 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa *Locus of Control* terbukti berpengaruh terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa Depan. Demikian hipotesis keempat (H₄) yang menyatakan *Locus of Control* berpengaruh terhadap Perilaku Etis diterima.

Variabel Nilai-nilai etika idealisme memiliki nilai t sebesar -2,353 dengan signifikansi 0,020 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika idealisme terbukti berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan. Dengan demikian hipotesis kelima (H₅) yang menyatakan nilai-nilai etika idealisme berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan, diterima.

Variabel Nilai-nilai etikarelativisme memiliki nilai t sebesar 3,733 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa Nilai-nilai etikarelativisme berpengaruh terhadap Perilaku etis akuntan masa depan. Dengan demikian hipotesis keenam (H₆) yang menyatakan orientasi etikarelativisme berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan diterima.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh religiusitas, *intellectual capital*, *locus of control*, orientasi etis, terhadap perilaku etis akuntan masa depan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Religiusitas intrapersonal tidak berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang akuntan masa depan atau calon akuntan yang kurang memiliki iman yang kuat, kesadaran yang tinggi akan nilai-nilai kebaikan yang sudah ditetapkan oleh agama mereka masing-masing sehingga kurang berperilaku etis.
2. Religiusitas interpersonal tidak berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan. Hal ini bermakna bahwa kurangnya hubungan antara seseorang akuntan masa depan atau calon akuntan dengan orang lain dalam nilai-nilai agama sehingga berkurang juga pemahaman mereka untuk berperilaku etis.
3. *Intellectual capital* yang meliputi *human capital*, *customer capital*, *structural capital* berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang dengan pengetahuan atau *intellectual capital* yang tinggi akan lebih berperilaku etis daripada seseorang yang kurang mempunyai pengetahuan atau *intellectual capital*.
4. *Locus of control* berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang akuntan masa depan atau calon akuntan yang dapat mengendalikan peristiwa dalam dirinya atau bisa disebut *locus of control* mempengaruhi dalam berperilaku etis.
5. Nilai-nilai etika idealisme berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang akuntan masa depan atau calon akuntan yang memiliki sikap idealisme yang tinggi akan lebih berperilaku etis. Dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan pedoman atau aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan mengacu pada nilai moral yang berlaku tanpa melanggar sedikitpun nilai moral.
6. Nilai-nilai etika relativisme berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan masa depan. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang akuntan masa depan atau calon akuntan yang mempunyai sifat orientasi etis relativisme cenderung mentoleransi kesalahan atau perilaku tidak etis, sehingga mempunyai kemungkinan untuk melakukan perilaku yang tidak etis atau melanggar nilai moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Conroy, S. dan Emerson, T. 2004. "*Business Ethics and Religion: Religiosity as a Predictor of Ethical Awareness among Students*". *Journal of Business Ethics*
- Damayanthi, P.D.A. dan Gede Juliarsa. 2016. "*Pengaruh Idealisme, Relativisme, Pengetahuan, Gender, dan Umur pada Perilaku Tidak Etis Akuntan*" *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.15 (1), April 2016.
- Febrianty. 2010. "*Pengaruh Gender, Locus of Control, Intellectual Capital, dan Ethical Sensitivity terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi pada Perguruan Tinggi*" *jurnal Ilmiah Orasi Bisnis* edisi ke-IV November 2010.
- Ghozali, Imam.2006. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*". Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hastuti, S. 2007. "*Perilaku Etis Mahasiswa dan Dosen Ditinjau dari Faktor Individual Gender dan Locus of Control*." *Jurnal riset Ekonomi dan Bisnis* Volume 7.
- Hukumonline, 2001, "Skandal Penyuaan Pajak Kantor Akuntan KPMG Indonesia Digugat AS"<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3732/font-size1-lorff0000bskandal-penyuaan-pajakfontbr-kantor-akuntan-kpmg-indonesia-digugat-di-as> diakses pada tanggal 11 Agustus 2016
- Hutahahean M.B. dan Hanawati. 2015. "*Pengaruh Gender, Religiusitas, dan Prestasi Belajar terhadap Perilaku Etis Akuntan Masa Depan*" *E-Jurnal Akuntansi Trisakti* Vol. 2 (1)Februari 2015.

- Jones, W.A. 1990. "Student views of ethical issues: A situational analysis". *Journal of Business Ethics*.
- Rotter, J. 1966. "*Generalized Expextancies for Internal versus External Locus of Control Reinforcement*". *Pschology Monographs: Generaland Applied*. 80 Whole No.609.
- Sugiyono. 2012. "*Statistik untuk Penelitian*". Bandung : Alfabeta.
- Supomo Bambang. 2002. "*Metodologi Penelitian*". Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit BPFY Yogyakarta.
- Windiastuti, Eni dan Mahendra, Adhi. 2015. "*Pengaruh Orientasi Etis, Equity Sensitivity, dan Budaya Jawa terhadap Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta*" *Jurnal Nominal* vol 4 (1).

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *GROWTH OPPORTUNITY* TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2014

Setyaka Abi Saputra¹; Alp Yuwidianoro²
UPN "Veteran" Yogyakarta
E-mail: setyaka.abi@gmail.com¹; yuwialip@yahoo.co.id²

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of good corporate governance (GCG) and growth opportunity to share price of property companies listed on the Stock Exchange 2012-2014. Variable GCG consists of managerial ownership, institutional ownership, independent commissioner, the size of the board of directors, audit committee and variable growth opportunity. Collecting data using the research instrument in the form of financial statement data listed on the Stock Exchange. Analysis of data using multiple linear regression. These results indicate that institutional ownership and audit committee on stock prices, while managerial ownership, independent commissioner, board size and growth opportunity no effect on stock prices.

Keywords: *Good Corporate Governance, Growth Opportunity, Stock Price*

A. PENDAHULUAN

Harga saham merupakan cerminan dari kinerja atau nilai perusahaan dan juga cerminan kepercayaan investor. Jika kinerja perusahaan baik maka harga saham perusahaan akan meningkat. Namun, pihak manajemen sering memiliki tujuan dan kepentingan yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan tersebut mengakibatkan munculnya konflik yang disebut *agency conflict*. Konflik keagenan akan mengakibatkan adanya oportunistik manajemen yang akan mengakibatkan laba yang dilaporkan semu, dan menyebabkan nilai perusahaan berkurang dimasa yang akan datang (Herawati dalam Syafaatul, 2011).

Corporate governance hadir sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham (*shareholder*) atau pemilik perusahaan. *Corporate governance* oleh *The Indonesian Institute For Corporate Governance* didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Sedangkan kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham oleh institusi/perusahaan lain dari seluruh lembar saham perusahaan yang beredar.

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Dengan begitu, diharapkan komisaris independen dapat melakukan pengawasan yang efektif kepada manajemen. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam, Kep-29/PM/2004).

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar (PT Bursa Efek Indonesia, 2011).

Berkaitan dengan *Growth Opportunity* (kesempatan tumbuh), perusahaan yang memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi pada umumnya membutuhkan dana eksternal untuk melakukan ekspansi, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam penerapan *corporate governance* dalam rangka untuk menurunkan biaya modal (Darmawati, 2005) dalam Ramadhani (2008). Dalam penelitian ini, variabel kesempatan tumbuh dilihat dari nilai *Price Earning Ratio* (Chen, 2002). Perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan *property*, karena perusahaan *property* memiliki potensi *return* yang besar. Potensi ini muncul karena penduduk semakin bertambah, namun di sisi lain jumlah tanah yang ditempati tetap.

Penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* dan *growth opportunity* terhadap harga saham pada perusahaan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini merupakan rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani dan Yadhnyana (2011). Hasil penelitian menunjukkan variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, ukuran dewan direksi, berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Ramadhani (2009), Hasil penelitian menunjukkan skor CGPI sebagai variabel bebas tidak mempengaruhi harga saham. *Growth opportunity* (dilihat dari nilai PER) berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Manurung (2012), Hasil penelitian menunjukkan variabel profitabilitas dan struktur modal berpengaruh terhadap harga saham.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Harga Saham

Dalam *agency theory* dikatakan bahwa kepentingan antara manager selaku pengelola perusahaan dengan pemegang saham akan bertentangan. Menurut Jensen (1993) dalam faizal (2004), hipotesis pemusatan kepentingan (*convergence of interest hypothesis*) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manager, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Dengan semakin baiknya kinerja perusahaan maka diharapkan harga saham perusahaan juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan Christiawan dan Tarigan (2007) menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata kinerja perusahaan antara perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial dan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, meskipun rata-rata kinerja perusahaan dengan kepemilikan manajerial lebih baik. Dalam penelitian Aprina (2012) disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Harga Saham

Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Cornet et al (2006) dalam Ujjianto dan Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manager untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham Solomon (2004) dalam Sabrina (2010).

Namun, Aprina (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *Economic Value Added* (EVA).

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Harga Saham

Fungsi service menyatakan bahwa dewan komisaris dapat memberikan konsultasi atau nasehat manajemen dan direksi. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris diambil dari teori agensi. Dari persepektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Latranita, 2012).

Keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajer perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat (Carningsih, 2009). Penelitian Syafaatul (2011) menunjukkan bahwa komisaris independen mampu melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajer perusahaan. Dengan pengawasan yang lebih efektif maka kinerja perusahaan akan meningkat dan meningkatkan harga saham.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Harga Saham

Menurut Issaq (2009) dalam Susanti (2010) ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik. Dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan (Bodroastuti, 2009). Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan (Iqbal, 2007) dalam Husni (2010).

Pengaruh Komite Audit Terhadap Harga Saham

Komite audit memiliki tugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa perseroan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, perseroan telah menerapkan pengendalian internal, manajemen risiko dan *good corporate governance* dan fungsi audit eksternal dan audit internal telah berjalan dengan baik.

Ketika tugas tersebut berjalan dengan baik, maka manajemen tidak dapat melakukan tindak kecurangan, seperti pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat. Tanggung jawab komite audit yakni dalam pengawasan audit eksternal, mengawasi laporan keuangan serta mengamati sistem pengendalian internal sehingga dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan manajemen dalam bentuk manajemen laba (Sam'ani, 2008). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa komite audit dapat mengurangi aktivitas *earnings* manajemen yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan yang salah satunya adalah kualitas laba (Siallagan, 2006 dalam Syafaatul, 2013). Ketika kualitas pelaporan menjadi lebih baik, maka nilai perusahaan akan meningkat. Penelitian Ramdiani dan Yadnyana (2013) menyimpulkan bahwa secara statistik jumlah anggota komite audit berpengaruh pada harga saham.

Pengaruh Growth Opportunity Terhadap Harga Saham

Perusahaan yang memiliki *growth opportunities* diharapkan memberikan profitabilitas yang tinggi di masa datang, dan diharapkan laba lebih persisten. Penilaian pasar terhadap kemungkinan bertumbuh suatu perusahaan terlihat dari harga saham yang terbentuk sebagai suatu nilai ekspektasi terhadap manfaat masa depan yang akan diperolehnya. Pemegang saham akan memberikan respon yang lebih besar kepada perusahaan yang mempunyai bertumbuh yang tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan yang mempunyai kemungkinan bertumbuh yang tinggi akan memberikan manfaat yang tinggi di masa depan bagi investor (Scott, 2009 dalam Jalil, 2009).

Perusahaan dengan *growth opportunities* yang tinggi akan cenderung membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karenanya perusahaan akan mempertahankan earningnya untuk diinvestasikan kembali pada perusahaan dan pada waktu bersamaan perusahaan diharapkan akan tetap mengandalkan pendanaan melalui utang yang lebih besar (Baskin, 1989 dalam Rachmatika, 2006).

PER (*Price Earning Ratio*) menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. PER yang menjadi ukuran penting sebagai landasan pertimbangan seorang investor membeli saham sebuah perusahaan merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham dengan *Earning Per Share* (EPS) dari saham yang bersangkutan (Jalil, 1997). PER yang tinggi menunjukkan bahwa investor bersedia untuk membayar dengan harga saham premium untuk perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan tumbuh atau berinvestasi yang tinggi pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Siamat, 2013).

Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *Good Corporate Governance dan Growth Opportunity* terhadap harga saham pada perusahaan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014.

B. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menganalisis secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit dan *growth opportunity*, terhadap harga saham. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis-hipotesis yang telah diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan menurut metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang akurat.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* (BEI 2012-2014). Berdasarkan metode pengambilan sampel yang menggunakan *purposive sampling*, diperoleh 58 perusahaan *property* dan diperoleh 13 perusahaan *property* yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah perusahaan *property* yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-2014, menyediakan laporan keuangan tahunan yang lengkap secara berturut-turut selama tahun 2012-2014, perusahaan *property* yang memiliki data mengenai *corporate governance* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan direksi dan komite audit).

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variable yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variable independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah harga saham. Menurut Hendri dan Leonardo (2008) harga saham dapat dilihat dari *opendan closing*. *Open*, harga saham dilihat dari harga awal pembukaan pasar di pasar modal, sedangkan *closing* harga saham dilihat dari harga penutupan di pasar modal. Dalam penelitian ini menggunakan *closing price* karena menunjukkan harga yang diharapkan dari saham pada setiap akhir tahun pertama dari saham hari ini sebagaimana dilihat oleh investor tertentu pada waktu melakukan analisis (Hendri, 2009).

Variabel Independen

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel Independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Kepemilikan manajerial
Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari pihak manajemen yang secara efektif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Variabel ini diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh manajer dibagi dengan jumlah saham beredar. (Darwis, 2012).
2. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan insitusional adalah persentase kepemilikan saham oleh institusi/perusahaan lain dari seluruh lembar saham perusahaan yang beredar. Dalam penelitian ini di ukur dengan jumlah saham yang dimiliki institusi/perusahaan lain dibagi dengan seluruh lembar saham yang beredar. (Darwis, 2012)
3. Komisaris Independen
Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris perusahaan yang berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Variabel ini diukur dengan jumlah komisaris yang berasal dari pihak independen dibagi dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris suatu perusahaan. (Carningsih, 2009)
4. Ukuran Dewan Direksi
Ukuran dewan direksi adalah jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran dewan direksi dikur dengan menghitung anggota dewan direksi pada suatu perusahaan.
5. Komite Audit
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertugas untuk membantu dewan komisaris. Komite audit diukur dengan menghitung anggota komite audit yang dimiliki perusahaan.
6. *Growth Opportunity*.
Dalam penelitian ini, variabel *Growth Opportunity* di lihat dari *Per Earning Ratio* (PER). PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. PER yang menjadi ukuran penting sebagai landasan pertimbangan seorang investor membeli saham sebuah perusahaan merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham dengan *Earning Per Share* (EPS) dari saham yang bersangkutan. PER yang tinggi menunjukkan bahwa investor bersedia untuk membayar dengan harga saham premium untuk perusahaan. (Husnan, 2001)

Model dan Teknik Analisis Data.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier. Dan serangkaian uji asumsi klasik dilakukan terhadap keseluruhan model regresi. Analisis regresi berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Fungsi lain dari analisis regresi digunakan sebagai alat untuk menunjukkan adanya arah hubungan positif atau negatif antara variabel independen kepada variabel dependen (Ghozali, 2009 dalam Utama, 2013) .Hubungan antara variabel independen dengan harga saham, diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y = harga saham

$\beta_1 - \beta_4$ = koefisien regresi

X_1 = kepemilikan manajerial

X_2 = kepemilikan institusional

X_3 = komisaris Independen

- X_4 = ukuran dewan direksi
- X_5 = komite Audit
- X_6 = *Growth opportunity*
- a = Konstanta
- e = Error

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEP_MAN	39	,0003	,5688	,074028	,1442211
KEP_INTI	39	,192	,904	,56952	,229288
KOM_INDEPEN	39	1	7	1,97	1,581
UKU_DEWAN	39	3	9	5,36	1,871
KOM_AUDIT	39	3	4	3,08	,270
GROWTH_OPP	39	-24,8	92,8	16,285	20,0588
HRGA_SAHAM	39	80	15300	1555,33	2926,565
Valid N (listwise)	39				

Sumber: Output SPSS 21

Table 2 merupakan hasil statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian. Berdasarkan output dari statistik deskriptif diketahui jumlah pengamatan yang dilakukan sebanyak 39 pengamatan. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel harga saham mempunyai minimum tertinggi yaitu sebesar 80 dan variabel *growth opportunity* mempunyai minimum terendah yaitu sebesar -24,8. Variabel harga saham memiliki nilai maximum tertinggi yaitu sebesar 15300 dan variabel kepemilikan institusional memiliki nilai maximum terendah yaitu sebesar 0,904.

Dari tabel statistik deskriptif juga memberikan informasi bahwa variabel harga saham mempunyai *mean* tertinggi yaitu sebesar 1555,33 dan variabel kepemilikan manjerial memiliki nilai *mean* terendah yaitu sebesar 0,074024. Sementara itu variabel harga saham memiliki standar deviasi tertinggi yaitu sebesar 2926,565 dan variabel kepemilikan manjerial memiliki Standar Deviasi terendah yaitu sebesar 0,1442211.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang berasal dari sample berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan pengujian *One-sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian regresi ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1643,48789507
Most Extreme Differences	Absolute	,177
	Positive	,158
	Negative	-,177
Kolmogorov-Smirnov Z		1,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,175
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Output SPSS 21

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai residual sudah berdistribusi normal. Hal ini sesuai dengan syarat dari uji *Kolmogrov Smirnov* yang menunjukkan hasil 0,175 lebih besar dari 0,05.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Uji *Durbin-Watson* (*DW test*). Data bebas dari autokorelasi apabila nilai DW diantara d_U dan $4-d_U$ ($d_U < DW < 4-d_U$). Hasil pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,000 ^a	,000	-,188	955,07671064	1,9461

a. Predictors: (Constant), Growth_Opp, Kep_Man, Kom_Audit, Uku_Dewan, Kep_Inti, Kom_Indepen

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber : Output SPSS 20

Dari hasil uji *Durbin-Watson* menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,9461. Dengan jumlah sample (n) sebesar 39 dan jumlah variabel independen (k) 6 didapatkan nilai d_U sebesar 1,8587. Sehingga DW berada diantara d_U dan $4-d_U$ ($1,8587 < 1,9461 < 2,1413$). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya autokorelasi pada data penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Untuk mengujinya dapat diuji dengan uji multikolinieritas dan dapat dilihat nilai VIF. Model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai VIF yang ada pada hasil pengujian harus lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$). Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a			T	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized	Coefficients				Tolerance	VIF
	Standardized	Coefficients					
B	Std. Error	Beta					
(Constant)	-22936,169	8792,787		-2,609	,014		
1 KEP_MAN	-3657,702	3176,372	-,180	-1,152	,258	,402	2,486
KEP_INTI	173,359	1883,676	,014	,092	,927	,452	2,210
KOM_INDP	-5,235	534,436	-,003	-,010	,992	,118	8,457
UK_DEWAN	-331,880	197,012	-,212	-1,685		,621	1,609
KOM_AUDIT	8584,054	3140,278	,792	2,734		,117	8,514
GRWTH_OPP	2,453	15,744	,017	,156		,846	1,182

a. Dependent Variable: HARGA_SAHAM

Dari hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel yang nilai VIF yang lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak terkena gejala multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha=0,05$) atau $sig > 0.05$ maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized	Coefficients			
	Standardized	Coefficients			
B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-8131,243	4689,014		-1,734	,093
KEP_MAN	-3156,847	1693,894	-,374	-1,864	,072
KEP_INTI	-330,247	1004,526	-,062	-,329	,744
1 KOM_INDEPEN	-140,403	285,004	-,182	-,493	,626
UKU_DEWAN	-172,679	105,062	-,265	-1,644	,110
KOM_AUDIT	3543,272	1674,646	,785	2,116	,052
GROWTH_OPP	-3,596	8,396	-,059	-,428	,671

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 6, bahwa semua variabel independen yang diteliti mempunyai Signifikansi yang lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen diteliti bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*adjusted R2*) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi atau *R square* (R^2) adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,827 ^a	,685	,626	1790,949
A. Predictors: (Constant), Growth_Opp, Kep_Man, Kom_Audit, Uku_Dewan, Kep_Inti, Kom_Indepen				
B. Dependent Variable: Harga_Saham				

Dari tabel diatas di dapat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,626 atau 62%. Angka tersebut memberikan arti bahwa harga saham dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris lindependen, ukuran dewan direksi, komite audit dan *growth opportunity* sebesar 62% sedangkan 38% selebihnya di pengaruhi oleh variabel-variabel diluar penelitian ini.

Uji F

Uji statistik F adalah pengujian untuk menguji secara bersama –sama atau secara simultan variabel X terhadap Y. Jika signifikan $F < \alpha$ (0,05) maka variabel X berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y. Namun sebaliknya, jika $F > \alpha$ (0,05) maka tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama pada variabel X terhadap Y.

Tabel 8
Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	222821819,139	6	37136969,857	11,578	,000 ^b
	Residual	102639993,528	32	3207499,798		
	Total	325461812,667	38			

a. Dependent Variable: HARGA_SAHAM

b. Predictors: (Constant), GROWTH_OPP, KEP_MAN, KOM_AUDIT, UKU_DEWAN, KEP_INTI, KOM_INDEPEN

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,000 ini menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dari nilai α sebesar 0.05 ($\text{sig} < \alpha$). Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji t atau uji secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika $t \text{ hitung} < \alpha$ (0,05) maka terdapat pengaruh secara parsial variabel X terhadap Y. Namun jika $t \text{ hitung} > \alpha$ (0,05) maka tidak terdapat pengaruh secara parsial pada variabel X terhadap Y.

Tabel 9
Uji t

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-22936,169	8792,787		
KEP_MAN	-3657,702	3176,372	-,180	-1,152	,258
KEP_INTI	173,359	1883,676	,014	,092	,927
1 KOM_INDEPEN	-5,235	534,436	-,003	-,010	,992
UKU_DEWAN	-331,880	197,012	-,212	-1,685	,102
KOM_AUDIT	8584,054	3140,278	,792	2,734	,010
GROWTH OPP	2,453	15,744	,017	,156	,877

Dependent Variable: Harga_Saham

Tabel diatas menunjukkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda. Makna dari model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Variabel kepemilikan manjerial menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,152 dan memiliki signifikansi sebesar 0,258. Dikarenakan nilai signifikansi dari kepemilikan manajerial (-1,152) lebih besar dari nilai α (0,05) hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap harga saham dan Hipotesis satu (**H₁**) ditolak.
- b. Variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,092 dan memiliki signifikansi sebesar 0,927. Dikarenakan nilai signifikansi dari kepemilikan keluarga (0,927) lebih besar dari nilai α (0,05) hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap harga saham dan Hipotesis dua (**H₂**) ditolak.
- c. Variabel komisar independen menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,010 dan memiliki signifikansi sebesar 0,992. Dikarenakan nilai signifikansi dari kepemilikan institusional (0,992) lebih besar dari nilai α (0,05) hal ini dapat disimpulkan bahwa komiaris independen tidak berpengaruh terhadap harga saham dan Hipotesis tiga (**H₃**) ditolak.
- d. Variabel ukuran dewan direksi menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,685 dan memiliki signifikansi sebesar 0,102. Dikarenakan nilai signifikansi dari kepemilikan institusional (0,102) lebih besar dari nilai α (0,05) hal ini dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap harga saham dan Hipotesis empat (**H₄**) ditolak.

- e. Variabel komite audit menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,734 dan memiliki signifikansi sebesar 0,010. Dikarenakan nilai signifikansi dari komite audit (0,010) lebih kecil dari nilai α (0,05) hal ini dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap harga saham dan Hipotesis lima (H_5) **diterima**.
- f. Variabel *growth opportunity* menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,156 dan memiliki signifikansi sebesar 0,877. Dikarenakan nilai signifikansi dari *growth opportunity* (0,877) lebih besar dari nilai α (0,05) hal ini dapat disimpulkan bahwa *growth opportunity* tidak berpengaruh terhadap harga saham dan Hipotesis enam (H_6) **ditolak**.

D. PEMBAHASAN

1. Hasil pengujian untuk kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap harga saham, hal ini ditunjukkan dengan nilai sig sebesar (0,258 > 0,05) dan jika dilihat dari nilai statistik deskriptif pada variabel kepemilikan manajerial, nilai minimum sebesar 0,0003, maksimum 0,5688 dan rata-rata sebesar 0,074028. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Syafaatul (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap harga saham hal ini disebabkan karena kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan belum dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga pasar tidak bereaksi terhadap peristiwa penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Hal ini terjadi karena tingkat kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan relatif kecil (Syafaatul, 2011). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rebecca dan Veronica (2011).
2. Hasil pengujian untuk variabel kepemilikan institusional menunjukkan bahwa variabel kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional lebih besar dari nilai α (0,927 > 0,05) dan jika dilihat dari nilai statistik deskriptif pada variabel kepemilikan institusional, nilai minimum sebesar 0,192, maksimum 0,904 dan rata-rata sebesar 0,56952. Hal ini disebabkan karena investor institusi dibedakan menjadi dua yaitu investor pasif dan aktif. Investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dengan keputusan manajemen. Sedangkan investor aktif, mereka aktif terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan (Suranta dan Mudiastuty, 2005 dalam Syafaatul, 2011). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, kemungkinan terjadi karena investor institusi dalam perusahaan sampel adalah investor pasif. Sehingga masih terdapat tindakan manajemen yang merugikan perusahaan atau berlawanan dengan yang diinginkan oleh pemegang saham karena pemegang saham institusional tidak terlalu ingin terlibat dengan keputusan manajemen.
3. Hasil pengujian untuk variabel komisaris independen menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel komisaris independen lebih besar dari nilai α (0,992 > 0,05) dan jika dilihat dari nilai statistik deskriptif pada variabel komisaris independen, nilai minimum sebesar 1, maksimum 7 dan rata-rata sebesar 1,97. Hal ini disebabkan karena penambahan dewan komisaris independen dimungkinkan hanya untuk memenuhi ketentuan formal sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak maksimal (Ramdiani dan Yadnyana, 2011) serta proporsi dewan komisaris independen yang besar belum mampu menunjukkan perannya dalam memonitor manajemen dalam menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajemen (Carningsih, 2009 dalam Ramdiyani dan Yadnyana, 2011). Ramdiyani dan Yadnyana, (2011) juga menyatakan bahwa Proporsi dewan komisaris independen sebagai salah satu dalam rangka penerapan good corporate governance belum mampu meningkatkan nilai perusahaan terutama dalam peningkatan harga saham. Hal ini bisa dikarenakan penerapan yang masih baru sehingga pelaksanaannya belum optimal. Tidak berpengaruhnya proporsi dewan komisaris independen terhadap harga saham perusahaan memerlukan penyesuaian yang cukup

lama sehingga dampaknya kemungkinan akan dirasakan dalam jangka panjang (Sefiana, 2009).

4. Hasil pengujian untuk ukuran dewan direksi menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel ukuran dewan direksi lebih besar dari nilai α ($0,102 > 0,05$). Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang (Bodroastuti, 2009). Dewan direksi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah dewan direksi. Jumlah dewan direksi yang lebih sedikit akan menciptakan komunikasi yang lebih baik di antara para direktur, koordinasi yang lebih efektif, dan tindakan yang lebih cepat dalam mengatasi masalah. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa dewan direksi yang diukur dengan menggunakan jumlah dewan direksi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Wulandari (2006) dan Romano *et al.* (2012). Menurut Wulandari (2006) jumlah dewan direksi yang optimal tergantung masing-masing perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi tidak menjamin keefektifan dalam menjalankan tanggung jawabnya mengelola perusahaan.
5. Hasil pengujian untuk variabel komite audit menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel komite audit lebih besar dari nilai α ($0,010 < 0,05$) dan jika dilihat dari nilai statistik deskriptif pada variabel komite audit, nilai minimum sebesar 3, maksimum 4 dan rata-rata sebesar 3,08. Hasil penelitian ini sesuai Hal ini disebabkan karena Komite audit umumnya berasal dari pihak eksternal yang bertugas mengkaji perencanaan audit. Tanggung jawab komite audit yakni dalam pengawasan audit eksternal, mengawasi laporan keuangan serta mengamati sistem pengendalian internal sehingga dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan manajemen dalam bentuk manajemen laba (Sam'ani, 2008). Dengan demikian kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik sehingga kepercayaan investor akan perusahaan meningkat.
6. Hasil pengujian untuk variabel *growth opportunity* menunjukkan bahwa variabel *growth opportunity* tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional lebih besar dari nilai α ($0,877 > 0,05$). Ketidaksesuaian ini mungkin terjadi karena perusahaan yang diteliti berbeda, penelitian ini pada perusahaan *real estate* sedangkan penelitian Ramadhani (2009) pada perusahaan yang terdaftar di CGPI. Akan tetapi penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Dian (2006), dalam penelitiannya menghasilkan bahwa *growth opportunity* tidak berpengaruh pada harga saham. Alasan *growth opportunity* tidak berpengaruh karena return saham lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu selama periode pengamatan tahun 2001-2004. Oleh karena itu, investor menjadi ragu-ragu untuk menanamkan aktivitas investasinya kedalam operasional perusahaan.

D. SIMPULAN

Simpulan

Berdasar hasil dan analisis data dan pembahasan, simpulan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil pengujian untuk kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap harga saham.
2. Hasil pengujian untuk variabel kepemilikan institusional menunjukkan bahwa variabel kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap harga saham.
3. Hasil pengujian untuk variabel komisaris independen menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap harga saham.
4. Hasil pengujian untuk ukuran dewan direksi menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap harga saham.

5. Hasil pengujian untuk variabel komite audit menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap harga saham.
6. Hasil pengujian untuk variabel *growth opportunity* menunjukkan bahwa variabel *growth opportunity* tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Saran

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan peneliti yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya dan *stakeholder*, yaitu sebagai berikut:

1. Akademis
 - a. Peneliti selanjutnya disarankan menambah sampel penelitian dengan jenis industri yang lain, karena dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan *real estate dan property* yang terdaftar di BEI
 - b. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar dapat menghasilkan penelitian yang baik.
2. *Stakeholder*
 - a. Untuk *stakeholder* agar memperhatikan komposisi *Good Corporate Governance*, karena *Good Corporate Governance* akan berbanding positif terhadap harga saham sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan.
 - b. Untuk *stakeholder* agar memperhatikan *growth opportunity* karena tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan, tetapi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi lebih banyak membutuhkan dana di masa depan, sehingga manajemen harus lebih mampu memprediksi kesempatan pertumbuhan perusahaan dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprina, Desi. 2012. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan yang Diukur Melalui Economic Value Added*. Jakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi: Universitas Guna darma. (<http://www.gunadara.ac.id>)
- Bodroastuti, Tri. 2009. Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* *Jurnal Ilmu Ekonomi ASET (Online)*, Vol. 11, No. 2
- Darwis, Herman. 2012. *Manajemen Laba Terhadap Nilai perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Pemodasi*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Volume 16.
- Christiawan, Julius Yogi dan Tarigan, Josua. 2007. *Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja, dan Nilai perusahaan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 9.
- Faizal. 2004 *Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar.
- Herawati, Vinolia. 2008. *Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variabel*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 10 No. 2
- Husni, Rautharul. 2010. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010)*. Jakarta.
- Jalil, A, dkk. 1997. *Metode Penelitian*. Universitas Terbuka, Jakarta.

- Kismono, Gugup. 2001. *Pengantar Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE
- Manurung, N R, Hedyta. *Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar Dalam Indeks Kompas 100 BEI Periode 2009-2012*.
- Prastowo, DwidanYuliaty, Rifki. 2002. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- PT. Bursa Efek Indonesia. *Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Good Corporate Governance)*. 2011. Jakarta.
- Ramadhani, Fitra. 2009. *Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Growth Opportunity pada Harga Saham Perusahaan Dalam Daftar CGPI yang Dirilis IICG Periode 1005-2008*. Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma.
- Ramdiani, N dan Yadnyana, K. 2011. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan pada Harga Saham Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011*. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana.
- Romano, Giulia. *et al* . 2012. Corporate Governance and Performance in Italian Banking Groups. *Paper to be Presented at the International Conference "Corporate Governance and Regulation: Outlining New Horizons for Theory and Practice"*. Pisa, Italy, Sept 19,2012.
- Sabrina, Ira, Anindhita. 2010. *Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Sawidji, Widoatmojo, 1996. *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, Jakarta :Jurnalindo Aksan Grafika.
- Siamat, Dahlan. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Susanti, Rika. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Public yang Listed Tahun 2005-2008)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Syafaatul, Kurnia. 2011. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Harga Saham*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Ujiyanto, Muh. ArifdanPramuka, Bambang 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Labadan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go public Sektor Manufaktur)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Weston J. Fred dan Eugene F. Brigham. 1993. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Jilid 2, Edisi Kesembilan, Terjemahan oleh Alfonsus Sirait, Jakarta: Erlangga.
- Wulandari, Eddy Retno. 2011. *Good Corporate Governance: Konsep, Prinsip, dan Praktik* . Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia.
- www.idx.co.id
- www.google.com
- mariyunproperty.com, 10 Mei 2013
- www.propertiindonesia.co.id, Januari 2013

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2014)

Kurnia Armiaty¹; Ruserlistyani²

UPN "Veteran" Yogyakarta

kurnia.armiaty25@gmail.com¹; herlissantosa@yahoo.com²

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of local government characteristics (size of government, the wealth of the region, the level of dependence on central government, capital expenditures) of the performance of local government. The local government performance is measured by the results of Performance Evaluation Local Government (EKPPD) which is the main source of local government organizers report (LPPD) in 2011-2014. This research sample was 36 with a population of all districts / cities in East Borneo from the year of 2011-2014 using purposive sampling. The research results of multiple regression test using SPSS 20 application showed that the level of dependence on central government and capital expenditure do not affect the performance of local government. While the size of government and the wealth of the region proven do.

Keywords: EKPPD, LPPD, characteristics of local government.

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1996-1997 Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Setelah itu terjadi pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan kewenangan tersebut bertujuan agar kelak pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik dengan pengelolaan keuangannya sendiri dan diharapkan dapat mengembangkan potensi daerah.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow, Ganulin, Haddad, dan Williamson, 1998). Wood (1998) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Peraturan Pemerintah No. 6/28 menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi

tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

Pengelolaan APBD di berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Timur masih belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata penyerapan belanja daerah pemerintah daerah se-Kalimantan Timur masih rendah, pembiayaan pembangunan di daerah ini masih tergantung dari pendapatan transfer, selain itu penyerapan belanja modal belum diimbangi dengan pengelolaan aset secara baik. Menurut Cahyono (2013), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Kalimantan yang memiliki sumber daya yang cukup banyak untuk menghasilkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang masih belum optimal, dimana pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan kepada masyarakat memerlukan sejumlah dana untuk membiayai program-program dan juga kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Tertinggalnya pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur menjadi suatu fenomena jika dibandingkan dengan dengan Provinsi Kalimantan Selatan padahal dari kekayaan Sumber Daya Alam, Provinsi Kalimantan Timur jauh lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) menunjukkan adanya pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah daerah seluruh Indonesia tahun anggaran 2007. Untuk belanja daerah dan temuan audit terbukti tidak berpengaruh, sedangkan penelitian dari Sudarsana dan Shiddiq (2013) yang menambahkan belanja modal karena belanja modal terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan belanja modal tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Sedangkan untuk temuan audit BPK dan variabel tingkat kekayaan daerah terbukti berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2012. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Lulus (2013), menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, jumlah belanja daerah, ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa. Sedangkan untuk ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Selain itu Sedyaningsih dan Zaky (2015) menyimpulkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja Pemda Sulawesi Selatan. Sedangkan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda Sulawesi Selatan.

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan kerja antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agen*. Di satu sisi, *agen* secara moral bertanggungjawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi.

Berdasarkan *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *asymmetry information* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *asymmetry information* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012).

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Transparansi sangat penting dalam akuntabilitas. Transparansi digambarkan sebagai “ketersediaan informasi kepada publik atas transaksi pemerintah dan proses pengambilan keputusan, merupakan dasar untuk manajemen di semua negara demokrasi”. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik (Rahmanurrajjid, 2008).

Otonomi Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah dipahami sebagai penyerahan kewenangan beberapa urusan pusat ke daerah sehingga daerah memiliki kapasitas untuk mengatur pemerintahan yang lebih efektif di daerah (Yasin, 2011). Demi terwujudnya tujuan dari otonomi daerah dan untuk perwujudan *Good Corporate Governance*, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah daerahnya, baik dari sisi keuangannya maupun dari tata kelolanya. Oleh karena itu, setiap Kepala Daerah wajib memberikan laporan kinerja dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat setiap tahunnya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah (PP No. 3 Tahun 2007). LPPD digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998 dalam Sumarjo, 2010). Salah satu evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama. EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja. LPPD digunakan sebagai sumber informasi utama EKPPD yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Hasil dari EKPPD tersebut berupa laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri. Pada pasal 32 Permendagri No.73/2009 disebutkan bahwa pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional, disusun berdasarkan peringkat, skor dan status. Berdasarkan ini maka didapatkan Skor Kinerja untuk masing-masing Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur menggunakan skor kinerja pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari Laporan Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan LPPD.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah yang besar akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang selanjutnya akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kerjanya.

Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) dana alokasi umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lainnya. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah.

Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang diprosikan melalui Skor Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan utama dari program kerja Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena

itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemerintah Daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemerintah Daerah tersebut.

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian Indrawan (2013); Mustikarini & Fitriyani (2012) dan Kusumawadani (2012) yang menyatakan bahwa ukuran (*size*) daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah baik kinerja keuangan maupun kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya.

H_1 : Ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kekayaan Pemerintah Daerah diprosikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pengertian PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 15 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Daerah berasal dari pendapatan daerah (PAD), dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemerintah Daerah tersebut. Hartoyo (2014) menyatakan bahwa jika PAD dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan dan potensi daerah maka akan dapat menumbuhkan daya saing kompetitif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumarjo (2010) bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Uraian tersebut didukung dengan penelitian Indrawan (2013), Mustikarini dan Fitriyani (2012) Juliawati *et al* (2012), Nurdin (2015) dan Sudarsana (2013) yang mengatakan berpengaruh terhadap kinerja baik kinerja keuangan, kinerja akuntabilitas maupun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan penjelasan di atas mengenai konsep dan penelitian terdahulu tingkat kekayaan daerah, sehingga hipotesis penelitian ini adalah :

H_2 : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan (DAU) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat (DAU) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) dana alokasi umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya sehingga tiap-tiap daerah memperoleh DAU yang berbeda-beda sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing guna meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Semakin besarnya penerimaan DAU oleh suatu daerah, maka Pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini memotivasi Pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari Pemerintah Pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemerintah daerah kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemerintah daerah juga semakin meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Mustikarini & Fitriyani (2012), Sumarjo (2010), Nurdin (2015) dan Julitawati *et al* (2012) menghasilkan pengaruh atas DAU terhadap kinerja pemerintah daerah. Hipotesis penelitian ini yaitu :

H_3 : Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

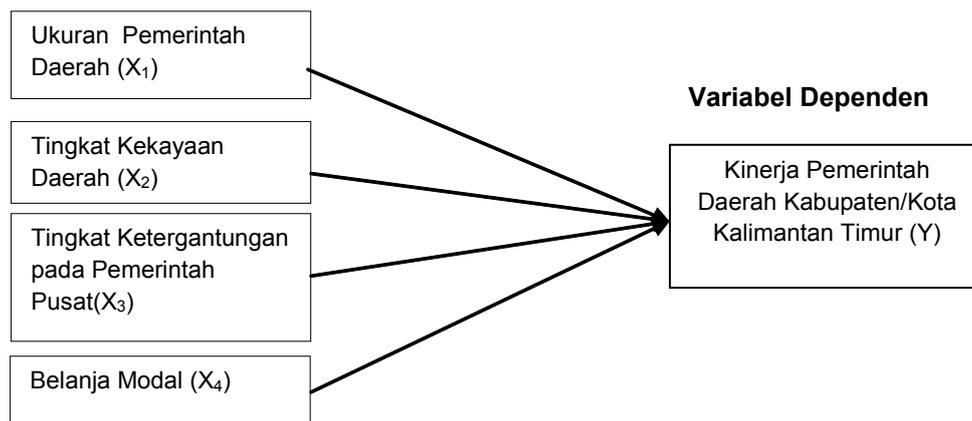
Menurut Halim (2008) , belanja modal merupakan investasi yang berupa pengadaan/pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Belanja modal sangat terkait dengan pembangunan infrastruktur daerah yang digunakan oleh masyarakat. Logikanya semakin besar belanja modal, maka akan semakin banyak infrastruktur yang terbangun yang artinya pelayanan kepada masyarakat akan semakin bagus, pertumbuhan semakin meningkat, dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat Setiawan (2011). Dengan kata lain, kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya pun akan semakin baik.

Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun, sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja akan menjadi lebih baik. Hal ini didukung oleh penelitian Mustikarini &Fitriasari (2012) dan Nugroho & Rohman (2012) menghasilkan pengaruh atas belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₄ : Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Kerangka Konseptual

Variabel Independen



Gambar 1.1
 Kerangka konseptual
 Pengaruh X₁, X₂, X₃, X₄ terhadap Y

B. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan skor kinerja pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari Laporan Evaluasi Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan LPPD tahun 2012-2014. Dalam Pasal 5 Permendagri No.73/2009 LPPD digunakan sebagai sumber informasi utama EKPPD yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Menurut Mardiasmo (2002) IKK merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik bersifat finansial maupun nonfinansial untuk

melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Aspek tataran pengambilan kebijakan pada pengukuran indeks capaian kinerja dengan menilai IKK meliputi:

- a. Ketentraman dan ketertiban umum daerah
- b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah
- c. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah
- d. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD
- e. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
- f. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
- g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan
- h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah
- i. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan bagi hasil
- j. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah
- k. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD
- l. Pengelolaan potensi daerah dan terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012), pemberian kriteria skor penilaian yaitu Sangat Tinggi diberi nilai 4, Tinggi diberi nilai 3, Sedang diberi nilai 2, dan Rendah diberi nilai 1. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian *portofolio secara desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran (*size*) dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi (Damanpour, 1991 dalam Suharjanto, *et al*, 2011). Ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset seperti pada penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012). Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing Pemerintah Daerah berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut, maka data total aset perlu di Ln kan. Maka pada penelitian ini variabel ukuran daerah dihitung dengan rumus :

$$\text{Ukuran Daerah} = \text{Ln} (\text{total aset})$$

Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah menggambarkan pendapatan yang bersumber dari kekayaan daerah itu sendiri, dan dapat menunjukkan seberapa mandiri daerah tersebut dalam membiayai pengeluarannya. Penelitian ini menggunakan tingkat kekayaan daerah yang dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah yang diperoleh dengan total pendapatan. Seperti pada penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012). Maka pada penelitian ini variabel tingkat kekayaan daerah dihitung dengan rumus :

$$\text{Tingkat kekayaan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Tingkat Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat

Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membantu daerah membiayai pengeluaran rutinnya. Besarnya DAU tiap daerah dapat diukur dengan menggunakan presentase DAU yang diterima dengan jumlah total pendapatan daerahnya. Pada penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya dana alokasi umum dibandingkan dengan total pendapatan. Maka pada penelitian ini variabel tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Belanja Modal

Realisasi belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah mencerminkan seberapa besar porsi belanja daerah yang digunakan untuk belanja modal. Hal ini sesuai dengan pernyataan DJPK (2013) yang menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Pada penelitan Sedyaningsih dan Zaky (2015) belanja modal diukur dengan realisasi belanja modal dibandingkan dengan total belanja. Maka pada penelitian ini variabel belanja modal diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 14 tetapi, karena pada bulan Oktober tahun 2012 sebanyak 4 Kabupaten dan 1 Kota bergabung ke Provinsi Kalimantan Utara sehingga peneliti hanya menggunakan 9 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Maka, total populasi pada penelitian ini berjumlah 36, yang didapatkan dari 6 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang dikalikan dengan 4 tahun periode penelitian (2011-2014). Dengan menggunakan metode pengambilan sampel ini diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah:

- a. Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur yang telah menyampaikan LPPD tahun 2011-2014.
- b. Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mendapatkan skor dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2014.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit tahun 2011-2014.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan berupa empat variabel dependen, yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat kekaayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja modal. Serta satu variabel dependen yaitu Skor Kinerja Pemerintah Daerah.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$(SKOR)_{it} = \beta_0 + \beta_1 LN_TA_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 BM_{it} + \beta_5 TEM_{it} + \varepsilon$$

Keterangan :

- LN_TA : ukuran daerah
 PAD : tingkat kekayaan daerah
 DAU : tingkat ketergantungan dengan pusat
 BM : belanja modal
 Temuan : temuan audit BPK
 SKOR : skor kinerja Pemerintah Daerah
 : error term

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota. Data LKPD diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan melalui www.bpk.go.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah se-Kalimantan Timur tahun 2011-2014. Dalam penelitian ini menggunakan 9 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 Kabupaten dan 3 Kota yang menyediakan data dan informasi secara lengkap terkait kinerja pemerintah daerah dalam LKPD-nya pada periode 2011-2014.

Tabel 3.1
 Hasil Penentuan Sampel

Keterangan	Jumlah
Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur yang telah menyampaikan LPPD tahun anggaran 2011-2014.	9
Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mendapatkan skor dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2014.	9
Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit tahun 2011-2014.	9
Jumlah Observasi (9 x 4 Tahun)	36

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif penelitian ini memberikan gambaran atau deskripsi data sampel yang terdiri dari jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari variabel-

variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu skor hasil evaluasi LPPD (yang selanjutnya disebut Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota) dan Variabel Independen terdiri dari Ukuran Daerah, Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Pusat, dan Belanja Modal.

Tabel 3.2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	,0229	,5834	,097856	,1107473
DAU	36	,0002	,2660	,150161	,0725748
BM	36	,1905	1,2828	,424185	,1668373
Y	36	2,1570	3,2349	2,843144	,2929314
LN_TA	36	26,5126	30,7817	29,398364	,8281630
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2016

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual atau variabel pengganggu telah terdistribusi secara normal pada model regresi. Residual dinyatakan normal jika nilai probabilitasnya > 0,05 dan jika sebaliknya < 0,05 maka residual tidak terdistribusi secara normal (Ghozali,2011). Hasil yang ditunjukkan menggunakan uji *One-Sampel Kolmogorov-Z* bahwa nilai *asympt. sig. (2-tailed)* sebesar 0,857 lebih besar dari taraf nilai signifikansi 0.05, sehingga disimpulkan bahwa hasil dari uji normalitas menunjukkan nilai residual terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	36	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,23690037
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,071
	Negative	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		,606
Asymp. Sig. (2-tailed)		,857
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2016

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linier diantara variabel-variabel independen dengan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel independen dengan model regresi. Pengujian Multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai *Tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* masing-masing $\geq 0,10$ atau nilai $VIF \leq 10$ menunjukkan tidak adanya multikorelasi.

Tabel 3.4
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity	
	Coefficients		Coefficients			Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-,466	1,615		-,289	,775		
LN_TA	,111	,054	,314	2,039	,050	,890	1,124
1 PAD	1,151	,431	,435	2,671	,012	,795	1,257
DAU	-,130	,679	-,032	-,192	,849	,746	1,341
BM	-,112	,268	-,064	-,419	,678	,905	1,105

a. Dependent Variable: Y

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali,2011). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah dengan pengujian terhadap nilai *Durbin watson* (*Uji DW*). Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW terletak diantara nilai du (1,7245) dan 4-du (4-1,7245).

Tabel 3.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,588 ^a	,346	,262	,2517207	1,265
a. Predictors: (Constant), BM, LN_TA, PAD, DAU					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2016

Nilai d sebesar 1,265. Sedangkan nilai dU yang diperoleh dari tabel *Durbin Watson* sebesar 1,7245. Dengan demikian diperoleh bahwa nilai d berada diantara dU dan 4-dU ($1,7245 < 1,265 < 2,2755$). Dengan demikian menunjukkan bahwa model regresi tersebut belum bebas dari autokorelasi maka dilakukan uji *Run test*.

Tabel 3.6
Hasil Uji Run test

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	,00234
Cases < Test Value	
18	
Cases >= Test Value	
18	
Total Cases	36
Number of Runs	16
Z	-,845
Asymp. Sig. (2-tailed)	,398
a. Median	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2016

Dalam pengujian *run test* dapat diketahui bahwa nilai signifikannya 0,398 yang berarti diatas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah disebut homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas, artinya *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yaitu tetap. Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan, jika signifikansi masing-masing variabel independen > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2009).

Hasil regresi yang ditunjukkan pada Tabel 3.7, dari masing-masing variabel independen > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 3.7
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,259	,932		,278	,783
LN_TA	,000	,031	,001	,005	,996
1 PAD	,058	,249	,046	,235	,816
DAU	-,528	,392	-,271	-1,349	,187
BM	-,007	,155	-,008	-,043	,966

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2016

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan tabel atas dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{SKOR} = -0,466 + 0,111\text{LN_TA} + 1,151\text{PAD} - 0,130\text{DAU} - 0,112\text{BM} + e$$

Tabel 3.8
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,466	1,615		-,289	,775
LN_TA	,111	,054	,314	2,039	,050
1 PAD	1,151	,431	,435	2,671	,012
DAU	-,130	,679	-,032	-,192	,849
BM	-,112	,268	-,064	-,419	,678

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2016

Uji Hipotesis

Uji F (simultan)

Karena nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$ berarti secara simultan (bersama-sama) variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja modal yang dimasukkan dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Skor Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.9
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1 Regression	1,039	4	,260	4,100	,009 ^b	
Residual	1,964	31	,063			
Total	3,003	35				

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), BM, LN_TA, PAD, DAU

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2016

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,588 ^a	,346	,262	,2517207

a. Predictors: (Constant), BM, LN_TA, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2016

Koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,262. Hal ini berarti bahwa sebesar 26,2% kinerja keuangan yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan belanja modal. Sedangkan sisanya sebesar 73,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Uji t (parsial).

Tabel 3.11
Hasil Uji t

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,466	1,615		-,289	,775
LN_TA	,111	,054	,314	2,039	,050
1 PAD	1,151	,431	,435	2,671	,012
DAU	-,130	,679	-,032	-,192	,849
BM	-,112	,268	-,064	-,419	,678

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2016

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang diprosikan melalui Skor Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Diketahui bahwa variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah, nilai *t-sig* pada variabel ukuran daerah adalah 0,050 sama dengan 0,05, hal ini menunjukkan ukuran daerah berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota, maka hipotesis 1 diterima.

Tujuan utama program kerja Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sedangkan untuk mendukung pelayanan yang baik untuk masyarakat harus didukung oleh aset yang baik juga. Maka dari itu diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan jumlah aset maka akan semakin tinggi skor kinerja pemda kabupaten/kota. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indrawan (2013) dan Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah, nilai *t-sig* pada variabel ukuran daerah adalah 0,012 hal ini menunjukkan tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota, maka hipotesis 2 diterima.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada layanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumardjo, 2010). Selain itu pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah dengan ukuran dan kekayaan asli daerah (PAD) yang besar seharusnya memiliki nilai skor kinerja yang tinggi. Jika Pemerintah Daerah dengan ukuran dan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar ternyata memiliki nilai skor yang rendah maka Pemerintah Daerah tersebut harus melakukan evaluasi atas kinerjanya bahwasanya kinerjanya berarti tidak lebih baik dibanding Pemerintah Daerah dengan ukuran pendapatan asli daerah (PAD) yang memang lebih kecil. Pemerintah Daerah dengan ukuran dan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan masyarakat.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat (DAU) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Variabel tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah, nilai *t-sig* pada variabel tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah 0,849 hal ini menunjukkan tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota, maka hipotesis 3 ditolak. Sesuai dengan analisis hasil, berarti kenaikan dana alokasi umum tidak mempengaruhi probabilitas kenaikan skor kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rendah, sedang dan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dana alokasi umum dalam meningkatkan skor kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika dilihat secara parsial.

Tidak berpengaruhnya tingkat ketergantungan dengan pusat terhadap skor kinerja, kemungkinan dikarenakan Menteri Dalam Negeri tidak hanya mempertimbangkan sisi kinerja keuangan saja, sehingga tidak ada keterkaitan antara besarnya dana alokasi umum (DAU) terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam penentuan skor kinerja, yang merupakan hasil dari EKPPD, tidak hanya aspek kinerja keuangan saja namun juga kinerja nonkeuangan Pemerintah Daerah sehingga hasilnya tidak berpengaruh. Selain itu ada kemungkinan lain adalah Pemerintah Daerah tidak transparan dalam melaporkan penggunaan dana alokasi umum (DAU), serta penggunaan dana alokasi umum yang tidak tepat sasaran. Dalam penggunaan DAU, Pemerintah Daerah seharusnya menggunakan DAU sesuai dengan kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan dan lain lain sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik.

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) dan Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Daerah pusat yang diukur dengan besarnya dana alokasi umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11, diketahui bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah, nilai *t-sig* pada variabel belanja modal adalah 0,678 hal ini menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota, maka hipotesis 4 ditolak.

Dilihat dari arah hasil penelitian ini, arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini kemungkinan dikarenakan adanya asimetri informasi antara pihak agen atau pemerintah yang mempunyai akses langsung terhadap belanja modal dengan pihak principal atau masyarakat. Adanya asimetri informasi inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen (pemerintah). Selain itu, banyaknya kasus terhadap belanja modal yang menyebabkan nilai barang tidak sesuai dengan spesifikasinya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Nugroho dan Rohman (2012) yang menyimpulkan bahwa Belanja Modal Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Keterbatasan

1. Penelitian ini pengujiannya hanya pada pemerintah daerah tingkat Provinsi Kalimantan Timur saja, oleh karena itu penelitian selanjutnya bisa menggunakan Pemerintah Daerah di provinsi yang ada di Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan periode waktu 2011-2014 saja. Diharapkan peneliti selanjutnya bisa menggunakan periode waktu terbaru, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dan memberikan kesimpulan yang lebih baik.

Saran

1. Bagi pemerintah daerah seharusnya lebih mampu mengoptimalkan, mengelola dan melaporkan sumber-sumber keuangan daerahnya dengan baik dan benar sesuai yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat meningkatkan serta menyejahterakan masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama disarankan untuk menggunakan variabel dependen yang lain yaitu rasio kemandirian daerah atau menggunakan variabel independen yang lain seperti misalnya tingkat pertumbuhan, leverage, jumlah penduduk, jumlah pegawai dan jumlah fasilitas umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. 2015. Laporan Hasil Pengawasan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014. Diunduh pada tanggal 26 Mei 2016. www.bpk.go.id
- Cahyono, Heru. 2013. *Rasionalitas Tuntutan Provinsi Kalimantan Timur untuk Otonomi Khusus*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Chow, C.W., Ganulin, D., Haddad, K. and Williamson, J. 1998. *The balanced scorecard: a potent tool for energizing and focusing health-care organization management*. *Journal of Health-care Management*.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah*. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta.
- Indrawan, M. Yusuf. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Jurnal of Financial Economics*, p305-360
- Juliawati, Ebit, Darwanis dan Jalaluddin. 2012 "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana*. Universitas Syiah Kuala.
- Kusumawardani, Media. 2012. "Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia". *Accounting Analysis Journal 1*. Universitas Negeri Semarang.
- Marfiana, Nandya dan Lulus Kurniasih. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.
- Nurdin, Fandy. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya.
- Lesmana, Sigit I. 2010. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia". *Tesis*. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mustikarini, Widya Astuti; Fitriyani Debby. (2012). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Universitas Indonesia.
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. 2012. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)". *Dipenegoro Journal of Accounting*. Universitas Dipenegoro.
- Nurdin, Fandy. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri.
- Rahmanurrajjid, Amin. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah*. Tesis. Pasca Sarjana. Universitas Dipenegoro. Semarang.
- Sedyaningsih, Peni dan Zaky, Ahmad. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012)". *Brawijaya Journal of Accounting*. Universitas Brawijaya.
- Setiawan, Wahyu. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Dipenegoro. Semarang.
- Sudarsana, Hafidh S. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temaun Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)". *Dipenegoro Journal of Accounting*. Semarang.

- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Wood, L. 1998. *Local Government Dollars & Sense* (Rancho Palos Verdes, CA: Training Shoppe)
- Yasin, Akhmad. 2011. Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Perekonomian Daerah. Dalam *Risiko Fiskal Daerah*. Era Adicitra Intermedia. Solo

PERANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SORONG TAHUN ANGGARAN 2009-2014

Selvina Asatila Murafer¹; Kunti Sunaryo²
evi.murafer@gmail.com¹; kunti_73@yahoo.co.id²
UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the contribution of Local Income and Local Retribution on the revenue of Local Income in Sorong Municipality and examine whether or not the collection of Local Tax in Sorong Municipality was effective. The study was conducted using a descriptive method. Data in the study were secondary data on Local Income in Sorong Municipality from 2009 to 2014. The data used were originated from the Subdepartment of Local Income in Sorong Municipality. The data were analyzed by an analysis of the contribution of Local Tax on Local Income, effectiveness analysis, and elasticity analysis. The results of the study showed that first, during six years of 2009-2014, the contribution of local tax and local retribution on the Local Income of Sorong Municipality was relatively high. Second, in the same period of 2009-2014, the collection of local tax was effective or exceeded the determined target. Third, however the collection of local retribution in 2009 decreased less than 100% or did not reach the target determined by Local Government of Sorong Municipality, but in the period of 2010-2014 it was effective as indicated by a realization of the revenue of local retribution that exceeded the determined target.

Keywords: Contribution, Effectiveness, elasticity Local Tax, Local Retribution, Local Income

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, paradigma pembangunan di Indonesia berubah menjadi paradigma daerah membangun yang didekati dengan prinsip: (i) pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; (ii) asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antar desa dan kota; (iii) pemberdayaan masyarakat serta; (iv) pendayagunaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup.

Sementara ada pihak yang memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah akan ditentukan oleh adanya 5 (lima) kondisi strategis yang meliputi Suwardyono, dkk. (2000): (i) *Self Regular Power*, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat di daerahnya; (ii) *Self Modifying Power*, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah termasuk terobosan inovatif ke arah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah; (iii) *Creating Local Political Support*, dalam arti penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya, baik pada posisi kepala daerah sebagai Eksekutif maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan Legislatif; (iv) *Managing Financial Resources*, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; serta (v) *Developing Brain Power*, dalam arti membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan selalu bertumpu pada kapabilitas dalam menyelesaikan masalah.

Dari paparan di atas jelaslah bahwa faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sorong. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kota Sorong dipandang sebagai langkah riil yang relatif mudah dilakukan karena terkait dengan sumber-sumber keuangan yang secara nyata ada di daerah. Sebagai kota yang pertama di wilayah Provinsi Papua Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong sangat banyak memiliki potensi yang bisa dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Baik pajak daerah maupun retribusi daerah, keduanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan, Mardiasmo (2002).

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah dalam Mardiasmo (2002), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Sifat iuran adalah wajib, Tidak memperoleh imbalan langsung yang seimbang, Bersifat memaksa, Sebagai sumber pembiayaan.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) adalah sebagai berikut: Fungsi *Budgeter* Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan. Fungsi Mengatur pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembebasan pajak kepada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Jenis-jenis Pajak Daerah, menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak

Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari: (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; (2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; (4) Pajak air permukaan; (5) Pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan di bidang ekonomi.

Objek Retribusi Daerah. Objek Retribusi Daerah terdiri dari: (1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan; (2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/nikmati pelayanan jasa yang bersangkutan; dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah, Mardiasmo (2003).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut pendapat Halim dalam Sulistyawan (2007), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah: (1) Hasil pajak daerah; (2) Hasil retribusi daerah; (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penelitian Terdahulu pernah dilakukan oleh Siregar (2009) tentang analisis tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak dari tahun 2003-2007 adalah tinggi, sedangkan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah menunjukkan angka penurunan yang berarti.

Riduansyah (2003) tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus pemerintah daerah kota Bogor). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun.

Widyaningsih (2009) tentang analisis potensi penerimaan pajak reklame kota Bandung periode tahun 2001-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak reklame dari tahun 2001 hingga tahun 2002 berada di bawah target dan realisasi penerimaan pajak reklame. Sedangkan potensi penerimaan pajak reklame tahun 2003 hingga tahun 2007 lebih tinggi dari target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

Penelitian ini dilakukan di Kota Sorong yang meneliti tentang Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siregar (2009), Riduansyah (2003) dan Widiyaningsih (2009). Kota Sorong yang merupakan satu-satunya kota yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat, dimekarkan pada 28 Februari 2000 dari Kabupaten Sorong. Kota Sorong merupakan daerah berkembang yang dibuktikan dengan peningkatan pertumbuhan dan pembangunan yang signifikan pada sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor hiburan, sektor perhotelan dan pusat perbelanjaan yang ikut menyumbang atau sebagai sumber pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang peranan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong Tahun Anggaran 2009-2014. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Sorong dan data yang digunakan untuk 6 tahun, mulai tahun 2009 sampai tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong; (2) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Sorong selama ini sudah efektif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain Sugiyono (2010). Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Sorong dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan, dapat berupa catatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah serta data terkait dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini meliputi :

Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui peranan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut : (Dispenda Kota Sorong)

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Realisasi PD}}{\text{PAD}} \times 100 \%$$

Keterangan :

PD : Pajak Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Realisasi RD}}{\text{PAD}} \times 100 \%$$

Keterangan :

RD : Retribusi Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Ukuran yang dipakai untuk mengetahui tinggi rendahnya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD yaitu kemampuan keuangan daerah yang digunakan oleh Handoko (2013) :

Kontribusi	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40.10 – 50.00%	Baik
30.10 – 40.00%	Cukup Baik
20.10 – 30.00%	Sedang
10.10 – 20.00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (Dalam Handok, 2013)

Analisis Efektivitas

Untuk melihat apakah pungutan pajak dan retribusi daerah di Kota Sorong sudah Efektif atau belum maka digunakan rumus: Halim (2004).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PD}}{\text{Target/Potensi PD}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi RD}}{\text{Target/Potensi RD}}$$

Standar efektivitas yang dalam hubungannya dengan perpajakan, khususnya pajak dan retribusi daerah standar efektivitasnya adalah :

Prosentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri. Kepmendagri. No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Bisma dan Susanto, 2010)

Analisis Elastisitas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan pajak dan retribusi daerah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya Suparmoko (2004), rumusnya:

Rumus:

a.
$$E = \frac{\% \Delta \text{PD} / \% \Delta \text{RD}}{\% \Delta \text{PDRB}}$$

b.
$$E = \frac{\% \Delta \text{PD} / \% \Delta \text{RD}}{\% \Delta \text{INFLASI}}$$

Adapun untuk mengetahui tingkat perubahan (Δ) adalah:

$$\Delta Y = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

Keterangan :

ΔY = Pertumbuhan pajak daerah

Y_t = Pajakdaerahpada tahun t

Y_{t-1} = Pajak daerah

Berdasarkan perhitungan dan rumus di atas apabila hasil perhitungan di peroleh sebagai berikut :

- Apabila $E < 1$ maka elastisitas yang artinya apabila variabel tersebut mengalami perubahan besar 1% dan faktor lainnya di anggap tetap maka penerimaan pajak daerah lebih dari satu.
- Apabila $E > 1$ berarti inelastis yang artinya bahwa variabel independent tersebut berubah sebesar 1% dan faktor-faktor lainnya di anggap tetap maka pajak daerah kurang dari satu.
- Apabila $E = 1$ berarti bersifat unitari artinya tidak ada perubahan.

C. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi Pajak Daerah	Kontribusi Retribusi Daerah
2009	3.910.187.236	1.718.057.500	23.041.205.403	16,97 %	7,46 %
2010	4.450.109.772	5.581.577.970	18.086.233.892	31,53 %	39,54 %
2011	9.259.567.134	12.427.454.519	25.142.232.199	36,83 %	49,43 %
2012	11.493.050.866	17.184.705.152	33.838.557.340	42,21%	50,78 %
2013	14.244.736.024	29.543.174.000	56.277.722.000	25,31 %	52,50 %
2014	26.082.507.855	53.396.163.026	100.020.642.577	26,08 %	53,39 %
Rata-rata Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2009-2014				30,82%	42,18%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong relatif sama selama tahun 2009-2014 yaitu 30,82% dan 42,18%.

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2009-2014 sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Sorong. Kontribusi pajak daerah mulai mengalami peningkatan yang signifikan terhadap PAD Kota Sorong pada tahun 2010 yaitu sebesar 31,53% kenaikan kontribusi ini selain disebabkan karena adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah tetapi juga karena realisasi penerimaan PAD pada tahun 2010 yang mengalami penurunan sebesar 18.086,23 miliar rupiah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 23.041,20 miliar rupiah pada tahun 2009. Penurunan realisasi PAD ini disebabkan karena menurunnya penerimaan pada beberapa sektor PAD, seperti sektor Lain-lain PAD yang Sah yang pada tahun 2009 sebesar 6.388,41 miliar rupiah menurun pada tahun 2010 menjadi 4.363,00 miliar

rupiah. Selain itu kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu 25,31% dan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,77% menjadi 26,08% pada tahun 2014. Penurunan kontribusi PAD disebabkan oleh meningkatnya realisasi penerimaan PAD pada tahun 2013 sebesar 56.277,72 miliar rupiah yang berasal dari realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar 29.543,17 miliar rupiah, lain-lain PAD yang sah sebesar 10.927,33 miliar rupiah, sedangkan penerimaan pajak daerah sebesar 14.244,73 miliar rupiah sehingga jika dibandingkan dengan sektor penerimaan PAD yang lain yaitu retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah kontribusi PAD dari pajak daerah relatif lebih kecil tetapi jika dilihat dari realisasi penerimaan pada tahun 2013 sudah mengalami peningkatan dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan telah memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sorong.

Begitupun dengan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2009 sudah efektif walaupun belum memenuhi target 100% yang ditetapkan yaitu 94,14%, dan memberikan kontribusi yang sangat kurang bagi PAD yaitu 7,46%. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pemungutan disetiap sektor retribusi daerah seperti pelayanan persampahan yang ditargetkan 300,00 juta rupiah dan hanya terealisasi sebesar 281,77 juta rupiah pada tahun 2009, sektor retribusi parkir juga mengalami hal yang sama yaitu tidak memenuhi target penerimaan sebesar 450,00 juta rupiah dan hanya terealisasi sebesar 382,80 juta rupiah dan sektor retribusi pasar (Klademak, Boswesen dan Doom) yang hanya terealisasi sebesar 116,36 juta rupiah dari target sebesar 150,00 juta rupiah. Tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi daerah disetiap sektor penerimaan retribusi daerah inilah yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah di Kota Sorong pada tahun 2009.

Realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2010 mulai mengalami peningkatan dengan tercapainya realisasi penerimaan sebesar 5.581,57 miliar rupiah melebihi dari target yang ditetapkan dengan prosentase yaitu 178,21% dengan tingkat kontribusi bagi PAD Kota Sorong sebesar 39,54%. Kenaikan ini didukung dengan meningkatnya penerimaan disetiap sektor retribusi daerah dan juga kinerja Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah yang semakin baik walaupun potensi untuk mendapatkan realisasi penerimaan retribusi daerah masih sangat tinggi tetapi kinerja Pemerintah Kota Sorong dalam usahanya meningkatkan penerimaan realisasi retribusi daerah pada tahun 2010 patut diapresiasi. Selanjutnya penerimaan realisasi retribusi daerah pada tahun 2011 terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2014, bahkan penerimaan realisasi retribusi daerah pada tahun 2013 dan 2014 merupakan yang tertinggi kontribusinya bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong yaitu pada tahun 2013 menyumbang 52,50% dan 53,39% pada tahun 2014 bagi PAD Kota Sorong.

Penerimaan realisasi retribusi daerah tahun 2014 sebesar 53.396,16 miliar rupiah dengan prosentase kontribusi bagi PAD sebesar 53,39% merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan penerimaan dari sektor PAD lainnya. Tercapainya realisasi penerimaan ini tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Kota Sorong dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah dengan melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan sistem kinerja yang semakin baik maupun meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Sorong.

Analisis Efektivitas

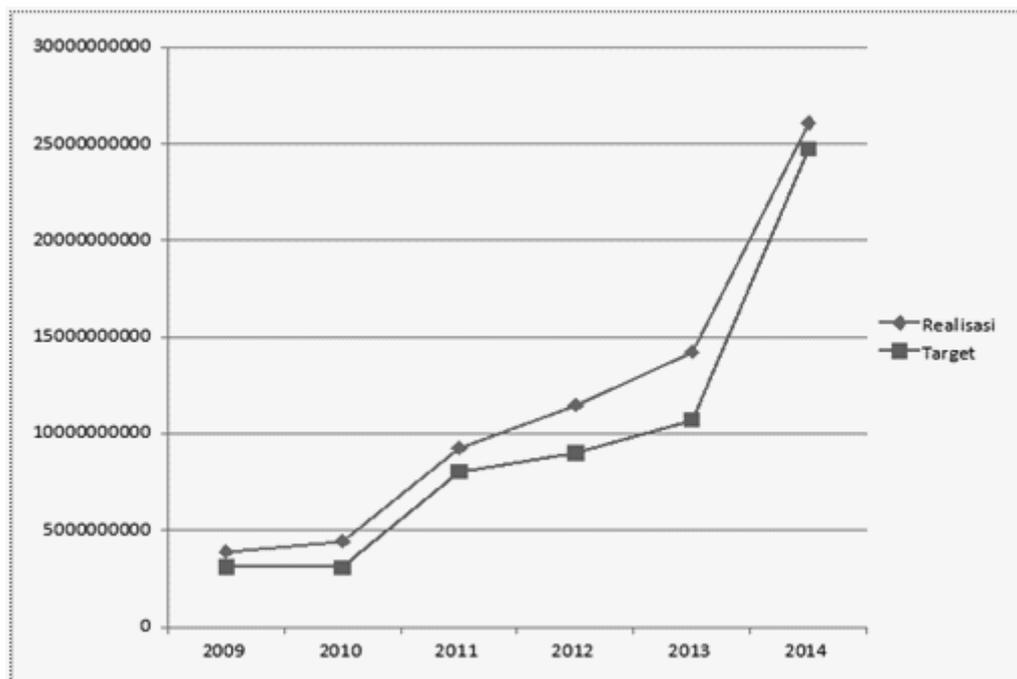
Untuk melihat apakah pajak daerah di Kota Sorong sudah efektif atau belum dapat dilihat pada tabel di sebagai berikut.

Tabel 3.2
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi	Target	Persentase
2009	3.910.187.236	3.100.000.000	126,14%
2010	4.450.109.772	3.080.000.000	144,48%
2011	9.259.567.134	8.050.000.000	115,03%
2012	11.493.050.866	9.020.000.000	127,42%
2013	14.244.736.024	10.720.000.000	132,88 %
2014	26.082.507.855	24.750.000.000	105,38 %
Rata-rata Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah			125,22%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pungutan pajak daerah untuk tahun 2009 sudah efektif, bahkan melebihi target yang ditetapkan pemerintah Kota Sorong. Sedangkan pungutan pajak daerah untuk tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 sudah efektif karena realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 100%, hal ini berarti pemerintah Kota Sorong bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk kedepannya pemerintah Kota Sorong harus bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah agar efektivitas pajak ini dapat lebih efektif bahkan sangat efektif agar penerimaannya senantiasa dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

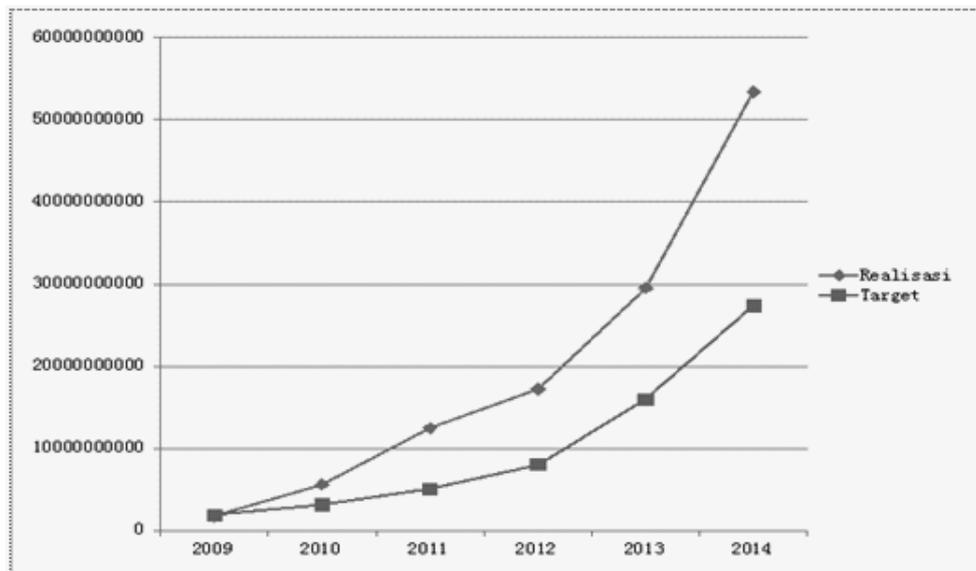
Untuk melihat retribusi daerah di Kota Sorong sudah efektif atau belum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi	Target	Persentase
2009	1.718.057.500	1.825.000.000	94,14%
2010	5.581.577.970	3.132.000.000	178,21%
2011	12.427.454.519	5.010.000.000	248,05%
2012	17.184.705.152	8.030.000.000	214,01%
2013	29.543.174.000	15.930.000.000	185,46%
2014	53.396.163.026	27.333.131.000	195,35 %
Rata-rata Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah			170,06%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pungutan retribusi daerah di Kota Sorong sudah efektif. Hal ini terlihat dari nilai prosentase yang terus mengalami kenaikan selama tahun 2009-2014, walaupun pada tahun 2009 kurang dari 100% atau tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sorong, tetapi Pemerintah Kota Sorong dapat merealisasikan penerimaan retribusi daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2010-2014 atau dengan kata lain rata-rata penerimaan atau realisaasi retribusi daerah padatahun 2009-2014 sudah efektif. Oleh karena itu, untuk kedepannya Pemerintah Kota Sorong harus bisa mempertahankan keefektifan pemungutan retribusi daerah ini agar penerimaannya senantiasa dapat lebih ditingkatkan pada setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2 Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah

Analisis Elastisitas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa besar perubahan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pajak daerah dan retribusi daerah adalah faktor PDRB dan inflasi.

a. Faktor PDRB

Perubahan pajak reklame berdasarkan faktor PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Perubahan Pajak Daerah Berdasarkan Faktor PDRB

Tahun	Pajak Daerah	% Δ Pajak Daerah	PDRB (Juta Rupiah)	% Δ PDRB	E
2009	3.910.187.236		4.776.401,64		
2010	4.450.109.772	13,81	4.996.506,58	4,61	3,00
2011	9.259.567.134	108,08	5.573.006,34	11,54	9,37
2012	11.493.050.866	24,12	6.438.533,10	15,53	1,56
2013	14.244.736.024	23,94	7.658.730,37	18,95	1,26
2014	26.082.507.855	83,10	9.259.209,86	21,37	3,89
Rata-rata Elastisitas Perubahan Pajak Daerah Berdasarkan Faktor PDRB					3,82

Sumber: data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, terlihat bahwa tahun 2010 perubahan pajak daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar 3,00 > 1, artinya apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah lebih dari 1 (satu).

Tahun 2011 perubahan pajak daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar 9,37 > 1, artinya apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah lebih dari 1 (satu).

Tahun 2012, perubahan pajak daerah elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar sebesar 1,56 > 1, artinya apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah lebih dari 1 (satu).

Tahun 2013, perubahan pajak daerah elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar sebesar 1,26 > 1, artinya apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah lebih dari 1 (satu).

Tahun 2014, perubahan pajak daerah elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar sebesar 3,89 > 1, artinya apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah lebih dari 1 (satu).

Sedangkan perubahan retribusi daerah berdasarkan faktor PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Perubahan Retribusi Daerah Berdasarkan Faktor PDRB

Tahun	Retribusi Daerah	% Δ Retribusi Daerah	PDRB (Juta Rupiah)	% Δ PDRB	E
2009	1.718.057.500		4.776.401,64		
2010	5.581.577.970	224,88	4.996.506,58	4,61	48,78
2011	12.427.454.519	122,65	5.573.006,34	11,54	10,63
2012	17.184.705.152	38,28	6.438.533,10	15,53	2,46
2013	29.543.174.000	311,20	7.658.730,37	18,95	16,42
2014	53.396.163.026	80,74	9.259.209,86	21,37	3,78
Rata-rata Elastisitas Perubahan Retribusi Daerah Berdasarkan Faktor PDRB					16,41

Sumber: data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, terlihat bahwa tahun 2010 perubahan retribusi daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $48,78 > 1$, artinya apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan retribusi daerah lebih dari 1 (satu).

Tahun 2011, perubahan retribusi daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $10,65 > 1$, artinya apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan retribusi daerah lebih dari 1 (satu). Tahun 2012, perubahan retribusi daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $2,46 > 1$, artinya apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan retribusi daerah lebih dari 1 (satu). Tahun 2013, perubahan retribusi daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $16,42 > 1$, artinya apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan retribusi daerah lebih dari 1 (satu). Tahun 2014, perubahan retribusi daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $3,78 > 1$, artinya apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan retribusi daerah lebih dari 1 (satu).

b. Faktor Inflasi

Perubahan pajak daerah berdasarkan faktor inflasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Perubahan Pajak Daerah Berdasarkan Faktor Inflasi

Tahun	Pajak Daerah	%Δ Pajak Daerah	Inflasi	%Δ Inflasi	E
2009	3.910.187.236		2,61		
2010	4.450.109.772	13,81	2,97	13,79	1,00
2011	9.259.567.134	108,08	3,59	20,88	5,18
2012	11.493.050.866	24,12	5,12	20,88	1,16
2013	14.244.736.024	23,94	7,93	54,88	0,44
2014	26.082.507.855	83,10	6,83	-13,87	-5,99
<i>Rata-rata Elastisitas Perubahan Pajak Daerah Berdasarkan Faktor Inflasi</i>					0,36

Sumber: data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, terlihat bahwa tahun 2010 perubahan pajak daerah bersifat unitari, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $1=1$, artinya apabila laju inflasi mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah sama dengan 1 (satu) atau tidak ada perubahan.

Tahun 2011, perubahan pajak daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $5,18 > 1$, artinya apabila laju inflasi mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah lebih dari 1 (satu).

Tahun 2012, perubahan pajak daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $1,16 > 1$, artinya apabila laju inflasi mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah lebih dari 1 (satu).

Tahun 2013, perubahan pajak daerah bersifat inelastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $0,44 < 1$, artinya apabila laju inflasi mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah kurang dari 1 (satu).

Tahun 2013, perubahan pajak daerah bersifat inelastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $-5,99 < 1$, artinya apabila laju inflasi mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah kurang dari 1 (satu).

Sedangkan perubahan retribusi daerah berdasarkan faktor inflasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Perubahan Retribusi Daerah Berdasarkan Faktor Inflasi

Tahun	Retribusi Daerah	%Δ Retribusi Daerah	Inflasi	%Δ Inflasi	E
2009	1.718.057.500		2,61		
2010	5.581.577.970	224,88	2,97	13,79	16,31
2011	12.427.454.519	122,65	3,59	20,88	5,87
2012	17.184.705.152	38,28	5,12	42,61	0,90
2013	29.543.174.000	311,20	7,93	54,88	5,67
2014	53.396.163.026	80,74	6,83	-13,87	-5,82
Rata-rata Elastisitas Perubahan Retribusi Daerah Berdasarkan Faktor Inflasi					4,59

Sumber: data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, terlihat bahwa tahun 2010 perubahan retribusi daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $16,31 > 1$, artinya apabila laju inflasi mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan retribusi daerah lebih dari 1 (satu).

Tahun 2011, perubahan retribusi daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $5,87 > 1$, artinya apabila laju inflasi mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan retribusi daerah lebih dari 1 (satu).

Tahun 2012, perubahan retribusi daerah bersifat inelastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $0,90 < 1$, artinya apabila laju inflasi mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan retribusi daerah kurang dari 1 (satu).

Tahun 2013, perubahan retribusi daerah bersifat elastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $5,67 > 1$, artinya apabila laju inflasi mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan retribusi daerah lebih dari 1 (satu).

Tahun 2014, perubahan retribusi daerah bersifat inelastis, yang ditunjukkan oleh nilai E sebesar $-5,82 < 1$, artinya apabila laju inflasi mengalami perubahan sebesar 1% dan faktor lainnya dianggap tetap maka penerimaan retribusi daerah kurang dari 1 (satu).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- 1) Selama enam tahun yaitu tahun 2009-2014, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah relatif tinggi karena terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- 2) Selama enam tahun yaitu tahun 2009-2014, pemungutan pajak daerah sudah efektif (sudah melebihi target yang ditetapkan), dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya.
- 3) Selama tahun 2010-2014 pemungutan retribusi daerah di Kota Sorong sudah efektif yang ditunjukkan oleh realisasi penerimaan retribusi daerah yang melebihi target yang ditetapkan. *Walaupun pada tahun 2009 hanya 94,14 % atau tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sorong.*

Saran

Melihat masih ada rendahnya kontribusi penerimaan dari beberapa komponen pajak daerah dan retribusi daerah bagi Pemerintah Kota Sorong, maka diperlukan adanya usaha dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Sorong sehingga penerimaan dan kontribusi, baik terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah

dapat ditingkatkan lagi. Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD terkait dengan sektor pajak dan retribusi daerah adalah:

- 1) meningkatkan pengawasan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap penunggak pajak dan juga bagi wajib pajak yang membayar kurang dari yang seharusnya dibayarkan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Sorong yang tertera dalam Bab XVIII Pasal 65 tentang Ketentuan Pidana, sehingga hal ini dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran bagi para wajib pajak yang dengan sengaja menunggak atau tidak membayar dan kurang bayar. Selain itu peningkatan kedisiplinan dari segenap aparatur pemerintah daerah yang berurusan dengan keuangan daerah juga harus ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pengawasan yang lebih ketat sehingga dapat menjamin kedisiplinan dan kejujuran aparat pelaksana yang mengurus PAD.
- 2) pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PDRB dari semua sektor karena hal itu akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Suwardyono, Eko W, dkk, 2000, *Kesiapan Jawa Timur Dalam Proses Desentralisasi Fiskal, Suatu Kajian Pendahuluan*, Paper dipresentasikan dalam Lokakarya Nasional *Strengthening the University Capacity to Support Decentralization*, Jakarta, 5 – 10 Juni.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi: Yogyakarta.
- _____. 2003, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik: Akunansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Riduansyah, Mohammad, 2003, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*, *Jurnal* Vol.7 No.2 Desember Tahun 2003.
- Handoko Sri P, 2013, *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*, *Jurnal Ilmiah Magister Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak*.
- Sulistiyawan, Eko, 2007, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera*, (www.google.com).
- Siregar, Amri, 2009, *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara*, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- UU No. 33 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Widyaningsih, Aristanti, 2009, *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode Tahun 2001 – 2007*, *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol.4 No.1, 2009:1-12.

Bisma I, D.G., Hery, S. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007*, *GoneC Swara* Edisi Khusus Vol. 4 No.3. hal 75 – 86.

Suparmoko. (2004). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit Andi: Yogyakarta.

PENGARUH AKUNTABILITAS, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kota Palangka Raya)

Elga Arya Putra¹; Windyastuti²
eghamagat@gmail.com¹; windyastuti.wijaya@gamil.com²
UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

Title: The Influence of accountability, clarity of the budgets, budget participation and internal control system on performance of managerial work units of the device regions (Study On The Government Of The City Of Palangka Raya). This research aims to know the factors that affect the performance of managerial Work Unit of the device of the City of Palangka Raya, where the factors that effect are accountability, clarity of the budget targets, budget participation and internal control system. The type of this research is classified quantitative research. The population in this research are 20 SKPD that consist of structural officials who are head of the Education Finance, Head of Sub Section and the secretary on the SKPD in City of Palangka Raya. The sampling technique used is purposive sampling. Data collection method is spreading of the questionnaire. Data analysis techniques use multiple regression analysis. The results of this research are the accountability of the clarity of the budget targets budget participation and internal control system affect the performance of the managerial Work Unit of the device of the city of Palangka Raya. SKPD of City of Palangka Raya are expected to be able to maintain the improvement of the quality of performance that has been reached by looking at the implementation of accountability. The clarity of the budget and the budget participation and should be reviewed related to the internal control system, because in general, the error in the internal control system are to be found such as the process of report preparation is not in accordance with the terms and a breach of the terms of legislation.

Key Words: *managerial performance work unit of the device regions, accountability, clarity of the budget targets, budget participation and internal control system.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah suatu lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dimana sumber kepercayaannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat ke pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik. Sebagai salah satu bagian dari organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Saat ini sektor publik khususnya mengalami perkembangan pemerintahan yang cukup pesat dimana telah adanya desentralisasi yang menuntut setiap daerah untuk mampu mengelola daerahnya sendiri begitu pula dalam penyusunan anggaran.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan untuk pemerintah

daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik partisipatoris (Mardiasmo, 2006).

Dengan adanya pendelegasian wewenang, maka disertai pula dengan pelimpahan tanggungjawab tiap-tiap satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan anggaran serta pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban ini dinamakan dengan akuntabilitas publik. Sebagai organisasi sektor publik yang masih harus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat, tentunya peranan manajer menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya partisipasi secara luas pada proses organisasional, dimana para anggota organisasi yang dalam hal ini adalah para manajer ikut serta dan mempunyai pengaruh dalam suatu pembuatan keputusan yang berkepentingan dengan mereka. Dalam suatu SKPD yang dikatakan manajer disini yaitu beberapa kepala bagian yang membidangi satu bidang tertentu. Kinerja dari kepala bagian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukannya. Selain peningkatan kinerja, kejelasan anggaran juga dianggap akan mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam perencanaan keuangannya. Anggaran merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda-beda, misalnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Astini dkk (2014) menemukan bahwa akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD pada Kabupaten Klungkung. Dalam penelitian yang dilakukan Sari dkk (2014) menemukan bahwa akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD pada Kabupaten Buleleng. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sedangkan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten dan masih terbatasnya penelitian di bidang pemerintahan khususnya di Kota Palangka Raya memotivasi peneliti untuk meneliti mengenai kinerja pada instansi pemerintah. Alasan lain Kota Palangka Raya dipilih sebagai obyek penelitian karena banyaknya permasalahan dan penyimpangan terkait laporan keuangan dan kinerja pemerintah Kota Palangka Raya, seperti yang diberitakan www.skalanews.com "Hasil temuan BPK terkait jumlah aset pemerintah kota Palangka Raya yang bermasalah yaitu sebesar Rp1,7 triliun. Selanjutnya pihak BPK memberikan dua kali opini disclaimer kepada pemerintah kota dari tahun 2012 yang diserahkan pada 2013 lalu dan 2013 yang diserahkan belum lama ini. Pada tahun 2011, pemerintah kota Palangka Raya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pernah berhasil meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2014 yang dipublikasikan melalui siaran pers (palangkaraya.bpk.go.id), BPK RI memberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Pemerintah Kota Palangka Raya TA 2014. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Laporan Keuangan yang diperiksa BPK terdiri atas Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi APBD dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kota Palangka Raya masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan yaitu andal. Melalui peningkatan akuntabilitas yang baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan sistem pengendalian intern yang seoptimal mungkin dan melakukan pengawasan secara terus menerus diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu

melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang bernilai dan akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

B. HIPOTESIS

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002). Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Deddi (2010) dalam Putra (2013), pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah daerah diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, untuk itu dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Sehingga didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kenis (1979) dalam Putra (2013) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan, jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Dengan demikian karakteristik sasaran anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai kebijakan umum APBD. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran kinerja suatu unit kerja organisasi dinilai baik secara finansial. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah daerah, sebaliknya apabila tidak adanya kejelasan sasaran anggaran aparat akan memiliki sedikit informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan dan target-target telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dengan adanya sasaran anggaran yang jelas diharapkan aparat pemerintah daerah dalam hal ini masing-masing SKPD mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sari dkk (2014) mengatakan bahwa adanya partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Hal ini sangat penting karena

aparatus pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Partisipasi anggaran terjadi karena adanya komitmen organisasi dari para karyawan dan rasa memiliki organisasi tersebut, maka para manajer tingkat bawah berkewajiban berpartisipasi dalam penyusunan anggaran SKPD. Namun demikian dalam partisipasi penyusunan anggaran terdapat keterbatasan, proses partisipasi dapat memberikan kekuatan, jika mendapat dukungan dari pemimpin bawah untuk diberikan kesempatan dalam menentukan atau menetapkan isi anggaran mereka, sebaliknya akan menjadi lemah ketika mereka tidak diberikan kesempatan untuk menentukan dan menetapkan isi anggaran. Sehingga didapatkan hipotesis sebagai berikut:

***H₃*: Partisipasi Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, serta dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Pengendalian dapat berbentuk prosedur, peraturan dan instruksi yang didesain untuk memastikan bahwa tujuan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengendalian intern juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Pengendalian intern mempunyai peran penting untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Kualitas pengendalian internal suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kualitas pengendalian internal yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja manajerialnya pula, Magdalena dkk (2014). Sehingga didapatkan hipotesis sebagai berikut:

***H₄*: Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.**

B. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pegawai yang terlibat langsung secara teknis dalam pelaksanaan anggaran dan mampu menggambarkan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah pada 20 SKPD. SKPD ini meliputi dinas, badan, dan kantor di Kota Palangka Raya. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan SKPD, kepala bagian keuangan, kepala sub bagian dan sekretaris yang merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pelaksanaan anggaran dan mampu menggambarkan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah dengan jumlah 68 untuk 20 SKPD.

Variabel Penelitian

Klasifikasi Variabel

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas, dan variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pengendalian intern dan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah, variabel-variabel tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini variabel bebas adalah akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran dan sistem pengendalian intern.
2. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini variabel terikat adalah kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya.

Definisi Operasional Variabel

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan. Terdapat empat unsur akuntabilitas yang harus dipenuhi, diantaranya adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan, Putra (2013). Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah kapasitas sumber daya manusia memadai atau tidak memadai. Jawaban responden atas penyebaran kuesioner diukur dengan skala likert 5 poin dengan keterangan: Sangat Tidak Setuju (STS)= 1, Tidak Setuju (TS)= 2, Netral (N)= 3, Setuju (S)= 4, Sangat Setuju (SS)= 5.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, Putra (2013). Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah kapasitas sumber daya manusia memadai atau tidak memadai. Jawaban responden atas penyebaran kuesioner diukur dengan skala likert 5 poin dengan keterangan: Sangat Tidak Setuju (STS)= 1, Tidak Setuju (TS)= 2, Netral (N)= 3, Setuju (S)= 4, Sangat Setuju (SS)= 5.

Partisipasi Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan seluruh manajer (lini menengah ke bawah) dalam suatu instansi untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Partisipasi anggaran akan mempengaruhi kinerja manajerial dengan tiga cara, yaitu: (1) melalui perancangan tujuan anggaran yang lebih tinggi, (2) melalui peningkatan komitmen untuk mencapai tujuan anggaran, dan (3) melalui keuntungan kognitif yang berasal dari pembagian informasi selama partisipasi (Kern & Liao dalam Indarto & Ayu, 2011) dalam Amanta dkk (2015). Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah kapasitas sumber daya manusia memadai atau tidak memadai. Jawaban responden atas penyebaran kuesioner diukur dengan skala likert 5 poin dengan keterangan: Sangat Tidak Setuju (STS)= 1, Tidak Setuju (TS)= 2, Netral (N)= 3, Setuju (S)= 4, Sangat Setuju (SS)= 5.

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap Undang-undang dan aturan yang berlaku. Pengendalian dapat berbentuk prosedur, peraturan dan instruksi yang didesain untuk memastikan bahwa tujuan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. pengendalian intern juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Pengendalian intern mempunyai peran penting untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Kualitas pengendalian internal suatu organisasi sangat

mempengaruhi kinerja organisasi. Premis ini menunjukkan bahwa kualitas pengendalian internal yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja manajerialnya pula, Magdalena dkk (2014). Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah kapasitas sumber daya manusia memadai atau tidak memadai Jawaban responden atas penyebaran kuesioner diukur dengan skala likert 5 poin dengan keterangan: Sangat Tidak Setuju (STS)= 1, Tidak Setuju (TS)= 2, Netral (N)= 3, Setuju (S)= 4, Sangat Setuju (SS)= 5.

Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah adalah hasil dari proses aktivitas manajerial sektor publik yang efektif dalam melaksanakan kegiatan manajerial mulai dari proses perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negoisasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan, Putra (2013).Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah kapasitas sumber daya manusia memadai atau tidak memadai Jawaban responden atas penyebaran kuesioner diukur dengan skala likert dengan keterangan: Kinerja dibawah rata-rata = 1,2,3Kinerja rata-rata = 4,5,6Kinerja diatas rata-rata = 7,8,9.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas (X ₁)	68	2,67	4,89	4,01	0,474
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₂)	68	3,00	5,00	4,15	0,477
Partisipasi Anggaran (X ₃)	68	3,00	5,00	4,08	0,491
Sistem Pengendalian Intern (X ₄)	68	2,45	4,95	3,79	0,566
Kinerja Manajerial (Y)	68	7,11	9,00	8,10	0,351

Sumber: data primer, diolah (2016).

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 4,01. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan berkaitan dengan akuntabilitas pada satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya. Nilai standar deviasi 0,474 lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan data rendah.

Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 4,15. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya. Nilai standar deviasi sebesar 0,477 lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan data rendah.

Variabel partisipasi anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 4,08. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan partisipasi anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya. Nilai standar deviasi sebesar 0,491 lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan data rendah.

Variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai rata-rata 3,79. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sistem pengendalian intern pada satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya. Nilai standar deviasi sebesar 0,566 lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan data rendah.

Variabel kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 8,10. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan

berkaitan dengan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Palangka Raya sudah cukup tinggi atau baik. Nilai standar deviasi sebesar 0,351 lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan data rendah.

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	P_Value	Keterangan
Akuntabilitas (X_1)	$X_{1.1}$	0,000	Valid
	$X_{1.2}$	0,000	Valid
	$X_{1.3}$	0,000	Valid
	$X_{1.4}$	0,000	Valid
	$X_{1.5}$	0,000	Valid
	$X_{1.6}$	0,000	Valid
	$X_{1.7}$	0,000	Valid
	$X_{1.8}$	0,000	Valid
	$X_{1.9}$	0,000	Valid
Kejelasan sasaran anggaran (X_2)	$X_{2.1}$	0,000	Valid
	$X_{2.2}$	0,000	Valid
	$X_{2.3}$	0,000	Valid
	$X_{2.4}$	0,000	Valid
	$X_{2.5}$	0,000	Valid
	$X_{2.6}$	0,000	Valid
	$X_{2.7}$	0,000	Valid
Partisipasi anggaran (X_3)	$X_{3.1}$	0,000	Valid
	$X_{3.2}$	0,000	Valid
	$X_{3.3}$	0,000	Valid
	$X_{3.4}$	0,000	Valid
	$X_{3.5}$	0,000	Valid
Sistem pengendalian intern (X_4)	$X_{4.1}$	0,000	Valid
	$X_{4.2}$	0,000	Valid
	$X_{4.3}$	0,000	Valid
	$X_{4.4}$	0,000	Valid
	$X_{4.5}$	0,000	Valid
	$X_{4.6}$	0,000	Valid
	$X_{4.7}$	0,000	Valid
	$X_{4.8}$	0,000	Valid
	$X_{4.9}$	0,000	Valid
	$X_{4.10}$	0,000	Valid
	$X_{4.11}$	0,000	Valid
	$X_{4.12}$	0,000	Valid
	$X_{4.13}$	0,000	Valid
	$X_{4.14}$	0,000	Valid
	$X_{4.15}$	0,000	Valid
	$X_{4.16}$	0,000	Valid
	$X_{4.17}$	0,000	Valid

	X _{4.18}	0,000	Valid
	X _{4.19}	0,000	Valid
	X _{4.20}	0,000	Valid
Kinerja manajerial (Y)	Y _{1.1}	0,001	Valid
	Y _{1.2}	0,019	Valid
	Y _{1.3}	0,001	Valid
	Y _{1.4}	0,008	Valid
	Y _{1.5}	0,000	Valid
	Y _{1.6}	0,001	Valid
	Y _{1.7}	0,001	Valid
	Y _{1.8}	0,000	Valid
	Y _{1.9}	0,000	Valid

Sumber : data primer, diolah(2016).

Tabel 2 menunjukkan hasil yang baik, masing-masing pertanyaan dari variabel seperti akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, sistem pengendalian intern, dan kinerja majerial menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	AlphaCronbach	Keterangan
Akuntabilitas (X ₁)	0,875	Reliabel
Kejelasan sasaran anggaran (X ₂)	0,841	Reliabel
Partisipasi anggaran (X ₃)	0,812	Reliabel
Sistem pengendalian intern (X ₄)	0,943	Reliabel
Kinerja manajerial (Y)	0,757	Reliabel

Sumber : data Primer diolah (2016).

Dari hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat bahwa hasil koefisien *Cronbach Alpha* untuk lima variable lebih besar dari 0,70. Variabel akuntabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,875, variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,841, variabel partisipasi anggaran menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,812, variabel sistem pengendalian intern menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,943, dan variabel kinerja manajerial menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,757. Maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,21829031
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,050
	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		,735
Asymp. Sig. (2-tailed)		,652

Sumber : data primer diolah (2016)

Hasil pengujian normalitas data dengan Uji *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test* di Tabel 4 menunjukkan nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,652 yang lebih tinggi dari 0,05. Sehingga dikatakan data residual berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,783 ^a	,613	,588	,22511	1,819

Sumber : data primer diolah (2016).

Berdasarkan sampel sejumlah 68 dan nilai $k = 4$, maka diperoleh nilai d_l sebesar 1,4853 dan nilai d_u sebesar 1,7335. Besarnya $4 - d_l = 4 - 1,4853 = 2,5147$ dan besarnya $4 - d_u = 4 - 1,7335 = 2,2665$. Hasil perhitungan pada Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,819 yang berada diantara nilai d_u dan $4 - d_u$ atau $1,7335 < 1,819 < 2,5147$ yang artinya model regresi berganda tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji Multikolonieritas

Tabel 6
Hasil Uji Multikolonieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	AkuntabilitasX1	,853	1,172
	KejelasanSasaranAnggaranX ²	,899	1,112
	PartisipasiAnggaranX ₃	,924	1,082
	SistemPengendalianInternX4	,981	1,019

Sumber : data primer diolah (2016)

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai VIF disekitar angka 1. akuntabilitas mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,853 dan mempunyai nilai VIF sebesar 1,172, kejelasan sasaran anggaran mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,899 dan mempunyai nilai VIF sebesar 1,112, partisipasi anggaran mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,924 dan mempunyai nilai VIF sebesar 1,082, sistem pengendalian intern mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,981 dan mempunyai nilai VIF sebesar 1,019. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a			
		Unstandardized		Standardized	
Model		Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
	(Constant)	,145	,226		,643 ,523
1	Akuntabilitas X ₁	-,032	,038	-,112	-,849 ,399
	Kejelasan Sasaran Anggaran X ₂	-,028	,036	-,097	-,758 ,451
	Partisipasi AnggaranX ₃	,019	,035	,070	,551 ,584
	Sistem Pengendalian InternX ₄	,050	,029	,209	1,699 ,094

Sumber : data primer diolah (2016).

Pada tabel 7 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependent nilai *absolute* (absute). Hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya (sig) di atas 0,05 (sig > 0,05), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis Uji**Koefisien Determinasi (R^2)**

Tabel 8
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,783 ^a	,613	,588	,22511

Sumber : data primer diolah (2016).

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R^2 adalah sebesar 0,588 atau 58,8%, nilai tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran dan sistem pengendalian intern memberikan pengaruh sebesar 58,8% terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, sedangkan sisanya 41,2% merupakan pengaruh dari variabel bebas lainnya.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi

ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5,051	4	1,263	24,920	,000 ^b
Residual	3,193	63	,051		
Total	8,244	67			

Sumber : data primer diolah (2016).

Berdasarkan hasil analisis regresi Uji F pada tabel 9 dapat dilihat bahwa hasil nilai F hitung sebesar 24,920 dengan taraf signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi layak dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah

Uji t

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4,455	,376		11,838	,000	
Akuntabilitas X1	,265	,063	,358	4,219	,000	
1 KejelasanS asaran Anggaran X2	,304	,061	,413	5,000	,000	
Partisipasi Anggaran X3	,210	,058	,294	3,600	,001	
Sistem PengendalianIntern X4	,124	,049	,200	2,526	,014	

Sumber : data primer diolah (2016).

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terdapat pada tabel 10 dapat dilihat bahwa dari keempat variabel independen yang dimasukkan ke dalam model penelitian, keempatnya berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk variabel akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran dan sistem pengendalian intern. Untuk probabilitas signifikan variabel akuntabilitas yaitu sebesar 0,000, probabilitas signifikansi kejelasan sasaran anggaran yaitu sebesar 0,000, probabilitas signifikan variabel partisipasi anggaran sebesar 0,001 dan probabilitas signifikan variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,014, keempat nilai tersebut dibawah 0,05.

D. PEMBAHASAN

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan variabel akuntabilitas terbukti mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah, hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pada SKPD sudah terlaksana dengan baik dengan memperhatikan empat dimensi akuntabilitas yang mencakup akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Semakin baik penerapan akuntabilitas maka akan meningkatkan kinerja manajerial SKPD.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan variabel kejelasan sasaran anggaran terbukti mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah, hal ini menjelaskan bahwa karena semakin jelas perencanaan sasaran dan tujuan anggaran yang telah ditetapkan akan meningkatkan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah yang akan mempermudah organisasi dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan variabel partisipasi anggaran terbukti mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah, hal ini menjelaskan bahwa partisipasi anggaran mendukung dalam meningkatnya kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah dengan melibatkan aparatur pemerintah dalam proses penyusunan anggaran.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini juga menunjukkan variabel sistem pengendalian intern terbukti mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah, hal ini menjelaskan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pada satuan kerja perangkat daerah sudah berjalan dengan baik dengan memperhatikan lima komponen pengendalian internal dan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh Akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya, yang berarti makin baiknya pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan maka kinerja dari perangkat daerah pun juga semakin baik.
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya, yang berarti semakin jelas tujuan dan target kejelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran termotivasi dan tingginya kinerja yang tercipta.
3. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya, yang berarti semakin terlibatnya para pegawai atau bawahan dalam penyusunan anggaran akan berdampak pada kinerja yang baik dalam melaksanakan anggaran.
4. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya, yang berarti makin baiknya perencanaan organisasi dan kepatuhan terhadap sistem yang berlaku akan mendorong peningkatan kinerja dan tingkat kontrol kedisiplinan yang meningkat.

Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode kuesioner. Responden kurang memahami, kurang peduli dan kurang serius dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
2. Berdasarkan model penelitian yang digunakan diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 58,8%. Sedangkan 41,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan masih kurang cukup untuk dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

Saran Hasil Penelitian

1. Bagi SKPD Kota Palangka Raya, diharapkan mampu mempertahankan peningkatan kualitas kinerja yang sudah tercapai dengan memperhatikan penerapan akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran serta partisipasi anggaran dan sebaiknya mengkaji ulang terkait sistem pengendalian intern, karena secara umum kesalahan dalam sistem pengendalian intern banyak ditemukan seperti proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan.
2. Penelitian selanjutnya, dapat melengkapi metode survey dengan menggunakan metode wawancara untuk meningkatkan pemahaman, sikap kepedulian dan keseriusan dari responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
3. Peneliti selanjutnya, dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel lain yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah, seperti komitmen organisasi, ketepatan skedul anggaran, ketidakpastian tugas dan senjangan anggaran (*Budgetary slack*).
4. Peneliti selanjutnya, dapat memperluas cakupan penelitian di kabupaten/kota lainnya yang masih mendapatkan opini *disclaimer* berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

DAFTAR PUSTAKA

- Amanta, Komang Budi., Putra, Made Pradana Adi dan Werastuti, Desak Nyoman Sri. 2015. Pengaruh Komitmen organisasi, Gaya Kepemimpinan, Ketepatan Skedul Penyusunan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Kantor Dinas Se – Kabupaten Karangasem). *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 5, No 1.*
- Astini, Ni Kadek., Sulindawati, Ni Luh Gede Erni dan Sinarwati, Ni Kadek. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.2, No 1*
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Magdalena, Erica., Ratnawati, Vince dan Azhar Al. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *JOM FEKON. Vol 1, No. 2.*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UAD Press
- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Sari, Desak Putu Intan Permata., Sinarwati, Ni Kadek dan Sujana, Edy. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2, No 1.*
- www.skalanews.com
- <http://skalanews.com/berita/nasional/daerah/188842-bpk-berikan-opini-disclamer-ke-pemkot-palangka-roya-->
- <http://palangkaraya.bpk.go.id/?p=1620>

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN GOVERNMENT MALUKU DISTRICT WEST

Samuel Rudolfo Nowally¹; Sucahyo Heriningsih²

UPN "Veteran" Yogyakarta

heriningsih_s@yahoo.co.id²

ABSTRACT

Analysis Of Financial Performance In Government Maluku District West this study aims to inform the public regarding the presentation of financial statements and performance of local government in realizing accountability. Financial Ratio Analysis in Maluku southwest district government for the fiscal year 2011-2015 as measured by the ratio of Regional Financial Independence is very less independent since the percentage of revenue was between 0.00 to 10.00%, Ratio Effectiveness of fiscal year 2011-2015 is very effective as a percentage performance is already above 100% while the efficiency ratio of the fiscal year 2011-2015 is inefficient because the percentage is above 40%, Activity ratio fiscal year 2011 to 2015 which explained that the results of the operation more prioritized expenditure ratio compared with the ratio of capital expenditure, Revenue Growth rate (PAD) always increase from 2011-2015. and Regional Financial Dependency Ratio is very high because the percentage is above 50%.

Keywords: *Ratio of Regional Autonomy, Effectiveness and Efficiency Ratio Ratio, Activity Ratio, Ratio of Growth and Regional Financial Dependency Ratio.*

A. PENDAHULUAN

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun, pada kenyataannya sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Kedua undang-undang ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan,

maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah propinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang dibentuk oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku, dengan ibukota Kabupaten adalah Kota Tiakur.

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan kabupaten baru yang tentu memiliki berbagai fenomena dan permasalahan. Fenomenanya adalah memiliki potensi daerah yang sangat besar. Potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Maluku Barat Daya antara lain adalah kekayaan laut yang melimpah, tambang gas abadi di Blok Marsela, tambang emas dan Tembaga yang menjadi potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Maluku Barat Daya. Lahirnya otonomi daerah merupakan berkah tersendiri, bagi upaya peningkatan pembangunan yang bertumpu pada potensi daerah. Salah satu permasalahan yang muncul adalah masalah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya.

Sebagai kabupaten yang relatif masih baru, Kabupaten Maluku Barat Daya terus melakukan perbaikan terutama dari segi tata kelola pemerintahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menyadari bahwa kemajuan yang diciptakan daerah di era desentralisasi ini bergantung pada tata kelola pemerintah daerah.

Sebagai kabupaten baru yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah wajib menggunakan kreativitas dan inisiatif dalam menggali sumber daya keuangan yang dimiliki daerah agar tidak tergantung dari subsidi pemerintah pusat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengkajian secara mendalam untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan daerah sehingga dapat menilai kemampuan pemerintah daerah dan apakah pemerintah daerah telah berhasil atau belum dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berikut ini penelitian terdahulu yang terkait dengan judul.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Utomo (2011), menulis tentang Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan ditinjau dari rasio kemandirian, tingkat kemandirian keuangan daerah selama tahun anggaran 2007-2009 masih rendah sekali dan tiap tahunnya mengalami penurunan, untuk rasio efektivitas sangat efektif, rasio efisiensi tingkat efisiensinya sangat efisien, rasio aktivitas untuk belanja rutin terhadap APBD menunjukkan hasil yang cukup baik dan untuk belanja pembangunan terhadap APBD menunjukkan presentase yang cukup baik dan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada belanja rutin dan mengalami penurunan pada belanja pembangunan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Arief (2013), menulis tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 – 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan ditinjau dari rasio kemandirian, tingkat kemandirian keuangan daerah selama tahun anggaran 2009-2012 masih rendah dan tiap tahunnya mengalami fluktuasi, Ditinjau dari rasio efektivitas, sangat efektif hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim yang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan, Ditinjau dari rasio efisiensi, kurang efisien karena disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang sedikit lebih besar dari pada realisasi belanja daerah, ditinjau rasio aktivitas untuk belanja rutin terhadap APBD menunjukkan hasil yang cukup baik dan untuk belanja pembangunan terhadap APBD menunjukkan presentase yang cukup baik dan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada belanja rutin dan mengalami penurunan pada belanja pembangunan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Machmud, *dkk* (2014), menulis tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan

ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2007-2012 di Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan persentase perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah masih kurang stabil karena masih mengalami naik turun terhadap hasil perhitungan persentasenya. Artinya adalah ketergantungan daerah masih sangat tinggi, terutama penerimaan dari bantuan pemerintah pusat, Berdasarkan hasil perhitungan untuk rasio efektivitas, kemampuan daerah di Sulawesi Utara didalam menjalankan tugasnya kurang stabil karena masih mengalami rasio yang naik turun. Kinerja Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara belum efektif karena efektifnya belum mencapai 1 (satu) atau 100 persen, kecuali untuk tahun 2012, Rasio pertumbuhan kinerja di Provinsi Sulawesi Utara juga kemampuan daerah didalam menjalankan tugasnya kurang stabil karena mengalami rasio yang naik turun. Peningkatan realisasi rasio pertumbuhan di tahun 2007-2012 membawa *trend positif* dan *trend negatif* karena membawa efek yang belum bagus dalam mengelola peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pramono (2014), menulis tentang Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Untuk rasio kemandirian, tingkat kemampuan keuangan masih sangat rendah, Untuk rasio efektivitas, Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 telah sangat efektif dalam mengelola PADnya, Untuk rasio efisiensi, Pemerintah Kota Surakarta sudah sangat efisien dalam mengelola PADnya, untuk rasio keserasian (rasio aktivitas) belanja operasional mengalami penurunan di tahun 2011 dan untuk belanja modal masih relatif kecil dan mengalami kenaikan pada tahun 2011, Untuk rasio pertumbuhan, Pemkot Surakarta mengalami pertumbuhan PAD yang cukup tinggi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nurhayati (2015), menulis tentang Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Untuk rasio kemandirian sangat rendah, Untuk rasio ketergantungan masih sangat tinggi, Untuk rasio efektivitas pada tahun 2009 – 2012 sangat efektif, dan untuk rasio efisiensi pada tahun 2009 – 2012 sangat efisien, Untuk rasio aktivitas, belanja rutin lebih diprioritaskan dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan dimana belanja rutin selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan untuk belanja pembangunan mengalami penurunan setiap tahunnya,

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Maluku Barat Daya yang berkenaan dengan menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah setempat dengan judul: **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya”**.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Menurut Mahsun (2009), kinerja (*performance*) adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Bastian (2006) mendefinisikan kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja adalah ukuran kemampuan atau keberhasilan dalam melaksanakan suatu tugas, kegiatan/aktivitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,

kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010).

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan (Mardiasmo, 2002), yaitu:

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Halim, 2007):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator kinerja keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1. Indikator Masukan (*Input*)
Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator proses (*process*)
Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator keluaran (*output*)
Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. Indikator hasil (*outcome*)
Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.
5. Indikator manfaat (*benefit*)
Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
6. Indikator Dampak (*Impact*)
Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak terpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasikenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan tidak lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan Pemerintah Daerah (Halim, 2007) adalah:

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja keuangan Daerahnya menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang antara lain: rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi PAD, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio ketergantungan keuangan daerah.

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangaunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Formula Rasio Kemandirian sebagai berikut (Mahsun, 2009):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. formula rasio efektivitas sebagai berikut (Mahsun, 2009):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara totalrealisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. formula rasio efisiensi sebagai berikut (Halim, 2007):

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau belanja operasi dan belanja pembangunan atau belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Formula rasio Aktivitas sebagai berikut (Halim, 2007):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Formula rasio pertumbuhan PAD sebagai berikut (Halim, 2007):

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t_1 - \text{PAD } t_0}{\text{PAD } t_0} \times 100\%$$

Keterangan:

t_0 = Tahun Awal

t_1 = Tahun Akhir

6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Formula rasio ketergantungan keuangan daerah sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

C. METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara teknik pengumpulan dokumen. Yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang memuat informasi suatu objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat, dan disusun dalam arsip. Sebagai sumber data, Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat dan Propinsi serta Pinjaman (Rp)	RKKD (%)	Kriteria
2011	6.683.131.712,34	390.105.110.632,00	1,71%	Sangat Kurang
2012	9.271.545.031,52	426.904.967.560,00	2,17%	Sangat Kurang
2013	10.538.141.512,21	486.567.268.109,00	2,17%	Sangat Kurang
2014	15.193.765.673,02	585.812.195.177,00	2,59%	Sangat Kurang
2015	22.928.048.114,60	731.532.892.233,68	3,13%	Sangat Kurang

Menunjukkan bahwa PAD MBD dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2011 PAD Kabupaten MBD sebesar Rp 6.683.131.712,34 atau sebesar 1,61% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu menjadi Rp 9.271.545.031,52 atau sebesar 2,05% dari total pendapatan. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten MBD menjadi Rp 10.538.141.512,21 atau sebesar 2,03% dari total pendapatan, atau turun 0,02% dari sisi presentasi. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 15.193.765.673,02 atau sebesar 2,45% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 22.928.048.114,60 atau 3,03% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 sebesar Rp 390.105.110.632 kemudian pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 426.904.967.560 Pada tahun 2013 sebesar Rp 486.567.268.109, kemudian mengalami peningkatan sebesar Rp 585.812.195.177 pada tahun 2014. Dan Pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 731.532.892.233.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 di atas kemampuan keuangan DPKAD Kabupaten MBD tergolong masih sangat kurang dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2011 dimana nilainya sebesar 1,71% dan tahun 2012 naik menjadi 2,17%, tahun 2013 masih tetap sama dengan tahun 2012 yaitu sebesar 2,17%, 2014 naik menjadi 2,59%, dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,13%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong sangat kurang karena masih tergantung dari pemerintah pusat dan pemerintah pemerintah propinsi.

Jadi Kemandirian Keuangan DPKAD Kabupaten MBD secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana

ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten MBD sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Rasio Efektivitas PAD

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2011	5.194.170.000,00	6.683.131.712,34	128,67%	sangat efektif
2012	8.079.826.151,00	9.271.545.031,52	114,75%	sangat efektif
2013	6.634.170.000,00	10.538.141.512,21	158,85%	sangat efektif
2014	13.663.200.000,00	15.193.765.673,02	111,20%	sangat efektif
2015	14.786.624.658,00	22.928.048.114,60	155,06%	sangat efektif

Menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten MBD selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 PAD dianggarkan sebesar Rp 5.194.170.000 atau 1,23% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2012 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 8.079.826.151 atau 1,71% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2013 anggaran PAD diturunkan menjadi Rp 6.634.170.000 atau 1,23% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2014 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 13.663.200.000 atau 2,13% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2015 anggaran PAD kembali naik menjadi Rp 14.786.624.658 atau 1,90% dari total anggaran pendapatan.

Realisasi PAD Kabupaten MBD dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 PAD Kabupaten MBD sebesar Rp 6.683.131.712,34 atau sebesar 1,61% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu menjadi Rp 9.271.545.031,52 atau sebesar 2,05% dari total pendapatan. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten MBD menjadi Rp 10.538.141.512,21 atau sebesar 2,03% dari total pendapatan. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan lagi yaitu menjadi Rp 15.193.765.673,02 atau sebesar 2,45% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar Rp 22.928.048.114,60 atau 3,03% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Keuangan DPKAD Kabupaten MBD pada tahun 2011 sebesar 128,67%, tahun 2012 sebesar 114,75%, tahun 2013 sebesar 158,85%, tahun 2014 sebesar 111,20%, dan tahun 2015 sebesar 155,06%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten MBD dikatakan sudah sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada, karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pendapatan dari sisi pajak dan retribusi mengalami naik turun. Untuk tahun 2011 pajak yang dianggarkan sebesar Rp 390.000.000, realisasinya sebesar Rp 105.000.548, untuk retribusi yang dianggarkan sebesar Rp 687.500.000, realisasinya sebesar Rp 783.313.450. tahun 2012 pajak yang dianggarkan sebesar Rp 395.000.000, realisasinya sebesar Rp 276.424.810, untuk retribusi yang dianggarkan sebesar Rp 722.500.000, realisasinya sebesar Rp 390.226.625. tahun 2013 pajak yang dianggarkan sebesar Rp 895.000.000, realisasinya sebesar Rp 731.350.738, untuk retribusi yang dianggarkan sebesar Rp 1.187.500.000, realisasinya sebesar Rp 1.109.203.280. tahun 2014 pajak yang dianggarkan sebesar Rp

1.010.000.000, realisasinya sebesar Rp 1.103.027.524, retribusi yang dianggarkan sebesar Rp 1.060.500.000, realisasinya sebesar Rp 787.434.400. dan tahun 2015 pajak yang dianggarkan sebesar Rp 1.170.000.000, realisasinya sebesar Rp 3.058.760.101, dan retribusi yang dianggarkan sebesar Rp 895.500.000, realisasinya sebesar Rp 706.968.000.

Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2015) yang melakukan penelitian di Kabupaten Rokan Hulu dijelaskan bahwa kinerja keuangan Rokan Hulu jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah sangat efektif. Begitupun juga dalam penelitian ini dimana kinerja keuangan Kabupaten MBD sudah sangat efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Rasio Efisiensi PAD

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2011	391.862.536.451,00	413.986.777.344,34	94,66%	Kurang Efisien
2012	477.944.489.677,85	452.981.563.591,52	105,51%	Tidak Efisien
2013	451.485.460.941,42	519.881.232.621,21	86,84%	Cukup Efisien
2014	520.005.297.518,89	620.189.302.263,62	83,85%	Cukup Efisien
2015	655.273.525.349,66	757.460.940.348,28	86,51%	Cukup Efisien

Realisasi total belanja daerah Kabupaten MBD dari tahun 2011 sampai dengan 2015 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2013. Pada tahun 2011 belanja daerah Kabupaten MBD sebesar Rp 391.862.536.451, naik menjadi Rp 477.944.489.677 pada tahun 2012. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi Rp 451.485.460.941, tahun 2014 naik kembali menjadi Rp 520.005.297.518 dan naik kembali pada tahun 2015 menjadi Rp 655.273.525.349.

Total pendapatan daerah Kabupaten MBD dari tahun 2011 sampai dengan 2015 selalu mengalami kenaikan. Tahun 2011 total pendapatan daerah sebesar Rp 413.986.777.344. Mengalami kenaikan sebesar 9,42% atau menjadi Rp 452.981.563.591 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 total pendapatan daerah sebesar Rp 519.881.232.621 naik 14,77% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2014 naik sebesar 19,29% atau menjadi Rp 620.189.302.263. Pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan sebesar 22,13% atau menjadi Rp 757.460.940.348 dari tahun sebelumnya.

Diketahui bahwa rata-rata efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten MBD tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 91,47% atau dapat dikatakan tidak efisien. Pada tahun 2011 rasio efisiensinya sebesar 94,66%, kemudian tahun 2012 menjadi 105,51%, tahun 2013 sebesar 86,84%, tahun 2014 sebesar 83,85%, dan tahun 2015 sebesar 86,51%.

Rata-rata efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten MBD yang tergolong masih tidak efisien karena rata-rata rasionya 91,47% walaupun pada tabel 4.3 menunjukkan pendapatan masih lebih besar dari belanja terkecuali pada tahun 2012 belanja lebih besar dari pendapatan tetapi jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerah. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten MBD dalam hal ini masih kurang baik karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten MBD dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014) di Pemerintah Kota Surakarta, kinerja keuangannya jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah sudah sangat efisien karena rasio efisiensi kurang dari 60%. Menurut Pramono (2014) hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Surakarta sudah berhasil menerapkan efisiensi anggarannya. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam penelitian ini dimana efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten MBD masih tidak Efisien karena pengeluaran untuk belanja hampir mendekati pendapatan yang diterima bahkan pada tahun 2012 belanja lebih besar dari pendapatan yang diterima pemerintah.

Rasio Aktivitas

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	RBO (%)
2011	391.862.536.451,00	279.564.717.084,00	71,34%
2012	477.944.489.677,85	321.398.141.879,05	67,25%
2013	451.485.460.941,42	316.005.539.959,42	69,99%
2014	520.005.297.518,89	366.021.145.427,60	70,39%
2015	655.273.525.349,66	46046185240500%	70,27%

Dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kabupaten MBD dari tahun 2011 sampai dengan 2015 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2013 dimana terjadi penurunan belanja daerah. Pada tahun 2011 belanja daerah Kabupaten MBD sebesar Rp 391.862.536.451 naik menjadi Rp 477.944.489.677 pada tahun 2012. Kemudian terjadi penurunan belanja daerah pada tahun 2013 menjadi Rp 451.485.460.941 pada tahun 2014 belanja daerah naik lagi menjadi Rp 520.005.297.518 naik kembali pada tahun 2015 menjadi Rp 655.273.525.349.

Rasio belanja operasi dan rasio belanja modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 rasio belanja operasinya sebesar 71,34% mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 67,25%, kemudian naik lagi pada tahun 2013 menjadi 69,99%, pada tahun 2014 naik menjadi 70,39%. tahun 2015 mengalami sedikit penurunan menjadi 70,27%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 69,27%. Sedangkan pada rasio belanja modal pada tahun 2011 sebesar 28,60% naik menjadi 32,75% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi 30,00%, dan turun lagi pada tahun 2014 menjadi 29,13%. Pada tahun 2015 naik kembali menjadi 29,67% sehingga rata-rata rasionya sebesar 30,03%.

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	RBM (%)
2011	391.862.536.451,00	112.072.469.367,00	28,60%
2012	477.944.489.677,85	156.546.338.298,80	32,75%
2013	451.485.460.941,42	135.447.230.982,00	30,00%
2014	520.005.297.518,89	151.485.266.218,00	29,13%
2015	655.273.525.349,66	194.422.415.896,50	29,67%

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal DPKAD Kabupaten MBD 30,03%. Dimulai pada tahun 2011 dimana rasio nya sebesar 28,60% mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 32,75%, dan mengalami penurunan lagi menjadi 30,00% pada tahun 2013. Tahun 2014 juga mengalami penurunan menjadi 29,13%, dan pada tahun 2015 terjadi sedikit kenaikan menjadi 29,67%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah MBD yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten MBD kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten MBD diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arfandi Arief (2013) dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Propinsi Kaltim sebagian besar dananya masih dialokasikan untuk belanja aparaturdaerah/belanja tidak. Hal tersebut sama seperti yang terjadi pada penelitian ini di mana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten MBD jika dilihat dari rasio keserasian atau rasio aktivitas sebagian besar dananya masih dialokasikan untuk belanja operasional.

Rasio Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan PAD tahun 2012:
$$= \frac{9.271.545.031,52 - 6.683.131.712,34}{6.683.131.712,34} \times 100\% = 38,73\%$$

Pertumbuhan PAD tahun 2013:
$$= \frac{10.538.141.512,21 - 9.271.545.031,52}{9.271.545.031,52} \times 100\% = 13,66\%$$

Pertumbuhan PAD tahun 2014:
$$= \frac{15.193.765.673,02 - 10.538.141.512,21}{10.538.141.512,21} \times 100\% = 44,18\%$$

Pertumbuhan PAD tahun 2015:
$$= \frac{22.928.048.114,60 - 15.193.765.673,02}{15.193.765.673,02} \times 100\% = 50,90\%$$

Untuk rasio pertumbuhan dapat diketahui bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 2011 PAD sebesar Rp 6.683.131.712, pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 9.271.545.031, pada tahun 2013 mengalami peningkatan lagi yaitu sebesar Rp 10.538.141.512, tahun 2014 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar Rp 15.193.765.673, dan pada tahun 2015 meningkat sangat signifikan yaitu sebesar Rp 22.928.048.114.

Dari hasil tersebut dapat diketahui rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011-2012 sebesar 38,73%, masih dikategorikan cukup baik karena masih di atas rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2011-2015 yaitu 36,87%, tahun 2012-2013 mengalami penurunan menjadi 13,66%, di kategorikan tidak baik karena masih di bawah rata-rata pertumbuhan PAD, serta pada tahun 2013-2014 mengalami kenaikan menjadi 44,18%, dan pada tahun 2014-2015 juga mengalami kenaikan menjadi 50,90%, di kategorikan baik karena berada di atas rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2011-2015. Jadi secara keseluruhan pertumbuhan PAD dari tahun 2011-2015 sangat baik, hal ini tercermin dari peningkatan setiap tahunnya walaupun pada tahun 2012-

2013 masih dibawah rata-rata rasio pertumbuhan.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa pertumbuhan PAD kabupaten MBD dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami peningkatan, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD selalu meningkat, maka dengan kata lain pemerintah kabupaten MBD mampu mempertahankan dan meningkatkan PAD yang telah dicapai.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Machmud dkk (2014) di Propinsi Sulawesi Utara, mengatakan bahwa Rasio pertumbuhan kinerja di Provinsi Sulawesi Utara juga kemampuan daerah didalam menjalankan tugasnya kurang stabil karena mengalami rasio yang naik turun. Peningkatan realisasi rasio pertumbuhan di tahun 2007-2012 membawa *trend positif* dan *trend negatif* karena membawa efek yang belum bagus dalam mengelola peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam penelitian ini dimana pertumbuhanpendapata asli daerah (PAD) kabupaten MBD dari tahun 2011 sampai dengan dengan tahun 2015 selalu mengalami peningkatan.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	RKKD (%)	Kriteria Ketergantungan
2011	390.105.110.632,00	413.986.777.344,34	94,23%	Sangat Tinggi
2012	426.904.967.560,00	452.981.563.591,52	94,24%	Sangat Tinggi
2013	486.567.268.109,00	519.881.232.621,21	93,59%	Sangat Tinggi
2014	585.812.195.177,00	620.189.302.263,62	94,46%	Sangat Tinggi
2015	731.532.892.233,68	757.460.940.348,28	96,58%	Sangat Tinggi

Tingkat ketergantungan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan yang membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah menunjukkan peningkatan persentase yang sedikit berfluktuatif. Dimana pada tahun 2011 pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah sebesar 94,23%, tahun 2012 pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah sebesar 94,24%, kemudian tahun 2013 pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 93,59%, tahun 2014 pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah kembali naik yaitu sebesar 94,46%, dan tahun 2015 pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah sebesar 96,58%. Tingginya persentase ini menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten MBD menunjukkan angka rata-rata sebesar 94,62%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 96,58%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 93,59%. Angka di atas 50% memperlihatkan bahwa Kabupaten MBD masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini mendukung pendapat Mahmudi (2016:140) bahwa semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2015) yang melakukan penelitian di Kabupaten Rokan Hulu dijelaskan bahwa kinerja keuangan kabupaten Rokan Hulu jika dilihat dari Rasio ketergantungan keuangan daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sangat tinggi. Begitupun juga dalam penelitian ini dimana kinerja keuangan Kabupaten MBD jika dilihat dari Rasio ketergantungan keuangan daerah, sangat tergantung dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, jadi kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki ketergantungan terhadap subsidi pemerintah dari dana perimbangan.

E. SIMPILAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Maluku Barat Daya jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara keseluruhan dapat dikatakan sangat kurang, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.
2. Kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Maluku Barat Daya jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.
3. Kinerja keuangan DPKAD Kabupaten Maluku Barat Daya jika dilihat dari rasio efisiensi PAD tidak efisien karena rata-rata rasio efisiensi selama lima tahun tidak efisien.
4. Kinerja Keuangan DPKAD Kabupaten Maluku Barat Daya jika dilihat dari Rasio Aktivitas Pemerintah masih memprioritaskan dananya untuk belanja operasi.
5. Kinerja Keuangan DPKAD Kabupaten Maluku Barat Daya jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD kabupaten MBD dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami peningkatan, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD selalu meningkat, maka dengan kata lain pemerintah kabupaten MBD mampu mempertahankan dan meningkatkan PAD yang telah dicapai.
6. Kinerja Keuangan DPKAD Kabupaten Maluku Barat Daya jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Maluku Barat Daya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, karena dari rata-rata rasio ketergantungan selama periode 2011-2015 masih sangat tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat.

1. Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan untuk lebih mendalami lagi mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat dari pada penelitian ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kabupaten di Propinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Arfandi. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 – 2012. *Jurnal Ekonomi-Bisnis* 4 (1): 63-76.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi sektor publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Machmud, Machmud, Masita, George Kawung, dan Wensy Rompas. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 14 (2): 1-13.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurhayati, 2015. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 4 (1): 55-66.
- Nurhidayat. 2005. *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Among Makarti* 7 (13): 83-112.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Utomo, Danang. 2011. Analisa Rasio Keuangan Apbd Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. *Jurnal Educatio* 6 (2): 57-80.

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE INDEX, UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP BIAYA EKUITAS DAN BIAYA UTANG PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI

Kandida Ratna Tiffany¹; Dian Indri P.²

UPN "Veteran" Yogyakarta

indri_mtc@yahoo.com²

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of corporate governance index, the company size, ownership structure, and auditor's quality of equity and debt costs on mining companies which is listed on Indonesia stock exchange over the years 2011-2013. The sampling method used was purposive sampling method and acquired 106 companies that will be the object of the research. The research hypotheses were tested using multiple regression. The test results indicate that simultaneous factors Corporate Governance Index which is an indicator of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) proved to have no significant influence towards the cost of equity. And influential company size partially significantly to the cost of equity, whereas the variable family ownership structure and the quality of Auditors does not have an effect on the cost of equity, but to influential institutional ownership structure variables significantly to costs of equity. Besides that, Corporate Governance Index which is an indicator of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is proven to have no significant influence towards the cost of the company's debt. But influential the company size significantly to the cost of debt, while the variable family ownership structure, the structure of institutional ownership and the quality of Auditors does not have an effect on the cost of debt.

Keywords: *corporate governance index, the company size, family ownership, institutional ownership, auditor's quality, cost of equity, cost of debt.*

A. PENDAHULUAN

Corporate Governance telah menerima banyak perhatian di negara-negara berkembang, terutama setelah krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997-1998. Kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diyakini sebagai salah satu penyebab utama krisis tersebut. Di antaranya ialah sistem regulasi yang lemah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta dewan komisaris dan *board of directors* yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas (Bunkanwanicha *et al.*, 2006).

Selain mekanisme *corporate governance*, struktur kepemilikan diduga juga berpengaruh terhadap biaya ekuitas. Yao dan Sun (2008) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham mayoritas memiliki biaya ekuitas yang lebih tinggi dibanding perusahaan lainnya. Di satu sisi, kepemilikan keluarga dapat mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham. Namun, di sisi lain kepemilikan keluarga juga meningkatkan insentif untuk memperoleh keuntungan pribadi yang lebih besar. Attig *et al.* (2008) menyatakan bahwa ketika perusahaan dimiliki secara mayoritas oleh keluarga tertentu, risiko informasi menjadi lebih besar dan menyebabkan biaya ekuitas perusahaan menjadi

lebih tinggi. Berbeda dengan kepemilikan keluarga, penelitian yang dilakukan oleh Piot dan Missonier-Piera (2007), serta Roberts dan Yuan (2009) menemukan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya utang perusahaan yang diukur dengan *bond yield*.

Biaya modal ekuitas merupakan *rate of return* yang dipersyaratkan investor terhadap perusahaan. Hajiha *et al.* (2012) menyatakan bahwa kualitas audit yang baik akan dapat menurunkan *cost of equity capital*. Kualitas audit yang baik akan lebih banyak mengungkapkan informasi. Jika suatu perusahaan diaudit oleh KAP yang berkualitas baik, maka risiko yang diungkapkan auditor akan lebih banyak. Investor akan lebih mengetahui keadaan perusahaan dan asimetri informasi yang terjadi antara agen dan principal berkurang. Rendahnya tingkat asimetri informasi ini membuat principal mempercayai pihak agen. Kepercayaan yang diberikan oleh *principal* akan membuat *rate of return* yang dipersyaratkan investor semakin kecil. Auditor yang dipilih haruslah auditor yang berkualitas, sehingga hasilnya lebih meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang lebih berkualitas pula dibandingkan dengan informasi yang dihasilkan auditor yang tidak berkualitas. Auditor yang berkualitas dapat diprosikan dengan auditor *big four*, yaitu auditor yang bekerja pada kelompok KAP *big four*.

The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), suatu lembaga independen di Indonesia yang memiliki peran dalam internalisasi praktek *corporate governance* yang baik, secara konsisten telah melakukan penilaian tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Studi ini dimulai sejak tahun 2005 yang melibatkan 61 perusahaan publik terkemuka di Indonesia pada awalnya. Namun, saat ini penilaian yang dilakukan oleh IICD telah meliputi seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan utama dari *Corporate Governance Index* yang dipublikasikan oleh IICD ini adalah sebagai alat analisis untuk meningkatkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Tujuan utama lainnya adalah untuk memberikan informasi pada investor dan kreditur dalam menilai praktek *corporate governance* perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Evaluasi penerapan GCG ini berpedoman pada *International Standard Code on GCG* yang ditetapkan oleh *Organization of Economic Corporation and Development* (OECD) yang terdiri dari lima aspek utama, yaitu hak pemegang saham, perlakuan setara terhadap pemegang saham, peran *stakeholders*, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab pengelola perusahaan (IICD-CIPE Indonesia GCG Scorecard, 2007).

Teori Keagenan

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia yang disebutkan Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), manajer sebagai *agent* akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan konflik dalam hubungan antara principal dan agen (*agency conflict*). Konflik ini timbul sebagai akibat keinginan manajemen (agen) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (prinsipal) untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam satu perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002). Kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola ini disebut juga dengan *agency problem*.

Corporate Governance

Seperti yang dikutip oleh Susilo dan Simarmata (2007) definisi mengenai *corporate governance* pertama kali dikeluarkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 menyatakan bahwa, "*corporate governance* adalah sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perseroan". Sedangkan *International Chamber of Commerce* yang dikutip oleh Susilo dan Simarmata (2007) memberikan definisi bahwa, "*corporate governance* adalah suatu tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, pemodal, masyarakat dan institusi lain yang ikut menginvestasikan uangnya pada perseroan serta mengharapkan imbalan atas investasinya tersebut.

Corporate governance juga harus memastikan bahwa direksi bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pencapaian sasaran perseroan serta memastikan bahwa perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Corporate Governance Index

Manfaat utama bagi perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* adalah mendapatkan kepercayaan dari investor dan masyarakat. *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) adalah suatu lembaga independen di Indonesia yang didirikan untuk menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik dengan mempromosikan perilaku perusahaan yang etis dan meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, serta kemampuan direksi dan dewan komisaris perusahaan. Aktivitas IICD berkonsentrasi pada pendidikan profesional bagi direktur dan komisaris, penelitian tentang *governance* perusahaan, direktur, dan kinerja, serta advokasi dalam pendidikan dan penelitian. Peran penting IICD adalah internalisasi praktek *corporate governance* yang baik dimana IICD secara konsisten telah melakukan penilaian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Studi ini dimulai sejak tahun 2005 yang melibatkan 61 perusahaan publik terkemuka di Indonesia pada awalnya. Namun saat ini penilaian yang dilakukan oleh IICD telah meliputi seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total penjualan, total asset, nilai pasar saham, jumlah karyawan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi natural log total aset untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston 2001).

Struktur Kepemilikan

1. Kepemilikan Keluarga

Keluarga sebagai pemegang saham mayoritas dapat menggunakan tingkat pengendalian yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi pada beban yang ditanggung oleh pemegang saham minoritas. Pernyataan ini didukung oleh sebuah riset yang dilakukan oleh ekonom Bank Dunia pada tahun 1998 yang mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 1993 sampai tahun 1997, lebih dari 60% saham perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) hanya dikuasai oleh sepuluh keluarga terkaya di Indonesia (Fajari, 2004). Dengan kepemilikan perusahaan Indonesia yang demikian, kerap terjadi sengketa kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Sengketa kepentingan pada perusahaan publik di Indonesia disebabkan karena pemegang saham mayoritas umumnya memiliki kontrol yang sangat besar terhadap perusahaan tersebut.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya (Juniarti dan Sentosa, 2009). Adanya kepemilikan saham oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena mereka memiliki *voting power* untuk mengadakan perubahan pada saat manajemen sudah dianggap tidak efektif lagi dalam mengelola perusahaan (Ashbaugh *et al.*, 2004).

Kualitas Auditor

Laporan keuangan auditan yang berkualitas, relevan dan reliabel dihasilkan dari audit yang dilakukan secara efektif oleh auditor yang berkualitas. Pengguna laporan keuangan lebih memprioritaskan laporan keuangan auditan yang diaudit oleh auditor yang dianggap berkualitas tinggi karena mereka menganggap bahwa untuk mempertahankan kredibilitasnya, auditor akan lebih bersikap hati-hati dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi salah saji atau kecurangan (Sandra, 2004) dalam (Isnugrahi dan Wijaya Indra, 2009).

Biaya Ekuitas

Menurut Bodie, Kane, dan Marucus (2009), biaya ekuitas adalah suatu *rate* tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan untuk dapat memenuhi imbalan yang diharapkan (*expected return*) oleh para pemegang saham biasa (*common stockholders*) atas dana yang telah ditanamkan pada perusahaan tersebut sesuai dengan risiko yang diterimanya. Biaya ekuitas juga dapat diartikan sebagai suatu tingkat diskonto (*discount rate*) dari arus kas masa depan yang diharapkan (*expected future cash flows*) oleh pemegang saham biasa (Yao dan Sun, 2008). Perhitungan biaya ekuitas yang dapat mencerminkan *expected return* yang disesuaikan dengan risiko akan menjadi penting untuk mengetahui biaya ekuitas perusahaan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi.

Biaya Utang

Debt biasanya digunakan sebagai salah satu alternative pendanaan bagi perusahaan karena memberikan keuntungan berupa *tax savings* yang disebabkan bunga pinjaman bersifat *tax deductible* sehingga pada akhirnya mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Ketika membuat keputusan investasi, kreditur biasanya akan memperkirakan profil risiko dari perusahaan. Profil risiko ini akan menentukan *required return* yang diinginkan oleh kreditur atau disebut juga dengan biaya utang (Blom dan Schauten, 2006).

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Derwall dan Verwijmeren (2007) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kualitas *corporate governance* yang baik memiliki biaya ekuitas yang rendah. Dalam penelitiannya, Derwall dan Verwijmeren (2007) menggunakan *Governance Metrics International* (GMI) untuk menilai praktek *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan publik di Amerika. Selain biaya ekuitas, kualitas *corporate governance* juga dianggap turut mempengaruhi besarnya biaya utang.

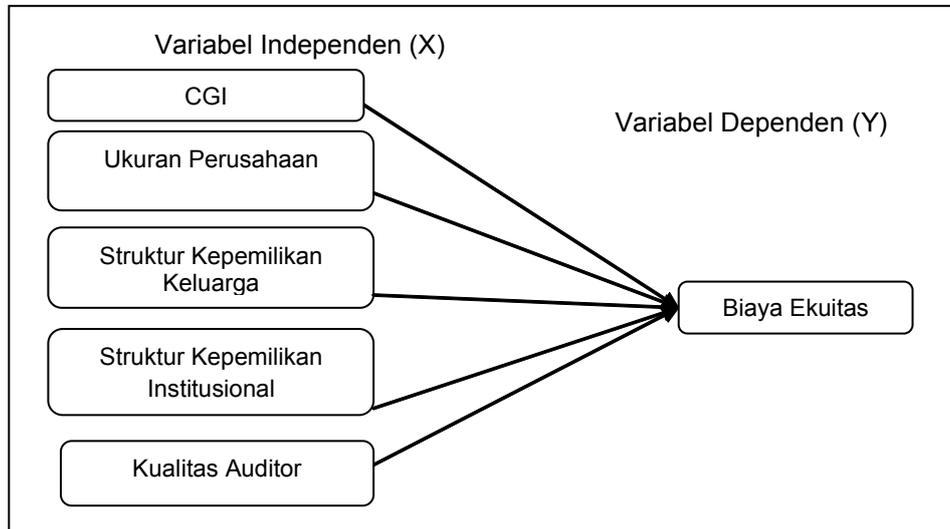
Attig *et al.* (2008) berpendapat bahwa ketika perusahaan dimiliki secara mayoritas keluarga tertentu, risiko informasi menjadi lebih besar karena terdapat kemungkinan bahwa mereka mengetahui dan menguasai seluruh informasi tentang perusahaan sehingga tingkat asimetri informasi pun akan menjadi lebih besar. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan biaya ekuitas perusahaan menjadi lebih tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Boubakri dan Ghouma (2010) ketika kepemilikan keluarga adalah pemegang saham mayoritas perusahaan, mereka memiliki kecenderungan menggunakan kontrol yang dimiliki untuk merugikan kepentingan pihak kreditur (*debtholders*). Akibatnya, kreditur mengantisipasi risiko tersebut dengan biaya utang yang lebih tinggi.

Juniarti dan Sentosa (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa investor institusional diyakini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memonitor tindakan manajemen dibandingkan dengan investor individual dimana investor institusional tidak mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen. Berkurangnya perilaku oportunistik manajemen akan mengarah pada berkurangnya *agency cost* dan biaya ekuitas yang lebih rendah. Dalam penelitian Juniarti dan Sentosa (2009) juga menguji apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap biaya utang perusahaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya utang perusahaan.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh *Corporate Governance Index*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan kualitas auditor terhadap biaya ekuitas dan biaya utang. Adapun gambar model penelitian sebagai berikut:

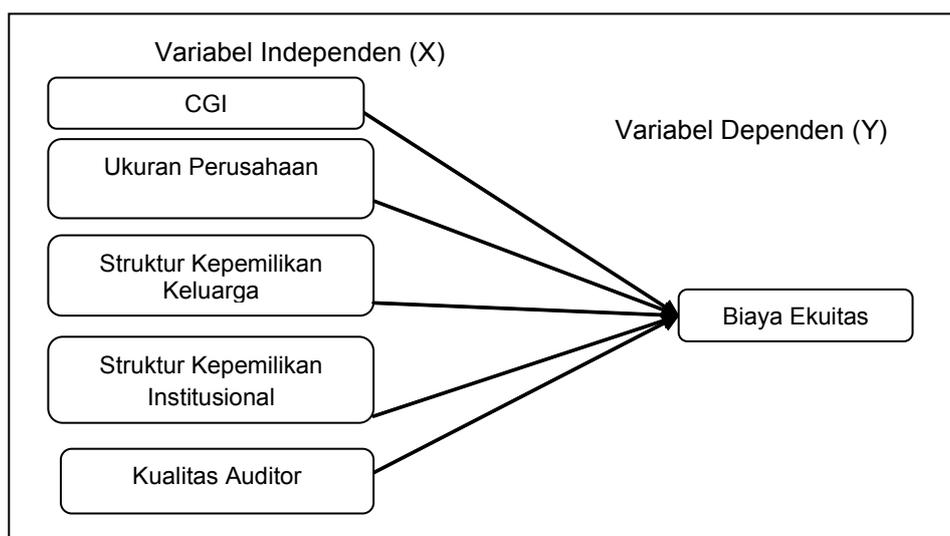
Gambar Kerangka Konseptual Model Penelitian I



Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H_{1a} : *Corporate governance index* berpengaruh terhadap biaya ekuitas
- H_{1b} : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya ekuitas
- H_{1c} : Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap biaya ekuitas
- H_{1d} : Struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya ekuitas.
- H_{1e} : Kualitas auditor berpengaruh terhadap biaya ekuitas

Kerangka Konseptual Model Penelitian II



Gambar 2
Kerangka Konseptual Model Penelitian

Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H_{2a} : *Corporate governance index* berpengaruh terhadap biaya utang
 H_{2b} : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang
 H_{2c} : Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap biaya utang
 H_{2d} : Struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang
 H_{2e} : Kualitas auditor berpengaruh terhadap biaya utang

Metode Penelitian

Data yang dikumpulkan berdasarkan dimensi waktu dan urutan waktu penelitian ini bersifat cross-sectional atau disebut data panel (data pooled), karena selain mengambil sampel waktu dan kejadian pada suatu waktu tertentu juga mengambil sampel berdasarkan urutan waktu. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2013, yaitu sebanyak 42 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Adapun pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki periode akhir tahun 31 Desember selama tahun 2011-2013 secara berturut-turut dan lengkap beserta laporan tahunannya.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Tabel Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Deskripsi	Indikator
Biaya Ekuitas	Suatu <i>rate</i> tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan untuk dapat memenuhi imbalan yang diharapkan (<i>expected return</i>) oleh para pemegang saham biasa (<i>common stockholders</i>) atas dana yang telah ditanamkan pada perusahaan tersebut sesuai dengan risiko yang diterimanya.	$COE = R_f + \beta R_p$
Biaya Utang	Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan.	$K_i = K_d (1 - T)$
<i>Corporate Governance Index</i>	Sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perseroan.	$CGI = \sum_n^x$
Ukuran Perusahaan	Besar kecilnya perusahaan dapat didasarkan pada total aset yang dimiliki perusahaan.	Ukuran Perusahaan = (Ln) Total Aset
Struktur Kepemilikan Keluarga	Perusahaan yang mayoritas kepemilikan saham dan lainnya dikendalikan oleh pihak keluarga.	Nilai 1 untuk kepemilikan keluarga 20% atau lebih dan untuk kepemilikan kurang dari 20% diberi nilai 0.
Struktur Kepemilikan Institusional	Kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya.	Nilai 1 untuk kepemilikan institusional 20% atau lebih dan untuk kepemilikan kurang dari 20% diberi nilai 0.
Kualitas Auditor	Probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang ada atau tidaknya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya.	Nilai 1 untuk KAP <i>Big Four</i> dan untuk KAP <i>Non Big Four</i> diberi nilai 0.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari 42 perusahaan pertambangan diperoleh 38 sebagai sampel, karena terdapat 4 perusahaan yang tidak mengumpulkan laporan keuangan selama periode 2011-2013 secara berturut-turut dan tidak memiliki data lengkap yang dibutuhkan

Statistik Deskriptif

Tabel Statistik Deskriptif Setelah *Outlier*
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Corporate Governance Index	106	50.00	78.45	68.5101	6.71191
Ukuran Perusahaan	106	22.90	35.50	28.8547	2.03411
Struktur Kepemilikan Keluarga	106	0	1	.09	.294
Struktur Kepemilikan Institusional	106	0	1	.92	.280
Kualitas Auditor	106	0	1	.47	.502
Biaya Ekuitas	106	14.44	18.45	17.0515	1.77327
Biaya Utang	106	.0000536	.2364189	.083979944	.0655715097
Valid N (listwise)	106				

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Uraian dari hasil *Descriptive Statistics* adalah sebagai berikut:

Rata-rata *Corporate Governance Index* adalah 68.5101 (dalam rentang 50.00 hingga rentang 78.45) dan nilai standar deviasinya adalah 6.71191. Sesuai dengan kriteria penilaian praktek GCG yang ditetapkan oleh IICD, rata-rata perusahaan berada dalam kategori *fair*. Rata-rata ukuran perusahaan yang diprosikan dengan *natural log* (Ln) total aset adalah 28.8547 (dalam rentang 22.90 hingga rentang 35.50) dan nilai standar deviasinya adalah 2.03411. Struktur Kepemilikan Keluarga menggunakan variabel dummy sehingga nilai minimum berada pada 0 dan nilai maksimum berada pada 1. Rata-rata Struktur Kepemilikan Keluarga adalah 0.09 dan nilai standar deviasinya adalah 0.294. Selain struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional dan kualitas auditor juga menggunakan variabel dummy yang nilai minimumnya berada pada 0 dan nilai maksimum berada pada 1. Rata-rata Struktur Kepemilikan Institusional adalah 0.92 dan nilai standar deviasinya adalah 0.280. Dan rata-rata Kualitas Auditor adalah 0.47 dan nilai standar deviasinya adalah 0.502. Rata-rata Biaya Ekuitasperusahaan pertambangan adalah 17.0515 dan nilai standar deviasinya adalah 1.77327. Sedangkan rata-rata Biaya Utang perusahaan pertambangan adalah 0.083979944 dan nilai standar deviasinya adalah 0.0655715097.

Uji Asumsi Klasik**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan dengan melihat uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* :

Tabel Uji Normalitas Setelah *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.53911201
Most Extreme Differences	Absolute	.257
	Positive	.145
	Negative	-.257
Kolmogorov-Smirnov Z		2.647
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Hasil dari *output* SPSS mengenai uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji statistik non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dari pengujian ini memiliki nilai Asymptotic Significance (2-tailed) 0.000, dimana hasil tersebut lebih kecil dari 0.05 dan data tersebut dapat dikatakan data masih tidak terdistribusi secara normal.

Namun, Gujarati (2006) menyebutkan bahwa teorema limit sentral (TLS) menyatakan bahwa kurva distribusi sampling (untuk ukuran sampel 30 atau lebih) akan berpusat pada nilai parameter populasi dan akan memiliki semua sifat-sifat distribusi normal. Oleh karena ukuran sampel dalam penelitian ini lebih dari 30, maka menurut teorema limit sentral (TLS) data dapat dikatakan data akan mendekati normal.

b. Uji Multikolinearitas**Tabel Uji Multikolinearitas**

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
CORPORATE GOVERNANCE INDEX	.923	1.083
UKURAN PERUSAHAAN	.860	1.162
STRUKTUR KEPEMILIKAN KELUARGA	.831	1.203
STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	.854	1.171
KUALITAS AUDITOR	.895	1.117

a. Dependent Variable: BIAYA EKUITAS

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* yang kurang dari 0,1. Sedangkan nilai VIF untuk semua variabel bebas kurang dari 10 (sepuluh). Hal ini berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari masalah multikolinearitas.

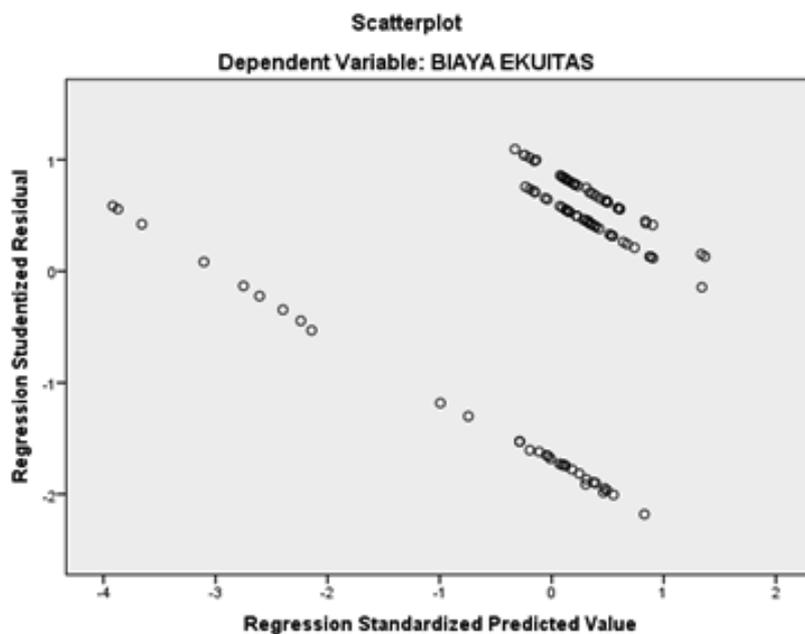
c. Uji Autokorelasi

Tabel Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.497 ^a	.247	.209	1.57712	.543	
A. Predictors: (Constant), Kualitas Auditor, Struktur Kepemilikan Institusional, Corporate Governance Index, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Keluarga						
B. Dependent Variable: Biaya Ekuitas						

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson pada Tabel 4.7 diperoleh hasil 0.543. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen (k=5), nilai signifikansi 5%, dan jumlah sampel sebanyak 106 (n=106), dasar hal tersebut maka dapat diketahui du yang diperoleh dari tabel Durbin Watson sebesar 1.7832. Oleh karena nilai DW 0.543 lebih kecil dari batas atas (du) 1.7832 dan kurang dari 4 – 1.7832 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif (lihat tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas.



Gambar Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik tidak menyebar secara acak serta tidak tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi homogen pada model regresi, sehingga model regresi belum layak dipakai untuk memprediksi biaya ekuitas berdasarkan masukan variabel independen *corporate governance index*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional dan kualitas auditor.

Model Penelitian II**a. Uji Normalitas****Tabel Uji Normalitas Setelah Outlier**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.06178280
Most Extreme Differences	Absolute	.143
	Positive	.143
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		1.471
Asymp. Sig. (2-tailed)		.026
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Hasil dari *output* SPSS mengenai uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji statistik non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dari pengujian ini memiliki nilai Asymptotic Significance (2-tailed) 0.026, dimana hasil tersebut lebih kecil dari 0.05 dan data tersebut dapat dikatakan data masih tidak terdistribusi secara normal.

Namun, Gujarati (2006) menyebutkan bahwa teorema limit sentral (TLS) menyatakan bahwa kurvadistribusisampling (untuk ukuran sampel 30 atau lebih) akan berpusat pada nilai parameterpopulasidan akan memiliki semua sifat-sifat distribusi normal. Oleh karena ukuran sampel dalam penelitian ini lebih dari 30, maka menurut teorema limit sentral (TLS) data dapat dikatakan data akan mendekati normal.

b. Uji Multikolinearitas**Tabel Uji Multikolinearitas**

		Coefficients ^a	
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Corporate Governance Index	.923	1.083
	Ukuran Perusahaan	.860	1.162
	Struktur Kepemilikan Keluarga	.831	1.203
	Struktur Kepemilikan Institusional	.854	1.171
	Kualitas Auditor	.895	1.117

Dependent Variable: BIAYA UTANG

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* yang kurang dari 0,1. Sedangkan nilai VIF untuk semua variabel bebas kurang dari 10 (sepuluh). Hal ini berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari masalah multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel Uji Autokorelasi

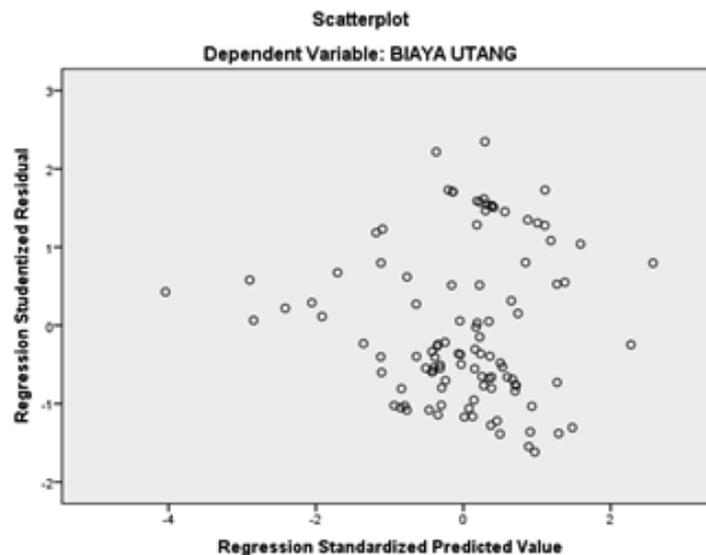
Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.335 ^a	.112	.068	.0633085308	2.056

A. Predictors: (Constant), Kualitas Auditor, Struktur Kepemilikan Institusional, Corporate Governance Index, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Keluarga
 B. Dependent Variable: Biaya Utang

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson pada Tabel 4.16 diperoleh hasil 2.056. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen ($k=5$), nilai signifikansi 5%, dan jumlah sampel sebanyak 106 ($n=106$), dasar hal tersebut maka dapat diketahui du yang diperoleh dari tabel Durbin Watson sebesar 1.7832. Oleh karena nilai DW 2.056 lebih besar dari batas atas (du) 1.7832 dan kurang dari $4 - 1.7832$ ($4 - du$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif (lihat tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas



Gambar Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi biaya ekuitas berdasarkan masukan variabel independen *corporate governance index*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional dan kualitas auditor.

Uji Hipotesis

Model Penelitian I

a. Analisis Regresi Berganda

Tabel Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized		Standardized		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.804	2.586		3.791	.000
Corporate Governance Index	-.007	.024	-.026	-.289	.773
1 Ukuran Perusahaan	.165	.082	.189	2.023	.046
Struktur Kepemilikan Keluarga	.846	.575	.140	1.472	.144
Struktur Kepemilikan Institusional	3.245	.595	.513	5.457	.000
Kualitas Auditor	-.194	.324	-.055	-.599	.550

a. Dependent Variable: BIAYA EKUITAS

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.12 di atas, maka persamaan regresinya adalah:

$$\text{Biaya Ekuitas} = 9,804 - 0,007 \text{ CORPORATE GOVERNANCE INDEX} + 0,165 \text{ UKURAN Perusahaan} + 0,846 \text{ Struktur Kepemilikan Keluarga} + 3.245 \text{ Struktur Kepemilikan Institusional} - 0,194 \text{ Kualitas Auditor}$$

Persamaan regresi di atas mempunyai makna sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 9,804. Hal ini mengindikasikan bahwa jika variabel independen bernilai nol, maka besarnya biaya ekuitas adalah sebesar 9,804 satuan.
2. Koefisien regresi untuk variabel X_1 yaitu *corporate governance index* sebesar $-0,007$. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa *corporate governance index* berpengaruh negatif terhadap biaya ekuitas. Hal ini menggambarkan ketika *corporate governance index* semakin tinggi, maka biaya ekuitas semakin kecil.
3. Koefisien regresi untuk variabel X_2 yaitu variabel ukuran perusahaan sebesar 0,165. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya ekuitas. Hal ini menggambarkan ketika ukuran perusahaan semakin besar, maka biaya ekuitas semakin besar.
4. Koefisien regresi untuk variabel X_3 yaitu variabel struktur kepemilikan keluarga sebesar 0,846. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap biaya ekuitas. Hal ini menggambarkan ketika struktur kepemilikan keluarga semakin besar, maka biaya ekuitas semakin besar.
5. Koefisien regresi untuk variabel X_4 yaitu variabel struktur kepemilikan institusional sebesar 3,245. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap biaya ekuitas. Hal ini menggambarkan ketika struktur kepemilikan institusional semakin besar, maka biaya ekuitas semakin besar.
6. Koefisien regresi untuk variabel X_5 yaitu variabel kualitas auditor sebesar $-0,194$. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap biaya ekuitas. Hal ini menggambarkan ketika kualitas auditor semakin baik, maka biaya ekuitas semakin kecil.

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.497 ^a	.247	.209	1.57712

a. Predictors: (Constant), Kualitas Auditor, Struktur Kepemilikan Institusional, Corporate Governance Index, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Keluarga
 b. Dependent Variable: BIAYA EKUITAS

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Pada table diatas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R square* sebesar 0.209. Hal ini berarti 20,9% variabel *corporate governance index*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional, dan kualitas auditor dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel biaya ekuitas, sedangkan sisanya sebesar 79,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam variabel penelitian ini. Sedangkan untuk koefisien korelasi (R) sebesar 0.497. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tinggi antara *corporate governance index*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional, dan kualitas auditor dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel biaya ekuitas.

c. Uji F

Tabel Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	81.441	5	16.288	6.549	.000 ^b
Residual	248.731	100	2.487		
Total	330.172	105			

A. Dependent Variable: Biaya Ekuitas
 B. Predictors: (Constant), Kualitas Auditor, Struktur Kepemilikan Institusional, Corporate Governance Index, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Keluarga

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Hasil regresi secara simultan menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini, yakni *corporate governance index*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional, dan kualitas auditor secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap biaya ekuitas. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

d. Uji t

Dari tabel hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa :

- 1) Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel *corporate governance index* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya ekuitas. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi *corporate governance index* (0,773) > α (0,05).
- 2) Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap biaya ekuitas. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi ukuran perusahaan (0,046) < α (0,05).

- 3) Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya ekuitas. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi struktur kepemilikan keluarga $(0,144) > \alpha (0,05)$.
- 4) Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap biaya ekuitas. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi struktur kepemilikan institusional $(0,000) < \alpha (0,05)$.
- 5) Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya ekuitas. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi kualitas auditor $(0,550) < \alpha (0,05)$.

C. PEMBAHASAN

Pengaruh *Corporate Governance Index* terhadap Biaya Ekuitas

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel *corporate governance index* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya ekuitas. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Derwall dan Verwijmeren (2007), Byun *et al.* (2008), dan Chen *et al.* (2009) yang menunjukkan bahwa praktek *corporate governance* memiliki hubungan negatif dengan biaya ekuitas. Dalam hal ini, perusahaan dengan kualitas *corporate governance* yang lebih baik memiliki biaya ekuitas yang lebih rendah. Penerapan *good corporate governance* diyakini dapat mengurangi *agency problem* dan risiko asimetri informasi yang kerap terjadi antara perusahaan dengan pemegang saham. Maka, hipotesis yang menyatakan *corporate governance index* berpengaruh terhadap biaya ekuitas **ditolak**.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Ekuitas

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap biaya ekuitas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) yang menentukan besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilakukan menggunakan total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Maka, hipotesis yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya ekuitas **diterima**.

Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga terhadap Biaya Ekuitas

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya ekuitas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Guedhami dan Mishra (2006) yang membuktikan bahwa *excess control* yang ditemukan pada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan sebagai akibatnya, biaya ekuitas perusahaan menjadi lebih tinggi. Maka, hipotesis yang menyatakan struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap biaya ekuitas **ditolak**.

Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap biaya ekuitas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Sentosa (2009) yang menegaskan bahwa investor institusional memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memonitor tindakan manajemen dibandingkan dengan investor individual dimana investor institusional tidak mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen. Selain itu, investor institusional yang umumnya juga berperan sebagai fidusiari, memiliki insentif yang lebih besar untuk memantau tindakan manajemen dan kebijakan perusahaan. Kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya perilaku oportunistik manajemen yang mengarah pada biaya ekuitas yang lebih rendah. Maka, hipotesis yang menyatakan struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya ekuitas **diterima**.

Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Biaya Ekuitas

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya ekuitas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2012) yang menyatakan bahwa Komite Audit yang masuk dalam *big four* memiliki kualitas audit yang lebih baik karena memiliki pemahaman lebih atas proses penyusunan laporan keuangan sehingga risiko informasi yang dimiliki oleh investor akan berkurang dan *required rate of return* akan lebih rendah. Maka, hipotesis yang menyatakan kualitas auditor berpengaruh terhadap biaya ekuitas **ditolak**.

Model Penelitian II

a. Analisis Regresi Berganda

Tabel Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error			
(Constant)	.302	.104		2.904	.005
CORPORATE GOVERNANCE INDEX	.000	.001	-.033	-.341	.734
UKURAN PERUSAHAAN	-.008	.003	-.250	-2.465	.015
1 STRUKTUR KEPEMILIKAN KELUARGA	-.016	.023	-.073	-.708	.480
STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	.040	.024	.172	1.684	.095
KUALITAS AUDITOR	.005	.013	.041	.412	.681

a. Dependent Variable: BIAYA UTANG

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.13 di atas, maka persamaan regresinya adalah:

$$\text{Biaya Utang} = 0.302 + 0,000 \text{ CORPORATE GOVERNANCE INDEX} - 0,008 \text{ UKURAN PERUSAHAAN} - 0,016 \text{ STRUKTUR KEPEMILIKAN KELUARGA} + 0,040 \text{ STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL} + 0,005 \text{ KUALITAS AUDITOR}$$

Persamaan regresi di atas mempunyai makna sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,302. Hal ini mengindikasikan bahwa jika variabel independen bernilai nol, maka besarnya biaya utang adalah sebesar 0,302 satuan.
2. Koefisien regresi untuk variabel X_1 yaitu *corporate governance index* sebesar 0,000. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa *corporate governance index* berpengaruh positif terhadap biaya utang. Hal ini menggambarkan ketika *corporate governance index* semakin tinggi, maka biaya utang semakin besar.
3. Koefisien regresi untuk variabel X_2 yaitu variabel ukuran perusahaan sebesar -0,008. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Hal ini menggambarkan ketika ukuran perusahaan semakin besar, maka biaya utang semakin kecil.
4. Koefisien regresi untuk variabel X_3 yaitu variabel struktur kepemilikan keluarga sebesar -0,016. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa struktur kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Hal ini menggambarkan ketika struktur kepemilikan keluarga semakin besar, maka biaya utang semakin kecil.
5. Koefisien regresi untuk variabel X_4 yaitu variabel struktur kepemilikan institusional sebesar 0,040. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap biaya utang.

biaya utang. Hal ini menggambarkan ketika struktur kepemilikan institusional semakin besar, maka biaya utang semakin besar.

6. Koefisien regresi untuk variabel X_5 yaitu variabel kualitas auditor sebesar 0,005. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap biaya utang. Hal ini menggambarkan ketika kualitas auditor semakin besar, maka biaya utang semakin besar.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.335 ^a	.112	.068	.0633085308

A. Predictors: (Constant), Kualitas Auditor, Struktur Kepemilikan Institusional, Corporate Governance Index, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Keluarga
B. Dependent Variable: Biaya Utang

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R square* sebesar 0.068. Hal ini berarti 6,8% variabel *corporate governance index*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional, dan kualitas auditor dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel biaya utang, sedangkan sisanya sebesar 93,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam variabel penelitian ini. Sedangkan untuk koefisien korelasi (R) sebesar 0.258. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang rendah antara *corporate governance index*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional, dan kualitas auditor dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel biaya utang.

c. Uji F

Tabel Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.051	5	.010	2.528	.034 ^b
	Residual	.401	100	.004		
	Total	.451	105			

a. Dependent Variable: BIAYA UTANG

b. Predictors: (Constant), Kualitas Auditor, Struktur Kepemilikan Institusional, Corporate Governance Index, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Keluarga

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Hasil regresi secara simultan menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini, yakni *corporate governance index*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional, dan kualitas auditor secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap biaya utang. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi 0,034 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

d. Uji t

Dari tabel hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa :

- 1) Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel *corporate governance index* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi *corporate governance index* ($0,734 > \alpha (0,05)$).
- 2) Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi ukuran perusahaan ($0,015 < \alpha (0,05)$).
- 3) Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi struktur kepemilikan keluarga ($0,480 > \alpha (0,05)$).
- 4) Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi struktur kepemilikan institusional ($0,095 > \alpha (0,05)$).
- 5) Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi kualitas auditor ($0,681 > \alpha (0,05)$).

D. PEMBAHASAN**Pengaruh *Corporate Governance Index* terhadap Biaya Utang**

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel *corporate governance index* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang. Diperkuat dengan penelitian Missonier-Piera (2007) yang menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap *cost of debt*. Dalam hal ini, *corporate governance* dipandang sebagai mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi potensi *conflict of interest* antara manajemen dan pihak kreditur dengan meningkatkan pemantauan terhadap tindakan manajemen dan mengurangi risiko *misallocation of funds* yang ditanggung oleh kreditur. Penelitian-penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang efektif adalah salah satu indikator penting yang sangat dipertimbangkan oleh kreditur ketika menentukan *risk premium* perusahaan. Dengan demikian, *corporate governance* merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pengambilan keputusan kreditur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil pengujian hipotesis ini dapat dikatakan mendukung pernyataan-pernyataan tersebut. Maka, hipotesis yang menyatakan *Corporate Governance Index* berpengaruh terhadap biaya utang **ditolak**.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sudarmadji dan Sularto (2007) yang menentukan besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilakukan menggunakan total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva, maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat. Maka, hipotesis yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang **diterima**.

Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga terhadap Biaya Utang

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ayub (2008) yang menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

Hal ini mengindikasikan bahwa pihak kreditur cenderung untuk tidak memperhatikan proporsi kepemilikan keluarga dalam menentukan biaya utang yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dengan kata lain, besar kecilnya proporsi kepemilikan keluarga tidak menggambarkan suatu risiko tertentu. Maka, hipotesis yang menyatakan struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap biaya utang **ditolak**.

Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Utang

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Sentosa (2009) serta Koesnadi (2010) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya utang. Hal ini dikarenakan pihak investor institusional diyakini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memonitor tindakan manajemen dibandingkan dengan investor individual. Selain itu, pihak institusional yang umumnya berperan sebagai fidusiari, memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak manajemen dan kebijakan perusahaan. Adanya *monitoring* yang efektif oleh pihak institusional dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen sehingga menyebabkan risiko perusahaan menjadi lebih kecil dan *return* yang diinginkan oleh kreditur pun menjadi lebih rendah. Maka, hipotesis yang menyatakan struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang **ditolak**.

Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Biaya Utang

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya utang. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim dkk (2007) menunjukkan bahwa bank-bank mengenakan biaya pinjaman lebih rendah untuk perusahaan yang diaudit KAP Big-4 daripada perusahaan yang diaudit KAP non Big-4. Bank memperhitungkan kualitas audit ketika menilai kualitas pelaporan keuangan dan menentukan kontrak perjanjian pinjaman. Maka, hipotesis yang menyatakan kualitas auditor berpengaruh terhadap biaya utang **ditolak**.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Corporate Governance Index* yang merupakan indikator dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya ekuitas. Dan secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap biaya ekuitas, sedangkan variabel struktur kepemilikan keluarga dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap biaya ekuitas, namun untuk variabel struktur kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya ekuitas
- b. *Corporate Governance Index* yang merupakan indikator dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya utang perusahaan. Namun ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, sedangkan variabel struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap biaya utang.

Saran

Mengingat hasil penelitian ini memiliki keterbatasan, maka peneliti mengajukan beberapa saran perbaikan untuk penelitian mengenai biaya ekuitas dan biaya utang di masa yang akan datang, yaitu:

- a. Sebaiknya penelitian berikutnya menambahkan periode waktu penelitian sehingga lebih dari 3 tahun, sehingga dapat dibedakan dengan penelitian ini dan dapat diperoleh gambaran yang mendekati keadaan sebenarnya mengenai pengaruh *corporate governance index*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan kualitas auditor terhadap biaya ekuitas dan biaya utang.

- b. Menggunakan proksi lain yang lebih tepat untuk mengukur biaya ekuitas perusahaan, misalnya dengan *residual income model* yang mendefinisikan biaya ekuitas sebagai tingkat diskonto untuk menilaitunaikan (mem-*present value*-kan) penghasilan residu masa depan sesuai dengan harga saham saat ini, dengan periode penelitian yang lebih panjang sehingga total observasi yang diperoleh lebih banyak.
- c. Menambah unsur-unsur *corporate governance* yang lain, seperti mengkaji efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, dan lain sebagainya secara lebih mendalam sehingga lebih mencerminkan praktek *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Irfan. 2002. *Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi*. Lintasan Ekonomi Vol. XIX. No. 2. Juli 2002.
- Amurwani, Aniek. (2006). *Pengaruh Luas Pengungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi terhadap Cost of Equity Capital*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Asbaugh, Hollis, Collins, Daniel W., LaFond, Ryan. 2004. *Corporate governance and the cost of equity capital*. Working paper, University of Wisconsin.
- Attig, N., Guedhami, Mishra, D. 2008. *Multiple large shareholders, control contests, and implied cost of equity*. Journal of Corporate Finance 14, 721-737.
- Blom, Jasper dan Marc B. J. Schauten. 2006. *Corporate Governance and The Cost of Debt*. Erasmus University, Rotterdam.
- Bodie, Z., A.Kane, dan A.J. Marcus. 2009. *Investment*. 8th Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., USA.
- Boubakri, Narjess, dan H. Ghouma. 2010. *Control/ownership structure, creditor rights protection, and the cost of debt financing: International evidence*. Journal of Banking and Finance 34, 2481-2499.
- Brigham, Eugene dan Joel F Houston. 2001. *Manajemen Keuangan II*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bunkanwanicha, P., Gupta, J., dan Rokhim, R. 2006. *Debt and entrenchment: Evidence from Thailand and Indonesia*. The Journal of Operational Research 185, 1578-1595.
- Chen, Y.M. dan Jian J.Y. 2006. *The Impact of Information Disclosure and Transparency Rankings System (IDTRs) and Corporate Governance Structure on Interest Cost of Debt*. Working Paper, National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan.
- Claessens, S., Djankov, S., Lang, L.H.P. 2000. *The separation of ownership and control in East Asian corporations*. Journal of Financial Economics 58, 81-112.
- Collins, Denton, and H. Huang. 2010. Management Entrenchment and the Cost of Equity Capital. *Journal of Business Research* 64, 356-362.
- Derwall, Jeroen, dan Patrick Verwijmeren. 2007. *Corporate Governance and The Cost of Equity Capital: Evidence from GMI's Governance Rating*. European Centre for Corporate Governance Research Note, RSM Erasmus University, The Netherlands.
- Fabozzi, Frank J. 2007. *Bond Market, Analysis and Strategies*. Prentice-Hall, Inc., 4th edition.
- Fajari, A. Adriansyah. 2004. *Good Corporate Governance, Sebuah Keharusan*. 2 September 2011. http://www.kompas.com/bisnis_dan_investasi/htm

- FCGI. 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Jilid 1. FCGI, edisi 3.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19 (edisi kelima)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar N. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Hajiha, Zohreh and Rafiee, Azadeh. 2012. *The Impact of Internal Audit Function Quality on Audit Delays*. Middle-East Journal of Scientific Research. 10, (3), 389-397.
- IICD-CIPE Indonesia GCG Scorecard 2007
- Isnugrahadi, I., dan Indra, W.K. 2009. *Pengaruh Kecakapan Manajerial terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi*. Simposium Nasional Akuntansi 12 Palembang, 4-6 November 2009.
- Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Kedua. BPFY-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Juniarti dan A. A. Sentosa. 2009. *Pengaruh Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure terhadap Biaya Utang (Cost of Debt)*. Jurnal Akuntansi Keuangan, Vol. 11, No. 2, November, 88-100.
- Koesnadi, Ruddy. 2010. *Pengaruh Tingkat Pengungkapan dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Pinjaman: Studi Empiris atas Emiten LQ45*. Tesis FEUI.
- Piot, C., dan Piera, F.M. 2007. *Corporate Governance, Audit Quality, and The Cost of Debt Financing of French Listed Companies*.
- Roberts, G.S., dan Yuan, L. 2009. *Does Institutional Ownership Affect the Cost of Bank Borrowing?* Working Paper, York University.
- Ryandini, Diandra. 2015. *Pengaruh Independensi, Pengalaman, Motivasi dan Kompleksitas Audit terhadap Kualitas Audit (Survei pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta)*. Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta.
- Susilo, Leo. J. dan Simarmata, Karlen. 2007. *Good Corporate Governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya*. Jakarta: PT Hikayat Dunia.
- Syadeli, Moh. 2013. Struktur Kepemilikan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Pemanufakturan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* Vol. 2.
- Ujiyantho, Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Villalonga, Belen, dan Raphael Amit. 2005. *How do family ownership, control, and management affect firm value?* Journal of Financial Economics 80, 385-417.
- www.idx.co.id
- Yao, Alex. J., dan Sunny Y. J. Sun. 2008. *Ownership Structure and Cost of Equity Capital in East Asian Corporations*. School of Accounting and Finance, The Hong Kong Polytechnic University.

PEMERINGKATAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DENGAN METODE RISK BASED BANK RATING TAHUN 2011-2013

Sri Budiwati Wahyu Suprapti¹⁾; Geliska Jenio Balkan²⁾

UPN "Veteran" Yogyakarta

Jalan SWK 104, Lingkar Utara, Condongcatur Yogyakarta

ABSTRAKSI

Penelitian ini dimaksudkan melakukan pemeringkatan tingkat kesehatan pada 10 bank umum syariah di Indonesia pada periode 2011-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Metode penelitian menggunakan Risk Based Bank Rating (RBBR) yang terdiri atas 4 komponen, yakni komponen 1). Risk Profile yang diwakili rasio Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR); komponen 2). Good Corporate Governance dengan hasil Self Assessment; komponen 3). Earnings yang diwakili rasio Return On Asset (ROA); dan komponen 4). Capital yang diwakili rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah yang mampu mengelola kredit macetnya dengan baik karena nilainya sedikit/kecil yakni bank BCA Syariah. Sedangkan untuk bank syariah yang tidak baik dalam pengelolaan kredit macetnya yaitu Bank Syariah Mandiri karena nilai kredit macetnya selama 3 tahun berturut-turut bertambah besar. Bank syariah yang penyaluran Dana Pihak Ketiganya sehat dan tergolong baik yaitu Bank Syariah Mandiri. Untuk Maybank Syariah Indonesia merupakan bank yang tidak mengalami peningkatan pengelolaan Dana Pihak Ketiganya, karena berturut-turut selama periode penelitian tidak mengalami perubahan peringkat dan tetap dalam kondisi tidak sehat. Pada tata kelola perbankan, bank syariah yang konsisten menunjukkan tata kelola banknya baik dari tahun ketahun yaitu Bank Muamalat Indonesia. Akan tetapi untuk semua bank syariah yang beroperasi di Indonesia menunjukkan tata kelola yang baik dan sangat baik. Sedangkan bank syariah yang mampu mengelola keuntungan secara keseluruhan dengan sangat sehat yaitu Maybank Syariah Indonesia. Sedangkan bank yang mengalami penurunan pengelolaan keuntungan secara keseluruhan adalah Bank Victoria Syariah dan Bank Panin Syariah. Dari segi permodalannya kesemua bank syariah yang beroperasi di Indonesia menunjukkan permodalannya yang sehat, dan untuk bank syariah yang permodalannya besar dibandingkan yang lain yaitu Maybank Syariah Indonesia.

Kata kunci: kesehatan bank, Risk Based Bank Rating, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Good Corporate Governance, Return On Asset, Capital Adequacy Ratio.

A. PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang dengan menanamkan dana yang ada sekarang ini. Biasanya investasi dilakukan oleh perorangan maupun kelompok ekonomi. Perorangan dan kelompok ekonomi melakukan investasi dengan harapan adanya keuntungan dimasa yang akan datang. Sedangkan yang diharapkan dari investasi pada suatu negara adalah adanya perubahan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut.

Investasi dapat dilakukan pada instrument surat berharga, emas, mesin atau peralatan, property maupun investasi pada perbankan. Investasi pada surat berharga dengan jangka lama akan mendapatkan hasil yang

besar, namun investasi pada surat berharga risikonya tinggi karena harga saham yang selalu berfluktuasi. Bentuk investasi yang aman dengan risiko rendah dapat dilakukan pada perbankan. Hasil dari investasi perbankan relative kecil dngan risiko yang kecil pula, sesuai denagn prinsip investasi. Hasil dari investasi di bank bersifat pasti yakni berupa bunga tabungan ataupun deposito, dan juga aman.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2004). Berdasarkan prinsip operasionalnya, bank dibedakan menjadi dua macam yaitu bank yang prinsip operasionalnya dengan prinsip konvensional dan bank yang prinsip operasionalnya dengan prinsip syariah. Saat ini banyak bank syariah yang beroperasi selai bank konvensional, hal ini sering membuat calon nasabah bingung dalam menentukan bank untuk kegiatan investasinya

Penilaian kesehatan bank, dahulunya menggunakan metode CAMELS sebagai mana yang diatur oleh PBI No. 6/10/2004. CAMELS terdiri dari faktor *Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk*. Akan tetapi metode penilaian ini dirasa kurang sempurna karena ternyata banyakyang tidak melakukan penilaian pada faktor *Management*, sehingga penilaian yang dilakukan hanya faktor CAEL yaitu *Capital, Asset, Earnings* dan *Liquidity*.

Sebagai penyempurna penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode CAMELS, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 pada tanggal 25 Oktober 2011 bahwa bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank dengan cakupan penilaian meliputi faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), *GoodCorporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Alasan penelitian di bank syariah dikarenakan pertama, penelitian tentang bank syariah belum banyak. yang meneliti, juga penggunaan metode RBBR belum populer. Kedua,keberadaan bank syariah dari tahun ke tahun semakin bertambah. Ketiga, banyak masyarakat masih awam dan belum tahu dengan bank syariah. Keempat, mayoritas masyarakat muslim Indonesia tidak menginginkan riba. Bank Syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbal hasilnya. Adapun konsep bank syariah mengacu pada isi Al – Qur'an dan Al – Hadist yang melarang adanya riba.Perkembangan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah tergolong berkembang cepat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah	11	11	11
Unit Usaha Syariah	24	24	23
- Jumlah Kantor BUS dan UUS	1737	2262	2588
BPRS	155	158	163
- Jumlah Kantor BPRS	364	401	402

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013, OJK

Laporan keuangan perbankan berguna untuk menilai kinerja bank dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja bank difungsikan untuk mengetahui bahwa suatu bank itu kinerjanya : Sangat Baik; Baik; Cukup

Baik; Kurang Baik dan Tidak Baik. Kinerja keuangan bank yang sehat dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat karena perbankan merupakan lembaga yang berdiri atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Tingkat kesehatan suatu bank, dapat diketahui dengan menghitung analisis rasio yang ada pada rasio – rasio keuangan bank.

Beberapa penelitian tentang tingkat kesehatan dan kinerja bank telah dilakukan, antara lain Nugroho (2011) meneliti kinerja pada bank syariah, Rossianti & Nidar (2013) meneliti pada bank konvensional dengan metode CAMEL & RBBR, Rafelia & Arianto (2013) meneliti kinerja pada bank syariah, Mubarak (2014) meneliti pada bank konvensional dengan metode RBBR, Astutik (2014) meneliti pada bank syariah dengan metode RBBR, Widyaningrum (2014) meneliti pada bank konvensional dengan metode RBBR. Yang mana hasil dari penelitian tersebut berbeda karena objek bank yang berbeda dan metode penelitian yang digunakan berbeda.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana urutan pemeringkatan kesehatan bank umum syariah di Indonesia pada periode 2011 – 2013 dengan menggunakan metode RBBR atau *Risk Based Bank Rating* ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar (Sharpe et all, 2005). Ada bermacam sektor untuk berinvestasi diantaranya adalah investasi pada pasar modal, investasi pada property, investasi emas, investasi mesin bahkan investasi pada bank. Investasi pada bank menjadi pilihan karena investasi pada bank lebih terjamin keamanannya walaupun hasil yang didapatkan tidaklah besar.

1. Definisi Bank

Bank menurut Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

2. Fungsi Bank

Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 fungsi perbankan di Indonesia adalah :

- a. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit.
- b. Bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit.
- c. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran.

3. Jenis Bank

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 membagi perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

4. Bank Syariah

Menurut Booklet Perbankan Indonesia, 2011 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

5. Prinsip Syariah

Prinsip syariah sesuai SE Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 sebagai berikut :

Pa

- a. Prinsip Syariah Dalam Penghimpun Dana
 - 1). Giro dan tabungan atas dasar akad *wadi'ah*
 - 2). Giro atas dasar akad *mudharabah*
 - 3). Tabungan dan deposito atas dasar *mudharabah*
- b. Prinsip Syariah Dalam Penyaluran Dana
 - 1). Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*
 - 2). Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*
 - 3). Pembiayaan atas dasar akad *murabahah*
 - 4). Pembiayaan atas dasar akad *salam*
 - 5). Pembiayaan atas dasar akad *istishna'*
 - 6). Pembiayaan atas dasar akad *ijarah*
 - 7). Pembiayaan atas dasar akad *ijarah muntahiya bittamlik*
 - 8). Pembiayaan atas dasar akad *qardh*
- c. Prinsip Syariah Dalam Pelayanan / Jasa
 - 1) Jasa pemberian jaminan atas dasar akad *kafalah*
 - 2) Pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah*
 - 3) Jasa pertukaran mata uang atas dasar akad *sharf*

6. Laporan Keuangan

Laporan keuangan bank menurut Kasmir, 2004 adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan, dan kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Keuntungan dengan membaca laporan keuangan agar pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya.

Menurut Munawir, 2002 laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat *financial*.

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.1, 2009 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

7. Analisis Tingkat Kesehatan Dengan Metode *Risk Based Bank Rating*

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating*). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual mencakup 4 macam komponen penilaian sebagai berikut :

a. Penilaian Profil Risiko.

Penilaian faktor profil risiko adalah penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Penilaian terhadap risiko inheren merupakan atas penilaian atas risiko yang melekat pada bank yang ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk, dan aktivitas bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan)

jenis risiko yaitu : Risiko Kredit; Risiko Pasar; Risiko Likuiditas; Risiko Operasional; Risiko Hukum; Risiko Strategik; Risiko Kepatuhan; Risiko Reputasi.

b. Penilaian Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu : pertama transparansi(*transparency*); kedua, akuntabilitas (*accountability*); ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*); keempat, professional (*professional*); dan kelima, kewajaran (*fairness*) dan untuk kriteria tingkat penilaian GCG yang dilakukan oleh bank secara *Self Assessment* sebagai berikut :

Tabel 2.3
Peringkat Penilaian G

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 < Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 < Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 < Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 < Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Sumber : SE BI No.9/12/DPNP tahun 2007

c. Penilaian Rentabilitas (Earnings)

Penilaian rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber – sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Dendawijaya, 2005 analisis penilaian faktor rentabilitas suatu bank dapat diukur dengan *Return On Asset* (ROA).

d. Penilaian Permodalan (Capital)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Menurut SE BI 13/24/DPNP/2011 indikator penilaian faktor permodalan untuk kecukupan modal bank dapat diukur dengan *Capital Adequacy Ratio*

C. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif mengenai pemeringkatan tingkat kesehatan pada 10 bank umum syariah di Indonesia periode 2011 - 2013. Metode untuk melakukan pemeringkatan digunakan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang terdiri atas komponen *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings* dan *Capital*. Data dan sumber data yang digunakan untuk penelitian merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dan laporan GCG bank syariah.

Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 10 bank umum syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri; Bank Muamalat Indonesia; BNI Syariah; BRI Syariah; Bank Mega Syariah; Bank Panin Syariah; Bank Bukopin Syariah; Bank Victoria Syariah; BCA Syariah; dan Bank Maybank Syariah Indonesia.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang berasal dari laporan keuangan tahunan yang terdiri dari *Non Performing Financing*; *Financing to Deposit Ratio*; *Return On Asset*; *Capital Adequacy Ratio* dan laporan *Good Corporate Governance*. Data diperoleh dengan mengakses web pada bank syariah yang menjadi sampel penelitian.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel penelitian yang digunakan untuk pemeringkatan kesehatan bank pada penelitian ini adalah :

1. *Risk Profile* adalah penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Rasio yang digunakan untuk menganalisis *Risk Profile* kesehatan bank yaitu :
 - a. *Non Performing Financing* (NPF)
Non Performing Financing atau NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. (Teguh Pudjo Mulyono, 1995).

Adapun kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk kesehatan bank syariah adalah :

Tabel 3.2
Kriteria Peringkat Penilaian *Non Performing Financi*

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	NPF < 2%	Sangat Baik
2	2% < NPF < 5%	Baik
3	5% < NPF < 8%	Cukup Baik
4	8% < NPF < 12 %	Kurang Baik
5	NPF > 12 %	Tidak Baik

Sumber : SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Arthesa,2009).

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12 / 11 / DPNP / 2010, penilaian kesehatan bank terhadap *Financing to Deposit Ratio* dikategorikan sehat apabila nilai FDR berada pada interval 85% - 110%. Jika *Financing to Deposit Ratio* suatu bank berada diatas atau bawah 85% - 110%, maka bank dapat dikatakan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi dengan baik. Secara ringkas dapat dituliskan sebagai berikut :

Tidak Sehat < FDR Sehat > Tidak Sehat <85% - 110% >

1. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Prinsip dan fokus penilaian berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia. Untuk menganalisis GCG pada kesehatan tidak digunakan rasio keuangan, melainkan pembobotan pada faktor GCG. Pembobotan faktor GCG pada bank syariah menggunakan persentase pembobotan yang telah ditetapkan bank umum syariah yaitu :

Tabel 3.3
Pembobotan Faktor GCG

No	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5.00
6.	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7.	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5.00
8.	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
10.	Batas maximum penyaluran dana	5.00
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15.00
TOTAL		100.00

Sumber : SE BI No.12/13/DPbS tahun 2010

2. *Earnings* (Rentabilitas) adalah penilaian yang meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber – sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas dan manajemen rentabilitas. Rasio yang digunakan untuk menganalisis *earnings* kesehatan bank yaitu :

a. *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan asset. (Dendawijaya, 2005). Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS 2007, *Return On Asset* dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kriteria Predikat Penilaian *Return On Aset*

No	Rasio ROA	Predikat
1	ROA > 1,5 %	1
2	1,25% < ROA < 1,5%	2
3	0,5% < ROA < 1,25%	3
4	0% < ROA < 0,5%	4
5	ROA < 0 %	5

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004

3. *Capital* adalah penilaian meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan kecukupan pengelolaan permodalan. Rasio yang digunakan untuk menganalisis *capital* kesehatan bank yaitu

a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkanseberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana – dana dari sumber – sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain – lain. Dengan kata lain *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. (Dendawijaya,2005).

Adapun untuk ketentuan predikat CAR dalam kesehatan bank adalah ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Ketentuan Predikat Kesehatan Bank Berdasar Rasio CAR

No	Rasio CAR	Peringkat
1	12% < CAR	1
2	9% < CAR < 12%	2
3	8% < CAR < 9%	3
4	6% < CAR < 8%	4
5	CAR < 6%	5

Sumber : SE BI No.6/23/DPNP tahun 2004

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono, 2012 deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Pemeringkatan kesehatan bank syariah yang diteliti secara sederhana ditampilkan dalam bentuk tabulasi, dengan memasukkan komponen – komponen yang diukur menurut ketentuan pemerintah dalam hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia yaitu dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian pemeringkatan tingkat kesehatan pada 10 bank umum syariah di Indonesia dengan metode *Risk Based Bank Rating* ini didapatkan hasil perhitungan dari komponen :

1. *Risk Profile*. Komponen perhitungan dari *Risk Profile* mencakup :
 - a. *Non Performing Financing*, mewakili rasio risiko kredit macet.
 - b. *Financing to Deposit Ratio* , mewakili risikolikuiditas.
2. *Good Corporate Governance*, dilihat dari *Self Assessment*.
3. *Earnings*, perhitungannya menggunakan *Return On Asset*
4. *Capital*, perhitungannya menggunakan *Capital Adequacy Ratio*.

Semua hasil dari perhitungan komponen *Risk Based Bank Rating* ini disajikan dalam bentuk tabel. Sehubungan dengan teknik analisis yang dilakukan peneliti adalah tabulasi maka pembahasan hasil penelitian tidak dapat dipisahkan dari hasil analisis pada penelitian dari masing – masing komponen penilaian kesehatan bank atau komponen metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR)

1. Risk Profile
 - a. Peringkat kesehatan bank syariah dari komponen *Risk Profile*, yang dianalisis dari *Non Performing Financing* (NPF) yang menggambarkan pengelolaan kredit macet.

Tabel 4.1
Non Performing Financing (%) Bank Syariah Tahun 2011 - 2013

No	Bank Syariah	2011			2012			2013		
		Nilai	Predikat	Ranking	Nilai	Predikat	Ranking	Nilai	Predikat	Ranking
1	Bank Syariah Mandiri	2,42	Baik	5	2,82	Baik	7	4,32	Baik	10
2	Bank Muamalat Indonesia	2,60	Baik	7	2,09	Baik	4	1,35	Sangat Baik	3
3	BNI Syariah	3,62	Baik	10	2,02	Baik	3	1,86	Sangat Baik	4
4	BRI Syariah	2,77	Baik	8	3,00	Baik	8	4,06	Baik	8
5	Bank Mega Syariah	3,03	Baik	9	2,67	Baik	5	2,98	Baik	6
6	Bank Panin Syariah	0,88	Sangat Baik	3	0,20	Sangat Baik	2	1,02	Sangat Baik	2
7	Bank Syariah Bukopin	1,74	Sangat Baik	4	4,57	Baik	10	4,27	Baik	9
8	Bank Victoria Syariah	2,43	Baik	6	3,19	Baik	9	3,71	Baik	7
9	BCA Syariah	0,2	Sangat Baik	2	0,1	Sangat Baik	1	0,1	Sangat Baik	1
10	Maybank Syariah Indonesia	0,02	Sangat Baik	1	2,69	Baik	6	2,69	Baik	5

Sumber : Data diolah.

Non Performing Financing :

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa bank syariah yang paling baik dalam penanganan kredit macetnya dalam kurun waktu 3 tahun, peringkat pertama adalah BCA Syariah. Selanjutnya peringkat kedua yaitu Bank Panin Syariah dengan kredit macet yang nilainya juga tidak besar. Peringkat ketiga diperoleh Bank Muamalat Indonesia. Peringkat keempat bank yaitu BNI Syariah. Peringkat kelima yaitu Maybank Syariah

Indonesia. Peringkat keenam yaitu Bank Mega Syariah. Selanjutnya peringkat ketujuh yaitu Bank Victoria Syariah. Peringkat kedelapan BRI Syariah. Peringkat kesembilan diperoleh Bank Syariah Bukopin. Sedangkan peringkat kesepuluh atau terakhir bank syariah yang paling tidak baik dalam mengatasi kredit macetnya karena nilai kredit macet tiap tahunnya bertambah lebih besar adalah Bank Syariah Mandiri. Sekalipun begitu, ke 10 bank syariah yang diteliti berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (SE BI No. 9 / 24 / DPbS / 2007) dalam kategori baik dan sangat baik.

Kredit macet yang dialami Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun makin bertambah besar nilainya karena total dari semua pembiayaannya besar dan selama periode penelitian pembiayaannya kurang lancar. Untuk mengurangi risiko kredit macetnya, pihak bank harus lebih selektif dalam survey dan analisis pada calon nasabahnya.

- b. Peringkat kesehatan bank syariah dari komponen *Risk Profile*, dianalisis dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK).

Tabel 4.2
Financing to Deposit Ratio (%) Bank Syariah Tahun 2011 - 2013

No	Bank Syariah	2011			2012			2013		
		Nilai	Predikat	Ranking	Nilai	Predikat	Ranking	Nilai	Predikat	Ranking
1	Bank Syariah Mandiri	86,03	Sehat	2	94,40	Sehat	4	89,37	Sehat	1
2	Bank Muamalat Indonesia	85,18	Sehat	1	94,15	Sehat	3	99,99	Sehat	2
3	BNI Syariah	78,60	Tidak Sehat	6	84,99	Tidak Sehat	6	97,86	Sehat	3
4	BRI Syariah	90,55	Sehat	3	100,96	Sehat	5	102,70	Sehat	4
5	Bank Mega Syariah	83,08	Tidak Sehat	4	88,88	Sehat	1	93,37	Sehat	5
6	Bank Panin Syariah	162,97	Tidak Sehat	9	123,88	Tidak Sehat	9	90,40	Sehat	6
7	Bank Syariah Bukopin	83,66	Tidak Sehat	5	92,29	Sehat	2	100,29	Sehat	7
8	Bank Victoria Syariah	46,08	Tidak Sehat	8	73,77	Tidak Sehat	7	84,65	Sehat	8
9	BCA Syariah	78,8	Tidak Sehat	7	79,9	Tidak Sehat	8	83,5	Tidak Sehat	9
10	Maybank Syariah Indonesia	289,20	Tidak Sehat	10	197,70	Tidak Sehat	10	152,87	Tidak Sehat	10

Sumber : Data diolah.

Financing to Deposit Ratio :

Tabel 4.2 tentang penilaian kesehatan dari komponen *Risk Profile*, yaitu aspek *Financing to Deposit Ratio* atau penyaluran kredit Dana Pihak Ketiganya menunjukkan bahwa bank syariah yang berada pada peringkat 5 besar punya kecenderungan membaik dalam pengelolaan penyaluran Dana Pihak Ketiganya, peringkat pertama diperoleh Bank Syariah Mandiri. Peringkat kedua Bank Muamalat Indonesia. Peringkat ketiga adalah BNI Syariah. Peringkat keempat BRI Syariah, dan peringkat kelima bank Panin Syariah karena dari tahun ke tahun ranking meningkat. Peringkat keenam bank Mega Syariah. Disusul peringkat ketujuh Bank Syariah Bukopin. Peringkat kedelapan Bank Victoria Syariah. Peringkat kesembilan adalah BCA Syariah, keempat

peringkat terakhir menunjukkan penurunan pengelolaan FDR. Peringkat kesepuluh adalah Maybank Syariah Indonesia, pengelolaan FDRnya selama periode penelitian tidak menunjukkan perubahan peringkat tetapi tetap pada posisi tidak sehat.

Tidak berfungsinya penyaluran Dana Pihak Ketiga dengan baik, dapat berakibat penurunan keuntungan. Karena dana tersebut hanya berhenti di bank, dalam artian dana tidak mengalir ke Pihak Ketiga, sehingga menunjukkan bahwa bank tidak menjalankan fungsi intermediaries dengan baik.

2. *Good Corporate Governance*

Peringkat kesehatan bank syariah dari komponen *Good Corporate Governance*, melalui hasil *Self Assessment* nya.

Tabel 4.3
Good Corporate Governance Bank Syariah Tahun 2011 - 20

No	Bank Syariah	2011			2012			2013		
		Nilai			Nilai			Nilai		
		Komposit	Predikat	Ranking	Komposit	Predikat	Rangking	Komposit	Predikat	Rangking
1	Bank Syariah Mandiri	1,6	Baik	3	1,675	Baik	7	1,85	Baik	8
2	Bank Muamalat Indonesia	1,300	Sangat Baik	1	1,15	Sangat Baik	1	1,15	Sangat Baik	1
3	BNI Syariah	1,675	Baik	5	1,25	Sangat Baik	2	1,3	Sangat Baik	2
4	BRI Syariah	1,55	Baik	2	1,38	Sangat Baik	4	1,35	Sangat Baik	3
5	Bank Mega Syariah	1,825	Baik	7	1,600	Baik	6	1,869	Baik	9
6	Bank Panin Syariah	1,95	Baik	9	1,35	Sangat Baik	3	1,35	Sangat Baik	4
7	Bank Syariah Bukopin	1,6	Baik	4	1,5	Sangat Baik	5	1,5	Sangat Baik	5
8	Bank Victoria Syariah	1,69	Baik	6	2,07	Baik	9	1,66	Baik	7
9	BCA Syariah	1,90	Baik	8	1,800	Baik	8	1,55	Baik	6
10	Maybank Syariah Indonesia	2,00	Baik	10	2,30	Baik	10	2,17	Baik	10

Sumber : *Data diolah.*

Good Corporate Governance :

Tabel 4.3 menunjukkan hasil *SelfAssessment* untuk *Good Corporate Governance* semua bank syariah yang diteliti selama 3 periode memperoleh nilai baik dan sangat baik. Terdapat peringkat 5 besar bank yang tata kelolanya sangat baik, peringkat pertama Bank Muamalat Indonesia. Peringkat kedua BNI Syariah. Untuk peringkat ketiga BRI Syariah. Peringkat keempat Bank Panin Syariah dan peringkat kelima Bank Syariah Bukopin. Disusul peringkat keenam ada BCA Syariah. Ketujuh Bank Victoria Syariah. Adapun kedelapan Bank Syariah Mandiri. Peringkat kesembilan Bank Mega Syariah dan peringkat kesepuluh adalah Maybank Syariah Indonesia. Secara keseluruhan semua bank syariah yang diteliti memiliki tata kelola yang baik, tetapi yang konsisten adalah Bank Muamalat Indonesia.

Hasil *Self Assessment* bank syariah yang baik menunjukkan bahwa bank syariah yang beroperasi di Indonesia mempunyai tata kelola perbankan atau kualitas manajemen bank yang sudah baik dan sudah menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*.

3. *Earnings*

Peringkat kesehatan bank syariah dari komponen *Earnings*, melalui *Return On Aset* (ROA) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan bank

Tabel 4.4
Return On Aset (%) Bank Syariah Tahun 2011- 2013

No	Bank Syariah	2011			2012			2013		
		Nilai	Predikat	Ranking	Nilai	Predikat	Ranking	Nilai	Predikat	Ranking
1	Bank Syariah Mandiri	1,95	Sangat Sehat	3	2,25	Sangat Sehat	4	1,53	Sangat Sehat	3
2	Bank Muamalat Indonesia	1,52	Sangat Sehat	6	1,54	Sangat Sehat	5	1,37	Sehat	4
3	BNI Syariah	1,29	Sehat	7	1,48	Sehat	6	1,37	Sehat	5
4	BRI Syariah	0,20	Kurang Sehat	10	1,19	Cukup Sehat	8	1,15	Cukup Sehat	6
5	Bank Mega Syariah	1,58	Sangat Sehat	5	3,81	Sangat Sehat	1	2,33	Sangat Sehat	2
6	Bank Panin Syariah	1,75	Sangat Sehat	4	3,29	Sangat Sehat	2	1,03	Cukup Sehat	7
7	Bank Syariah Bukopin	0,52	Cukup Sehat	9	0,55	Cukup Sehat	10	0,69	Cukup Sehat	9
8	Bank Victoria Syariah	6,93	Sangat Sehat	1	1,43	Sehat	7	0,50	Cukup Sehat	10
9	BCA Syariah	0,9	Cukup Sehat	8	0,8	Cukup Sehat	9	1,0	Cukup Sehat	8
10	Maybank Syariah Indonesia	3,57	Sangat Sehat	2	2,88	Sangat Sehat	3	2,87	Sangat Sehat	1

Sumber : Data diolah.

Return On Asset :

Tabel 4.4 menunjukkan terdapat 5 besar peringkat bank syariah yang masuk kategori sehat yaitu peringkat pertama, Maybank Syariah Indonesia. Peringkat kedua Bank Mega Syariah. Ketiga Bank Syariah Mandiri. Peringkat keempat Bank Muamalat Indonesia dan peringkat kelima bank syariah yang ROA nya sehat yaitu BNI Syariah. Sementara BRI Syariah berada pada peringkat keenam. Peringkat ketujuh Bank Panin Syariah. Kedelapan BCA Syariah. Kesembilan Bank Syariah Bukopin dan terakhir kesepuluh Bank Victoria Syariah. Untuk BRI Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Bukopin merupakan bank syariah dalam kondisi yang relatif cukup sehat. Sedangkan Bank Panin Syariah dan Bank Victoria Syariah merupakan bank syariah yang mengalami penurunan keuntungan (ROA) yang drastis karena dari sangat sehat menjadi cukup sehat.

Peningkatan ROA mengindikasikan bank berkembang dengan baik dan mampu membayarkan bunganya ke deposan dengan lancar. diperlukan oleh semua bank. Karena dengan peningkatan keuntungan bank lebih cepat berkembang baik dan tentunya dapat membayarkan bunga kepada deposan dengan baik.

4. *Capital*

Peringkat kesehatan bank syariah dari komponen *Capital*, melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu mengukur kecukupan permodalan bank syariah.

Tabel 4.5
Capital Adequacy Ratio (%) Bank Syariah Tahun 2011 - 201

No	Bank Syariah	2011			2012			2013		
		Nilai	Predikat	Rangking	Nilai	Predikat	Rangking	Nilai	Predikat	Rangking
1	Bank Syariah Mandiri	14,57	Sangat Sehat	8	13,82	Sangat Sehat	6	14,10	Sangat Sehat	8
2	Bank Muamalat Indonesia	12,01	Sangat Sehat	10	11,57	Sehat	9	17,27	Sangat Sehat	5
3	BNI Syariah	20,67	Sangat Sehat	5	19,07	Sangat Sehat	5	16,23	Sangat Sehat	6
4	BRI Syariah	14,74	Sangat Sehat	7	11,35	Sehat	10	14,49	Sangat Sehat	7
5	Bank Mega Syariah	12,03	Sangat Sehat	9	13,51	Sangat Sehat	7	12,99	Sangat Sehat	9
6	Bank Panin Syariah	61,98	Sangat Sehat	2	32,20	Sangat Sehat	2	20,83	Sangat Sehat	3
7	Bank Syariah Bukopin	15,29	Sangat Sehat	6	12,78	Sangat Sehat	8	11,10	Sehat	10
8	Bank Victoria Syariah	45,20	Sangat Sehat	4	28,08	Sangat Sehat	4	18,40	Sangat Sehat	4
9	BCA Syariah	45,9	Sangat Sehat	3	31,5	Sangat Sehat	3	22,4	Sangat Sehat	2
10	Maybank Syariah Indonesia	73,44	Sangat Sehat	1	63,89	Sangat Sehat	1	59,41	Sangat Sehat	1

Sumber : Data diolah.

Capital Adequacy Ratio :

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* semua bank syariah yang beroperasi di Indonesia sehat dan sangat sehat. Terdapat 3 besar peringkat bank dengan CAR terbaik, yaitu peringkat pertama Maybank Syariah Indonesia yang dari tahun ke tahun CAR nya menunjukkan konsisten sangat sehat. Kedua BCA Syariah. Peringkat ketiga Bank Panin Syariah. Keempat Bank Victoria Syariah. Peringkat kelima Bank Muamalat Indonesia. Keenam BNI Syariah, dan peringkat ketujuh BRI Syariah. Adapun peringkat kedelapan yang masuk dalam kategori CAR sangat sehat Bank Syariah Mandiri. Kesembilan Bank Mega Syariah serta kesepuluh Bank Syariah Bukopin dengan perolehan CAR yang masuk kategori sehat.

Kecukupan permodalan atau *Capital Adequacy Ratio* dari suatu bank syariah, dapat digunakan untuk mengcover aktiva yang mengandung risiko yang dimiliki bank seperti kredit yang diberikan bank kepada deposan. Dan bank tentunya tidak mengalami kesulitan modal untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang timbul atas kredit yang disalurkan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Penelitian mengenai pemeringkatan kesehatan pada 10 bank syariah yang beroperasi di Indonesia dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari aspek *Risk Profile*, dibawah ini BCA Syariah dan Maybank Syariah merupakan bank syariah yang paling berisiko.
2. Dilihat dari aspek *Good Corporate Governance* atau tata kelola bank, kesemua bank syariah yang beroperasi di Indonesia mengalami peningkatan pengelolaan yang semakin baik dan semakin baik lagi.
3. Dilihat dari aspek *Earning* (keuntungan atau laba) ROA, bahwa Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah merupakan bank yang sangat sehat dan bank syariah yang mengalami penurunan keuntungan dalam Bank Panin Syariah dan Bank Victoria Syariah.
4. Dilihat dari aspek *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau kecukupan modal, kesemua bank syariah yang beroperasi di Indonesia menunjukkan CAR yang sehat.

b. Saran

Oleh karena semua bank syariah yang beroperasi di Indonesia belum ada yang listing di Bursa Efek Indonesia, maka penambahan Dana Pihak Ketiga pastinya diharapkan dari para deposan atau nasabah. Untuk itu bagi calon nasabah disarankan untuk memilih bank syariah yang baik yaitu BNI Syariah. Karena dari segi resiko BNI syariah masih tergolong tidak berat (penyaluran kreditnya atau FDR tergolong sehat, tetapi nilai kredit macetnya atau NPF masih tergolong tidak banyak) dan dari sisi ROA, BNI Syariah juga bisa memberikan bunga kepada nasabah lewat keuntungan yang diperolehnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arthesa, A. dkk. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : PT.

Macanan Jaya Cemerlang.

Assauri, Sofyan. 2000. *Rekayasa Keuangan*. Manajemen Usahawan Indonesia No. 08 Th XXIX.

Astutik, Puji. 2014 / 2015. Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating* terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Jurnal Vol.3 No. 1 Semester Ganjil, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*.

Booklet Perbankan Indonesia. 2011. Jakarta : Bank Indonesia.

Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Bandung :

ALFABETA

Hempel, George, H., Donald G. 1995. *Bank Management : Text and Cases*. New York : John Willey & Sons, Inc

Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Kuncoro, M., Suharjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah. 2013. Otoritas Jasa Keuangan.

Mubarak, M. Aan Faizal. "Penilaian Kinerja Bank Menurut *Risk-Based Bank Rating*" (Studi Pada Bank Umum Milik Negara Yang Listing Di BEI). *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*.

Muljono, Teguh Pudjo. 1999. *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*.

Edisi Revisi. Cetakan 6. Jakarta : Djambatan.

- Nugroho, Aluisius Wishnu. 2011. Analisis Pengaruh FDR, NPF, BOPO, KAP Dan PLO Terhadap Return On Asset. *Jurnal Program Studi Magister Manajemen, Universitas Diponegoro*.
- Pernyataan Standar Akutansi Keuangan. Nomor 1. 2009.
- Peraturan Bank Indonesia. Nomor 6 / 10 / PBI / 2004.
- Peraturan Bank Indonesia. Nomor 13 / 1 / PBI / 2011
- Rafelia, Thyas., dan Ariyanto, Moh. Didik. 2013. Pengaruh CAR, FDR, NPF, Dan BOPO Terhadap ROE Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008 – Agustus 2012. *Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1 – 9, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro*.
- Rossianti, Fennicia, Auliantika., dan Nidar, Sulaeman, Rahman. 2013. Akurasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Kinerja Keuangan Berdasarkan CAMEL Rating System Dan Penilaian Berbasis *Risk-Based Bank Rating*. *Jurnal Volume 3 No.1 November 2013. ISSN : 2089 : 3477, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran*.
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- S, Munawir. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty.
- Sarita, Buyung., dan Putera, Arsip. 2011. *Manajemen Perbankan*. Kendari : Unhalu Press.
- Sharpe, William F., Gordon J. Alexander, & Jeffery V. Bailey. 2005. *Investasi*. Edisi Keenam, Jilid I, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Widyaningrum, Hening Asih. 2014. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode *Risk-Based Bank Rating (RBBR)* (Studi pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam IHSG Sub Sektor Perbankan Tahun 2012). *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*

KEPUTUSAN *HEDGING* DALAM MEMINIMALISASI RISIKO PERUSAHAAN (Studi Pengaruh Utang, Piutang, *Net Sales*, ROA Pada Perusahaan Pertambangan yang *listing* di BEI Tahun 2010-2014)

Novita Ratna Pratiwi *); C. Ambar Pujiharjanto **)

*) Alumni Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Jl. SWK 104 Lingkar Utara, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta 55283, Phone: (0274) 486733.

**) Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Jl. SWK 104 Lingkar Utara, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta 55283, Phone: (0274) 486733.

ABSTRACT

International trade has exposure risk that is foreign exchange risk. The foreign exchange that can't be predicted can impact to the company's performance, hedging contribute to minimize the risk. The purpose of this study is known the effect of debt, receivable, net sales, and ROA to hedging decision. The population is Mining Company listed in 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 as many as 50 companies, while the sample is 180 data with 78 hedging decisions and 120 not hedging decision. Analysis in this research is logistic regression. Hypothesis test results in this study indicate that debt has positive effect to decision hedging, while receivable, net sales, and ROA not effect to the decision of hedging.

Key words: *hedging, debt, receivables, net sales, ROA.*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional menjadi salah satu ciri yang menandakan bahwa era globalisasi semakin meluas yang melibatkan kegiatan ekspor dan impor, sehingga dalam pembayarannya pun tidak hanya menggunakan mata uang negara sendiri, melainkan terdapat peran dari valuta asing. Transaksi dengan valuta asing membuat perusahaan multinasional terpengaruh dengan risiko pelemahan nilai tukar.

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan dari nilai yang diharapkan (Hanafi, 2013: 243). Manajemen risiko adalah sistem yang digunakan untuk mengelola risiko dalam suatu perusahaan. Manajemen risiko pada dasarnya digunakan untuk menganalisis pentingnya berbagai risiko dan implikasinya terhadap suatu perusahaan (Yusgiantoro, 2004: 216).

Risiko pelemahan nilai tukar rupiah yang semakin eksposur di era globalisasi ini bisa diatasi dengan kebijakan lindung nilai. Lindung nilai (*hedging*) dalam bahasa Inggris disebut *hedge* yang artinya meminimalisir risiko dalam aspek keuangan.

Contoh kegiatan dalam penggunaan lindung nilai (*hedging*) di suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan Indonesia memproduksi barang yang bahan bakunya diperoleh dari luar negeri. Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk rupiah. Tiba-tiba nilai mata uang asing menguat dan nilai tukar rupiah melemah sehingga mengakibatkan biaya pembelian bahan baku menjadi lebih tinggi dengan pendapatan yang lebih rendah karena pendapatan perusahaan diperoleh dalam mata uang rupiah.

Pelemahan nilai tukar rupiah membuat perusahaan melakukan lindung nilai (*hedging*) dengan melakukan kontrak berjangka dalam waktu beberapa bulan kedepan dengan nilai nominal rupiah sebesar yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 pasal 12 ayat 10 yang menyebutkan persyaratan *hedging* dengan jangka waktu paling singkat satu minggu. Strategi lindung nilai (*hedging*) efektif melindungi risiko yang dihadapi oleh perusahaan akibat pelemahan nilai tukar karena jika tiba-tiba terjadi pelemahan nilai tukar rupiah karena perusahaan hanya akan membayar sesuai nominal yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan lindung nilai (*hedging*) masih terdapat perbedaan, misalnya Septama Hardanto Putro, M. Chabachib (2012) dengan hasil *DER, Growth Opportunity, Firm Size* berpengaruh positif terhadap lindung nilai (*hedging*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh utang, piutang, *net sales*, dan ROA terhadap lindung nilai.

B. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Eksposur Valuta Asing

Eksposur valuta asing muncul akibat adanya kurs valuta asing yang berfluktuasi. Exposur valuta asing lebih merujuk kepada utang dan piutang yang didenominasi oleh mata uang asing. Ketika perusahaan multinasional Indonesia memiliki utang dengan mata uang asing dan terjadi penguatan mata uang asing maka eksposur valuta asing akan lebih tinggi.

Eksposur transaksi terjadi jika kontrak bisnis menggunakan harga tertentu dengan asumsi kurs yang tertentu, sementara kurs yang terjadi bisa berubah (Hanafi, 2013: 245) yang bisa terjadi karena kurs bisa berubah kapan saja, jika kurs pada harga jual produk maupun harga bahan baku yang dibeli melemah maka arus kas perusahaan dapat melemah juga.

Eksposur ekonomi merupakan eksposur yang paling mempengaruhi secara keseluruhan dari perusahaan. Berfluktuasinya nilai tukar mengakibatkan kegiatan operasional perusahaan memakan biaya yang lebih tinggi. Fluktuasi nilai tukar baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi eksposur ekonomi. Perencanaan mengenai eksposur ekonomi merupakan tanggung jawab total manajemen karena mencakup interaksi strategi keuangan, pemasaran, pembelian, dan produksi (Kuncoro, 2009: 279).

Eksposur translasi muncul disebabkan oleh adanya pengkonversian ke mata uang negara perusahaan induk pada perusahaan anak, jika perusahaan induk berada di Indonesia, maka laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Pengkonversian mata uang dalam laporan konsolidasi menyebabkan adanya eksposur translasi. Rugi/Laba atau posisi keuangan bisa berubah-ubah tergantung asumsi kurs yang digunakan atau metode akuntansi konversi yang digunakan (Hanafi, 2013: 247).

C. TEORI-TEORI LINDUNG NILAI (HEDGING)

Lindung nilai (*hedging*) yang diungkapkan Paul Merrick "*A hedg is one or more traders performed in order to protect an existing market exposure against market movement.*" (Putro, Chabacib, 2012: 3). Jadi lindung nilai (*hedging*) digunakan oleh perusahaan untuk melindungi aset dari risiko pasar.

Lindung nilai (*hedging*) adalah tindakan untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan kerugian akibat berubahnya harga efek dengan menutup kontrak terlebih dahulu (Kamus Ekonomi). Lindung nilai (*hedging*) dilakukan menggunakan kontrak untuk meminimalisasi terjadinya kerugian akibat berfluktuasinya harga pasar.

Hanafi (2013: 259) *hedging* dilakukan dengan cara meminjam dan meminjamkan dua mata uang asing secara simultan. Lindung nilai (*hedging*) dapat dikatakan bahwa melakukan utang maupun piutang dalam mata uang asing dengan kesepakatan bersama.

Lindung nilai (*hedging*) yang sempurna adalah dengan mengeleminasi semua risiko, namun lindung nilai (*hedging*) yang sempurna merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi (Hull, 2008: 45). Penggunaan

lindung nilai (*hedging*) diharapkan dapat meminimalisasi seluruh risiko perusahaan akibat adanya perdagangan internasional meskipun lindung nilai (*hedging*) belum tentu meminimalisasi seluruh risiko karena dalam prosesnya penggunaan lindung nilai (*hedging*) memerlukan biaya.

Sesuai pernyataan mengenai teori-teori lindung nilai (*hedging*) maka dapat penulis simpulkan bahwa lindung nilai (*hedging*) adalah keputusan melakukan kontrak oleh perusahaan untuk meminimalisasi dampak akibat dari adanya kegiatan perdagangan internasional.

Utang

Proses penyerahan uang barang atau memberikan jasa kepada pihak lain dimasa yang akan datang yang timbul sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang telah terjadi sebelumnya (Munawir, 2002: 181). Perusahaan yang memiliki pinjaman maka wajib untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa atas pinjamannya sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Piutang

Piutang adalah klaim kepada pelanggan atau pihak lain berupa uang, barang atau jasa (Munawir, 2002: 111). Piutang dipinjamkan kepada perusahaan lain yang dapat dipercaya oleh perusahaan yang meminjam uang, barang atau jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Perusahaan yang memiliki piutang berhak menagih kepada perusahaan yang memiliki utang kepada perusahaan karena telah terjadi perjanjian diantara kedua perusahaan, jika perusahaan yang memiliki utang tidak dapat memenuhi janjinya maka perusahaan yang memiliki piutang berhak melaporkan kepada badan hukum. Piutang termasuk ke dalam aktiva, maka jika terdapat piutang yang tidak tertagih dapat menyebabkan kerugian pada neraca perusahaan.

Net Sales

Net sales dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kepercayaan pelanggan, biaya operasional, dan tingkat persaingan di pasar. Perusahaan yang telah dipercayai oleh pelanggan maupun konsumen maka bisa mendapatkan *net sales* yang tinggi. Selain itu biaya operasional yang tinggi akan mempengaruhi tingkat *net sales* yang juga semakin tinggi. *Net sales* yang diperoleh perusahaan dapat menentukan posisi perusahaan dalam persaingannya. Selain faktor-faktor di atas, terdapat faktor yang mempengaruhi *net sales* yaitu harga penjualan, jika perusahaan memiliki produk yang sejenis dengan perusahaan lain maka harga penjualan produknya setara dengan perusahaan lainnya yang berlaku di pasar. Harga jual produk atau jasa, selain mempengaruhi volume penjualan atau jumlah pembeli produk atau jasa, juga akan mempengaruhi jumlah pendapatan perusahaan (Halim dan Supomo, 2005: 97). Harga jual yang berpengaruh kepada kepercayaan pelanggan dapat mempengaruhi besar kecilnya *net sales* yang diperoleh perusahaan dan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang dapat terjadi karena jika harga jual sesuai dengan keinginan pelanggan maka kepercayaan pelanggan akan semakin kuat dan akan meningkatkan pendapatan perusahaan.

ROA

ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2012: 201). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ROA penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Utang Terhadap Lindung Nilai (*Hedging*)

Utang digunakan perusahaan untuk membantu proses operasional perusahaan. Bagi perusahaan multinasional, utang dalam mata uang asing menjadi hal yang penting karena dalam kegiatannya menggunakan transaksi mata uang asing dan alat serta bahan bakunya dapat didapat dari luar negeri, sehingga fluktuasi nilai tukar menjadi aspek yang perlu diperhatikan bagi perusahaan yang memiliki utang dalam bentuk mata uang asing. Untuk melindungi perusahaan dari pembayaran yang membengkak akibat fluktuasi nilai tukar maka perlu dilakukan lindung nilai (*hedging*) agar tidak terjadi pembengkakan pembayaran utang jika tiba-tiba nilai tukar mata uang asing menguat. Jadi hubungan antara utang dengan lindung nilai (*hedging*) adalah positif, jika utang meningkat maka lindung nilai (*hedging*) juga menguat dan sebaliknya, jika utang menurun maka lindung nilai (*hedging*) melemah.

H₁: terdapat pengaruh positif utang terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).

Pengaruh Piutang Terhadap Lindung Nilai (*Hedging*)

Piutang yang tidak tertagih menjadi risiko bagi perusahaan yang akan mengakibatkan penurunan nilai arus kas perusahaan. Selain risiko piutang tersebut, piutang yang harus dikonversi dalam nilai tukar rupiah dapat terpengaruh akibat fluktuasi nilai tukar rupiah. Lindung nilai (*hedging*) dilakukan untuk melindungi arus kas perusahaan dalam instrumen keuangan piutang. Lindung nilai (*hedging*) dapat digunakan perusahaan untuk meminimalisasi risiko pembayaran piutang akibat terdapatnya perbedaan kurs antar negara. Lindung nilai (*hedging*) dilakukan dengan membeli kontrak dengan lembaga atau perusahaan jasa keuangan dalam aspek lindung nilai (*hedging*) sehingga risiko penurunan pembayaran piutang karena tidak tertagih dapat diminimalisir. Jadi hubungan antara piutang dengan lindung nilai (*hedging*) adalah negatif yaitu jika piutang meningkat maka lindung nilai (*hedging*) melemah dan sebaliknya, jika piutang menurun maka lindung nilai (*hedging*) menguat.

H₂: terdapat pengaruh negatif piutang terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).

Pengaruh *Net Sales* Terhadap Lindung Nilai (*Hedging*)

Salah satu ancaman bagi perusahaan pada rasio *net sales* adalah adanya fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi harga penjualan. Risiko harga penjualan termasuk dalam risiko pasar yang perlu dilindungi karena terpengaruh dengan naik turunnya nilai kurs. Selain itu risiko harga penjualan dapat terjadi karena berfluktuasinya harga komoditas dipasar, maka digunakan lindung nilai (*hedging*) untuk melindungi risiko pasar khususnya mengenai jatuhnya harga penjualan komoditas yang dapat melindungi tingkat *net sales* dari penurunan. Dilakukannya kebijakan lindung nilai (*hedging*) karena untuk melindungi perusahaan dari kerugian dan melindungi perusahaan dari berfluktuasinya harga penjualan dalam meminimalisasi risiko pendapatan tingkat *net sales*. Jadi sesuai pernyataan di atas hubungan antara *net sales* dengan lindung nilai (*hedging*) adalah positif yaitu jika *net sales* meningkat maka lindung nilai (*hedging*) menguat dan sebaliknya, jika *net sales* menurun maka lindung nilai (*hedging*) melemah.

H₃: terdapat pengaruh positif *net sales* terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).

Pengaruh ROA Terhadap Lindung Nilai (*Hedging*)

Rasio ROA terkait dengan operasional perusahaan, jika ROA meningkat berarti proses operasional perusahaan menghasilkan laba yang baik. Proses operasional perusahaan multinasional dapat terkendala dengan adanya pelemahan nilai tukar karena biaya operasional menjadi lebih tinggi yang akan mengakibatkan ROA menurun, oleh karena itu dapat digunakan lindung nilai (*hedging*) untuk melindungi aset perusahaan dengan melakukan kontrak lindung nilai (*hedging*). Misalnya melakukan kontrak lindung nilai (*hedging*) dengan penjual bahan baku untuk proses operasional perusahaan yang dapat menjaga aset perusahaan ataupun menjaga kestabilan laba perusahaan atas kegiatan operasional perusahaan. Jadi hubungan antara

ROA dengan lindung nilai (*hedging*) adalah positif yaitu jika ROA meningkat maka lindung nilai (*hedging*) juga menguat dan sebaliknya, jika ROA menurun maka lindung nilai (*hedging*) melemah.

H₄: terdapat pengaruh positif ROA terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).

D. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang bersumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2006: 153) yang berupa data perusahaan dengan keputusan *hedging* dan tidak *hedging* dan variabel-variabel independen yaitu utang, piutang, *net sales*, ROA.

Prosedur pengambilan data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui data dokumentasi yaitu metode pengambilan data dalam suatu penelitian melalui media. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan Perusahaan Pertambangan yang *listing* tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 yang terdaftar di BEI, tertulis di ICMD, IDX, dan hasil perhitungan pada rasio ROA tahun 2010 dan 2014 pada beberapa perusahaan. Sedangkan data yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan kebijakan lindung nilai (*hedging*) atau tidak menerapkan lindung nilai (*hedging*) diperoleh dari laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2010 hingga 2014.

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Pertambangan yang *listing* di BEI pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 masing-masing sebanyak 40 perusahaan per tahun. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling purposive* dengan kriteria :

1. Perusahaan secara teratur melaporkan laporan keuangannya kepada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014.
2. Data yang diperlukan untuk melakukan analisis dalam penelitian tersedia pada tahun 2010 hingga 2014.
3. Perusahaan melakukan lindung nilai (*hedging*) dan dan tidak lindung nilai (*hedging*).

Metode Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode regresi logistik. Regresi logistik sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu kita ingin menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independennya (Ghozali, 2013: 333). Peneliti menggunakan teknik analisis ini karena dalam analisis hanya ada dua jawaban yaitu melakukan lindung nilai (*hedging*) dan tidak melakukan lindung nilai (*hedging*) atau ya dan tidak. Model regresi logistik adalah nonlinear maka metode OLS tidak bisa digunakan (Widarjono, 2015: 112). Pengolahan data dengan regresi logistik tidak memerlukan uji asumsi normalitas pada variabel independennya (Ghozali, 2013: 333). Model regresi logistik adalah sebagai berikut:

$$p = \frac{Odds}{1 + odds}$$

atau

$$\ln \frac{p}{1 - p} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

Sederhananya persamaan regresi logistik dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$p = \frac{1}{1 + e^{-(b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4)}}$$

Keterangan:

- P : probabilitas perusahaan *hedging*
- Odds : probabilitas
- X₁ : utang
- X₂ : piutang
- X₃ : *net sales*
- X₄ :ROA
- Ln : log natural
- b₀ : konstanta
- b₁ : koefisien regresi utang
- b₂ : koefisien regresi piutang
- b₃ : koefisien regresi *net sales*
- b₄ : koefisien regresi ROA

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis pertama adalah uji keseluruhan model yang digunakan untuk mengetahui hasil uji keseluruhan model (*overall model fit*) berdasarkan fungsi *Likelihood* (L).

Tabel 1 *Iteration His*

-2 LogLikelihood Konstanta	-2 LogLikelihood Variabel Independen
246.323	226.649

Pada tabel 1 di atas diperoleh nilai statistik -2 Log Likelihood yang hanya menggunakan konstanta sebesar 246.323. Setelah memasukkan keempat variabel independen dalam penelitian diperoleh nilai -2 Log Likelihood sebesar 226.649. Penurunan nilai -2 Log Likehood dari 246.323 ke 226.649 menunjukkan penambahan keempat variabel independen berpengaruh terhadap koefisien konstanta, sehingga model penelitian sudah fit.

Tabel 2 *Hosmer and lameshow Test*

Chi-square	Sigifikansi	Alpha
8.391	0.396	0.05

Analisis kedua adalah Uji kelayakan model penelitian yang dapat dilihat dari tabel 2 yang menunjukkan bahwa nilai chi-square sebesar 8.391 dengan signifikansi 0.396. Model dikatakan layak apabila signifikansi chi-square lebih besar dari 0.05 sehingga sesuai perolehan pada tabel 2 maka model dalam penelitian sudah layak.

Tabel 3 Model Summary

Cox and Snall R Square	Nagelkerke R Square
0.104	0.139

Analisis ketiga adalah uji Nagelkerke R Square digunakan untuk melihat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 3 memperlihatkan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.139 yang artinya variabel utang, piutang, *net sales*, dan ROA menjelaskan variabel dependen sebesar 13.9% sedangkan sisanya sebesar 86.1% dijelaskan oleh variabilitas variabel lain diluar keempat variabel independen dalam penelitian.

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	SE	Sig
Utang	0.338	0.151	0.026
Piutang	0.021	0.080	0.791
Net Sales	-0.021	0.134	0.874
ROA	0.020	0.014	0.157

1. Pengujian terhadap Hipotesis Utang

Uji statistik utang menunjukkan tingkat signifikansi yang diperoleh adalah 0.026 lebih kecil dari 0.05. berarti bahwa H_1 yang menyatakan terdapat pengaruh utang terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*) dapat diterima. Dengan demikian maka terdapat pengaruh antara utang terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*) yang berarti semakin tinggi utang perusahaan maka semakin kuat keputusan lindung nilai (*hedging*). Tabel 4 menunjukkan utang memiliki pengaruh secara positif terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).

2. Pengujian terhadap Piutang

Uji statistik piutang menunjukkan tingkat signifikansi yang diperoleh adalah 0.791 lebih besar dari 0.05. berarti bahwa H_2 yang menyatakan terdapat pengaruh piutang terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*) ditolak. Dengan demikian maka tidak terdapat pengaruh antara piutang terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*). Tabel 4.7 menunjukkan piutang memiliki pengaruh secara positif terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).

3. Pengujian terhadap *Net Sales*

Uji statistik *net sales* menunjukkan tingkat signifikansi yang diperoleh adalah 0.874 lebih besar dari 0.05. berarti bahwa H_3 yang menyatakan terdapat pengaruh *net sales* terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*) ditolak. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *net sales* terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*). Tabel 4.7 menunjukkan *net sales* memiliki pengaruh secara negatif terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).

4. Pengujian terhadap ROA

Uji statistik ROA menunjukkan tingkat signifikansi yang diperoleh adalah 0.157 lebih besar dari 0.05. berarti bahwa H_4 yang menyatakan terdapat pengaruh ROA terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*) ditolak. Dengan demikian maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara ROA terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*). Tabel 4.7 menunjukkan ROA memiliki pengaruh secara positif terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).

E. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

1. Utang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).
2. Piutang tidak berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).
3. *Net sales* tidak berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).
4. ROA tidak berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai (*hedging*).

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah variabel utang, piutang, *net sales*, dan ROA menjelaskan variabel dependen sebesar 13.9% sedangkan sisanya sebesar 86.1% dijelaskan oleh variabilitas variabel lain diluar keempat variabel independen dalam penelitian.

Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Masih terbuka bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan variabel dan objek pada sektor lain yang melakukan ekspor dan impor agar hasilnya dapat lebih menguatkan keputusan lindung nilai (*hedging*) dalam upaya meminimalisir risiko.
2. Bagi Emiten
Perusahaan hendaknya memperhatikan akibat yang terjadi karena pelemahan nilai tukar terhadap utang perusahaan untuk meminimalisir risiko adanya pembengkakan angsuran. Adanya lindung nilai (*hedging*) sebaiknya dapat dimanfaatkan bagi perusahaan untuk melindungi utangnya ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Hepdityo Riski Adam, 2015, Keputusan Lindung Nilai dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi, *Diponegoro Business Review*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Faisal M, 2001, *Manajemen Keuangan Internasional*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Bambang Supomo, 2005, *Akuntansi Manajemen*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hanafi, Mamduh, 2013, *Manajemen Keuangan Internasional*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Husnan, Suad dan Enny Pujiastuti, 2004, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kasmir, 2009, *Analisis Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2009, *Manajemen Keuangan Internasional, Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Loen, Boy dan Sonny Ericson, 2008, *Manajemen Aktiva Pasiva-Bank Devisa*, Grasindo, Jakarta.
- Madura, Jeff, 2011, *International Finacial Management*, 8th Edition, West Publishing Company, Los Angeles, USA.

Mardiyanto, Handoyo, 2009, *Intisari Manajemen Keuangan*, Grasindo, Jakarta.

Munawir, 2002, *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, BPFE-UGM Yogyakarta.

Putro, Septana Hardanto dan M. Chabachi, 2012, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging, *Diponegoro Business Review*, UNDIP Semarang.

Sianturi, Crissy Norri, 2015, Pengaruh Liquidity, Firm Size, Growth Opportunity, Financial Distress, Leverage dan Managerial Ownership Terhadap Aktivitas Hedging dengan Instrumen Derivatif, *Diponegoro Business Review*, UNDIP-Semarang.

Wiharjono, Agus, 2015, *Analisis Multivariate Terapan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Yusgiantoro, Purnomo, 2004, *Manajemen Keuangan Internasional*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

PENGARUH *STORE ENVIRONMENT* TERHADAP PERILAKU PEMBELIAN IMPULSIF YANG DIMEDIASI EMOSI POSITIF

Intan Maharani¹; Chaula Anwar²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Jalan Swk 104 (Lingkar Utara), Yogyakarta 55283.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *store environment* terhadap Impulse Buying yang dimediasi oleh Emosi positif konsumen. Penelitian ini dilakukan, karena mengingat gaya berbelanja konsumen moderen, cara pandang konsumen dalam berbelanja semakin selektif tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan, kualitas, harga namun banyak faktor-faktor yang menyertainya. Seperti kenyamanan, lingkungan toko, citra toko, aksesibilitas tempat berbelanja, kebersihan, dan efisiensi berbelanja. Faktor-faktor tersebut menjadi perhatian utama bagi pengusaha-pengusaha retail, dan harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pasar dengan tanggap sehingga selalu menyesuaikan dengan gaya hidup konsumen Matahari Departemen Store Klaten. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menguji Store Environment pengaruhnya pada perilaku Pembelian Impulsif yang dimediasi oleh Emosi Positif. Alat uji yang dilakukan dengan menggunakan SEM, dengan jumlah sampel 100 responden yang sedang berbelanja di Matahari Departemen Store Klaten. Hasil penelitian dapat diperoleh, bahwa ada pengaruh langsung *Store Environment* terhadap Pembelian Impulsif pada konsumen Matahari Departemen Store Klaten. Ada pengaruh langsung *Store Environment* terhadap Emosi Positif konsumen, dan ada pengaruh langsung Emosi Positif terhadap Pembelian Impulsif. Terdapat pengaruh tidak langsung Store Environment terhadap pembelian Impulsif yang di mediasi oleh Emosi Positif pada konsumen Matahari Departemen Store Klaten. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pengelola toko Matahari Departemen Store Klaten memperhatikan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian impulsif, namun masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian impulsif yang belum masuk dalam penelitian ini seperti faktor budaya, karakteristik demografis, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian berikutnya.

Kata kunci: *Store Environment, Impulsif Buying, Emotional Positive, Matahari Departemen Store.*

A. PENDAHULUAN

Matahari *Department Store* merupakan salah satu tempat konsumen berbelanja untuk memenuhi berbagai kebutuhan, karena Matahari *Departemen Store* menghadirkan berbagai ragam produk yang menarik baik produk *Fashion* untuk wanita dan pria, anak-anak dan dewasa, pilihan aksesoris, peralatan kosmetika dan rumah tangga, dan juga ragam koleksi sepatu sandal dan tas yang berkualitas dan *fashionable* dengan harga spesial terjangkau yang dapat membantu memenuhi kebutuhan para pembeli matahari.

Matahari *Departemen Store* merupakan perusahaan retail yang menyediakan kenyamanan dalam berbelanja, menyediakan tempat lingkungan toko yang bersih, menyediakan aksesabilitas yang nyaman, sehingga memungkinkan terjadinya perilaku pembelian yang tak terencana. Perilaku pembelian tak terencana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti stimulus melalui lingkungan toko dengan menggunakan sistem pencahayaan yang baik, penampilan warna yang baik, musik yang lembut, aroma yang wangi, tata letak,

ataupun menggunakan kegiatan promosi dalam menciptakan kesan (Utami, 2010). Atmosfir toko menciptakan kesenangan dan kenyamanan sehingga dapat memberikan rangsangan yang kuat untuk meningkatkan perilaku pembelian tak terencana oleh pembeli dalam berbelanja.

Faktor lain yang memicu adanya pembelian tak terencana adalah emosi positif. Pembelian Impulsif yang dilakukan oleh konsumen karena adanya luapan emosi sehingga melakukan pembelian terhadap sesuatu diluar kebiasaan pembelian sehingga ini murni berasal dari kondisi internal konsumen. *Park et al* dalam Budiharta dan I Wayan (2014) bahwa emosi adalah sebuah efek dari *mood*. Emosi positif memiliki pengaruh positif terhadap pembelian secara impulsif, pembeli memiliki perasaan positif seperti rasa senang, gembira dan puas. Pembelian impulsif terjadi ketika konsumen mengalami ingatan secara tiba-tiba, sering kali muncul dorongan yang sangat kuat untuk melakukan pembelian dengan segera.

Perilaku pembelian tak terencana merupakan tindakan yang dilakukan pembeli dalam pembelian tanpa berfikir mengenai keuangannya (Utami, 2010). Pembelian tak terencana juga dapat diartikan suatu desakan hati yang begitu kuat untuk membeli sesuatu secara langsung tanpa memikirkan akibat selanjutnya (Rachmawati, 2009). Pernyataan lain mengenai perilaku pembelian tak terencana ini, merupakan perilaku yang muncul secara spontan akibat dari adanya stimulus yang kuat dari lingkungan tanpa di landasi oleh keperluan yang di butuhkan pembeli (Widawati, 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi *Impulse Buying* dalam perilaku pembelian ini menarik untuk diteliti.

Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah *Store Environment* berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap *Impulse Buying* yang di mediasi oleh Emosi Positif konsumen *Departement Store* Klaten?. Apakah *Environment Store* berpengaruh pada emosi positif konsumen matahasi *Departemen Store* Klaten?. Apakah Emosi Positif berpengaruh terhadap *Impulse Buying* Matahari *Departement Store* Klaten?.

B. KAJIAN TEORI

Pemahaman tentang konsep pembelian *Impulsif (Impulse Buying)* dan pemahaman tentang pembelian tidak direncanakan (*Unplanned Buying*) oleh beberapa peneliti tidak dibedakan. Dalam *Bayley dan Nancarrow* (1998) tidak membedakan antara *Unplanned Buying* dengan *Impulse Buying*. Dalam penelitian ini *Impulse Buying* mengatakan pembelian yang tidak direncanakan, pembelian yang berdasarkan ingatan, pembelian secara tiba-tiba. *Enggel dan Blacwell* (1982) mengatakan *Unplanned Buying* adalah suatu tindakan pembelian yang di buat tanpa direncanakan sebelumnya atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada didalam toko. *Coob dan Hayer* (1986), mengatakan pembelian *Impulse Buying* terjadi apabila tidak terdapat tujuan pembelian seperti: merek tertentu, kategori produk tertentu pada saat masuk kedalam toko. Sehingga dapat memperbesar kemungkinan pembeli untuk melakukan keputusan pembelian yang tidak disengaja. Untuk itu yang dapat di lakukan oleh penyedia retail adalah memperhatikan lingkungan toko (*Store Environment*). Utami (2009) mengatakan lingkungan toko adalah desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk merangsang respon emosional dan persepsi mempengaruhi konsumen dalam membeli barang. Sutisno (2005) mengatakan lingkungan toko adalah penataan ruang dalam (*Instore Atmosphere*: yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan ruangan misalnya: *layout*, musik, wangi-wangian, tekstur ruangan, *display* yang baik) yang dapat menarik perhatian pengunjung, mengamati dan memeriksa dan memilih barang –barang akhirnya melakukan pembelian. Ruang luar (*Outstore Atmosphere* : berkaitan dengan fasilitas, keindahan atau kemegahan gedung, citra toko) yang dapat menciptakan ketertarikan dan kenyamanan bagi pembeli. *Stone* (1996) mengatakan orientasi gaya hidup berbelanja atau gaya pembeli dalam membeli mencakup aktivitas berbelanja, pendapat dan minat beli. Orientasi berbelanja merupakan suatu yang kompleks terkait dengan motif, kebutuhan, ketertarikan, kondisi ekonomi dan kelas sosial, dimensi perilaku pasar (pilihan sumber informasi, perilaku panutan, dan atribut toko). *Thomson et al.* (1990) mengemukakan ketika terjadi pembelian impulsif akan memberikan pengalaman emosional lebih dari pada rasional, sehingga tidak terlihat sebagai suatu sugesti. Emosi merupakan hasil fisiologis yang

menyebabkan munculnya reaksi, emosi dapat dilihat dari ekspresi dan perilaku. Syukur (2011) mengatakan Emosi merupakan efek dari *mood* atau perasaan yang bersifat temporer karena berkaitan dengan suasana dan rangsangan dari luar yang akan merubah perilaku. Emosi positif adalah emosi yang mampu menghadirkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Premananto (2007) menjelaskan perasaan positif seperti jatuh cinta, gembira, ingin memiliki, terpesona dengan keindahan, kenyamanan, dari beberapa studi disinyalir memiliki korelasi yang positif kecenderungan melakukan *Impulse Buying*. Goleman (2004) menjelaskan bahwa emosi positif digambarkan rasa senang, kegembiraan, rasa suka, tenang dan kepuasan. Sebaliknya emosi negatif dapat mendorong konsumen tidak melakukan pembelian *Impulse* (Premananto,2007). *Bellenger dan Korgaonkar* (1980) mengatakan aktivitas selain berbelanja, adalah rekreasi maka berbelanja bisa merupakan suatu aktivitas *leisure-time* atau fungsi dari motif tidak berbelanja, dengan alasan hanya sebagai kebutuhan interaksi sosial, hiburan, atau pengalihan dari aktivitas rutin, rangsangan berhubungan dengan perasaan.

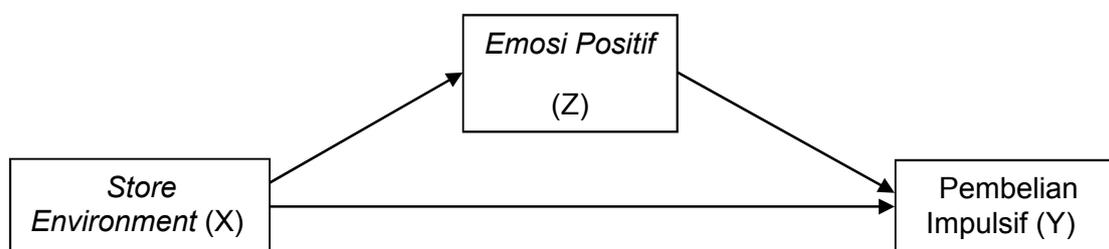
Hipotesis

Hasil penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perilaku pembelian tak terencana di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lingkungan toko, yang berkaitan dengan toko dapat menarik minat pembeli (Utami, 2010). Sedangkan Atmosfir toko dapat memberikan kesenangan bagi para pembeli untuk berbelanja, tetapi juga memberikan nilai tambah dari pembeli terhadap produk-produk yang di jual (Sukma dkk, 2012). Pembelian impulsif dilakukan karena pengalaman sebagai rangsangan dari stimulus lingkungan (Budiharta dan I Wayan, 2014). Penelitian ini diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Margana dan Putu (2015) yang menunjukkan masing-masing stimulus *Environment Store* berpengaruh pada *Impulse Buying*, berpengaruh pada emosi positif. Emosi positif berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif, didukung oleh hasil penelitian Margana dan Putu (2015) dan Budiarta , I Wayan (2011) mengatakan emosi positif berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif. Pengaruh tidak langsung *Store Environment* terhadap *Impulse Buying* yang di mediasi oleh emosi positif didukung oleh hasil penelitian Margana dan Putu (2015) dan Budiarta, I Wayan (2011) mengatakan emosi positif berpengaruh positif memediasi *Store Environment* terhadap pembelian *Impulse Buying*. Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H₁ : *Store Environment* berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian impulsif.
- H₂ : *Store Environment* berpengaruh positif terhadap emosi positif.
- H₃ : Emosi Positif berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif.
- H₄ : *Store Environment* berpengaruh positif terhadap pembelian *Impulse Buying* yang di mediasi emosi positif.

Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah penelitian berikut ini disajikan bagan kerangka teoritis penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang berbelanja di Matahari *Departemen Store* Klaten.

Teknik Analisis Data pada penelitian ini menggunakan *Struktur Equation Model* (SEM), merupakan suatu teknik modeling statistika yang paling umum, dan telah digunakan secara luas dalam ilmu perilaku (*Behavior Science*).

Operasional variabel meliputi *Store Environment* adalah suasana terencana yang sesuai dengan pasar sasaran dan dapat menarik konsumen untuk membeli (Barry dan Evans, 2007). *Store Environment* meliputi *general exterior, general interior, store layout, display*. Setelah melihat, memperhatikan, mengamati, rangsangan-rangsangan dari *Store Environment* muncul ketertarikan konsumen untuk melakukan dan bersikap positif melalui respon emosi dimana respon emosi adalah tingkat perasaan konsumen yang ditunjukkan oleh perilaku, kemudian dapat diungkapkan secara lisan ataupun tertulis tentang dirinya sendiri (Mehrabian dan Russell, 1974). Menurut Golamen (2004) emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.

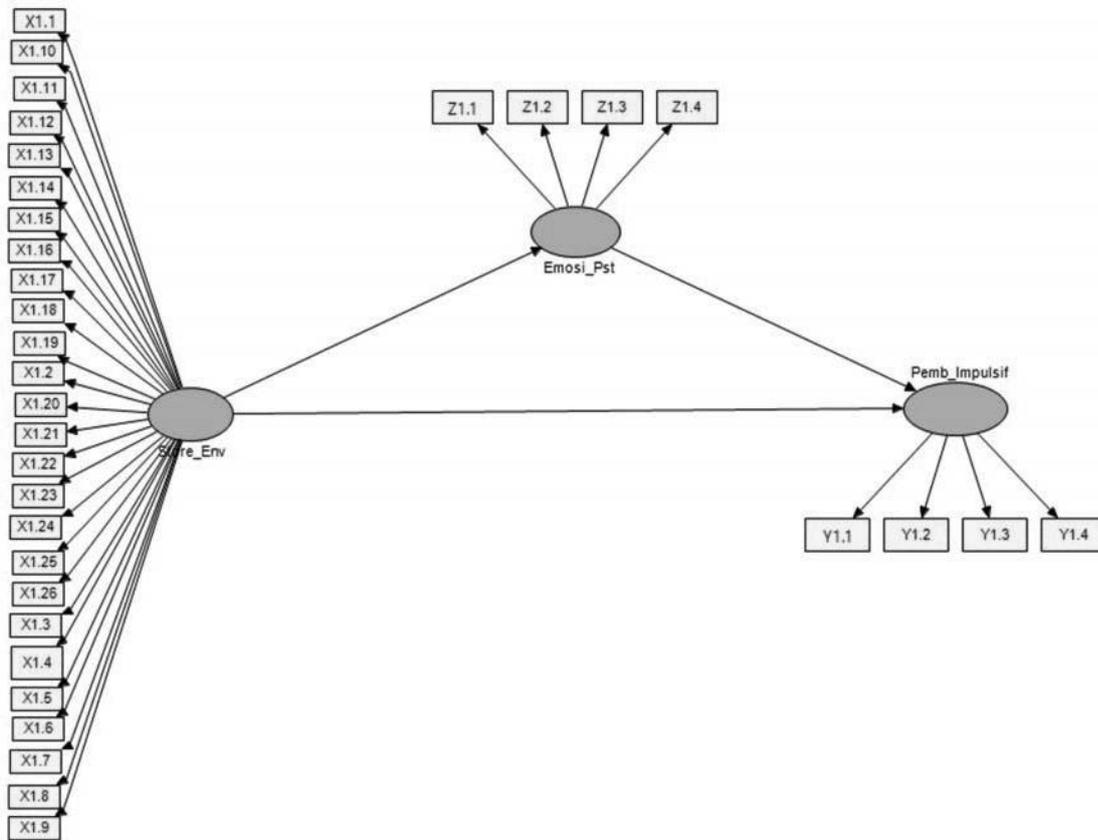
Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu: seperti rasa senang, gembira. Emosi positif adalah emosi yang mampu menghadirkan perasaan positif terhadap seseorang yang mengalaminya. Emosi positif adalah sebuah efek dari suasana hati yang positif (Premananto, 2007). Seperti gembira, ingin memiliki, terpesona, rasa catur cinta, rasa suka, rasa bangga, rasa tenang dan kepuasan. Kesemua ini disinyalir oleh beberapa teori dan para peneliti memiliki korelasi yang positif kecenderungan melakukan *Impulse Buying*. *Impulse Buying* di artikan sebagai pembelian secara langsung tanpa niatan sebelum berbelanja, perilaku pembelian impulsif didasarkan pada ingatan, stimulus tiba-tiba, diikuti kesenangan, kegembiraan dan dorongan tak tertahankan untuk membeli. Sedangkan kecenderungan pembelian impulsif adalah tingkat kecenderungan pembeli untuk membeli secara spontan, pembelian tiba-tiba, tersugesti ingin membeli (Bayley dan Nancarrow, 1998). Orientasi belanja, adalah sikap pembeli kearah aktivitas belanja, kenyamanan adalah sikap pembeli yang berhubungan langsung dengan aktivitas belanja, orientasi belanja rekreasi adalah sikap pembeli yang berhubungan dengan memperoleh kepuasan bersenang-senang, bermain, selain melakukan pembelian.

Selanjutnya untuk melihat pengaruh langsung atau tidak langsung Matahari *Departemen Store* terhadap perilaku pembelian *Impulse Buying* yang di mediasi oleh Emosi Positif dapat dilihat pada Gambar 1.

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

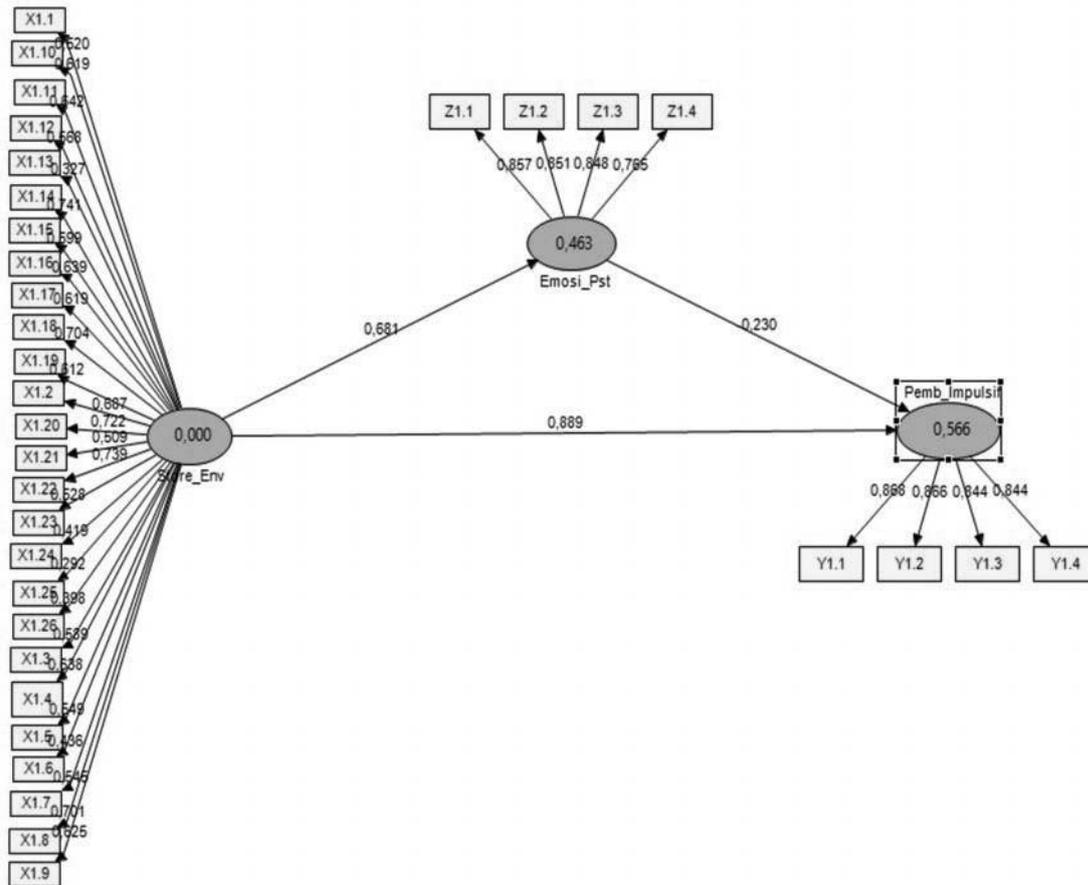
Jumlah kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 120 kuesioner. Jumlah responden yang mengembalikan mengisi menjawab lengkap dan baik 100 responden. Meskipun tidak ada ketentuan mengenai jumlah sampel yang tepat, jumlah sampel tersebut telah memenuhi jumlah sampel yang disarankan yaitu antara 100-200 sampel (Hair et al, 1998). Untuk analisis menggunakan analisis statistik *Struktural Equation Modeling* (SEM), dengan menggunakan bantuan *software PLS (Partial Least Square)*. Menurut Wiyono (2011), PLS adalah salah satu teknik SEM yang mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator, dan kesalahan pengukuran secara langsung. PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena dapat di terapkan pada semua skala data, tidak banyak membutuhkan asumsi, dan ukuran sampel tidak harus besar. Menurut Ghazali (2011) tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengestimasi model adalah Smart PLS versi 2.

Evaluasi Measurement (outer Model adalah untuk melihat apakah indikator yang digunakan valid atau reliabel. Dapat dilihat dalam gambar 4.1.



Gambar 4.1 Path Diagram

Pada gambar 4.1, konstruk *Store Environment* dibentuk atau diukur dengan 26 indikator yaitu X1.1 sampai X1.26. Arah anak panah adalah dari konstruk kepada indikator, ini sering disebut dengan indikator reflektif. Demikian juga kostruk emosi positif dibentuk dengan 4 indikator, pembelian impulsif dibentuk 4 indikator.

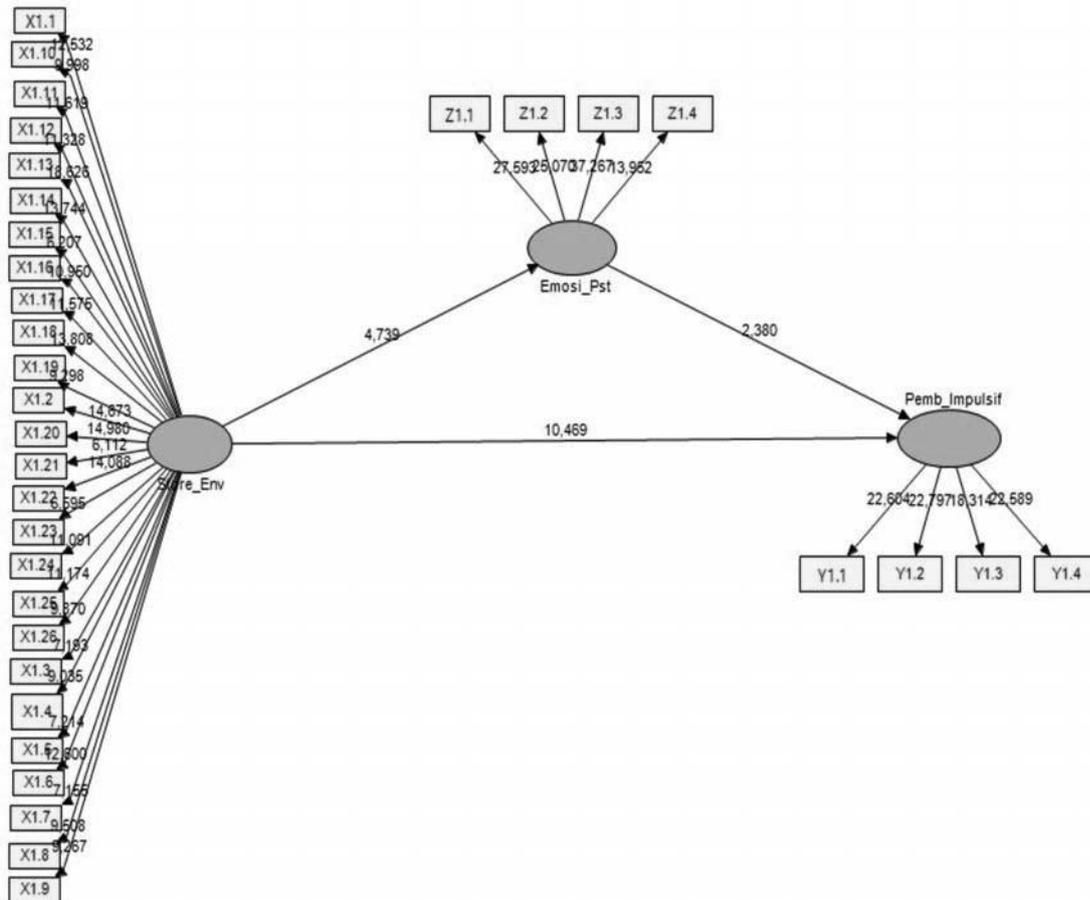


Gambar 4.2 Output Outer Model

Setiap indikator mampu membentuk konstruk yang dituju dengan valid. Pada gambar 4.2, angka yang terdapat pada anak panah dari konstruk kepada indikatornya disebut *loading faktor*. Nilai ini disarankan diatas 0,5. Dalam gambar 4.2 tidak ada indikator yang mempunyai *loading faktor* di bawah 0,5 untuk konstruk *Store Environment*, emosi positif dan *Impulse Buying*. Berarti indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid atau telah memenuhi *Convergen Validity*. Model lain untuk melihat *Discriminant Validity* dengan melihat nilai *Square Root of Averte Varianca Extracted (AVE)*. Nilai yang disarankan adalah diatas 0,5. Setelah dilakukan penelitian ternyata hasil yang diperoleh nilai *AVE* untuk store environment 0,545 emosi positif 0,718 dan impulsie buying 0,732. Untuk uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Composite Reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk dengan kriteria nilai diatas 0,7. Hasilnya menunjukkan *Store Environment* 0,954, emosi positif 0,910, *Impulse Buying* 0,916. Berarti indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria *Outer Model*, berikut akan dilakukan pengujian model struktural (*Inner Model*). Berikut nilai *R-Square* pada konsrtuk: emosi positif 22,50% berarti *StoreEnvironment* mampu menjelaskan emosi positif sebesar 22,50% dan selebih mampu dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Pembelian impulsif yang dipengaruhi oleh store environment dan emosi positif sebesar 55,83% artinya *Store Enviroment* dan emosi positif mampu menjelaskan varian pemelian impulsif sebesar 55, 83% dan selebihnya mampu dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan untuk pengujian model dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square (PLS)* dengan menggunakan program smart PLS 2.0. Hasil analisis jalur dapat dilihat dalam gambar model 4.3 sebagai berikut



Gambar 4.3 Output Bootstrapping

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa *Covarial* pengukuran item dipengaruhi oleh konstruk laten atau mencerminkan variasi dari konstruk *unidimensional* yang digambarkan dengan bentuk *elips* dengan beberapa anak panah dan konstruk ke item. Dalam model ini terdapat satu variabel eksogen yaitu *Store Environment* dan dua variabel endogen yaitu emosi positif dan pembelian impulsif. Hasil analisis dengan teknik analisis PLS dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Jalur dengan Teknik Analisis PLS

Hubungan Variabel Penelitian	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
Emosi_Pst ->Pemb_Impulsif	0,189032	0,178652	0,079434	0,079434	2,379727
Store_Env -> Emosi_Pst	0,474344	0,495489	0,100101	0,100101	4,738637
Store_Env ->Pemb_Impulsif	0,638765	0,647557	0,061013	0,061013	10,469356

Sumber: Hasil olah data, 2017.

Pengujian Hipotesis I

Hipotesis ini menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan dari *Store Environment* terhadap pembelian impulsif, berdasarkan pengujian diperoleh nilai *Original Sampel Estimate* sebesar 0,638765 dan memiliki nilai t hitung sebesar 10,469356. Berdasarkan pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel dengan n=100, maka diperoleh df (n-2=100-2=98)=1,9845, sehingga diperoleh nilai t hitung > dari nilai t tabel atau (10,469356>1,9845). Ini dapat diartikan bahwa *Store Environment* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembelian impulsif, sehingga hipoteses 1 diterima dan terbukti.

Pengujian Hipotesis 2

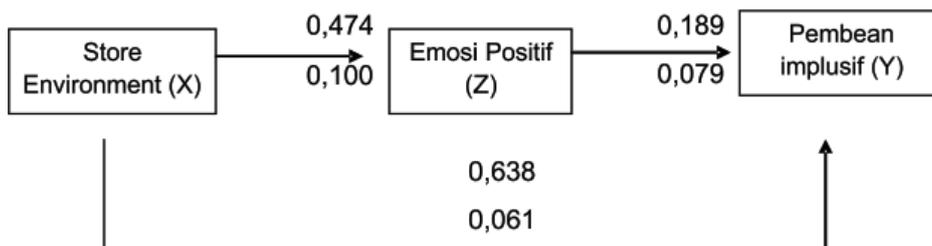
Hipoteses ini menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari *Store Environment* terhadap emosi positif, berdasarkan pengujian diperoleh nilai *Original Sampel Estimasi* sebesar 0,474344 dan memiliki nilai hitung sebesar 4,738637. Berdasarkan pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel dengan n=100, maka diperoleh $df(n-2=100-2=98)=1,9845$, sehingga diperoleh nilai hitung > nilai tabel atau $(4,738637 > 1,9845)$. Hal ini dapat diartikan *Store Environment* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap emosi positif, sehingga hipotesis ke 2 terbukti dan diterima.

Pengujian Hipotesis 3.

Hipotesis ini menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari emosi positif terhadap pembelian impulsif, berdasarkan pengujian diperoleh nilai *Original Sampel Estimate* sebesar 0,189032 dan memiliki nilai t hiting sebesar 2,379727. Berdasarkan pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel dengan n=100, maka diperoleh $df(n-2=100-2=98)=1,9845$, sehingga diperoleh nilai t hitung > nilai t tabel atau $(2,379727 > 1,9845)$. Hal ini dapat diartikan bahwa emosi positif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembelian impulsif, sehingga hipotesisi ke 3 terbukti dan dapat diterima.

Pengujian Hipotesis ke 4

Hipotesisi ini menyatakan *Store Environment* berpengaruh terhadap pembelian impulsif yang dimediasi oleh emosi positif. Pengujiannya adalah sebagai dalam gambar 4.4.



Gambar 4.4

Hasil perhitungan analisis *Path* pengaruh *Store Environment* (X1) terhadap pembelian impulsif (Y) melalui emosi positif (Z) menunjukkan hasil pengaruh langsung dan tidak langsung, berikut perhitungannya dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Pengaruh Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
Store environment (X) □ Pembelian impulsif (Y)	0,638	-	0,638 + 0,090 = 0,728
Store environment (X) □ Emosi positif (Z) □ Pembelian impulsif (Y)		$(0,474 \times 0,189) = 0,090$	

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa *Store Environment* mempunyai pengaruh secara tidak langsung (*Indirect Effect*) terhadap pembelian impulsif melalui emosi positif sebesar 0,090. Pengaruh secara langsung diperoleh sebesar 0,638 sehingga total pengaruh (total effect) sebesar 0,728. Pengujian signifikansi pengaruh tak langsung (*Indirect Effect*) *Store Environment* terhadap pembelian impulsif melalui emosi positif dengan

statisti (t hitung). Karena nilai t hitung =17,056 > 1,9908 (t tabel) berarti signifikansi pada taraf signifikansi 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Store Environment* secara signifikansi mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pembelian impulsif melalui emosi positif. Dengan demikian hipotesis ke 4 terbukti dan diterima.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan penelitian analisis terhadap variabel-variabel penelitian, *Store Environment* dengan 26 pertanyaan pada 100 responden, 67% mengatakan *Store Environment* sangat mempengaruhi impulse buying, karena faktor exterior dan faktor interior sangat menarik sehingga membuat calon pembeli untuk membeli, baik membeli tanpa sengaja yang dipengaruhi oleh iklan didalam toko, didukung harga yang sangat menarik pembeli. Lingkungan toko dapat memberikan kesenangan bagi para pembeli dalam berbelanja, tetapi juga memberikan nilai tambah dari pembeli terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh toko. Dengan demikian pengelolaan toko yang baik akan meningkatkan ketertarikan pembeli untuk datang berbelanja di toko tersebut. Tendai dan Crispen dalam Budiharta dan I Wayan (2014) menunjukkan pembelian impulsif dimotivasi oleh rangsangan-rangsangan lingkungan toko. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Margana dan Putu (2015) yang menunjukkan bahwa masing-masing stimulus lingkungan toko berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian tak terencana.

Store Environment berpengaruh positif terhadap emosi positif hal ini mengindikasikan semakin baik stimulus lingkungan toko, emosi positif yang dirasakan pembeli di Matahari *Departement Store* akan semakin meningkat. Dengan demikian pembelian impulsif dilakukan pembeli karena adanya luapan emosi sehingga pembelian barang diluar kebiasaan pembelian murni yang berasal dari kondisi internal pembeli. Hal ini didukung oleh penelitian Margana dan Putu (2015) menunjukkan bahwa masing-masing variabel stimulus lingkungan toko berpengaruh positif terhadap emosi positif. Budiharta dan I Wayan (2011) dalam kesimpulan penelitiannya mengatakan stimulus lingkungan toko berpengaruh positif terhadap emosi positif.

Emosi positif berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif yang berarti meningkatkan perilaku pembelian tidak terencana oleh konsumen Matahari *Departement Store* Klaten. Hal ini sependapat dengan Amiri et al (2012) mengatakan bahwa pembentukan emosi positif pembeli terhadap produk dapat meningkatkan motivasi pembeli untuk melakukan pembelian tiba-tiba.

Store Environment berpengaruh tidak langsung terhadap pembelian impulsif melalui emosi positif, artinya emosi positif sebagai variabel yang memediasi berperan untuk mempengaruhi antara variabel stimulus lingkungan toko terhadap variabel perilaku pembelian tidak terencana. Karena stimulus toko dapat secara langsung mempengaruhi perilaku pembelian tidak terencana, tetapi perilaku pembelian tidak terencana akan lebih meningkat jika stimulus lingkungan toko juga mampu meningkatkan emosi positif, dimana emosi positif juga akan mempengaruhi perilaku pembelian tidak terencana.

Maka Matahari *Departement Store* Klaten menambahkan fasilitas tambahan yang membuat konsumen nyaman, senang dan berlama-lama menghabiskan waktu sambil melihat-lihat, kemudian membangkitkan selera, menimbulkan ingatan akan kebutuhan dan didorong oleh gaya perilaku pembelian karena status sosial ekonomi yang mewah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barley, Geoff, and Clive Nancarrow, 1998, *Impulse Purchasing: Aqualitative Explanation of the phenomenon*. MCB UP Limited.
- Berlenger, D.,Robertson D.H., and HirschmanE.C., 1978, *A impulse Buying Varies by Product*. *Journal of Advertising Research*, vol. 18, Desember, pp. 15-18.

- Budiharta, Kadek dan I Wayan Santika (2014), Peran Emosi Positif Sebagai Pemeditasi Pengaruh Stimulus Toko Terhadap *Impulse Buying* Pakaian Di Matahari *Department Store* Kuta *Square*, *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Coob, C J. and Hayer W.D., 1986, A Planned Versus Impulse Behavior, *Journal of Retailing*, Vol.62, Winter, pp.67-87.
- Engel, J., and Blackwell, R., 1982, *Consumer Behavior*. Dryden Press, Chicago.
- Ghozali, Imam, 2006, *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2011, *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 3*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Goleman, D., 2004, *Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi*.
(Terjemahan : Alex Tri K. W.). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1, Yogyakarta : BPFE.
- Jondry, A. H. 2012. Model Kecenderungan Pembelian Impulsif (Studi pada Konsumen Matahari Department Store Kota Ambon). *Jurnal Manajemen Teknologi*. 11 (3): 34-45.
- Kotler, Philip, 2009, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : Erlangga.
- Kotler, Philip & Kevin Lane Keller, 2012, *Marketing Management*, Global Edition 14th Edition Pearson Prentice Hall . New Jersey
- Margana, Charloan Artha dan Putu Yudi Setiawan, 2015, Pengaruh Stimulus Lingkungan Toko Terhadap Perilaku Pembelian Tidak Terencana Yang Dimediasi Oleh Emosi Positif (Studi Kasus Pada Konsumen *Hypermarket* di Kota Denpasar), *Jurnal Fakultas Ekonomi*, Universitas Udayana.
- Marchall, Maikell, Lisbeth Mananeke, dan Ferdly Roring, 2015, Pengaruh *Brand Equity*, *Store Atmosphere* Dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian *Fashionable* Pada 3 *Second* Manado Town Square, *Jurnal Fakultas Ekonomi*, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mehrabian A. and Russell, J.A., 1974, *An Approach to Environmental Psychology*. in Fisher, Feffrey D., Paul A Bell, and Andrew Baum (1984). *Environmental Psycholog*. 2nd ed. New York: Holt , Rinehart and Winston.
- Octaprinanta, N., Kumadji, S & Hidayat, K. 2013. Pengaruh Faktor Situasional Terhadap Emotional States dan Impulse Buying (Survei pada Pengunjung Giant Hypermarket Mall Olympic Garden Malang). *Jurnal Aplikasi Manajemen*. 9 (4):88-96.
- Premananto, Gancar Candra. 2007. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Impuls Dengan Pendekatan Psikologi Lingkungan Dan Rantai Kausalitas, *Jurnal Antisipasi*, Vol. 10, No. 1, Hal.172-184.
- Purwa, Enrique Made Reidia Gana dan Ni Nyoman, Kerti Yasa ,2014, Strategi *Store Environment* Dan *Time Pressure* Pada Pembelian Impulsif Melalui *Emotional State*, *Jurnal Dinamika Manajemen*, ISSN, Vol. 5, No. 2,
- Rachmawati, V. 2009. Hubungan antara Hedonic Shopping Value, Positive Emotion, dan Perilaku Impulse Buying pada Konsumen Ritel. *Majalah Ekonomi*. 19 (2): 192-209.
- Rahmasari, Lisda. 2010. Menciptakan Impulse Buying. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(3), hal: 56-68.
- Rahmawan, Indra Wahyu, Srikandi Kumadji, dan Andriani Kusumawati, 2013, Pengaruh Faktor-Faktor Lingkungan Toko Terhadap Pembelian Impulsif (Survei Pada Pengunjung Giant Hypermarket Mall

Olympic Garden Kota Malang), *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB), Vol. 6 No. 2. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Safaria Triantoro, *Manajemen Emosi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Sugiyono, 2010, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kelima, Bandung: Alfabeta.

Sugiarta, I. 2011. *Panduan Praktis dan Strategis: Retail Consumer Goods*, Jakarta: Expose (MizanGroup).

Suhartanto, D & Nuralia, A. 2001. Citra Supermarket: Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumen: *Jurnal Kajian Bisnis* No.23

Sukma, Erlangga Andi., Achmad Fauzi DH., dan Franciska Yaningwati. 2012. Suasana Toko Dalam Menciptakan Emosi dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Manajemen*, 6(1), hal: 60-87. Fakultas ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang

Stone, N., V. Arunachalam and John S. Chandler, 1996, " Crosscultural Comparison: An Empirical Investigation of Knowledge , skill, Self Efficacy and Computer Anxiety in Accounting Education". *Issues in Accounting Education*, Vol.11.No.2.

Sutisna, 2005. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Syukur, Abdul, 2011, *Beragam Cara Terapi Gangguan Emosi*. Jogjakarta: Penerbit DIVA Press

Umar, Husein, 2005, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Utami, Christina Whidya. 2010. *Manajemen Ritel (Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern di Indonesia)*. Jakarta : Salemba Empat

Widawati, Lisa. 2011. Analisis Perilaku "Impulse Buying dan "Locus of Control" pada Konsumen di Carrefour Bandung. *Mimbar*, XXVII(2), hal: 125- 132.

Wiyono, G., 2011, *Merencanakan*

Penelitian Bisnis Dengan Alat Statistik SPSS & SmartPLS, Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta.

MAPPING POTENSI WISATA DALAM UPAYA TATA KELOLA GREEN ECOTOURISM DI KABUPATEN KAIMANA, PROVINSI PAPUA BARAT, INDONESIA

Putri Puspita Sari¹ dan Istiana Rahatmawati²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
puspita.jewel@gmail.com¹; rahatmawati@gmail.com²

ABSTRAK

Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kota Kabupaten di Propinsi Papua Barat yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Sama halnya dengan Raja Ampat Papua yang termashur, Kaimana selain memiliki keluasan daratan, juga memiliki luas perairan 17500km² dengan pulau-pulau kecil, terumbu karang dan ikan hiu paus yang merupakan potensi wisata yang menarik. Namun keindahan alam Kaimana belum terkelola dengan baik, karena baru tahun 2013 di rintis menjadi kawasan wisata sehingga belum dapat memberikan kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat. Mapping potensi wisata ini merupakan langkah awal sebelum menentukan strategi pengembangan kepariwisataan nantinya. Penentuan strategi pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan khususnya jenis wisata alam sering sekali menimbulkan kerusakan yang akhirnya justru merusak keindahan alam itu sendiri. Green ecotourism merupakan kegiatan wisata yang sekaligus menjaga kelestarian alam telah menjadi harga mati untuk terciptanya keselarasan dengan alam. Mapping potensi wisata akan mempermudah tata kelola pariwisata di Kaimana termasuk pemberian peran kepada para stake holder khususnya bagi komunitas lokal yang sering terabaikan. Dengan pengembangan green ecotourism diharapkan Kaimana akan menjadi tujuan wisata yang dapat menarik banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan Manca Negara sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Keywords: Mapping, Potensi, Green Eco-tourism.

A. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Kaimana adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia yang memiliki keindahan alam yang luar biasa dan kaya akan sumberdaya alam yang belum dikelola secara optimal sehingga belum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.



Gambar 1. Wilayah Kabupaten Kaimana

Luas wilayah Kabupaten Kaimana mencapai 36.000 km², yang terdiri atas luas daratan kurang lebih 18.500 km² dibagi menjadi 7 distrik, dan 84 kampung/ desa (Tabel 1.1). Luas lautan/ perairan kurang lebih 17.500 km².

Tabel 1 Daftar Distrik, Luas Daratan Masing-Masing Distrik dan Jumlah Desa, Tahun 2015

Distrik	Luas	Jumlah Desa
Buruway	2.650 km ²	10
Teluk Arguni Atas	3.010 km ²	24
Teluk Arguni Bawah	1.990 km ²	16
Kaimana	2.095 km ²	17
Kambrau	755 km ²	7
Teluk Etna	4.195 km ²	8
Yamor	3.805 km ²	6

Sumber: Kaimana Dalam Angka, 2016

Kabupaten Kaimana memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan masih belum sepenuhnya diolah sehingga belum tercipta nilai tambah dari produksi sumberdaya alam tersebut. Adapun jenis komoditi produksi tanamannya seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Luas Area Dan Produksi Tanaman Menurut Jenis Komoditi Di Kabupaten Kaimana, 2015

Jenis Tanaman	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
Kelapa	620	562,35
Kakao	27	12,05
Pala (Biji)	6 302,19	354,24
Pala (Buah)	6 302,19	18,264
Cengkeh	32	1,5
Jumlah	13 283,38	948,404

Sumber: Kaimana Dalam Angka 2016

Upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Kaimana baru mulai nampak dalam tahun 2013 ditandai dengan hadirnya investor asing yang membangun resor di Teluk Triton. Sumbangan sektor pariwisata belum nampak dalam perekonomian. Masyarakat belum banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung sektor pariwisata. Untuk itu perlu upaya pengembangan pariwisata yang diawali dengan mapping wisata.

B. Tujuan penelitian

- Untuk memberikan gambaran obyek obyek wisata yang ada
- Memberikan gambaran jarak menuju lokasi wisata
- Memberikan gambaran sarana dan prasarana pendukung pariwisata

C. Manfaat penelitian

- Mapping potensi wisata dapat digunakan untuk pengembangan strategi tata kelola pariwisata *Green Ecotourism* di Kaimana, Papua Barat, Indonesia
- Mapping wisata ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi para pelaku wisata baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan Mancanegara

B. KAJIAN PUSTAKA

Ekowisata banyak didefinisikan sebagai pariwisata di kawasan alam yang rapuh, murni, dan relatif tidak terganggu, sebagai alternatif wisata dengan skala yang rendah dan bahkan sering dalam ukuran kecil dibandingkan dengan standar pariwisata yang masal. Sedangkan *Green Ecotourism* dapat dikatakan sebagai perjalanan wisata ke suatu lingkungan, baik lingkungan alam yang alami maupun yang buatan, serta budaya yang ada yg bersifat informatif dan partisipatif yg lebih bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial dan budaya. *Green ecotourism* lebih menitik beratkan pada tiga hal utama yaitu, kelestarian alam atau ekologi, memberikan kemanfaatan ekonomis, dan secara psikologis dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian maka kegiatan ekowisata / *Green Ecotourism* dapat secara langsung memberikan akses kepada semua orang untuk melihat, merasakan, mengetahui, dan menikmati pengalaman alam, intelektual dan budaya dari masyarakat lokal. Secara konseptual ekowisata didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan tujuan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan alam dan budaya serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Sedangkan ditinjau dari segi pengelolaannya, ekowisata dapat diartikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di suatu tempat yang alami maupun pada kawasan yang dibuat dengan berdasarkan kaidah alam, yang secara ekonomi dapat berkelanjutan dan dapat mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan alam dan budaya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Mapping yang dimaksudkan disini adalah pemetaan atau pembuatan peta yang menggambarkan suatu wilayah pada bidang datar melalui proses survei wilayah dengan diberi petunjuk- petunjuk antara lain nama peta; skala; arah mata angin; batas wilayah; symbol-simbol; legenda (Rahatmawati dan Setiawan, 2017). Sedangkan potensi merupakan kemampuan terpendam yang memerlukan upaya untuk merealisasikan menjadi kekuatan riil (Lemhannas RI dalam Rahatmawati, 2013).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai Penelitian Exploratif yang merupakan salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian (Wikipedia.org/wiki/penelitian-eksploratif). Data-data dalam penelitian ini didapatkan dari observasi langsung di area penelitian dan dari sumber data sekunder (Kaimana Dalam

Angka 2016).

D. HASIL PEMBAHASAN

A. Potensi Wisata Kaimana

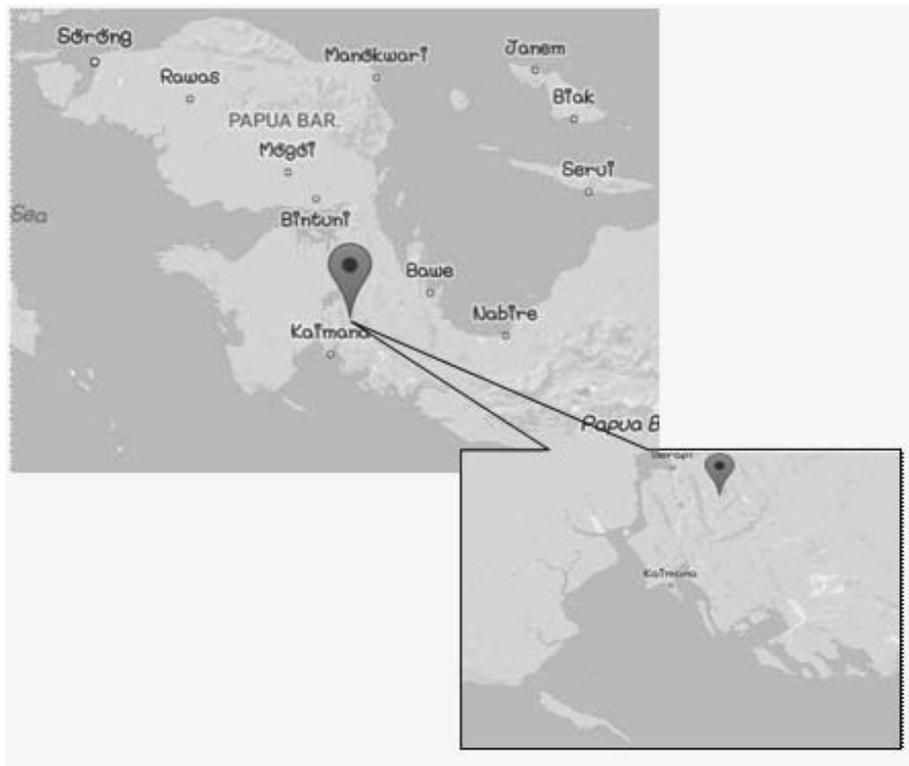
Potensi pariwisata di Kaimana tergolong sangat baik dan layak untuk dipromosikan. Obyek wisata yang dimaksud antara lain : Pulau Venu (pantai, *diving*, *sunset*, melihat langsung penyu bertelur), Pulau Kilimala (pantai, *diving*), Pulau Karawatu (*spot diving*), Tanjung Kinara (*birdwatching*, *sunset view*, *diving*), Pulau Adi (*agrowisata*), Teluk Triton (*best spot diving*), Tanjung Bicari (lukisan kuno di tebing, wisata Hiu Paus), Jembatan KM 14 (*bird watching*), Pulau Ermun, Pantai Bantemi (*sunset view*), Jembatan Usaha Mina (*pancing mania*, *sunset view*), Gelar Tradisi budaya pada Hari Raya Lebaran (*hadrat pesta rebana*), Kampung Lobo (Legenda Burung Garuda pemangsa manusia), Peninggalan Pra Sejarah: Gambar dan cap tangan manusia di sepanjang tebing pinggir laut, dan wisata aneka kuliner.

Salah satu potensi pariwisata yang saat ini banyak diminati adalah Teluk Triton. Teluk Triton adalah lokasi wisata di kaimana dengan keindahan alamnya yang begitu luar biasa, akan tetapi pengelolaannya masih tradisional. Investor asing melirik akan peluang bisnis di Teluk Triton ini dan telah membuka usaha resor (penginapan) di Teluk Triton. Masyarakat belum dapat menangkap peluang yang ada, padahal jika dimanfaatkan akan dapat menjadi pendorong pembangunan perekonomian di Kaimana.

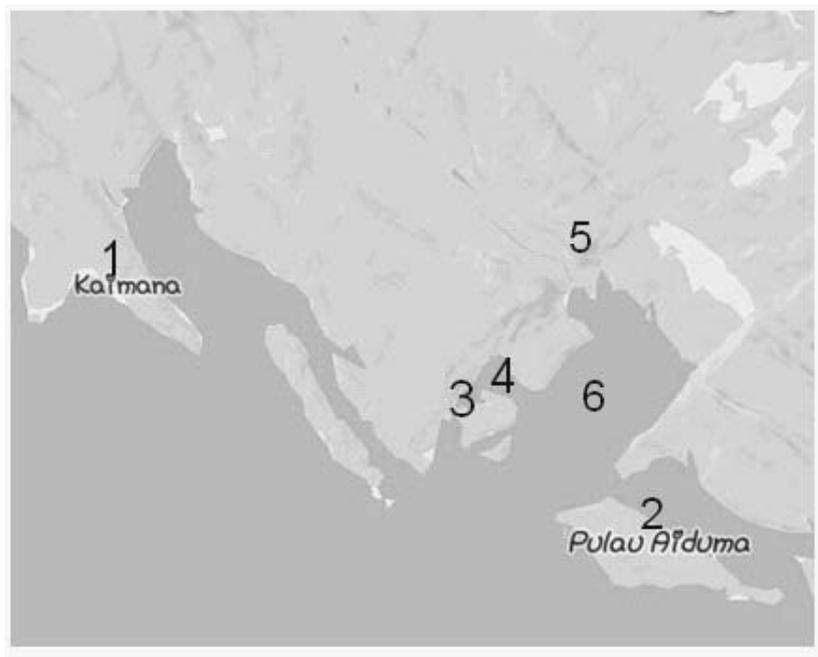


Gambar 2 Pulau- pulau Kecil di Teluk Triton

B. Gambar Mapping Wisata Kaimana



Gambar 3. Peta Kabupaten Kaimana di Papua



Gambar 4. Peta Lokasi Wisata di Kabupaten Kaimana

Keterangan:

- 4.1. Kota Kaimana
- 4.2. Resor di Pulau Aiduma
- 4.3. Pantai Ermun/Pantai Triton

- 4.4. Pulau- pulau Kecil di Teluk Triton
- 4.5. Gunung Emansirin di Kampung Lobo, Legenda Garuda Pemangsa Manusia
- 4.6. Hiu Paus di Perairan Sekitar Teluk triton
- 4.7. Peninggalan Pra Sejarah gambar di tebing laut Kaimana



Gambar 4.5 Gunung Emansirin di Desa Lobo, Cerita Rakyat Tentang Burung Garuda Pemangsa Manusia



Gambar 4.3 Pulau- pulau Kecil di Teluk Triton



Gambar 4.6 Hiu Paus di Perairan Sekitar Teluk Triton



Gambar 4.7 Gambar/Cap Tangan Manusia Zaman Pra Sejarah di Salah Satu Tebing Dekat Laut Pulau Kaimana



Gambar 4.3 Pulau Ermun di Teluk Triton Kabupaten Kaimana



Gambar 4.1 Pemandangan Senja Sore Hari Di Kaimana



Gambar 4.2 Resor di Pulau Aiduma.

C. Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata di Kabupaten Kaimana

Sarana dan prasarana di Kabupaten Kaimana berupa jalan yang tersedia adalah jalan yang sudah beraspal di bagian kota, akan tetapi separuh jalan di desa-desa masih berupa jalan tanah dan kerikil. Listrik yang dialirkan ke perumahan warga kota selama 24 jam seharisedangkan di desa hanya sampai jam 12 malam dengan menggunakan mesin pembangkit listrik oleh pemerintah. Ketersediaan air di Kaimana sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan pada musim kemarau warga tidak kekurangan air. Jaringan internet untuk yang di kota sudah terjangkau yaitu 4G tetapi di pedesaan masih belum bahkan susah untuk mendapatkan sinyal. Kendaraan dan angkutan hanya ada di kota, yang berupa mobil, truk, bis, sepeda motor dan sepeda. Akan tetapi di desa-desa tidak ada kendaraan angkutan sehingga kalo hendak bepergian harus berjalan kaki. Berikut ini gambaran sarana dan Prasarana yang ada di Kota Kabupaten Kaimana:



Gambar 5. Keadaan Jalan di Kota Kaimana



Gambar 6 Jalan di Depan Taman Kota Kaimana



Gambar 7 Taman Kota Kabupaten Kaimana



Gambar 8 Warga Kaimana Beraktifitas atau Sekedar Rekreasi di Jembatan Jodoh



Gambar 9 Rumah Makan Belia Dengan Sajian Aneka Masakan Seafood

Jumlah Hotel di Kabupaten Kaimana

Keterangan	Jumlah
Hotel	6
Kamar	143
Tempat Tidur	194

Sumber: Kaimana Dalam Angka 2016

Hotel yang ada di Kaimana masih sedikit dan kelas/fasilitas hotel masih standar hanya berupa kamar mandi, AC, tempat tidur belum ada mall dan kolam renang masih tipe melati. Di Kabupaten Kaimana terdapat Rumah Makan Belia, Cafe Delisyah dan Cafe Namatota yang representative.

Tabel 1.2 Kependudukan di Kabupaten Kaimaana Tahun 2015

Keterangan	Jumlah
Jumlah Penduduk 2015	54.165 Jiwa
Jumlah Rumah Tangga	12.238 Rumah Tangga
Laju Pertumbuhan Penduduk	3,22%
Jumlah Penduduk Laki-laki	29.184 Jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	24.981 Jiwa

Persentasi Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Status Pendidikan, Kabupaten Kaimana 2015

Jenis Kelamin	Status Sekolah					Jumlah Yang Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	SD/M/ Paket A	SMP/MT/ Paket B	SMA/ SMK/MA/ Paket C	Diploma 1 s.d Universitas			
Laki-laki	4,07	17,38	4,67	3,46	0,46	25,94	69,99	100,00
Perempuan	5,32	22,68	4,81	2,89	0,50	30,88	63,79	100,00
Laki- laki+Perempuan	4,65	19,85	4,74	3,18	0,47	28,24	67,11	100,00

Sumber: Kaimana Dalam Angka 2016

Mata pencaharian penduduk di wilayah Kabupaten Kaimana umumnya pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa. Sektor pertanian dan perikanan masih bersifat tradisional. Sedangkan dunia usaha umumnya ditekuni oleh penduduk asal Bugis, Jawa dan Warga Negara Indonesia Keturunan. Dewasa ini telah diberdayakan sejumlah putera daerah untuk menekuni bidang leveransir dan developer. Angkatan kerja terbanyak berdasarkan pendidikan terakhir adalah lulusan SD.

Tabel 1.3 Ketenagakerjaan di Kabupaten Kaimana Tahun 2015

Keterangan	Jumlah
Angkatan Kerja	28.814 Jiwa
Pengangguran	963 Jiwa
Rata-rata Umur Tenaga Kerja	35 – 45 Tahun
Pekerja Laki – laki	63%
Pekerja Perempuan	37%

Sumber: Kaimana Dalam Angka 2016

Kegiatan ekonomi penduduk pedesaan hingga saat ini masih bersifat tradisional (pertanian dan perikanan), artinya hasil produksi pertanian dan perikanan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara terbatas.

Sedangkan penduduk perkotaan di Kabupaten Kaimana sebagian lainnya menekuni lapangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang, buruh bangunan dan pekerja pelabuhan serta sektor informal lainnya.

Yang menjadi faktor penyebab tertinggalnya masyarakat dalam mengambil peluang bisnis pariwisata adalah karena masyarakat kurang sadar wisata dan minimnya pengetahuan tentang bisnis di bidang pariwisata, serta infrastruktur yang belum memadai. Masyarakat tidak teredukasi dan belum termotivasi untuk melakukan usaha di bidang pariwisata. Sementara investor asing dari Inggris dan China sudah mulai menanamkan investasinya dan mulai membuka usaha wisata di Kaimana. Bila pemerintah lokal tidak segera melakukan pembinaan sadar wisata pada warga masyarakat, dikhawatirkan kelak warga lokal hanya sebagai karyawan atau buruh di wilayah mereka sendiri.

E. SIMPULAN

1. Mapping Wisata diperlukan sebagai Data untuk rencana pengembangan wisata Kaimana.
2. Kabupaten Kaimana memiliki obyek-obyek wisata alam, budaya, kuliner yang sangat menarik
3. Sarana dan Prasarana belum dapat dikatakan memadai untuk menjadi wisata dunia
4. Sebagian besar masyarakat dapat dikatakan belum sadar wisata
5. Pemerintah harus berperan aktif menggandeng akademisi untuk penelitian, edukasi dan pendampingan masyarakat

F. SARAN

1. Perlu adanya pembelajaran sadar wisata bagi masyarakat sebagai pemilik dan pelaku wisata.
2. Perlu adanya pemberian pemahaman tentang Green Ecowisata bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan investor sehingga keindahan alam Kaimana, budaya dan kearifan lokal tetap terjaga.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menentukan strategi pengembangan wisata di Kabupaten Kaimana.

DAFTAR PUSTAKA

- Dobson, Andrew, *“Green Political Thought”*, <http://www.thehealingproject.net.au/wp=content/uploads/2009/ANDREW-DOBSON-Green-Political-Thought.pdf>, download, January 2012
- Fandeli, Chafid, Mukhlison, *Pengusahaan Ekowisata* (2000), Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta
- Kaimana Dalam Angka 2016, No. Katalog 1102001.9102, ISSN: 2089-3000, No. Publikasi 9102000.14.02
- Marpaung Happy, 2000, *Pengetahuan Kepariwisata*, Bandung: Alfabeta
- Mchintos, Robert W and Charles R Goeldner, 1990, *Tourism: Principles, Practice, Philosophies*, New York: Jogn Wiley and Sons Inc.
- Mira P. Gunawan, 1999, *Pariwisata Indonesia, Berbagai Aspek Gagasan Pembangunan*, Bandung: Penerbit Lembaga Penelitian ITB.
- Rahatmawati, Istiana dan Wahyuni, Purbudi, 2013, *SWOT Analysis for Integrated Ecotourism Development in Strengthening National Resilience (Case Study in Gajahwong River, Yogyakarta, Indonesia)*, <http://eprints.upnyk.ac.id/11457/>

Rahatmawati, Istiana, 2014, Peluang dan Tantangan Keterlibatan Perempuan Dalam Melestarikan Batik Dalam Rangka Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi dan Budaya, Studi Kasus di DIY (Prosiding)

Rahatmawati, Istiana dan Wahyuni, Purbudi, 2014, Ekowisata Sebagai Jendela Keberhasilan UMKU Dalam Memperkokoh Perekonomian Menghadapi AEC 2015 , <http://eprints.upnyk.ac.id/11449/>

Rahatmawati , Istiana dan Setiawan Jatmika, 2017, Aplikasi manajemen dalam Penanganan Bencana Banjir. UPN"Veteran" Yogyakarta

Rogers, Everett M dan Shoemaker,F Floyd, 1981, Memasyarakatkan Ide-ide baru, Usaha Nasional, Surabaya

Zahara, 2001, Perilaku Berwawasan Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dilihat Dari Keinovativan

TATA KELOLA PERTAMBANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT DI SUMUR TUA MIGAS

Noto Pamungkas¹ dan Sri Suryaningsum²,

¹Accounting Department, Economic and Business Faculty,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

²Jl. SWK (104) Lingkar Utara, Condongcatu, Yogyakarta, DIY. 55283 Telp. +62 274 486733

¹No. Hp.085228020181 E-mail: notopamungkas@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa tata kelola pertambangan di Indonesia dan perannya bagi kesejahteraan sekitar daerah tambang. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, dan migas. Penelitian ini dilakukan di Wonocolo tepatnya di Migas di Sumur Tua, penelitian dilakukan selama delapan bulan yaitu bulan Januari sampai Agustus 2017. Pencarian data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan narasumber. Kegiatan pertambangan sering dianggap negatif oleh sebagian orang karena dampak negatifnya seperti lingkungan sekitar yang rusak, pencemaran lingkungan, dan rawan bencana di daerah penambang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pertambangan berdampak negatif bagi daerah sekitar pertambangan. Dampak positif pertambangan antara lain, yang pertama, penduduk sekitar mendapatkan banyak sumber daya alam, penduduk sekitar juga dapat mendapatkan lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan pertambangan, daerah akan semakin ramai dan banyak dikunjungi, juga dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Kemudian dampak negatifnya seperti lingkungan sekitar yang rusak, pencemaran lingkungan, dan rawan bencana di daerah penambang.

Keyword: Tatakelola pertambangan, kesejahteraan rakyat

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam cukup beragam dan hasil bumi yang melimpah. Karena banyaknya sumber daya alam itu, mengakibatkan banyak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan berdiri di Indonesia.

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, dan migas. Tata kelola pertambangan Indonesia didasari aturan pelaksana UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengembangan sistem Data dan Informasi, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengoptimalan Penerimaan Negara.

Tata kelola pertambangan memiliki tujuan tersendiri yaitu supaya tidak merusak ekosistem dalam tanah. Tata kelola pertambangan yang baik seperti melakukan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang ramah lingkungan dengan tidak melakukan kegiatan penggalian bahan tambang hanya di satu daerah saja.

Selain itu juga melakukan perapihan serta penimbunan wilayah pasca melakukan penambangan akan memberi dampak yang positif dan dapat menjadi langkah yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu Menurut Suryaningsum 2016, adanya proyek tambang tersebut juga berperan untuk terbukanya peluang usaha dalam sektor pertambangan dan dalam sektor non pertambangan, adanya kesempatan untuk

mendapatkan tambahan modal dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesempatan meningkatnya peran stakeholder dalam pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Maka dari itu, sebuah tata kelola tambang yang baik tentunya diperlukan di perusahaan dalam kegiatan operasionalnya.

B. METODE PENELITIAN

1. Observasi

Penelitian ini dilakukan di Wonocolo tepatnya di Migas di Sumur Tua, Penelitian dilakukan selama delapan bulan yaitu bulan Januari sampai Agustus 2017. Penelitian ini menggunakan metode observasi. Metode ini paling tepat untuk mengamati secara langsung dan mendalam untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena di pertambangan.

2. Data dan Analisis

Pencarian data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antar Pejabat dan Staf Kecamatan Kedewan, Manager Oprasional Ep 4 Cepu, Penambang di Wonocolo, dan masyarakat sekitar Wonocolo.

Analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data yang dimiliki selama penelitian ini berlangsung. Penelaahan dilakukan secara mendalam atas kondisi tambang Migas di Sumur Tua.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sudrajat (2010), Dasar kebijakan publik di bidang pertambangan adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengembangan sistem data dan informasi, pelaksanaan pengawasan dan pengoptimalan penerimaan negara. Dalam era desentralisasi saat ini maka kegiatan pertambangan tidak terpisahkan lagi dengan pengambilan kebijakan di tingkat daerah sehingga:

Pertama Pemerintah pusat hendaknya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola kegiatan pertambangan yang melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat lokal.

Kedua Apabila risikonya tidak besar serta teknologinya dikuasai dan permasalahannya hanya modal, maka dana dapat dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Sebagian pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan umum yang sudah memberikan keuntungan banyak (misal: batu bara). Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk eksplorasi dan investasi pada sektor-sektor pertambangan lainnya.
2. Membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas mengelola kekayaan mineral di daerah tersebut seoptimal mungkin dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.
3. Aspek lingkungan baik fisik maupun sosial harus dipertimbangkan dalam setiap kontrak pertambangan dan pengusaha pertambangan harus menyediakan biaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut.

Ketiga, Menurut ahli ekonomi Kaldor dan Hicks suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dari usahanya dapat memberi kompensasi bagi golongan yang menderita kerugian akibat usaha tersebut sehingga posisi golongan kedua tersebut paling jelek sama seperti sebelum adanya usaha tersebut dan golongan pertama masih untung. Golongan kedua tersebut dapat berupa alam maupun masyarakat. Jadi, tidak adil bila ada suatu usaha yang kemudian menyebabkan lingkungan menjadi lebih rusak atau masyarakat menjadi lebih menderita dibandingkan keadaan sebelum adanya usaha tersebut.

Peran pemerintah daerah akan menjadi lebih besar dalam penanganan dampak lingkungan pertambangan ini, sehingga penguatan institusi di tataran lokal akan menjadi semakin signifikan.

Keempat, sumberdaya alam sebagai sumber untuk kegiatan pertambangan dan energi dimanfaatkan dari sistem ekologi oleh karena itu syarat mendasar yang harus dipatuhi adalah tidak melanggar daya dukung ekosistem. Untuk dapat memanfaatkan sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia, konsep eko-efisiensi harus menjadi acuan utama yaitu memanfaatkan sebanyak-banyaknya dan membuang atau memboroskan sesedikit mungkin yang juga berarti meminimumkan limbah. Dapat disimpulkan bahwa eko-efisiensi sekaligus akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Untuk itu ekonomi lingkungan perlu diperhitungkan dalam setiap aktifitas pertambangan.

Pendekatan Kemitraan

Tantangan masa depan yang dihadapi bangsa Indonesia termasuk sektor pertambangan harus dihadapi bersama melalui pendekatan kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan hubungan yang fair dan equitable, artinya pemerataan tanggung jawab dan tugas. Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi dalam peningkatan pendapatan nasional, khususnya pendapatan daerah. Pemenuhan pendapatan minimal daerah menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin pertambangan yang mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah disamping juga harus tetap mengedepankan tatakelola yang baik agar kesejahteraan rakyat sekitar bisa meningkat. Suryaningsum 2014a dan b, dan juga Suyoto 2015, bahwa sebaiknya ada pengelolaan kemiskinan yang baik dan benar supaya masyarakatnya terjamin kesejahteraannya, salah satunya dengan melaksanakan transformasi di berbagai bidang termasuk pertambangan.

Kesejahteraan Masyarakat Daerah Tambang

Berbagai dampak potensial di sektor sosial dan ekonomi dapat terjadi akibat adanya penambangan di suatu wilayah, Berbagai dampak positif diantaranya tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum, kesempatan kerja karena adanya penerimaan tenaga kerja, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar tambang, dan adanya kesempatan berusaha. (Raden,2010) Menurut Risal et al. (2013) Objek dari kegiatan pertambangan adalah sumberdaya alam yang tak terbaharukan (*non-renewable*), dimana dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruangan yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*).

Pendekatan Kesejahteraan melalui *Participating Interest* yang Optimal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, *Participating Interest* (PI) atau hak partisipasi adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerjasama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian menurut Oilfield Glossary menyatakan bahwa *Participating Interest* (PI) meliputi kewajiban berupa kewajiban mengeluarkan biaya dan hak berupa hak untuk mendapatkan bagi hasil. Adanya PI memberikan manfaat untuk daerah, tak lain yaitu supaya daerah penghasil migas dapat ikut menikmati sumber kekayaan migasnya dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah migas

Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Suryaningsum (2017), dengan adanya pemberian PI melalui BUMD ini diharapkan agar daerah benar-benar ikut berpartisipasi dalam pengelolaan migas, termasuk dalam pengelolaan transparansi tata kelola, ahli teknologi, dan juga ikut mengawasi secara langsung kinerja industri migas di daerah-daerah penghasil migas, mulai dari tahap awal perencanaan sampai dengan tahap akhir. Daerah yang menjadi lokasi eksplorasi migas harus bisa mengelola PI dengan baik. Apabila terkelola dengan baik, PI dapat memberikan keuntungan dan manfaat yang nyata bagi pemerintah daerah karena daerah penghasil migas dapat ikut menikmati sumber daya yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya khususnya dalam bidang ekonomi.

D. SIMPULAN

Untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang dapat menimbulkan kesejahteraan untuk masyarakat di sekitarnya harus memperhatikan aturan yang ada dan pendekatan-pendekatan yang dapat memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar Sumur Tua seperti Pendekatan Kemitraan, Pendekatan Kesejahteraan melalui *Participating Interest* yang Optimal sehingga kesejahteraan masyarakat daerah tambang dapat terwujud.

Berbagai dampak potensial di sektor sosial dan ekonomi dapat terjadi akibat adanya penambangan di suatu wilayah. Dampak untuk kesejahteraan akan muncul ketika ada suatu tata kelola yang baik dari suatu penambangan. Dampak tersebut adalah penduduk sekitar mendapatkan banyak sumber daya alam, penduduk sekitar juga dapat mendapatkan lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan pertambangan, daerah akan semakin ramai dan banyak dikunjungi, juga dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Sehingga tata kelola pertambangan yang baik tidak tercipta jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja tetapi juga pemerintah dan masyarakat juga saling mengawasi agar tercipta tata kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat disekitar daerah tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010,
- Noto Pamungkas, Keterkaitan Tata Kelola Pertambangan Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 10 Mei 2017, 09:38, <http://detakpos.com/mobile-detil.php?cat=142&idx=809>
- Noto Pamungkas, Sawahlunto Menjadi Kota Wisata, 26 Mei 2017, 17:33, <http://detakpos.com/mobile-detil.php?cat=181&idx=1065>
- Raden, I. 2010. Kajian Dampak Penambangan Batubara Terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten KUKAR. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Risal S, Paranoan DB, Djaja S. 2013. Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. E-Journal Administrative
- Suryaningsum, Sri. dkk. 2014. *Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pro-Poor Government dengan Sisi Transformasional* dalam Ekonomi dan Keindonesiaan: Membangun Ekonomi Pro-Rakyat. <http://sosiologi.ubb.ac.id/?q=content/pertambangan-berwawasan-lingkungan> (diakses 22 oktober 2017)
- Sri Suryaningsum, *Participating Interest* Bagi Daerah Migas Untuk Peningkatan Kesejahteraan, 25 Mei 2017, 10:25, <http://detakpos.com/mobile-detil.php?cat=141&idx=1050>
- Sri Suryaningsum, *Due Diligence* pada Holding Pertambangan, 23 Mei 2017, 11:59, <http://detakpos.com/mobile-detil.php?cat=141&idx=1020>
- Pengetahuan Tentang Lingkungan, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi 36.htm.www.depdiknas.go.id

PENGARUH DIVERSITAS KEBANGSAAN, KOMISARIS INDEPENDEN, DIVERSITAS TINGKAT UMUR, *LEVERAGE*, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Zachrara Putri Arintawati
Alumni UPN “Veteran” Yogyakarta
Email: zachraraputri.arintawati@yahoo.com

Marita
Email: Faridmarita@gmail.com
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to prove empirically the influence of national diversity, independent commissioners, age diversity diversity, leverage and audit committees to tax avoidance. Population in this research use service company sub sector trade, service and investment which listed in Bursa Efek Indonesia (BEI) in year 2013-2015. Sampling method using purposive sampling method with criteria of service company of trade, service and investment sub sector which publish annual financial report consecutively during 2013-2015 period, service company of trade sub sector, service and investment that presents complete data in the form of variables needed during the period 2013-2015, and service companies sub-sector trade, services and investments that experience profit in a row in the period 2013-2015 so that obtained sample of 102 samples. Method and technique of data analysis used in this research is multiple linear regression analysis and hypothesis test. The results of this study prove that the diversity of nationalities, independent commissioners, age diversity and audit committee have no effect on tax avoidance, while leverage affects tax avoidance.

Keywords : national diversity, independent commissioners, age diversity, leverage, audit committee

A. PENDAHULUAN

Pendapatan suatu negara mencerminkan bagaimana negara tersebut maju dan berkembang untuk kelangsungan negara dan kesejahteraan dari masyarakat negara tersebut di masa mendatang. Lokasi suatu negara tentunya akan sangat menentukan pendapatan negara tersebut, semakin strategis lokasi suatu negara maka akan semakin banyak investasi yang masuk ke negara tersebut. Banyaknya investasi yang masuk ke suatu negara maka akan menyebabkan peningkatan pendapatan negara melalui sektor penerimaan pajak (Putra dan Merkusiwati, 2016).

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Hal inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar tidak menjerumuskan kepada pelanggaran peraturan perpajakan atau penghindaran perpajakan (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan upaya memanfaatkan *loophole* dari peraturan perpajakan yang tidak sesuai dari maksud dan tujuan dari peraturan perpajakan itu sendiri yang bersifat legal guna menghindari pajak (Dewi dan Jati, 2014). Praktik ini dilakukan wajib pajak agar jumlah yang dibayarkan kepada otoritas pajak berkurang (Utari dan Supadmi, 2017).

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Jakarta, Kamis (Z/4), salah satunya adalah metode *Double Irish and Dutch Sandwich*. Diinisiasi oleh raksasa teknologi Apple, yang kemudian diikuti perusahaan besar lain seperti Google, Facebook, Oracle, Microsoft, IBM, Johnson & Johnson, Starbucks, Yahoo, Pfizer, Abbott Laboratories. Familiar dengan produk mereka bukan? Semua perusahaan itu berbasis di Amerika Serikat (AS). Metode itu berawal dari upaya perusahaan-perusahaan itu menghindari pajak korporat di AS yang nilainya 35 persen. Di Indonesia, pajak korporasi adalah 25 persen (www.Kompas.com, 2016).

Penelitian ini menggabungkan penelitian Swingly dan Sukartha (2015), Dewinta dan Setiawan (2016), dan penelitian Dewi (2017) tentang *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Namun sasaran penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan gabungan beberapa variabel independen diversitas kebangsaan, komisaris independen dan diversitas tingkat umur, *leverage*, dan komite audit. Alasan penggabungan penelitian ini yaitu melanjutkan penelitian sebelumnya dengan menambahkan beberapa variabel independen yang terdapat ketidak konsistenan hasil.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Meningkatkan nilai perusahaan dapat membuat manajer dan pemegang saham terlibat dalam konflik. Menurut Haryono dkk (2015), teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara prinsipal (pemegang saham) dengan agen (manajer). Menurut Belkai (2007) dalam Apriada dan Suardikha (2016), hubungan keagenan dikatakan telah terjadi ketika suatu kontrak antara seseorang atau lebih, seorang prinsipal, seorang agen, dan orang lainnya untuk memberikan jasa demi kepentingan prinsipal termasuk melibatkan adanya pemberian delegasi kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen.

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

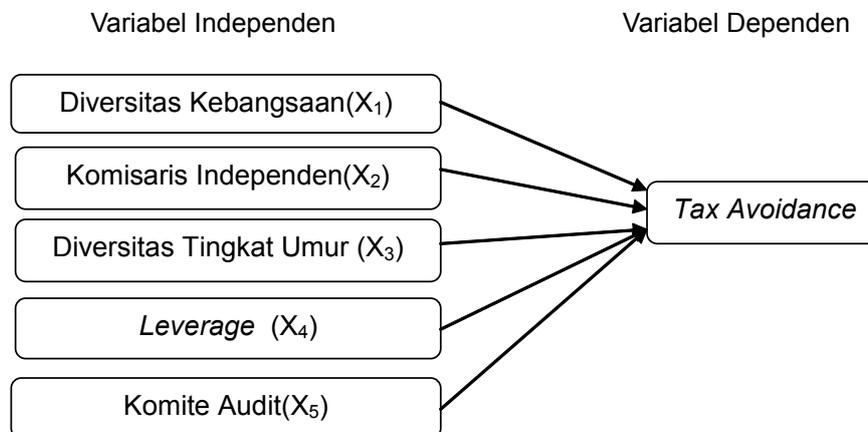
Perusahaan yang mempunyai kinerja perusahaan yang baik akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Menurut Hartono (2005) dalam Apriada dan Suardikha (2016), teori sinyal menyatakan cara suatu perusahaan memberi sinyal pada konsumen dalam menganalisa laporan keuangan. Teori sinyal menunjukkan bagaimana perusahaan yang berkualitas baik dengan segera dapat memberikan sinyal kepada investor, sehingga investor mampu membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan berkualitas buruk. Menurut Hartono (2005) dalam Sukirni (2012), *Signalling Theory* menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan segera akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharap dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk.

Tax *Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya memanfaatkan *loophole* dari peraturan perpajakan yang tidak sesuai dari maksud dan tujuan dari peraturan perpajakan itu sendiri yang bersifat legal guna menghindari pajak. Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Diantari dan Ulupui, 2016).

Kerangka Konseptual

Penelitian ini mencoba menguji pengaruh diversitas kebangsaan, komisaris independen, diversitas tingkat umur, *leverage* dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

B. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Diversitas Kebangsaan dengan *tax avoidance*

Keberadaan warga negara asing dalam jajaran dewan komisaris dan direksi menjadi ukuran *board diversity*. Anggota dewan komisaris dan direksi dengan kebangsaan asing membawa opini dan perspektif yang beragam, bahasa, keyakinan, latar belakang keluarga, dan pengalaman profesional yang berbeda antar satu negara dengan negara lain. Randoy *et al.* (2006) menjelaskan keuntungan dari keberadaan direksi asing, diantaranya: (1) tersedia kandidat anggota dewan yang berkualifikasi secara lebih luas (dengan pengalaman industri yang lebih luas), (2) dengan latar belakang yang berbeda, dewan direksi asing bisa menambah pengalaman yang lebih beragam dan berharga, yang tidak dimiliki oleh dewan direksi domestik, dan (3) anggota dewan direksi asing bisa membantu meyakinkan investor asing bahwa perusahaan dikelola secara profesional.

Penelitian Dewi (2017) menunjukkan hasil bahwa diversitas kebangsaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ = Diversitas kebangsaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian yang dilakukan Nurafli (2011) dinyatakan bahwa pengaruh dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk dari mekanisme peningkatan *corporate governance*.

Zehnder (2000) mengungkapkan komisaris independen bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada pengelola perusahaan untuk menjamin ketahanan dan kesuksesan perusahaan, serta berkewajiban untuk terlaksananya akuntabilitas dalam perusahaan. Penelitian Dewi (2017) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Komisaris independen berpengaruh pada *tax avoidance*

3. Pengaruh diversitas tingkat umur dengan *tax avoidance*

Diversitas tingkat umur anggota dewan komisaris dan direksi berkaitan dengan kesediaan mereka mengambil risiko dalam pengambilan keputusan. Umur dinilai memengaruhi kinerja seseorang dalam perusahaan (Hurlock, 1999 dalam Kusumastuti dkk., 2006). Dalam melakukan *tax avoidance* juga diperlukan pengalaman yang cukup dalam dunia perpajakan, karena manajemen pajak harus dilakukan sebaik mungkin agar tidak menjurus kepada pelanggaran peraturan perpajakan sehingga diversitas tingkat umur diduga mempengaruhi sikap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Penelitian Dewi (2017) menunjukkan hasil bahwa tingkat umur anggota dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Tingkat umur anggota dewan komisaris dan direksi berpengaruh pada *tax avoidance*

4. Pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*

Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang atau *leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) menemukan bahwa jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang maka akan meningkatkan tindakan manajemen melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Menurut Dewi dan Jati (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance*, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya aktivitas *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Populasi dan Sampel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa sub sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2013-2015. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Seleksi sampel didasarkan oleh kriteria yang telah ditetapkan, ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perincian Perhitungan Sampel Tahun 2013-2015

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Jumlah perusahaan jasa sub sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015 sebagai populasi penelitian.	115
2	Perusahaan jasa sub sektor perdagangan, jasa dan investasi yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut untuk periode 2013-2015.	(25)
3	Perusahaan jasa sub sektor perdagangan, jasa dan investasi yang tidak menyajikan data secara lengkap pada periode 2013-2015.	(32)
4	Perusahaan jasa sub sektor perdagangan, jasa dan investasi yang mengalami kerugian pada periode 2013-2015	(24)
Jumlah sampel		34
Observasi = 34 x 3 tahun		102
Data Outlier		(2)
Jumlah sampel pada penelitian ini		100

Sumber: Data yang diolah peneliti

Berdasarkan seleksi sampel yang telah dilakukan, terdapat 34 perusahaan pertambangan yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Tahun pengamatan selama 3 tahun yaitu pada tahun 2013-2015, sehingga diperoleh jumlah observasi sebanyak 102 sampel.

Definisi Operasional Variabel

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya memanfaatkan *loophole* dari peraturan perpajakan yang tidak sesuai dari maksud dan tujuan dari peraturan perpajakan itu sendiri yang bersifat legal guna menghindari pajak (Dewi dan Jati, 2014). Menurut Dyreng *et al.* (2010) dalam (Diantari & Ulupui) variabel ini dihitung dengan menggunakan *cash effective tax rate* yaitu:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Diversitas Kebangsaan

Diversitas dalam anggota dewan komisaris dan direksi, akan memberikan opini dan alternatif penyelesaian masalah yang semakin beragam, karena adanya perspektif yang heterogen dari individu anggota dewan. Keberadaan warga negara asing dalam jajaran dewan komisaris dan direksi menjadi ukuran *board diversity*. Anggota dewan komisaris dan direksi dengan kebangsaan asing membawa opini dan perspektif yang beragam, bahasa, keyakinan, latar belakang keluarga, dan pengalaman profesional yang berbeda antar satu negara dengan negara lain (Dewi, 2017).

Menurut Dewi (2017) Keberadaan anggota dewan komisaris dan direksi dengan kebangsaan asing dinilai dengan variabel dummy, jika terdapat warga negara asing dalam dewan komisaris dan direksi akan diberi nilai 1, tetapi jika tidak ada warga negara asing dalam dewan komisaris dan direksi akan diberi nilai 0.

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Artinya komisaris independen mempunyai tugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham (Dewi, 2017). Berikut ini rumus untuk menghitung proporsi komisaris independen:

$$\text{Proporsi KI} = \frac{\text{KI}}{\text{DK}}$$

Keterangan: KI = Jumlah komisaris independen dan DK = Total jumlah dewan komisaris

Diversitas tingkat umur

Diversitas tingkat umur merupakan keberagaman umur anggota dewan komisaris dan direksi. Diversitas tingkat umur berkaitan dengan kesediaan mereka mengambil risiko dalam pengambilan keputusan. Umur dinilai mempengaruhi kinerja seseorang dalam perusahaan (Hurlock, 1999 dalam Kusumastuti dkk., 2006). Variasi umur anggota dewan komisaris dan direksi akan mencegah adanya pemikiran kelompok (*group think*) dan mengarah pada kinerja yang lebih baik dengan menyeimbangkan antara pengambilan risiko (*risk taking*), yang berasosiasi dengan dewan komisaris dan direksi yang lebih muda, dan kehati-hatian serta menghindari risiko (*risk averseness*), dan juga kedalaman pengalaman, yang berasosiasi dengan dewan komisaris dan direksi yang lebih tua. Berikut ini adalah cara menghitung variasi umur anggota dewan yaitu: Diversitas Tingkat Umur = STDEV(Jumlah Umur Anggota Dewan Komisaris dan Direksi)

Leverage

Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan menyebabkan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih dan Sari, 2013) dalam (Putra & Merkusiwati, 2016). Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) variabel ini dihitung dengan rumus:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Komite audit

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010) dalam (Diantari & Ulupui, 2016). Menurut Singly & Sukartha (2015) variabel ini dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Komite Audit diluar Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Komite Audit Perusahaan}}$$

C. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data yang menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis ini untuk menjelaskan karakteristik sampel terutama mencakup nilai ekstrim yaitu nilai minimum dan nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), serta standar deviasi.

Berdasarkan data olahan SPSS yang meliputi diversitas kebangsaan (X_1), komisaris independen (X_2), diversitas umur (X_3), *leverage* (X_4), dan komite audit (X_5) serta variabel dependen *tax avoidance* (Y) dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel. Hal tersebut seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	100	,0075	,9809	,263790	,1242436
DK	100	,0000	1,0000	,320000	,4688262
DI	100	,2000	,6667	,418107	,1138337
STDEV UMUR	100	2,5071	15,9206	9,566833	3,3704531
DAR	100	,0081	,8254	,446076	,1958846
KA	100	,3333	1,3333	,710167	,2391400
Valid N (listwise)	100				

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai signifikan $>0,05$, maka data variabel terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
	N	102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,35545539
Most Extreme Differences	Absolute	,279
	Positive	,279
	Negative	-,227
Test Statistic		,279
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c
Test distribution is Normal.		

Hasil pengujian normalitas pada penelitian ini tidak lolos, dikarenakan nilai *Asym.Sig (2-tailed)* sebesar 0,000 yang dimana nilainya kurang dari 0,05. Oleh karena itu dilakukan penghapusan data ekstrim (*outlier*) sebanyak 2 data observasi.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,35545539
Most Extreme Differences	Absolute	,279
	Positive	,279
	Negative	-,227
Test Statistic		,279
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
Lilliefors Significance Correction.		

Berikut merupakan hasil dari penghapusan data ekstrim (*outlier*). Dari hasil yang telah dilakukan, nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* masih berada di bawah 0,05. Oleh karena itu peneliti melakukan pengobatan dengan mentransform data pada variabel dependen dengan menggunakan rumus SQRT.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.11153727
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.090
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		1.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.197
a. Test distribution is Normal.		

Dari Tabel 5 menggunakan non parametrik *Kolmogorov-smirnov* dapat dilihat bahwa nilai *test statistic* sebesar 1,076 dan *asymp. sig (2-tailed)* sebesar 0,197 ($> \alpha = 0,05$) sehingga disimpulkan bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016). Untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinearitas, peneliti menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka diindikasikan bahwa persamaan regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DK	.954	1.048
	DI	.800	1.250
	UMUR	.923	1.083
	DAR	.970	1.030
	KA	.854	1.171

a. Dependent Variable: SQRT_CETR

Dari hasil Tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa semua variabel independen mempunyai nilai toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas, yang artinya tidak terdapat hubungan antar variabel bebas sehingga layak digunakan untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah Uji Durbin-Watson (DW test) (Ghozali, 2016). Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.330 ^a	.109	.061	.11445	2.305

a. Predictors: (Constant), SQRT_KA, DK, DAR, UMUR, DI
b. Dependent Variable: SQRT_CETR

Sesuai dengan tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan hasil nilai DW sebesar 2.305 sedangkan dalam tabel DW untuk k=5 dan N= 100 besarnya DW-tabel; (dl)= 1.5710, (du)= 1.7804; 4-du =2.2196 dan 4-dl= 2.429, maka dari perhitungan disimpulkan bahwa DW-test terletak pada daerah tidak ada korelasi negatif ; ada autokorelasi positif $4-du < d < 4-dl = 2,2196 - 2,305 < 2,429$ maka dapat dikatakan bahwa data tersebut mengandung autokorelasi. Dengan demikian diperlukan adanya *run test*.

Menurut Ghozali (2016), uji *Run Test* dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antara residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Hasil uji autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat tabel *Run Test* sebagai berikut:

Tabel 8 Uji Autokorelasi

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-.00874
Cases < Test Value	50
Cases >= Test Value	50
Total Cases	100
Number of Runs	59
Z	1.608
Asymp. Sig. (2-tailed)	.108
a. Median	

Berdasarkan hasil uji *Run Test* pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,108 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terjadi autokorelasi pada data yang di uji.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode *Glejser*. Jika nilai signifikan variabel independen >0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 9 berikut ini:

Tabel 9 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.016	.056		.294	.769
	DK	-.011	.018	-.061	-.588	.558
	LN_DI	.005	.036	.016	.141	.888
	UMUR	.002	.003	.076	.721	.473
	DAR	-.014	.043	-.035	-.338	.736
	SQRT_KA	.068	.061	.123	1.115	.268

a. Dependent Variable: RES2

Tabel 9 di atas menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan Uji Glejser. Nilai signifikansi dari kelima variabel yaitu Diversitas Kebangsaan: 0,558 Dewan Komisaris Independen: 0,888, Diversitas Tingkat Umur: 0,473, *Leverage* (DAR):0,736, Komite Audit: 0,268. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima variabel independen mempunyai nilai signifikansi di atas 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh diversitas kebangsaan, komisaris independen, diversitas tingkat umur, *leverage*, dan komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan jasa sub sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1DK + \beta_2DI + \beta_3UMUR + \beta_4DAR + \beta_5KA + e$$

Hasil uji regresi linear berganda disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 10 Ringkasan Hasil Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized		Standardized		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.502	.077		6.486	.000
DK	-.009	.025	-.034	-.346	.730
LN_DI	.023	.049	.051	.472	.638
UMUR	-.004	.004	-.119	-1.172	.244
DAR	.167	.060	.277	2.804	.006
SQRT_KA	-.015	.084	-.019	-.176	.860

a. Dependent Variable: SQRT_CETR

Sumber: Hasil olah data, 2017.

Dari hasil uji regresi linear berganda yang telah dilakukan, yaitu:

$$Y = 0,502 - 0,009DK + 0,023DI - 0,004UMUR + 0,167DAR - 0,015KA$$

Nilai koefisien beta (B) merupakan nilai koefisien regresi variabel diversitas kebangsaan, komisaris independen, diversitas tingkat umur, *leverage* dan komite audit. Nilai konstanta sebesar 0,052 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata *tax avoidance* sebesar 0,052.

Uji Hipotesis dan Pembahasan

1. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square*. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.331 ^a	.110	.062	.11439

a. Predictors: (Constant), LN_DI, DAR, DK, UMUR, SQRT_KA
 b. Dependent Variable: SQRT_CETR

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 11 diatas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,062. Hal ini berarti 6,2% variabel Diversitas Kebangsaan, Dewan Komisaris Independen, Diversitas Tingkat Umur, *Leverage* dan Komite Audit dapat menjelaskan variabel *Tax Avoidance*. Sedangkan sisanya 93,8% (100% - 6,2%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

2. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2016). Model regresi layak (*fit*) jika nilai signifikan $<0,05$, sedangkan jika nilai signifikan $>0,05$ maka model regresi tidak layak (*fit*) untuk melakukan pengujian. Hasil Uji F ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 12 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.152	5	.030	2.317	.049 ^b
	Residual	1.230	94	.013		
	Total	1.382	99			

a. Dependent Variable: SQRT_CETR
 b. Predictors: (Constant), LN_DI, DAR, DK, UMUR, SQRT_KA
 Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diperoleh nilai signifikansi F sebesar 2,317 dan nilai signifikan sebesar 0,049 lebih kecil dari alpha (0,05), maka dikatakan adanya pengaruh signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikan. Apabila nilai signifikan $<0,05$ maka hipotesis didukung dan sebaliknya jika nilai signifikan $>0,05$ maka hipotesis tidak didukung. Hasil uji t ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 13 Uji t

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.502	.077		6.486	.000
	DK	-.009	.025	-.034	-.346	.730
	LN_DI	.023	.049	.051	.472	.638
	UMUR	-.004	.004	-.119	-1.172	.244
	DAR	.167	.060	.277	2.804	.006
	SQRT_KA	-.015	.084	-.019	-.176	.860

a. Dependent Variable: SQRT_CETR
 Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel hasil uji t diatas, bahwa variabel *Leverage* (DAR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena memiliki tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu *Leverage*= 0.006. Variabel Dewan Komisaris Independen, Diversitas Tingkat Umur, Komite Audit dan Diversitas Kebangsaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu Diversitas Kebangsaan= 0,730, Dewan Komisaris Independen= 0,638, Diversitas Tingkat Umur= 0,244, *Leverage*= 0,006 dan Komite Audit= 0,860.

Pengujian Pengaruh Diversitas Kebangsaan Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian data observasi antara variabel diversitas kebangsaan dengan variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t dari diversitas kebangsaan sebesar -0,346 dengan nilai signifikan sebesar 0,730 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa diversitas kebangsaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain Hipotesis 1 ditolak. Hal tersebut disebabkan keberadaan warga negara asing dalam jajaran dewan komisaris dan direksi dalam proses pemberian pendapat tidak memberikan efek terhadap penghindaran pajak karena sampel penelitian sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sehingga perusahaan dengan mudah di monitor pemerintah sehingga meskipun adanya keberagaman perspektif dan latar belakang pengalaman tetap tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) yang menyatakan bahwa diversitas kebangsaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin bertambah keberadaan anggota dewan komisaris dengan kebangsaan asing dalam jajaran dewan komisaris dan direksi maka semakin besar atau agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan.

Pengujian Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian data observasi antara variabel komisaris independen dengan variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t dari komisaris independen sebesar 0,472 dengan nilai signifikan sebesar 0,638 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain Hipotesis 2 ditolak.

Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya anggota dewan komisaris independen mungkin dimaksudkan untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan, namun hanya untuk memenuhi aturan dalam perusahaan.

Penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan Dewi dan Sari (2015) yang menyatakan variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengujian Pengaruh Diversitas Tingkat Umur Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian data observasi antara variabel diversitas tingkat umur dengan variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t dari diversitas tingkat umur sebesar -1,172 dengan nilai signifikan sebesar 0,244 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa diversitas tingkat umur tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain Hipotesis 3 ditolak.

Hal tersebut disebabkan karena *tax avoidance* dapat dilakukan bukan tergantung pada umur anggota dewan komisaris dan direksi. *Tax avoidance* dapat dilakukan apabila manajer dapat mengambil keputusan pajak dengan efektif dan efisien. Peran anggota dewan komisaris dan direksi sebagai pemberi saran dan pengontrol atau pemantau manajemen secara garis besar bukan ditentukan melalui variasi tingkat umur anggota dewan komisaris dan direksi, namun lebih ke sikap, sifat dan karakteristik masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi tersebut terhadap manajemen.

Pengujian Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian data observasi antara variabel diversitas tingkat umur dengan variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t dari *Leverage* sebesar 2,804 dengan nilai signifikan sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain Hipotesis 4 diterima.

Hal tersebut karena semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula *effective tax rate* atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah, karena biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Pengujian Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian data observasi antara variabel komite audit dengan variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t dari komite audit sebesar -0,176 dengan nilai signifikan sebesar 0,860 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain Hipotesis 5 ditolak.

Hal tersebut karena kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik meskipun jumlah komite audit pada perusahaan sudah sesuai dengan standar BEI, yaitu komite audit paling sedikit berjumlah 3 orang. Hal ini bisa juga disebabkan oleh cara pengukuran yang dilakukan dalam penelitian. Hasil tabulasi data untuk variabel komite audit cenderung homogen atau tidak bervariasi sehingga sulit untuk mengukur secara tepat pengaruh variabel komite audit pada *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diveristas kebangsaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Diversitas tingkat umur tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
4. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Keterbatasan

Tidak memisahkan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dan perusahaan yang tidak melakukan *tax avoidance*.

Saran

Untuk kesempurnaan penelitian yang akan datang, saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Manajemen
Manajemen perusahaan diharapkan lebih memperhatikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil terkait dengan keputusan perpajakannya. Misalnya terkait peraturan BEI mengenai komite audit dan peraturan OJK mengenai komisaris independen.
2. Pemerintah
Pemerintah diharapkan agar fiskus lebih meningkatkan pengawasan atau *monitoring* terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya.
3. Peneliti Selanjutnya
 - a. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya meneliti kembali variabel diversitas kebangsaan asing karena variabel ini belum banyak diteliti dengan mengganti atau menambah sampel.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya meneliti kembali tetapi hanya menggunakan sampel perusahaan yang melakukan *tax avoidance* relatif tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriada dan Suardikha. 2016. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Struktur Modal dan Profitabilitas Pada Nilai Perusahaan*. E-jurnal Akuntansi Unud, Vol.5, No.2
- Dewinta, Ida Ayu Rosa dan Putu Ery Setiawan. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. E-jurnal Akuntansi Unud, Vol. 14, No.3
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2.
- Dewi, Luh Gede Krisna. 2017. *Pengaruh Diversitas Dewan dan Direksi pada Tax Avoidance*. E-jurnal Akuntansi Unud, Vol. 18, No. 1
- Dharma, I Made Surya dan Putu Agus Ardiana. 2016. *Pengaruh Leverage, Intensitas, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. E-jurnal Akuntansi Unud, Vol. 15, No. 1
- Diantari, Putu Rista dan IGK Agung Ulupui. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. E-jurnal Akuntansi Unud, Vol. 16, No. 1
- Egon, Zehnder International. 2000. *Coorporate Governance and the Role of the Board of Directors*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Haryono, Bambang Santoso, dkk. 2015. *Capacity Building*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kusumastuti, Sari, Supatmi, dan Perdana Sastra. 2006. *Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance*. Jurnal Ekonomi Akuntansi-Universitas Kristen Petra. Available at: <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting>.
- Putra, I Gst Ln Ngr Cahyadi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2016. *Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance*. E-jurnal Akuntansi Unud, Vol. 17, No. 1
- Sukirni. 2012. *Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan*. *Accounting Analysis Journal*. 1 (2).
- Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. 2015. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. E-jurnal Akuntansi Unud, Vol. 10, No. 1
- Utari, Ni Kadek Yuliani dan Ni Luh Supadmi. 2017. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Koneksi Politik pada Tax Avoidance*. E-jurnal Akuntansi Unud, Vol. 18, No. 3
- <http://tekno.kompas.com/read/2016/09/20/10330087/cara.google.memanfaatkan.celah.untuk.menghindari.pajak>
- www.idx.co.id, Laporan Keuangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015.

ANALISIS PENGARUH *DAY OF THE WEEK EFFECT*, *WEEK FOUR EFFECT*, DAN *ROGALSKY EFFECT* TERHADAP *RETURN SAHAM LQ 45* YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA(TAHUN 2012-2014)

Triani Pujiastuti¹; Bray Ayu Lestari²

UPN "Veteran Yogyakarta

Jalan SWK 104, (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta

Abstract

This research aimed at examining return predictability to analyzed a patern on return securities. Dependent variable on this research is stock return, however dummy variable on this research is day of the week effect, week four effect and rogalsky effect. Test equipment that used are ANOVA and independent sample t_{test} . Sample that used is 28 emiten that active consistence trading on LQ 45 over 3 years continued during January 2012 to December 2014. As result of research it has been shown that there is day of the week effect on 2012, 2013, 2014, and 2012-2013. As result of research it has been shown that there is nothing week four effect on 2012 and 2013, but there is founed week four effect on 2014 and 2012-2014. As result of researchit has been shown that there is nothing rogalsky effect on 2012, 2013, 2014, and 2012-2014.

Key word : *return predictability, stockreturn, day of the week effect, week four effect, dan rogalsky effect*

A. PENDAHULUAN

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan *return*. *Return* yang diharapkan oleh investor dalam melakukan investasinnya dapat berupa *dividen* dan *capital gain*. Sebelum melakukan investasi biasanya investor melakukan penilaian-penilaian terhadap saham-saham yang akan dibeli. Penilaian-penilaian ini dilakukan agar investor tidak salah memilih saham-saham yang akan dibeli. Penilaian saham membutuhkan informasi, karena informasi adalah salah satu kunci seorang investor mendapatkan keuntungan. Menurut teori pasar modal yang efisien adalah pasar dimana semua harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Fama (1970) mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien kedalam tiga *efficient market hypothesis* (EMH), yaitu : Efisien dalam bentuk lemah (*weak form*) yang berarti semua informasi di masa lalu (historis) akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang, Efisien dalam bentuk setengah kuat (*semi strong*) yang berarti harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan, Efisiensi dalam bentuk kuat (*strong form*) yang berarti harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis dan semua informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan.

Tetapi masih banyak perdebatan tentang konsep hipotesis pasar yang efisien, bahkan sampai saat ini. Karena tidak semua orang bisa menerima konsep mengenai pasar modal yang efisien. Sebagian investor di pasar modal masih percaya dengan pasar yang tidak efisien, sehingga mereka bisa mendapatkan return yang tidak normal. Ada penelitian-penelitian yang memberikan bukti empiris mendukung tentang pasar efisien, tetapi ada juga sejumlah penelitian yang menyatakan adanya anomali pasar yang merupakan bentuk penyimpangan terhadap hipotesis pasar yang efisien. Anomali-anomali dalam pasar modal adalah *january effect*, *size effect*, *low P/R ratio*, *winner loser anomaly*, dan *day of the week effect*. *Day ofthe week effect* merupakan fenomena

yang termasuk penyimpangan efisiensi dalam bentuk lemah (*weak form*). Pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah ini bisa diuji dengan menggunakan pengujian *prediktabilitasreturn*. Pengujian ini meliputi pengujian pola *return* (harian, mingguan, maupun bulanan).

Menurut Damoran dan Mahdi (2006) *the day of the week effect* merupakan perbedaan *return* antara hari senin dengan hari-hari lainnya dalam seminggu secara signifikan yang dikutip dari jurnal yang berjudul pengujian *week-four, Monday, Friday dan earning management effect terhadap return saham* (Sri Dwi Ari Ambarwati, 2009). Biasanya *return* saham yang signifikan negatif terjadi pada hari senin, sedangkan *return* saham positif terjadi pada hari-hari lainnya selain hari senin (selasa, rabu, kamis, jumat). *Week four effect* merupakan fenomena yang mengungkapkan bahwa *Monday effect* hanya terjadi pada minggu keempat untuk setiap bulannya. Sedangkan *return* hari senin pada minggu pertama sampai minggu ketiga dianggap tidak signifikan negatif. *Rogalsky effect* dapat diartikan sebagai suatu fenomena dimana *return* negatif terjadi pada hari senin (*Monday effect*) menghilang pada bulan tertentu yaitu bulan april.

Harris (1984) menemukan bahwa pada hari senin terdapat *return* yang sangat negatif tetapi pada empat hari lainnya *return*nya positif yang disebut dengan fenomena *day of the week (Monday effect)*, (Tandellin, 2010). Beberapa penelitian menemukan bahwa *Monday effect* yang terjadi hanya terkonsentrasi pada minggu keempat dan kelima setiap bulannya. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah *week-four effect*. Sedangkan *return* hari senin pada minggu pertama sampai minggu ketiga dianggap tidak signifikan negatif atau sama dengan nol. Hasil penelitian Iramani, Ansyori Mahdi dalam jurnal yang berjudul *Studi Tentang Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Pada BEJ* menemukan fenomena *week four effect* pada Bursa Efek Jakarta Pada tahun 2005, dimana *return* negatif terjadi pada hari senin minggu keempat dan kelima setiap akhir bulan. Namun penelitian Sri Dwi Ari Ambarwati dalam jurnal yang berjudul *Pengujian Week-Four, Monday, Friday dan Earning Manajement Effect Terhadap Return Saham* menyimpulkan bahwa fenomena *week four effect* tidak berhasil diidentifikasi.

(Cahyaningdyah, 2005) mengemukakan adanya hubungan yang menarik antara *day of the week effect* dengan *january effect*. Rata-rata *return* senin pada bulan januari adalah positif sementara *return* senin dibulan lainnya adalah negatif.

Sedangkan hasil penelitian Iramani, Ansyori Mahdi dalam jurnal yang berjudul *Studi Tentang Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Pada BEJ* tidak berhasil menemukan bukti terjadinya *rogalsky effect* pada bulan april di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2005.

Karena perbedaan-perbedaan pendapat tentang hipotesis pasar yang efisien dan beragam hasil penelitian yang mengungkapkan tentang anomali-anomali hipotesis pasar yang efisien, maka hal inilah yang akhirnya mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang "**Analisis Pengaruh Day Of The Week Effect, Week Four Effect, dan Rogalsky Effect Terhadap Return Saham LQ 45 yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (Tahun 2012-2014)**".

B. HIPOTESIS

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H₁ : ada pengaruh *day of the week effect* terhadap *return* saham LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012, 2013, 2014.
- H₂ : ada pengaruh *week four effect* terhadap *return* saham LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012, 2013, 2014.
- H₃ : ada pengaruh *rogalsky effect* terhadap *return* saham LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012, 2013, 2014.
- H₄ : ada pengaruh *day of the week effect, week four effect, dan rogalsky effect* terhadap *return* saham LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014.

C. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan pengujian prediktabilitas *return* (*return predictability*) untuk menganalisis adanya suatu pola dalam *return* sekuritas. Pola *return* yang diteliti dalam penelitian ini adalah pola harian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia yang mengacu pada likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar selama periode 3 tahun dimulai dari Januari 2012 sampai dengan Desember 2014. Setiap 6 bulan terdapat saham-saham baru yang masuk ke dalam LQ 45. Dari hasil analisis akhirnya mendapatkan sampel 28 perusahaan yang secara konsisten selama kurun waktu 3 tahun masuk dalam indeks LQ 45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

C. Variabel Penelitian

1. Return Saham

Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. *Return* saham dapat dihitung menggunakan rumus :

$$R_t = \frac{IHSI_t - IHSI_{t-1}}{IHSI_{t-1}}$$

Dimana :

R_t : *return* saham harian pada hari t

$IHSI_t$: indeks harga saham individu penutupan harian pada hari ke-t

$IHSI_{t-1}$: indeks harga saham individu penutupan harian pada hari ke t-1

2. Day of The Week Effect

Day of the week effect merupakan perbedaan *return* antara hari senin dengan hari-hari lainnya dalam seminggu secara signifikan. Biasanya *return* saham yang signifikan negative terjadi pada hari senin, sedangkan *return* saham positif terjadi pada hari-hari lainnya selain hari senin (Selasa, Rabu, Kamis, Jumat).

3. Week Four Effect

Week four effect merupakan fenomena yang mengungkapkan bahwa *Monday effect* hanya terjadi pada minggu keempat untuk setiap bulannya. Sedangkan *return* hari senin pada minggu pertama sampai minggu ketiga dianggap tidak signifikan negatif.

4. Rogalsky Effect

Rogalsky effect adalah fenomena yang ditemukan oleh Rogalsky (1984). Dapat diartikan sebagai suatu fenomena dimana *return* negatif terjadi pada hari senin (*Monday effect*) menghilang pada bulan tertentu yaitu bulan April.

D. MODEL DAN TEKNIK ANALISIS DATA

A. Model pengujian

Model pengujian dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda tanpa *intercept* (*multiple regression through origin*).

1. Model untuk menguji *day of the week effect*

$$R_t = b_1 D_{\text{sen}} + b_2 D_{\text{sel}} + b_3 D_{\text{rab}} + b_4 D_{\text{kam}} + b_5 D_{\text{jum}} + e_t$$

Keterangan:

R_t : menunjukkan besarnya *return* saham pada hari t

$D_{\text{sen}}, D_{\text{sel}}, D_{\text{rab}}, D_{\text{kam}}, D_{\text{jum}}$: adalah *dummy* variabel yang menunjukkan hari-hari perdagangan

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 : adalah besarnya koefisien regresi, yang menunjukkan besarnya *return* rata-rata saham pada hari t

E_t : error term

2. Model untuk menguji *week four effect*

$$R_t = b_1 \text{SEN}_1 + b_2 \text{SEN}_2 + b_3 \text{SEN}_3 + b_4 \text{SEN}_4 + e_t$$

$$R_t = b_1 \text{SEN}_{123} + b_2 \text{SEN}_4 + e_t$$

Dimana :

R_t : menunjukkan besarnya *return* saham harian pada hari t.

$\text{SEN}_1 - \text{SEN}_4$: menunjukkan senin minggu pertama sampai dengan senin minggu keempat.

$b_1 - b_4$: koefisien yang menggambarkan rata-rata *return* hari minggu pertama sampai dengan senin minggu keempat.

SEN_{123} : *dummy* untuk senin minggu pertama, kedua, dan ketiga.

Diberi nilai 1 untuk senin minggu pertama, kedua, dan ketiga. Dan diberi nilai 0 untuk senin minggu keempat.

SEN_4 : *dummy* untuk minggu keempat. Diberi nilai 1 untuk senin minggu keempat, dan diberi nilai 0 untuk senin minggu pertama, kedua, dan ketiga.

E_t : error term

3. Model untuk menguji *rogalsky effect*

$$R_t = b_1 \text{JAN} + b_2 \text{FEB} + b_3 \text{MAR} + b_4 \text{APR} + b_5 \text{MEI} + b_6 \text{JUN} + b_7 \text{JUL} + b_8 \text{AGS} + b_9 \text{SEP} + b_{10} \text{OKT} + b_{11} \text{NOV} + b_{12} \text{DES} + e_t$$

Dimana :

R_t : besarnya *return* saham pada bulan t

$b_1 - b_{12}$: koefisien regresi untuk variabel *dummy* hari senin bulan januari, february, maret, april, mei, juni, juli, agustus, september, oktober, november, dan desember.

Variabel *dummy*: JAN, FEB, MAR, APR, MEI, JUN, JUL, AGS, SEP, OKT, NOV, DES menunjukkan hari senin pada bulan masing-masing. Nilai JAN = 1 apabila *return* saham jatuh pada hari senin bulan januari dan diberi nilai 0 apabila jatuh pada bulan lainnya. Begitu juga untuk bulan-bulan yang lain.

E_t : error term

B. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Hipotesis 1

Untuk menguji hipotesis pertama digunakan alat uji *Analysis of Variance* (ANOVA/nilai F). *Analysis of Variance* (ANOVA) adalah pengujian statistic untuk menguji hipotesis nol bahwa beberapa populasi mempunyai rata-rata yang sama (Jogiyanto, 2011).

$$H_0 : \mu_{sen} = \mu_{sel} = \mu_{rab} = \mu_{kam} = \mu_{jum} = 0$$

$$H_1 : \mu_{sen} \neq \mu_{sel} \neq \mu_{rab} \neq \mu_{kam} \neq \mu_{jum} \neq 0$$

Jika tingkat kesalahan F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ($\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak terjadi *Day of The Week Effect*. Jika tingkat kesalahan F hitung lebih kecil atau sama dengan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ($\alpha = 5\%$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terjadi *Day of The Week Effect*.

2. Pengujian Hipotesis 2

Untuk menguji hipotesis kedua digunakan alat uji *independent sample t_{test}*. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dua sampelnya (Santoso, 2008).

$$H_0 : \mu_{senin\ awal-senin\ akhir} \geq 0$$

$$H_1 : \mu_{senin\ awal-senin\ akhir} < 0$$

Jika tingkat kesalahan t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ($\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima, H_1 ditolak. Artinya tidak terjadi *Week Four Effect*. Jika tingkat kesalahan t hitung lebih kecil atau sama dengan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ($\alpha = 5\%$) maka H_0 ditolak, H_1 diterima. Artinya terjadi *Week Four Effect*.

3. Pengujian Hipotesis 3

Untuk menguji hipotesis ketiga dilakukan pengujian menggunakan alat uji *independent sample t_{test}*. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dua sampelnya (Santoso, 2008).

$$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

Jika tingkat kesalahan t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ($\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak terjadi *Rogalsky Effect*. Jika tingkat kesalahan t hitung lebih kecil atau sama dengan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ($\alpha = 5\%$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terjadi *Rogalsky Effect*.

4. Pengujian Hipotesis 4

Untuk menguji hipotesis keempat dilakukan pengujian menggunakan alat uji ANOVA dan *independent sample t_{test}* seperti pada hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Hanya saja tahun pengujiannya selama 3 tahun yaitu 2012-2014.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Tabel 1
Analisis Deskriptif *Return* Saham Tahun 2012

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Senin	336	.00203101	.014860651	.000810715	.00043628	.00362575	-.035290	.129820
Selasa	336	-.00005924	.014114095	.000769987	-.00157385	.00145538	-.097550	.047130
Rabu	336	.00336358	.012061838	.000658027	.00206920	.00465797	-.021200	.114500
Kamis	336	.00159373	.012474255	.000680526	.00025509	.00293237	-.053930	.067690
Jumat	336	.00079490	.012733782	.000694685	-.00057159	.00216140	-.041380	.052920
Total	1680	.00154480	.013325708	.000325114	.00090713	.00218247	-.097550	.129820

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa *return* rata-rata pada tahun 2012 adalah positif yaitu sebesar 0,00154480. *Return* rata-rata tertinggi terjadi pada hari rabu, yaitu sebesar 0,00336358. Sedangkan *return* rata-rata terendah terjadi pada hari selasa, yaitu sebesar -0,00005924.

Tabel 2
Analisis Deskriptif *Return* Saham Tahun 2013

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Senin	336	-.00361780	.012425678	.000677876	-.00495123	-.00228437	-.055610	.033180
Selasa	336	-.00011717	.011725403	.000639673	-.00137545	.00114111	-.037220	.044860
Rabu	336	.00693411	.011110298	.000606116	.00574183	.00812638	-.021040	.077290
Kamis	336	-.00259795	.013604369	.000742179	-.00405787	-.00113803	-.048570	.044190
Jumat	336	-.00075155	.013001725	.000709302	-.00214680	.00064370	-.046190	.032530
Total	1680	-.00003007	.012931716	.000315502	-.00064889	.00058875	-.055610	.077290

Dari Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa *return* rata-rata pada tahun 2013 adalah negatif, yaitu sebesar -0,00003007. *Return* rata-rata tertinggi terjadi pada hari rabu, yaitu sebesar 0,00693411. Sedangkan *return* terendah terjadi pada hari senin, yaitu sebesar -0,00361780.

Tabel 3
Analisis Deskriptif Return Saham Tahun 2014

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
					Senin	336		
Selasa	336	.00297412	.009645981	.000526231	.00193899	.00400926	-.034940	.035700
Rabu	336	.00212324	.013208556	.000720586	.00070579	.00354068	-.031130	.097830
Kamis	336	-.00146501	.010777579	.000587965	-.00262158	-.00030844	-.043010	.047540
Jumat	336	.00098638	.009754670	.000532161	-.00006041	.00203318	-.024310	.034990
Total	1680	.00018852	.010996376	.000268284	-.00033769	.00071473	-.056420	.097830

Dari tabel 3 dapat dijelaskan bahwa *return* rata-rata pada tahun 2014 adalah positif, yaitu sebesar 0,00018852. *Return* tertinggi terjadi pada hari selasa, yaitu sebesar 0,00297412. Sedangkan *return* terendah terjadi pada hari senin, yaitu sebesar -0,00367613.

Tabel 4
Analisis Deskriptif Return Saham Tahun 2012-2014

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
					Senin	1008		
Selasa	1008	.00093257	.012043588	.000379337	.00018819	.00167695	-.097550	.047130
Rabu	1008	.00414031	.012315323	.000387896	.00337913	.00490149	-.031130	.114500
Kamis	1008	-.00082308	.012454548	.000392281	-.00159286	-.00005329	-.053930	.067690
Jumat	1008	.00034325	.011934807	.000375911	-.00039441	.00108090	-.046190	.052920
Total	5040	.00056775	.012476583	.000175744	.00022321	.00091228	-.097550	.129820

Dari tabel 4 dapat dijelaskan bahwa *return* rata-rata pada tahun 2012-2014 adalah positif, yaitu sebesar 0,00056775. *Return* tertinggi terjadi pada hari rabu, yaitu sebesar 0,00414031. Sedangkan *return* terendah terjadi pada hari senin, yaitu sebesar -0,00175431.

2. Pengujian Hipotesis 1

Tabel 5
Uji ANOVA Tahun 2012

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.002	4	.001	3.177	.013
Within Groups	.296	1675	.000		
Total	.298	1679			

Berdasarkan hasil dari uji ANOVA tahun 2012 seperti dalam tabel 5. Tingkat signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,013 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu 0,05 ($0,03 \leq 0,05$). Ini membuktikan bahwa hari perdagangan (*day of the week effect*) pada tahun 2010 berpengaruh secara signifikan

terhadap *return* saham. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terjadi *day of the week effect* pada tahun 2012.

Tabel 6
Uji ANOVA Tahun 2013

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.023	4	.006	37.387	.000
Within Groups	.258	1675	.000		
Total	.281	1679			

Berdasarkan hasil dari uji ANOVA tahun 2013 seperti dalam tabel 6 tingkat signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu 0,05 ($0,000 \leq 0,05$). Ini membuktikan bahwa hari perdagangan (*day of the week effect*) pada tahun 2013 berpengaruh secara signifikan terhadap *return* saham. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terjadi *day of the week effect* tahun 2013.

Tabel 7
Uji ANOVA Tahun 2014

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.010	4	.003	21.730	.000
Within Groups	.193	1675	.000		
Total	.203	1679			

Berdasarkan hasil dari uji ANOVA tahun 2014 seperti dalam tabel 7. Tingkat signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu 0,05 ($0,000 \leq 0,05$). Ini membuktikan bahwa hari perdagangan (*day of the week effect*) pada tahun 2014 berpengaruh secara signifikan terhadap *return* saham. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terjadi *day of the week effect* tahun 2014.

3. Pengujian Hipotesis 2

Tabel 8
Uji Independent Sample t_{test} Tahun 2012

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower		Upper
Return 2010	Equal variances assumed	2.109	.149	.957	110	.341	.00224	.00234	-.00240	.00687
	Equal variances not assumed			1.135	65.585	.261	.00224	.00197	-.00170	.00618

Berdasarkan tabel 8 tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,341, lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu 0,05. Sehingga H_0 diterima H_1 ditolak. Hal ini berarti tidak terjadi *week four effect* pada tahun 2012.

Tabel 9
Uji Independent Sample t_{test} Tahun 2013

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower		Upper
Return 2011	Equal variances assumed	.177	.675	1.948	110	.054	.00222	.00114	-.00004	.00447
	Equal variances not assumed			1.937	45.900	.059	.00222	.00114	-.00009	.00452

Berdasarkan tabel 9 tingkat signifikansi sebesar 0,054 yang lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu sebesar 0,05. Sehingga H_0 diterima H_1 ditolak. Hal ini berarti tidak terjadi *week four effect* pada tahun 2013.

Tabel 10
Uji Independent Sample t_{test} Tahun 2014

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Return	Equal	2.720	.102	2.795	110	.006	.00430	.00154	.00125	.00735
2012	variances assumed									
	Equal			2.189	33.656	.036	.00430	.00196	.00031	.00829
	variances not assumed									

Berdasarkan tabel 10 besarnya tingkat signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu sebesar 0,05. Sehingga H_0 ditolak H_1 diterima. Hal ini berarti terjadi *week four effect* pada tahun 2014.

4. Pengujian Hipotesis 3

Tabel 11
Uji Independent Sample t_{test} Tahun 2012

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Return	Equal	2.121	.152	1.720	50	.092	.01529	.00889	-.00257	.03316
2010	variances assumed									
	Equal			6.011	47.000	.000	.01529	.00254	.01017	.02041
	variances not assumed									

Berdasarkan tabel 11 besarnya tingkat signifikansi sebesar 0,092 lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu sebesar 0,05. Sehingga H_0 diterima H_1 ditolak. Hal ini berarti tidak terjadi *rogalsky effect* pada tahun 2012.

Tabel 12
Uji Independent Sample t_{test} Tahun 2013

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Return 2011	Equal variances assumed	3.733	.059	.420	48	.676	.00404	.00962	-.01530	.02338
	Equal variances not assumed			1.339	44.086	.188	.00404	.00302	-.00204	.01013

Berdasarkan tabel 12 besarnya tingkat signifikansi sebesar 0,676 lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu sebesar 0,05. Sehingga H_0 diterima H_1 ditolak. Hal ini berarti tidak terjadi *rogalsky effect* pada tahun 2013.

Tabel 13
Uji Independent Sample t_{test} Tahun 2014

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Return 2012	Equal variances assumed	1.208	.145	.542	51	.590	.00322	.00594	-.00871	.01515
	Equal variances not assumed			1.545	45.720	.129	.00322	.00208	-.00097	.00742

Berdasarkan tabel 13 besarnya tingkat signifikansi sebesar 0,590 lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu sebesar 0,05. Sehingga H_0 diterima H_1 ditolak. Hal ini berarti tidak terjadi *rogalsky effect* pada tahun 2014.

5. Pengujian Hipotesis 4

Tabel 14
Uji ANOVA Tahun 2012-2014

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.020	4	.005	33.670	.000
Within Groups	.764	5035	.000		
Total	.784	5039			

Berdasarkan hasil dari uji ANOVA secara keseluruhan selama tiga tahun yaitu dari tahun 2010-2012 seperti dalam tabel 14 tingkat signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu 0,05 ($0,000 \leq 0,05$). Ini membuktikan bahwa hari perdagangan (*day of the week effect*) selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2012-2014 berpengaruh secara signifikan terhadap *return* saham. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terjadi *day of the week effect* pada tahun 2012-2014.

Tabel 15
Uji Independent Sample ttest Tahun 2012-2014

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Return	Equal variances assumed	.022	.883	2.776	334	.006	.00292	.00105	.00085	.00499
	Equal variances not assumed			2.766	141.470	.006	.00292	.00105	.00083	.00500

Berdasarkan tabel 15 besarnya tingkat signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu sebesar 0,05. Sehingga H_0 ditolak H_1 diterima. Hal ini berarti terjadi *week four effect* pada tahun 2012-2014.

Tabel 16
Uji Independent Sample t_{test} Tahun 2013-2014

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Return Equal variances assumed	1.045	.308	1.480	153	.141	.00703	.00475	-.00235	.01642
Equal variances not assumed			2.528	21.668	.019	.00703	.00278	.00126	.01281

Berdasarkan tabel 16 dibawah ini besarnya tingkat signifikansi sebesar 0,141 lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu sebesar 0,05. Sehingga H0 diterima H1 ditolak. Hal ini berarti tidak terjadi rogalsky effect pada tahun 2012-2014.

F. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 ditemukan terjadi *day of the week effect* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012, artinya ada perbedaan *return* saham harian rata-rata. *Return* terendah terjadi pada hari selasa sebesar -0,00005924, sedangkan *return* tertinggi terjadi pada hari rabu sebesar 0,00336358. Pada tahun 2013 ditemukan juga terjadi *day of the week effect* di Bursa Efek Indonesia. *Return* terendah terjadi pada hari senin sebesar -0,00361780, sedangkan *return* tertinggi terjadi pada hari rabu sebesar 0,00693411. Pada tahun 2014 juga ditemukan juga *day of the week effect*. *Return* terendah terjadi pada hari senin sebesar -0,00367613, sedangkan *return* tertinggi terjadi pada hari selasa sebesar 0,00297412. Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis 1 selama 3 tahun yaitu tahun 2010-2012 ditemukan konsisten terjadi *day of the week effect*. Dimana *return* terendah terjadi pada hari senin sebesar -0,00175431, sedangkan *return* tertinggi terjadi pada hari rabu sebesar 0,00414031.

Kecenderungan *return* pada hari senin negatif karena pada hari senin merupakan awal dari hari perdagangan setelah libur pada akhir pekan (sabtu dan minggu). Oleh karena itu pada hari senin biasanya pasar modal masih lesu sehingga investor akan malas untuk berinvestasi pada hari senin sehingga kinerja di bursa saham akan rendah yang mengakibatkan *return* pada hari senin negatif. Selain itu rendahnya *return* pada hari senin dibandingkan dengan hari-hari lainnya bisa juga disebabkan karena perusahaan-perusahaan biasanya menunda pengumuman berita buruk (*bad news*) sampai hari jumat dan kemudian pasar baru akan meresponnya pada hari senin. Hal ini menyebabkan keinginan investor untuk menjual saham lebih tinggi daripada keinginan untuk membeli saham pada hari senin dibandingkan pada hari perdagangan lainnya. Sehingga harga saham pada hari senin lebih rendah dibandingkan dengan hari lainnya.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 tidak ditemukan *week four effect* pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 ditemukan terjadinya *week four effect* yang artinya *return* negative pada hari senin hanya terjadi pada minggu keempat pada setiap bulannya. Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis 2 selama 3 tahun yaitu tahun 2012-2014 ditemukan konsisten terjadi *week four effect*.

Fenomena *week four effect* ini biasanya terjadi karena disebabkan pada awal bulan berikutnya ada tuntutan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehingga pada minggu keempat/akhir bulan tekanan untuk

menjual saham menjadi lebih tinggi. Banyaknya keinginan investor untuk menjual saham pada akhir bulan tersebut menyebabkan harga saham menjadi turun sehingga *return* pada minggu keempat menjadi negative.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 tidak ditemukan *rogalsky effect* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis 3 selama 3 tahun yaitu tahun 2012-2014 secara konsisten tidak ditemukan fenomena *rogalsky effect* di Bursa Efek Indonesia.

Fenomena *rogalsky effect* biasanya terjadi karena pada peraturan BAPEPAM bahwa laporan keuangan maksimum/paling lambat disampaikan 120 hari setelah tutup buku yang jatuh pada bulan April. Sehingga mendekati bulan april banyak perusahaan yang menyampaikan keuangan tahunan. Jika laporan keuangan perusahaan menunjukkan sinyal yang positif maka pada bulan April harga saham perusahaan akan lebih tinggi sehingga *return* juga akan tinggi.

G. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Terbukti ada pengaruh *day of the week effect* terhadap *return* saham tahun 2012, 2013, dan 2014. Tidak terbukti ada pengaruh *week four effect* terhadap *return* saham tahun 2012 dan 2013. Terbukti ada pengaruh *week four effect* terhadap *return* saham tahun 2014. Tidak terbukti ada pengaruh *rogalsky effect* terhadap *return* saham tahun 2012, 2013, dan 2014. Terbukti ada pengaruh *day of the week effect* terhadap *return* saham tahun 2012-2014. Terbukti ada pengaruh *week four effect* terhadap *return* saham tahun 2012-2014. Tidak terbukti ada pengaruh *rogalskyeffect* terhadap *return* saham tahun 2012-2014.

B. Saran

1. Investor sebelum berinvestasi sebaiknya memperhatikan hari perdagangan agar bisa mendapatkan *return* yang maksimal. Sebaiknya membeli saham pada hari senin karena *return* senin negatif dan sebaiknya menjual saham pada hari rabu.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya indeks yang diteliti bukan hanya LQ 45, tetapi juga indeks-indeks yang lain yang tercatat di BEI agar dapat diketahui apakah hasilnya akan sama atautkah akan bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Tahar dan Arum Indrasari. 2004. Analisis Pengaruh Day Of The Week Effect Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* : 131-146
- Arief Subyantoro dan Bambang Sulistyono. 1998. *Statistika II*. UPN "Veteran" Yogyakarta Press, Yogyakarta
- Ariff Mohamed and Johnson Lester W. 1990. *Securities Markets & Stock Pricing*. Longman Singapore Publishers (pte) Ltd, Singapore
- Bambang Riyanto. 1997. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE, Yogyakarta
- Damodar N. Gujarati. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Erlangga, Jakarta
- Desak Nyoman Sri Werastuti. 2012. Anomali Pasar Pada Return Saham : The Day Of Week Effect, Week Four Effect, Rogalsky Effect, Dan January Effect. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 2 (1)
- Didit Herlianto. 2008. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Wimaya Press UPN "Veteran", Yogyakarta
- Didit Herlianto. 2010. *Seluk Beluk Investasi Di Pasar Modal Indonesia*. Gosyem Publishing, Yogyakarta
- Dwi Cahyaningdyah. 2005. Analisa Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 20 (2) : 175-186

- Eduardus Tandellilin. 2010. *Portofolio Dan Investasi*. Kanisius. Yogyakarta
- Iramani dan Ansyori Mahdi. 2006. Studi Tentang Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Pada BEJ. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 8 (2) : 63-70
- Jogiyanto Hartono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. BPFE, Yogyakarta
- Luhglatno. 2011. Analisis Weekend Effect Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*. 2 (2)
- Maria Rio Rita. 2009. Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham : Pengujian Day of The Week Effect, Week-Four Effect dan Rogalsky di BEI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 15 (2) : 121-134
- Nurani Sendy dan Agung Satmoko. 2012. Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Harian Di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2010 Sampai Dengan Desember 2010. *Buletin Ekonomi*. 10 (1) :59-66
- Singgih Santoso. 2008. *Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16*. Gramedia, Jakarta
- Sri Dwi Ari Ambarwati. 2009. Pengujian Week-Four, Monday, Friday dan Earnings Management Effect Terhadap Return Saham. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 13 (1) : 1-14
- Suad Husnan. 1993. *Dasar-dasar Teori Portofolio*. UPP-AMP YKPN, Yogyakarta
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti. 2004. *Dasar-dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta
- Sumiyana. 2008. Day of The Week dan Monday Effect : Fenomena Yang Terbuktikan Tidak Konsisten di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. (1)
- Tatang Ary Gumanti dan Elok Sri Utami. 2002. Bentuk Pasar Efisien dan Pengujiannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 4 (1) : 54-68
- www.finance.yahoo.com
- www.idx.co.id